



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 231);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
dan  
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Permasalahan Pembangunan yang selanjutnya disebut Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
8. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) RPJPD diselenggarakan berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
- (2) RPJPD disusun secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan.

### Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJPD adalah tersedianya dokumen RPJPD sebagai:

- a. penjabaran dari Visi dan Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional, RPJPD Provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- b. pedoman dalam penyusunan RPJMD khususnya pada Arah Kebijakan dan Sasaran pokok RPJPD; dan
- c. pedoman bagi calon Bupati dan wakil Bupati untuk menyusun Visi, Misi dan program dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati.

## BAB III

### RUANG LINGKUP, SISTEMATIKA, DAN FUNGSI

#### Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD meliputi:

- a. Visi dan Misi Daerah;
- b. Permasalahan dan Isu Strategis;
- c. Arah Kebijakan dan Sasaran pokok; dan
- d. Indikator Utama Pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Isi dan uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I      Pendahuluan;
  - b. BAB II     Gambaran umum kondisi Daerah;
  - c. BAB III    Permasalahan dan Isu Strategis;
  - d. BAB IV    Visi dan Misi Daerah;
  - e. BAB V     Arah Kebijakan dan Sasaran pokok;
  - f. BAB VI    Penutup.
- (2) Fungsi RPJPD sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyusunan ...

- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi 4 (empat) tahapan periode yaitu:
  - a. periode tahun 2025-2029;
  - b. periode tahun 2030-2034;
  - c. periode tahun 2035-2039; dan
  - d. periode tahun 2040-2045.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 11 November 2024



Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 11 November 2024



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,  
PROVINSI JAWA BARAT : (11/219/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
TAHUN 2025-2025

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari Penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah jangka Panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Bupati Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk segera membahas RPJPD Kabupaten Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan, dimana setiap tahapannya dengan melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045, adalah pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Selanjutnya RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 yang telah disusun menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun serta menjadi acuan bagi calon Bupati dan wakil Bupati untuk menyusun visi, misi, dan program dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati.

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2025 sangat tergantung dari komitmen bersama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Sumedang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 51

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
DAERAH TAHUN 2025-2045

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	I-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya .....	I-9
1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045 .....	I-10
1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 .....	I-10
1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.....	I-10
1.3.4. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	I-11
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-11
1.4.1. Maksud .....	I-11
1.4.2. Tujuan .....	I-11
1.5. Sistematika Penulisan .....	I-12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b> .....	<b>II-1</b>
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi .....	II-1
2.1.1.1. Posisi Strategis Kabupaten Sumedang .....	II-1
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam .....	II-3
2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	II-17
2.1.1.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana .....	II-32
2.1.1.5. Aspek Demografi.....	II-37
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-42
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi.....	II-42
2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-55
2.3. Aspek Daya Saing .....	II-64
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah .....	II-64
2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	II-67

2.3.3. Daya Sain Infrastruktur Wilayah .....	II-70
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi .....	II-75
2.4. Aspek Pelayanan Umum .....	II-78
2.4.1. Reformasi Birokrasi.....	II-78
2.4.2. Pelayanan Publik.....	II-81
2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik .....	II-83
2.4.4. Inovasi Daerah .....	II-85
2.5. Evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025 .....	II-89
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik .....	II-103
2.6.1. Tren Demografi.....	II-103
2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik .....	II-108
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah .....	II-114
2.7.1. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten .....	II-115
2.7.2. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat.....	II-116
2.7.3. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional....	II-118
2.7.4. Proyek/Kegiatan Strategis Nasional di Kabupaten Sumedang.....	II-121
2.7.5. Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025 – 2045.....	II-122
2.7.6. Arah Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 .....	II-122
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Permasalahan Pembangunan.....	III-1
3.1.1. Aspek Geografi .....	III-1
3.1.2. Aspek Demografi .....	III-3
3.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	III-4
3.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi .....	III-4
3.1.3.2. Kesejahteraan Sosial Budaya .....	III-6
3.1.4. Aspek Daya Saing.....	III-8
3.1.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah.....	III-8
3.1.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia .....	III-8
3.1.4.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah.....	III-9
3.1.4.4. Daya Saing Iklim Investasi .....	III-11
3.1.5. Aspek Pelayanan Umum.....	III-12
3.1.5.1. Reformasi Birokrasi .....	III-12
3.1.5.2. Pelayanan Publik .....	III-13



3.1.5.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	III-14
3.1.5.4. Inovasi Daerah.....	III-15
3.2. Isu Strategis .....	III-16
3.2.1. Isu Global Pembangunan .....	III-16
3.2.2. Isu Strategis Nasional.....	III-18
3.2.3. Isu Regional Jawa Bali .....	III-22
3.2.4. Isu Berdasarkan West Java Development Forum (WJDF)...	III-23
3.2.5. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat .....	III-28
3.2.6. Isu Berdasarkan Masukan Publik.....	III-33
3.2.7. Isu Strategis Daerah.....	III-37
3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs).....	III-45
<b>BAB IV VISI DAN MISI .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Visi.....	IV-1
4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045 .....	IV-1
4.1.2. Visi Provinsi Jawa Barat 2025-2045 .....	IV-3
4.1.3. Visi Daerah Kabupaten Sumedang 2025-2045.....	IV-6
4.1.4. Sasaran Visi.....	IV-13
4.2. Misi .....	IV-16
4.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045.....	IV-16
4.2.2. Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2025-2045 .....	IV-18
4.2.3. Misi Pembangunan Kabupaten Sumedang 2025 – 2045.....	IV-22
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK .....</b>	<b>V-1</b>
5.1. Arah Kebijakan .....	V-1
5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045.....	V-45
5.2.1. Arah Pembangunan.....	V-45
5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi.....	V-49
5.2.3. Indikator Utama Pembangunan.....	V-60
5.2.4. Sasaran Pokok .....	V-75
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1. Pelaksanaan .....	VI-1
6.2. Pembiayaan .....	VI-2
6.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Resiko .....	VI-3

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sebaran Potensi Wisata Alam di Kabupaten Sumedang .....	II-3
Tabel 2.2	Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 .....	II-5
Tabel 2.3	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 .....	II-8
Tabel 2.4	Rekapitulasi Sumber Air Permukaan di Kabupaten Sumedang ..	II-14
Tabel 2.5	Klasifikasi Jasa Lingkungan .....	II-17
Tabel 2.6	Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Ketersediaan, Ambang Batas Penduduk, dan Status DDLH Penyedia Pangan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 .....	II-25
Tabel 2.7	Proporsi status yang belum dan sudah melampaui DDLH Penyedia Air di tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 .....	II-31
Tabel 2.8	Sebaran Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 .....	II-41
Tabel 2.9	Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 .....	II-56
Tabel 2.10	Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020 – 2023 .....	II-70
Tabel 2.11	Upaya Penanganan Persampahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023 .....	II-74
Tabel 2.12	Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023 .....	II-78
Tabel 2.13	Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023 .....	II-81
Tabel 2.14	Hasil Penilaian Kepatuhan atas Penerapan Standar Pelayanan Publik .....	II-82
Tabel 2.15	Indeks Kepuasan Masyarakat .....	II-82
Tabel 2.16	Nilai Domain dan Sub Domain SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	II-83
Tabel 2.17	Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 1 .....	II-90
Tabel 2.18	Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 2 .....	II-90
Tabel 2.19	Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 3 .....	II-91
Tabel 2.20	Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 4 .....	II-91
Tabel 2.21	Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 5 .....	II-92
Tabel 2.22	Indikator Makro Kabupaten Sumedang .....	II-93
Tabel 2.23	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 .....	II-95
Tabel 2.24	Jumlah Rumah di Kabupaten Sumedang Tahun 2022.....	II-108
Tabel 2.25	Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Sumedang (Liter/detik).....	II-109



Tabel 2.26	Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023....	II-111
Tabel 2.27	Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sumedang Tahun 2023.....	II-112
Tabel 2.28	Puskesmas dengan Pelayanan Rawat Inap di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 .....	II-112
Tabel 2.29	Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur Rawat Inap di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-114
Tabel 2.30	Pengembangan Wilayah WP di Provinsi Jawa Barat .....	II-117
Tabel 3.1	Hasil Survei Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	III-33
Tabel 4.1	Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat.....	IV-14
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan Visi dan Misi Nasional dan Provinsi Jawa Barat .....	IV-27
Tabel 5.1	Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	V-10
Tabel 5.2	Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	V-46
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	V-49
Tabel 5.4	Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Sumedang dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	V-61
Tabel 5.5	Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	V-76
Tabel 5.6	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	V-112

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	I-3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang .....	II-2
Gambar 2.2 Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-20
Gambar 2.3 Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-21
Gambar 2.4 Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-22
Gambar 2.5 Ambang Batas Penduduk terhadap DDLH Penyedia Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-23
Gambar 2.6 Status DDLH Penyedia Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-24
Gambar 2.7 Peta Kebutuhan Air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-27
Gambar 2.8 Peta Ketersediaan Air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-28
Gambar 2.9 Peta Selisih Ketersediaan Air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-29
Gambar 2.10 Peta ambang batas penduduk dalam penyediaan air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam sistem grid 5"x5" .....	II-30
Gambar 2.11 Status DDLH Penyedia Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5" .....	II-31
Gambar 2.12 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang .....	II-34
Gambar 2.13 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang.....	II-35
Gambar 2.14 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang.....	II-35
Gambar 2.15 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumedang.....	II-36
Gambar 2.16 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Sumedang.....	II-37
Gambar 2.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota dan Pertumbuhannya di Jawa Barat Tahun 2023.....	II-45
Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya Tahun 2023 .....	II-46
Gambar 2.19 IKG Kabupaten Sumedang, Kota Jabar dan Perubahannya.	II-62
Gambar 2.20 Nilai Indeks komposit IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023 .....	II-63

Gambar 2.21	Peta Wilayah Penanganan Persampahan di Kabupaten Sumedang .....	II-73
Gambar 2.22	Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek.....	II-84
Gambar 2.23	Hasil Pengukuran Komponen Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 .....	II-88
Gambar 3.1	Isu Global.....	III-17
Gambar 3.2	Isu Nasional .....	III-19
Gambar 3.3	Isu Regional.....	III-22
Gambar 3.4	Isu Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif ..	III-29
Gambar 3.5	Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	III-29
Gambar 3.6	Isu Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar .....	III-30
Gambar 3.7	Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan .....	III-31
Gambar 3.8	Isu Keberlanjutan Penataan Ruang.....	III-32
Gambar 3.9	Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan .....	III-33
Gambar 3.10	Perumusan Isu Strategis Daerah .....	III-37
Gambar 3.11	Isu Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia .....	III-39
Gambar 3.12	Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan.....	III-41
Gambar 3.13	Isu Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berbasis Teknologi... ..	III-43
Gambar 3.14	Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.....	III-44
Gambar 3.15	Keselarasan Isu Daerah dengan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional (Jawa-Bali) dan Isu Provinsi.....	III-45
Gambar 4.1	Visi Indonesia Emas Tahun 2045.....	IV-2
Gambar 4.2	Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 .....	IV-4
Gambar 4.3	Bagan Konsep Perumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.....	IV-7
Gambar 4.4	Keselarasan Rumusan Visi berdasarkan Isu Strategis dan Permasalahan Utama RPJPD Tahun 2025-2045 .....	IV-8
Gambar 4.5	Keselarasan Isu Strategis dan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	IV-12
Gambar 4.6	Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045.....	IV-12
Gambar 4.7	Misi (Agenda) Pembangunan Tahun 2045 .....	IV-16
Gambar 5.1	Tahapan Pembangunan Kabupaten Tahun 2025-2045 .....	V-2
Gambar 5.2	Tahapan Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing .....	V-5
Gambar 5.3	Tahapan Misi Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif.....	V-5
Gambar 5.4	Tahapan Misi Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel.....	V-6
Gambar 5.5	Tahapan Misi Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif Dan Akuntabel.....	V-6
Gambar 5.6	Tahapan Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya serta Berwawasan Lingkungan .....	V-7



Gambar 5.7 Tahapan Misi Meningkatkan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata.....	V-8
Gambar 5.8 Tahapan Misi Memperkuat Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah .....	V-8
Gambar 5.9 Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.....	V-9
Gambar 6.1 Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045.....	VI-4

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2019 – 2023 .....	II-6
Grafik 2.2	Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumedang (Ha) Tahun 2019 – 2023 .....	II-7
Grafik 2.3	Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2023 ..	II-10
Grafik 2.4	Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2020 – 2023 .....	II-11
Grafik 2.5	Produksi Komoditas Ikan Konsumsi (Ton) Tahun 2019 – 2023.	II-12
Grafik 2.6	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 .....	II-26
Grafik 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 .....	II-32
Grafik 2.8	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 .....	II-33
Grafik 2.9	Perbandingan LPP Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2023 .....	II-38
Grafik 2.10	Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 .....	II-38
Grafik 2.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (Ribuan) .....	II-39
Grafik 2.12	Persentase Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2023.....	II-40
Grafik 2.13	TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 .....	II-40
Grafik 2.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023 .....	II-43
Grafik 2.15	Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Dalam Juta) .....	II-43
Grafik 2.16	Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 .....	II-44
Grafik 2.17	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023.....	II-46
Grafik 2.18	Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumedang .....	II-47
Grafik 2.19	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 .....	II-48
Grafik 2.20	Hubungan Gini Ratio dengan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 .....	II-48
Grafik 2.21	Perkembangan IPM Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023 .....	II-50
Grafik 2.22	Capaian Usia Harapan Hidup Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 .....	II-51
Grafik 2.23	Capaian Rata-rata Lama Sekolah Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 .....	II-52

Grafik 2.24	Capaian Harapan Lama Sekolah Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 .....	II-53
Grafik 2.25	Capaian Pengeluaran per Kapita Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 .....	II-54
Grafik 2.26	Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 .....	II-56
Grafik 2.27	Penyebab Kematian Bayi Tahun 2023.....	II-58
Grafik 2.28	Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023 .....	II-58
Grafik 2.29	Perkembangan Cakupan JKN di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (%).....	II-59
Grafik 2.30	IPG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	II-60
Grafik 2.31	IDG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2023.....	II-61
Grafik 2.32	IKG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 .....	II-61
Grafik 2.33	IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 .....	II-63
Grafik 2.34	Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Komposisi Komponen PDRB Berdasarkan Pengeluaran (%) .....	II-64
Grafik 2.35	Kontribusi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2019 – 2023. II-65	
Grafik 2.36	Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%).....	II-65
Grafik 2.37	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2023 .....	II-66
Grafik 2.38	Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023.....	II-66
Grafik 2.39	Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023 .....	II-68
Grafik 2.40	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023....	II-68
Grafik 2.41	TPT dan TPAK di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023... II-69	
Grafik 2.42	Tingkat Kemantapan Jalan (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2023 .....	II-71
Grafik 2.43	RTHL Kabupaten Sumedang Periode 2019 – 2023 (%) .....	II-75
Grafik 2.44	Perkembangan ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2023 .....	II-76
Grafik 2.45	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 – 2023 .....	II-83
Grafik 2.46	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang .....	II-87
Grafik 2.47	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023 .....	II-94
Grafik 2.48	Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang.....	II-96
Grafik 2.49	Angka Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2023 .....	II-97
Grafik 2.50	Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023 .....	II-98
Grafik 2.51	Hubungan Gini Ratio Dengan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2019 – 2023 .....	II-99



Grafik 2.52 Jumlah Persentase Pengangguran di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023 .....	II-100
Grafik 2.53 TPAK Perempuan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022 .....	II-100
Grafik 2.54 TPAK Laki-laki di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 .	II-101
Grafik 2.55 Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%).....	II-101
Grafik 2.56 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan.....	II-102
Grafik 2.57 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023 .....	II-103
Grafik 2.58 Proyeksi jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-104
Grafik 2.59 Proyeksi Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-104
Grafik 2.60 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2045 .....	II-105
Grafik 2.61 Perbandingan Piramida Penduduk Tahun 2023 dengan Proyeksi Piramida Penduduk Tahun 2045 .....	II-105
Grafik 2.62 Proyeksi Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025 – 2045 .....	II-106
Grafik 2.63 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-107
Grafik 2.64 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-107
Grafik 2.65 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Hunian di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-109
Grafik 2.66 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 .....	II-110
Grafik 3.1 Hasil Survei Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 .....	III-33

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Kabupaten Sumedang memiliki potensi strategis dalam konteks perkembangan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dikarenakan letak wilayah Kabupaten Sumedang cukup dekat dengan Kota Bandung yang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat. Letak Kabupaten Sumedang sekitar 45 km Timur Laut dan merupakan kabupaten di Wilayah Priangan Timut Jawa Barat dan merupakan daerah lintasan yang diapit oleh beberapa daerah yang menjadi Pusat Kawasan Startegis Nasional (KSN) yaitu termasuk pada Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari, dan Kecamatan Pamulihan yang merupakan Kawasan perkotaan Cekungan Bandung. Selain itu juga Kabupaten Sumedang masuk kedalam pengembangan Kawasan BUTOM dan Kawasan Metropolitan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah sesuai dengan kewenangannya harus menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 Kabupaten Sumedang, untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sumedang yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan, disamping sebagai salah satu upaya mendukung

pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat lebih jauh juga untuk mendukung pembangunan Nasional dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Menindaklanjuti Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengamanatkan penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional Tahun 2024, serta dalam rangka upaya mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.

Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan merumuskan saran dan masukan hasil pembahasan Bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan melalui musyawarah pembangunan.

Berdasarkan substansi-nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 disusun menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial. Pendekatan



RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) Tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
22. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
25. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

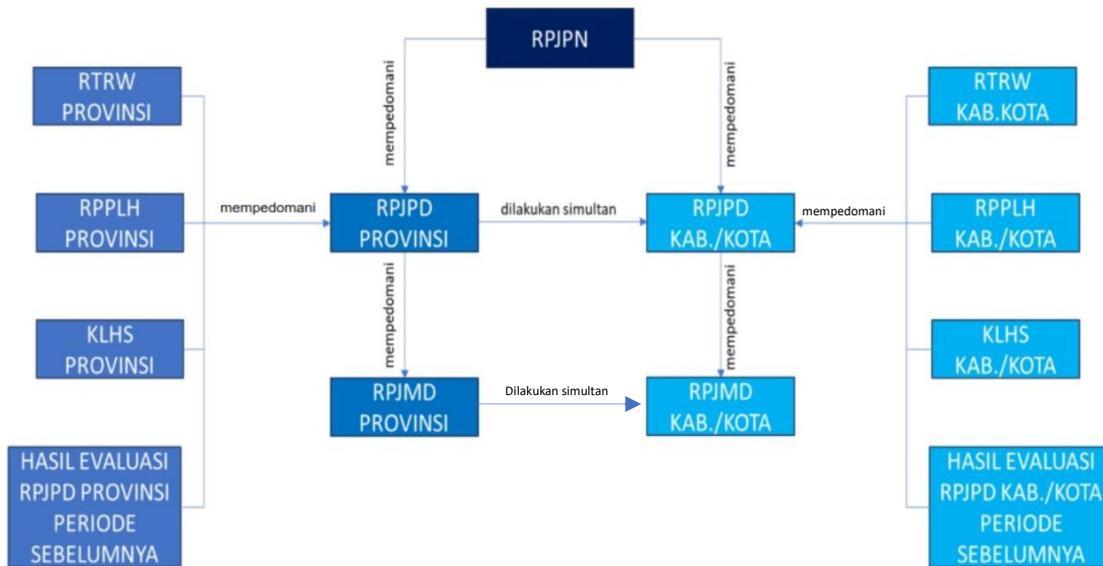
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 231);
  34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
  35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 4);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya *Sunda* (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya**

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah.

**Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen**



Sumber: *Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 (diolah)*

### 1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan 5 sasaran visi, 8 misi Pembangunan, 17 arah kebijakan Pembangunan dan memperhatikan 45 indikator utama Pembangunan.

### 1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 memperhatikan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. Hal ini dilakukan dengan menyelaraskan sasaran visi, misi isu strategis, arah kebijakan dan sasaran pokok, target indikator makro dan indikator kinerja Pembangunan.

### 1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 memperhatikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Hal ini dilakukan dengan

menyelaraskan strategi dan kebijakan rencana tata ruang, pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

#### **1.3.4. Hubungan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 mempedomani Dokumen Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) RPJPD Tahun 2025-2045. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

### **1.4. Maksud dan Tujuan**

#### **1.4.1. Maksud**

Penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang arah pembangunan Kabupaten Sumedang 20 (dua puluh) Tahun kedepan dalam upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

#### **1.4.2. Tujuan**

Selanjutnya, tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 adalah:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan periode Tahun 2025-2045;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD dalam penyusunan visi, misi daerah
3. Sebagai dasar penyusunan RPJMD periode berikutnya.
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima Tahunan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045 sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan RPJPD yang terdiri dari: (1) Latar Belakang, (2) Dasar Hukum Penyusunan, (3) Hubungan antar Dokumen, (4) Maksud dan Tujuan serta (5) Sistematika Penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Dalam bab ini menjelaskan dan menyajikan tentang gambaran umum kondisi daerah selama beberapa Tahun terakhir, yang meliputi: (1) Aspek Geografi dan Demografi; (2) Aspek Kesejahteraan Masyarakat; (3) Aspek Daya Saing; (4) Aspek Pelayanan Umum; (5) Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025; (6) Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik; dan (7) Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan butir-butir penting permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) Tahun mendatang yang meliputi: (1) Permasalahan; dan (2) Isu Strategis Daerah.

### BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Dalam bab ini menyajikan visi dan misi yang menggambarkan keadaan yang diinginkan selama 20 (dua puluh) Tahun mendatang.

### BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Pada Bab ini menjelaskan arah kebijakan pembangunan yang merupakan kerangka kerja Pembangunan tiap lima Tahunan selama 4 (empat) periode, dengan periode 2025-2029; periode 2030-2034; periode 2035-2039; dan periode 2040-2045.



Sasaran pokok menjelaskan memuat arah Pembangunan, arah kebijakan transformasi daerah, dan indikator utama Pembangunan.

## BAB VI PENUTUP

Bagian ini memuat peran RPJPD sebagai pedoman penyusunan RPJMD dan proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan diantaranya melalui manajemen resiko pembangunan daerah dan nasional.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1. Aspek Geografi dan Demografi

##### 2.1.1. Aspek Geografi

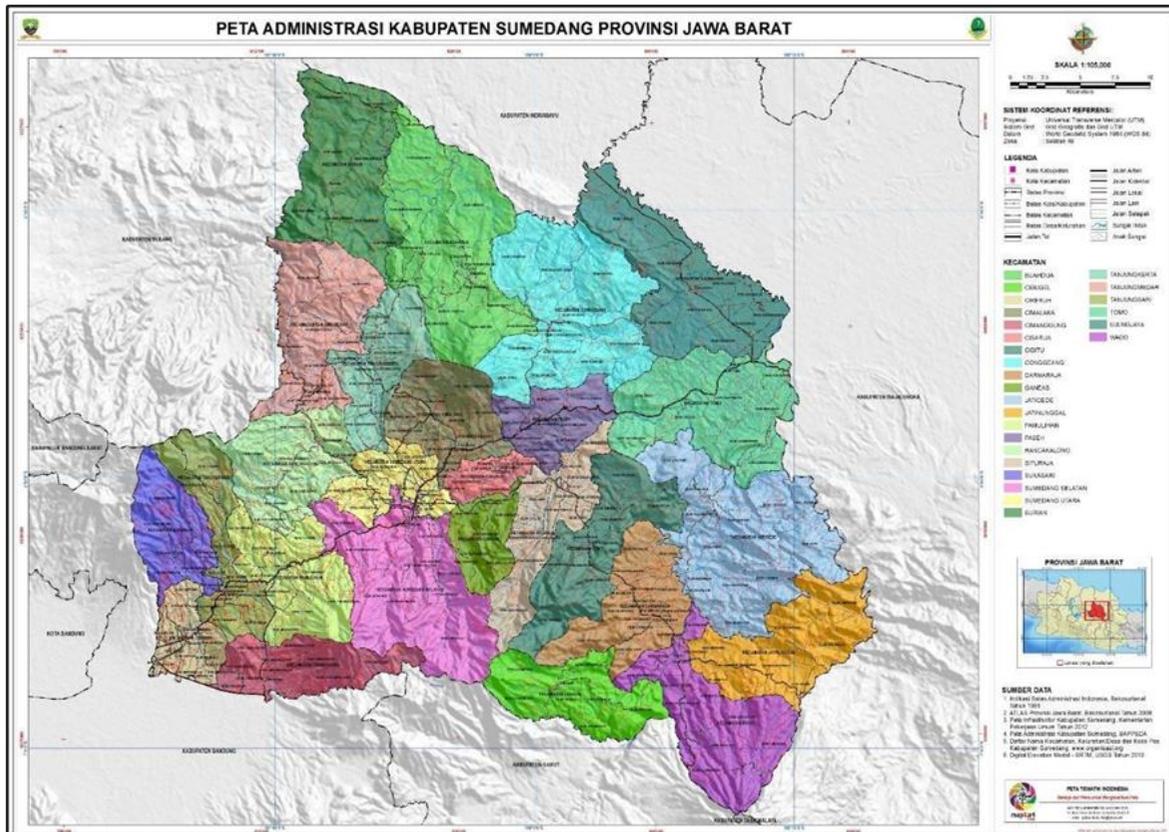
##### 2.1.1.1. Posisi Strategis Kabupaten Sumedang

Kabupaten Sumedang memiliki kondisi *geo-economy* yang terletak di koridor ekonomi Jawa yaitu diantara 3 (tiga) kota metropolitan meliputi Jakarta Raya, Bandung Raya dan Cirebon Raya, yang merupakan posisi strategis bagi Kabupaten Sumedang yang berada pada posisi koordinat 6°34'46,18" - 7°00'56,25" Lintang Selatan dan 107°01'45,63" - 108°12'59,04" Bujur Timur. Kabupaten Sumedang juga berada pada lokasi yang sangat strategis bagi perekonomian nasional, karena sebagian wilayahnya masuk dalam Kawasan Cekungan Bandung yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dan juga sebagai penyangga Ibukota Provinsi.

Kabupaten Sumedang juga masuk kedalam kawasan pengembangan baru berbasis perkotaan Inti Cirebon-Patimban-Kertajati yang selanjutnya disebut REBANA yang didalamnya meliputi 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Sumedang dan Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan REBANA dan Jawa Barat Bagian Selatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, luas Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha, terdiri dari 26 Kecamatan dan terbagi ke dalam 270 Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan. Secara luas, Kecamatan Jatigede mempunyai wilayah terluas dengan luas kurang lebih 11.394 Ha, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Ganeas dengan luas 2.531 Ha.

**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang**



Sumber: PERDA RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu;
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung;
- d. Sebelah Selatan: Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Seiring dengan Pembangunan berbagai proyek strategis di Kabupaten Sumedang, maka saat ini Kabupaten Sumedang mempunyai posisi strategis terhadap wilayah yang ada di sekitarnya. Keberadaan Waduk Jatigede telah menjadi potensi sumber daya air dengan peran antara lain:

1. Pengatur tata air (banjir, kekeringan) di daerah hilir DAS Cimanuk (Cirebon, Indramayu).
2. Sumber air baku untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cirebon Raya.
3. Waduk Jatigede menjadi sumber irigasi untuk pertanian daerah hilir DAS Cimanuk, yang juga ditetapkan sebagai wilayah penunpu ketahanan pangan nasional.

### 2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Sama seperti kabupaten lainnya Kabupaten Sumedang juga menyimpan cukup banyak potensi sumber daya alam, diantaranya potensi di sektor pariwisata, kehutanan, pertanian dan lain-lain.

#### A. Pariwisata

Kabupaten Sumedang saat ini sudah memiliki Perencanaan Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Sumedang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 sebagai upaya mendorong pengembangan Pariwisata di Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata sehingga bisa menjadi pedoman bagi penyelenggaraan desa wisata di Kabupaten Sumedang.

Wisata alam sebagai salah satu wisata yang memanfaatkan unsur-unsur daya tarik alam dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik itu alami maupun budidaya sebagai Daya Tarik Wisata cukup dominan di Kabupaten Sumedang disamping wisata lain seperti wisata sejarah, wisata budaya, wisata kuliner, wisata edukasi, wisata olahraga dan wisata minat khusus. Keberadaan pariwisata wisata alam di Kabupaten Sumedang tersebar di beberapa kecamatan, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1 Sebaran Potensi Wisata Alam di Kabupaten Sumedang**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wisata Alam
1	Buahdua	2
2	Cibugel	1
3	Cimalaka	3
4	Cimanggung	8
5	Cisarua	-
6	Cisitu	5
7	Conggeang	2

No	Nama Kecamatan	Jumlah Wisata Alam
8	Darmaraja	1
9	Ganeas	1
10	Jatigede	3
11	Jatinangor	-
12	Jatinunggal	-
13	Pamulihan	1
14	Paseh	-
15	Rancakalong	-
16	Situraja	4
17	Sukasari	1
18	Sumedang Utara	-
19	Sumedang Selatan	10
20	Surian	-
21	Tanjungkerta	1
22	Tanjungmedar	1
23	Tanjungsari	5
24	Tomo	-
25	Ujungjaya	-
26	Wado	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2014-2023 menunjukkan trend meningkat terutama pada Tahun 2022 dan 2023. Penurunan jumlah pengunjung puncaknya terjadi Tahun 2021 dimana terjadi puncak pandemi COVID-19.

**Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023**

Tahun	M mancanegara	Domestik	Total
2019	4.148	810.790	814.938
2020	7.784	874.038	881.822
2021	-	648.004	648.004
2022	11.410	1.248.543	1.293.963
2023	12.023	1.803.403	1.815.426

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (2023)

## B. Kehutanan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dikelola dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Adapun kewenangan yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura).

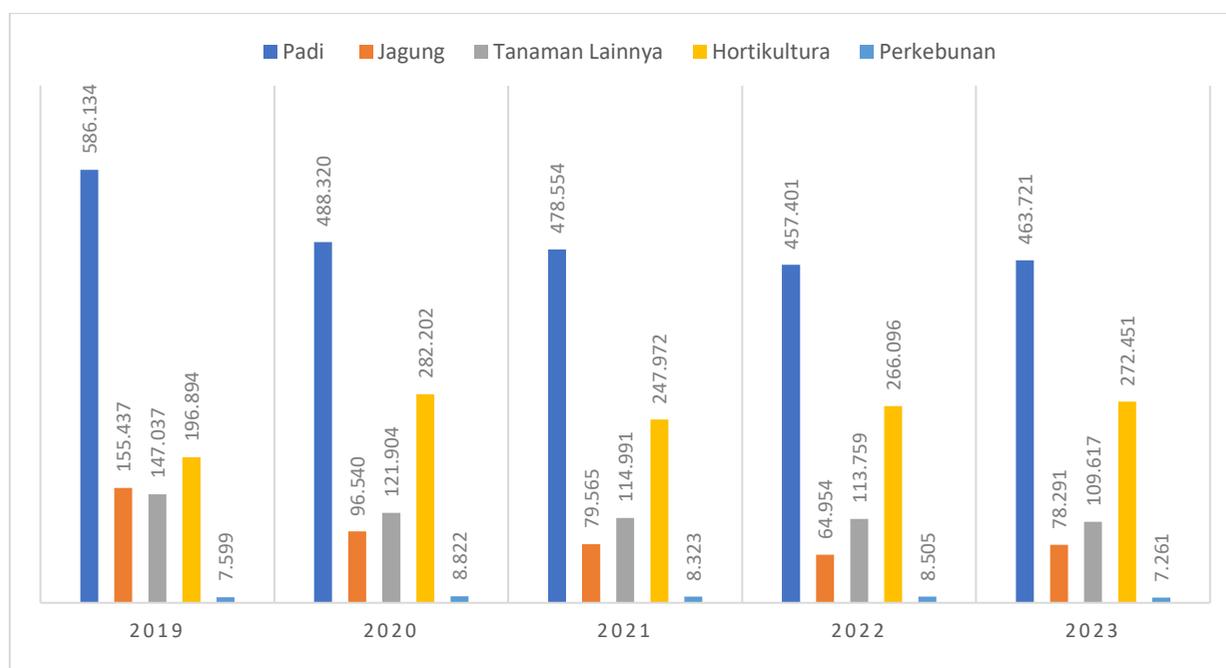
Potensi kehutanan di Kabupaten Sumedang berupa Taman Hutan Raya (Tahura), yaitu Tahura Gunung Palasari dan Tahura Gunung Kunci yang merupakan salah satu kawasan konservasi di Sumedang dan berfungsi sebagai kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kedua gunung tersebut menjadi kawasan taman hutan rakyat pada Tahun 2004 sehingga status kawasan Gunung Kunci dan Gunung Palasari berubah fungsinya dari Kawasan Hutan Produksi Terbatas menjadi Taman Hutan Raya yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.692/Menhut-II/2009, kawasan Tahura Gunung Kunci dan Gunung Palasari telah ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya. Adapun luas Gunung Kunci sebesar 3,2 hektar sedangkan Tahura Gunung Palasari luasnya 32,89 hektar. Saat ini Tahura di Kabupaten Sumedang merupakan tempat tumbuh dan pelestarian alam beberapa spesies flora seperti akasia (*Acacia mangium*), Eboni (*Diospyros celebica*), Jati (*Tectona grandis*) dan Pinus (*Pinus merkusii*) serta beberapa spesies fauna seperti Burung Kutilang (*Pycnonotus sp.*), Elang, Ular Bido (*Spilornis cheela*) dan Tekukur.

### C. Pertanian

Pertanian dan peternakan merupakan salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Secara sub sektor, urusan pertanian terdiri dari 5 (lima) sub sektor yaitu pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Urusan pertanian di Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang besar karena didukung oleh kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian. Selain itu juga sektor pertanian pun menjadi salah satu sektor utama yang berperan terhadap kontribusi perekonomian di Kabupaten Sumedang mengingat sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.

**Grafik 2.1 Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2019 – 2023**



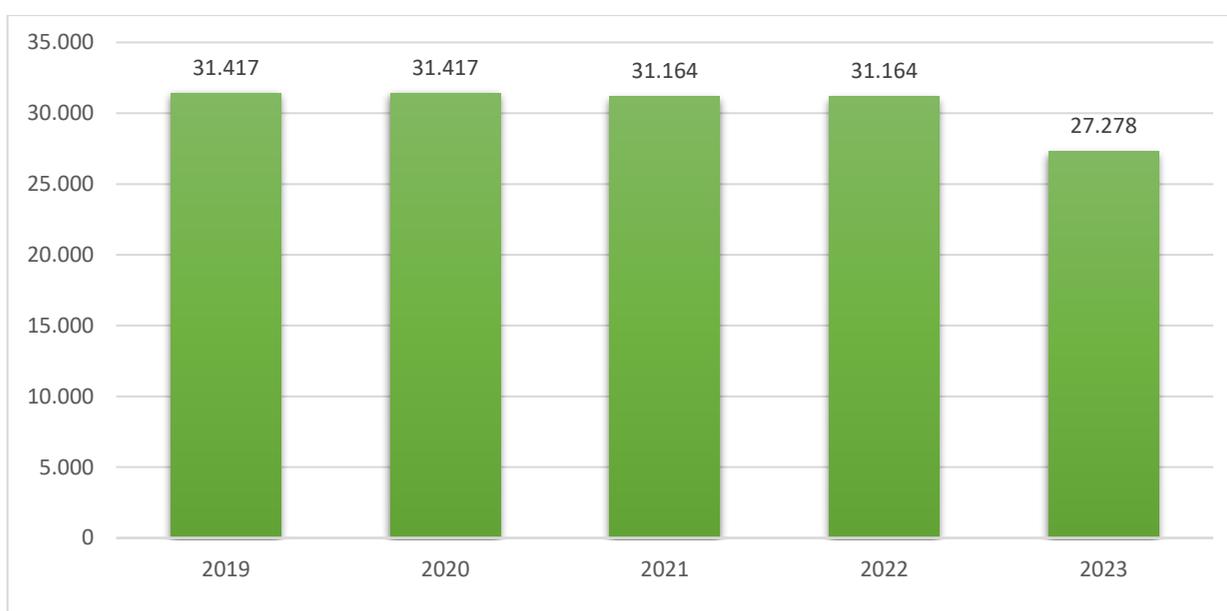
Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan Grafik 2.1, pada periode Tahun 2019-2022 secara umum jumlah produksi padi dan jagung menunjukkan tren menurun namun demikian memasuki tahun 2023 produksi padi dan jagung Kembali meningkat dibandingkan tahun 2022. Penurunan produksi padi dan jagung dari tahun 2019 sampai tahun 2022 seiring masa transisi akibat adanya luas lahan sawah yang mengalami alih fungsi lahan untuk Pembangunan proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Sumedang seperti Waduk Jatigede dan Jalan Tol Cisumdawu. Sementara itu produksi tanaman hortikultura relatif stabil dalam tren yang meningkat walaupun pada tahun 2021 sempat mengalami

penurunan dibanding tahun 2020, namun pada tahun 2022 dan 2023 kembali menunjukkan peningkatan.

Dalam peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2028 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2028-2038 luas lahan peruntukan pertanian tanaman pangan seluas kurang lebih 30.069 Ha yang didalamnya meliputi lahan beririgasi dan lahan tidak beririgasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang.

**Grafik 2.2 Perkembangan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Sumedang (Ha) Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, 2024

Pada sektor pertanian, Kabupaten Sumedang telah membuat kebijakan terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kedaulatan pangan daerah.

Sampai tahun 2023 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Sumedang tercatat 15.649,61 Ha yang merupakan lahan pertanian yang secara umum beririgasi teknis tersebar di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Selain LP2B untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) pada tahun 2023 tercatat 5.503,13 Ha. LP2B ini merupakan bidang Lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional, sementara LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan

ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LP2B pada masa yang akan datang.

Dalam upaya melindungi lahan pertanian saat ini ada pula kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD). Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) Tidak Sesuai Peruntukan Dengan Rencana Tata Ruang (RTR) Kabupaten Sumedang telah disepakati bahwa terdapat LSD yang tetap dipertahankan sebagai peta LSD seluas 27.960,58 Ha yang didalamnya termasuk LP2B.

**Tabel 2.3 Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

No	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Sawah	Tegalan	LP2B	LCP2B
1	Buahdua	2.188,90	91,85	1.283,02	24,53
2	Cibugel	576,32	912,10	346,68	555,33
3	Cimalaka	838,22	107,11	639,03	14,65
4	Cimanggung	390,16	797,13	330,78	644,96
5	Cisarua	461,45	6,95	384,39	6,67
6	Cisitu	984,53	313,39	690,94	179,23
7	Conggeang	1.676,11	150,56	1203,03	93,51
8	Darmaraja	755,39	67,46	246,33	1,10
9	Ganeas	592,17	39,95	356,93	1,41
10	Jatigede	1011,92	306,10	330,66	77,20
11	Jatinangor	346,78	392,91	106,02	123,47
12	Jatinunggal	2325,23	275,17	1174,14	40,23
13	Pamulihan	627,85	1.399,42	536,00	1.041,38
14	Paseh	1.072,34	38,71	836,85	23,74
15	Rancakalong	1.012,58	406,78	890,55	337,49
16	Situraja	1.166,39	129,00	899,47	91,13

No	Kecamatan	Luas (Ha)			
		Sawah	Tegalan	LP2B	LCP2B
17	Sukasari	525,40	837,05	356,04	111,70
18	Sumedang Selatan	1.307,08	298,05	647,20	80,29
19	Sumedang Utara	720,14	99,17	355,77	30,76
20	Surian	805,45	166,47	343,74	109,76
21	Tanjungkerta	1.505,54	93,49	1.224,56	65,42
22	Tanjungmedar	1.315,79	1.100,29	1.070,22	818,41
23	Tanjungsari	578,88	627,08	334,22	363,46
24	Tomo	1.007,35	112,97	480,89	33,88
25	Ujungjaya	2.587,53	77,90	16,26	0
26	Wado	899,34	883,39	538,86	633,41
Total		27.278,85	9,730,43	15.649,61	5.503,13

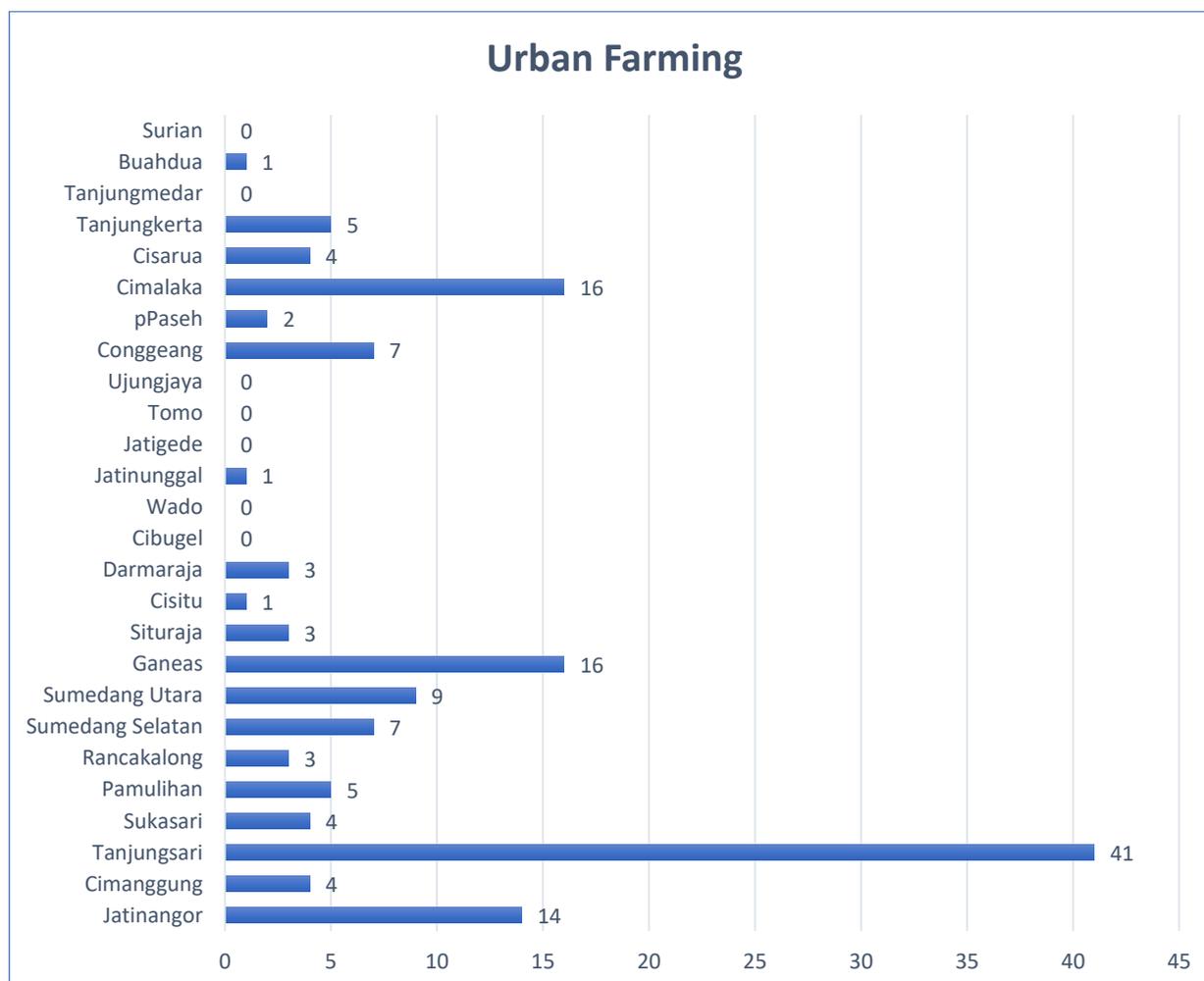
Sumber. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, 2024

Lahan pertanian di perkotaan semakin sempit seiring dengan penambahan penduduk perkotaan, sedangkan kebutuhan untuk konsumsi hasil pertanian cukup tinggi. Wilayah perkotaan memiliki ketergantungan hasil pertanian dari daerah lain, sehingga urban farming menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus membantu pengendalian inflasi, mengembangkan ekonomi lokal, efisiensi biaya transportasi, meningkatkan partisipasi masyarakat/komunitas, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Beberapa aktivitas yang tergolong urban farming antara lain berkebun sayuran di taman kota, atap bangunan, atau dalam ruang tertutup seperti rumah kaca. Kegiatan yang dilakukan pada urban farming selain budidaya tanaman, dapat juga berupa usaha peternakan. Meski hanya dilakukan di beberapa wilayah perkotaan, pelaku usaha urban farming cukup banyak, yaitu sebesar 146 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dan 146 unit Usaha Pertanian Perorangan (UTP). Kegiatan urban farming tersebar di seluruh

Kecamatan di Kabupaten Sumedang. Pelaku kegiatan urban farming paling banyak berada di Kecamatan Tanjungsari sebanyak 41 RTUP dan 41 unit UTP.

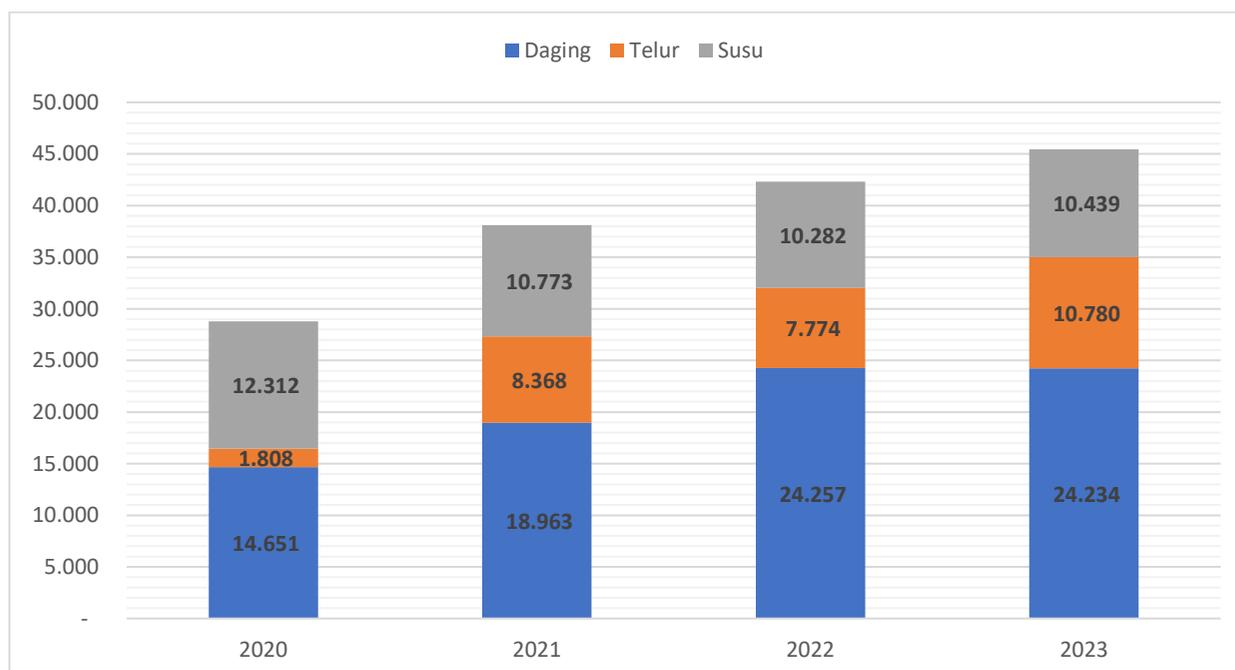
**Grafik 2.3 Jumlah Rumah Tangga dan Usaha Pertanian Perorangan Urban Farming Menurut Kecamatan di Kabupaten Sumedang, 2023**



Sumber: Sensus Pertanian, BPS Kabupaten Sumedang (2024)

Selain sub sektor pangan, sub sektor peternakan di Kabupaten Sumedang juga pada periode Tahun 2020-2023 secara total menghasilkan komoditas daging, telur dan susu yang terus meningkat.

**Grafik 2.4 Produksi Komoditas Peternakan Kabupaten Sumedang (Ton)  
Tahun 2020 – 2023**



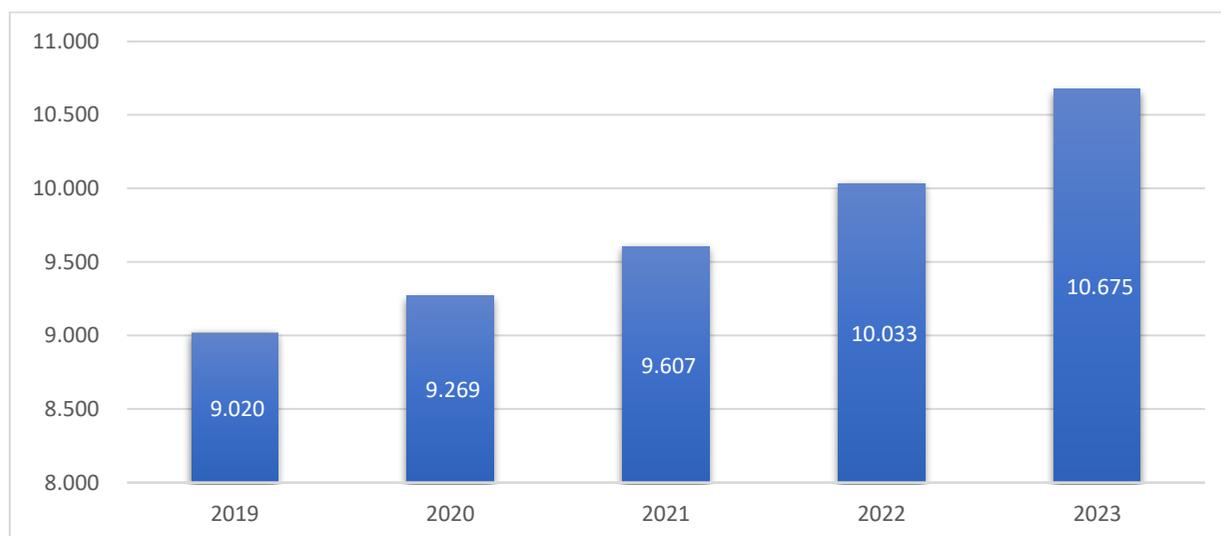
Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, 2024

Dari ketiga komoditas peternakan tersebut, komoditas daging menunjukkan tren peningkatan produksi yang cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar 14.651ton sampai tahun 2023 mencapai 24.234 ton. Peningkatan terjadi pula pada komoditas telur dimana pada tahun 2020 sebesar 1.808 ton menjadi 10.780 ton pada tahun 2023.

Untuk komoditas susu perkembangannya mengalami fluktuatif bahkan apabila dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12.312 ton, produksi tahun 2021-2023 masih belum bisa melampaui dimana produksi tahun 2023 baru mencapai 10.439 ton.

Untuk sub sektor perikanan di Kabupaten Sumedang juga pada periode Tahun 2019-2023 menghasilkan komoditas ikan konsumsi yang terus meningkat. Tahun 2019 tercatat produksi ikan sebesar 9.020 ton dan pada tahun 2023 mencapai 10.675 ton. Perkembangan produksi ikan setiap tahun sebagaimana tersaji pada Grafik 2.5 berikut.

**Grafik 2.5 Produksi Komoditas Ikan Konsumsi (Ton)  
Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang, 2024

#### **D. Potensi Energi Terbarukan**

Kabupaten Sumedang memiliki potensi sumber energi terbarukan berupa energi panas bumi Gunung Tampomas yang tersebar di Kecamatan Conggeang, Kecamatan Buahdua dan Kecamatan Tanjungkerta. Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038, secara umum dijelaskan bahwa perwujudan sistem jaringan prasarana wilayah yang potensial untuk dikembangkan salah satunya berupa rencana sistem jaringan prasarana energi panas bumi Gunung Tampomas dengan potensi kapasitas 40 MW.

Selain potensi panas bumi Tampomas, keberadaan Waduk Jatigede memberikan manfaat yang lebih luas untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede berkapasitas 2×55 megawatt (MW) untuk memenuhi kebutuhan energi Listrik di Jawa dan Bali, dengan progres sampai dengan saat ini akan segera segera dioperasikan oleh PT. PLN (Persero). Hal ini tentunya mempercepat upaya menghadirkan listrik bersih kepada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan bauran dari sumber energi baru terbarukan (EBT). Dengan demikian komitmen mempercepat transisi energi demi mencapai *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060. PLTA Jatigede menjadi salah satu solusi penyediaan energi bersih bagi Masyarakat.

## E. Potensi Air Baku

Berdasarkan Dokumen Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sumedang, potensi air baku di Kabupaten Sumedang meliputi potensi air permukaan, potensi air tanah dan sumber lain.

Potensi air permukaan di wilayah Kabupaten Sumedang berupa sungai dan infrastruktur Sumber Daya Air yang dibangun dan direncanakan oleh Pemerintah berupa Waduk, Bendung, Bendungan dan Embung. Sungai berfungsi mengumpulkan air hujan ke daerah aliran sungai. Dengan membandingkan curah hujan rata-rata dengan volume air sungai, diperkirakan sebagian besar curah air hujan meresap ke dalam tanah dan sisanya mengalir sebagai air permukaan. Pemanfaatan air permukaan di Kabupaten Sumedang merupakan anak sungai dan sungai besar yang banyak dimanfaatkan airnya seperti Sungai Cipeles, Sungai Ciranjang, Sungai Cipunagara, dan Sungai Cisugan. Hulunya di daerah pegunungan antara lain Gunung Tampomas, Gunung Pangarang, dan Gunung Calangcang. Secara umum DAS di Kabupaten Sumedang merupakan DAS masuk kedalam wilayah kerja BBWS Citarum dan BBWS Cimanuk Cisanggarung, DAS yang ada di kabupaten Sumedang terdiri dari DAS Cimanuk, DAS Citarum (Sub DAS Citarik), DAS Cipunagara (Sub DAS Cipunagara) dan DAS Cipanas (Sub DAS Cipanas).

Potensi sumber air baku di Kabupaten Sumedang selain Waduk Jatigede adalah Waduk Cipanas dan Waduk Sadawarna, Waduk Cipanas memiliki kapasitas tampung sebesar 250,81 juta m<sup>3</sup>, dengan kapasitas sebanyak itu dapat memenuhi air baku untuk kawasan industri di Kabupaten Sumedang sebesar 650 liter/detik dan kebutuhan air minum masyarakat di Kabupaten Indramayu sebesar 200 liter/detik. Adapun Waduk Sadawarna memiliki kapasitas tampung hingga 70,86 juta m<sup>3</sup> Luasan area genangan sebesar 681,48 Ha. Proyek strategis dan masif ini digadang mampu membantu mengatasi masalah banjir di hilir DAS Cipunegara, memberi pasokan irigasi bagi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Subang dan Indramayu, termasuk menyediakan air baku di Kabupaten Sumedang.

Data Debit sungai-sungai di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini.

**Tabel 2.4 Rekapitulasi Sumber Air Permukaan  
di Kabupaten Sumedang**

No.	Nama DAS	Kecamatan	Debit (L/dt)
1	Cisugan	Sumedang Utara	52.50
		Buahdua	58.80
		Rancakalong	79.30
2	Cikeruh	Cikeruh	46.50
		Tanjungsari	66.30
3	Cijati	Cikeruh	36.90
4	Cibeusi	Cikeruh	171.00
5	Cipeundeuy	Sumedang Utara	270.00
6	Cilimus	Sumedang Utara	63.00
7	Citarik	Cimanggung	260.00
8	Cimande	Cimanggung	175.50
9	Cipeles	Sumedang Selatan	373.10
		Tanjungsari	39.50
		Sumedang Utara	1,517.10
		Cimalaka	-
		Paseh	72.00
		Tomo	46.80
10	Ciledug	Rancakalong	62.40
		Tanjungsari	36.00
		Sumedang Selatan	49.20
11	Ciekel	Sumedang Selatan	49.20
12	Cikopeah	Sumedang Utara	54.00
13	Ciherang	Rancakalong	30.00
14	Cipicung	Sumedang Selatan	43.20
		Cibugel	285.00
		Darmaraja	32.40
15	Cikumpul	Sumedang Utara	60.00
16	Cilembu	Tanjungsari	36.00
17	Cisumengka	Tanjungsari	58.80
18	Cibeureum	Cimalaka	657.00
19	Cipanteuneun	Cimalaka	109.50
20	Cicaneang	Paseh	65.00
21	Cimuja	Cimalaka	45.50
		Darmaraja	123.60
22	MA. Cipaingeun	Paseh	239.20
23	Cicapar	Situraja	228.60
24	Cikoneng	Sumedang Utara	72.80
25	Cisudajaya	Sumedang Utara	33.80
26	Cidama	Situraja	48.10
27	Cihaur	Cimalaka	31.20
28	Cigodeg	Situraja	26.60
29	Cimacan	Situraja	31.20
30	Cikupa	Cimalaka	90.00
31	Cihonje	Darmaraja	481.50
32	Cigunung	Cibugel	97.50
		Darmaraja	78.00
33	Cikareo	Wado	270.40
34	Cialing	Wado	310.70
35	Cihikeu	Wado	444.60
36	Cikujang	Cibugel	36.00
37	Cijuray	Darmaraja	54.00
38	Cihonje	Darmaraja	57.60
39	Ciselang	Darmaraja	132.00
40	Cibayawak	Tomo	51.60

No.	Nama DAS	Kecamatan	Debit (L/dt)
41	Cigelong	Wado	82.80
42	Cacaban	Wado	178.40
43	Cimanuk	Tomo	80.40
44	Cilutung	Tomo	38.40
45	Cikarea	Wado	70.80
46	MA. Cileles	Cimalaka	78.00
47	Ciranjang	Tanjungkerta	153.40
48	Ciborolong	Tanjungkerta	41.60
49	Cigarukgak	Buahdua	223.60
50	Ciojar	Cimalaka	124.80
51	Cikandung	Cimalaka	204.00
52	Cidadap	Cimalaka	58.80
53	Cikandung	Tanjungkerta	133.20
54	Cibodas	Tanjungkerta	21.60
55	Cinungku	Tanjungkerta	42.00
56	Emulan	Buahdua	74.40
57	Ciliang	Buahdua	96.00
58	Cipunagara	Buahdua	96.00
59	Tangerang	Buahdua	72.00
60	Cisurian	Buahdua	138.00
61	Cipadung	Tanjungkerta	36.00
62	Ciranjang	Tanjungkerta	51.60
63	Cimamut	Tanjungkerta	36.00
		Buahdua	102.00
64	Cisuka	Tanjungkerta	51.60
65	Ciakar	Buahdua	44.40
66	Cisugan	Buahdua	97.20
67	Cipelang	Ujungjaya	2,404.50
		Conggeang	96.00
68	Cigelagah	Buahdua	269.10
69	Sirah Cipelang	Conggeang	598.00
70	Cibubuan	Conggeang	204.00
71	Ciande	Conggeang	12.00
72	Cianda	Conggeang	222.00

Sumber : SID Jaringan Air Baku di Kabupaten Sumedang, 2010

Dari beberapa DAS seperti pada tabel di atas, DAS yang dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Sumedang hingga saat ini adalah:

- Sungai Cimanuk – Wado (kapasitas terpasang 20 L/dt);
- Sungai Cigendel – Gudang (kapasitas terpasang 40 L/dt);
- Sungai Goa Walet – Tanjungsari (kapasitas terpasang 67,5 L/dt);
- Sungai Citekin – Pasanggrahan (kapasitas terpasang 100 L/dt).

Air tanah merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (mutu) sangat tergantung pada kondisi lingkungan, dimana proses pengimbuhan pengalirandan pelepasan air tanah tersebut berlangsung pada suatu wadah yang disebut cekungan air tanah (*groundwater basin*).

Berdasarkan Peta Cekungan Air Tanah yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan dan Pertambangan - Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral - 2004, di wilayah Kabupaten Sumedang terdapat 2 (dua) Cekungan Air Tanah, yaitu:

1. Cekungan Air Tanah Sukamantri: Cekungan ini tersebar di wilayah bagian utara Gunung Tampomas meliputi sebagian wilayah Kecamatan: Tanjungkerta, Buah Dua dan Conggeang. Besarnya recharge air tanah pada lapisan air tanah bebas (dangkal) adalah 98 juta m<sup>3</sup>/tahun, sedangkan air tanah dalam (tertekan) sebesar 13 juta m<sup>3</sup>/tahun.
2. Cekungan Air Tanah Sumedang: Cekungan ini tersebar di bagian selatan Kabupaten Sumedang meliputi sebagian wilayah Kecamatan: Tanjungsari, Sumedang Utara, Rancakalong, Cimalaka, Paseh, Situraja dan Darmaraja. Serta seluruh wilayah Kecamatan: Cikeruh, Sumedang Selatan, dan Cimanggung.

Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo tidak terletak pada pada wilayah cekungan air tanah, oleh karena itu potensi mata air pada wilayah ini tergolong kecil. Wilayah Ujung Jaya dan Tomo menjadi wilayah yang kedepannya harus menjadi prioritas untuk mendapatkan layanan sumber air baku.

Untuk Sumber lain, SPAM regional Jatigede merupakan proyek penyediaan air minum yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa untuk mendistribusikan air bersih secara merata dan meningkatkan cakupan area layanan air bersih di wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu.

Di proyek SPAM Jatigede, sebanyak enam PDAM diproyeksi menjadi offtaker air baku dari SPAM Jatigede. Keenam PDAM itu yakni PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan, PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon, dan PDAM Kabupaten Majalengka. Selanjutnya ada PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang, PDAM Tirta Dharma Ayu Kabupaten Indramayu, dan PDAM Tirta Dharma Kota Cirebon.

Proyek SPAM Regional Jatigede direncanakan mempunyai kapasitas total 3500 liter/detik dan akan dibangun melalui dua tahap yaitu tahap I sebesar 1.500 liter/detik dan 2.000 liter/detik. Investasi pembangunan pada tahap I ditaksir membutuhkan dana investasi sebesar Rp.1,9 triliun. SPAM yang

mengambil air baku dari Waduk Jatigede ini ditargetkan dapat memberikan pelayanan air minum kepada 600 ribu penduduk untuk tahap I dan 800 ribu penduduk untuk tahap II yang ada di daerah Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon.

- Area cakupan/pelayanan: Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu.
- Kapasitas Instalasi Pengolah Air: 1500 ltr/detik dan 2000 liter/detik.
- Off-Take: 7 lokasi (Tomo, Kab. Sumedang; Kertajati dan Jatiwangi, Kab. Majalengka; Jatibarang dan Krangkeng Kab. Indramayu; Babadan, Kab. Cirebon; Kepompongan, Kota Cirebon).
- Skema: KPBU.
- Nilai Investasi: Rp.2,1 Triliun.

### 2.1.1.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

#### A. Kinerja Layanan Ekosistem/Jasa Lingkungan Hidup

Jasa lingkungan / ekosistem merupakan produk sumber daya alam hayati yang ekosistemnya berupa manfaat baik langsung (*tangible*) dan/atau tidak langsung (*intangibile*). Jasa lingkungan dapat digunakan untuk merepresentasikan kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH). DDDLTH merupakan kapasitas jasa lingkungan dalam mendukung perikehidupan makhluk hidup di suatu wilayah ekoregion. Apabila semakin tinggi nilai DDDTLH pada suatu ekoregion, maka ekosistem semakin baik kualitas dan fungsi ekoregion tersebut menyediakan jasa lingkungannya (Riqqi, et al., 2019). Jasa lingkungan terbagi dalam empat jenis, yaitu layanan penyediaan (*provisioning*), pengaturan (*regulating*), budaya (*cultural*), dan pendukung (*supporting*) (*Millennium Ecosystem Assessment, 2005*). Klasifikasi ke-empat jenis jasa lingkungan ditunjukkan pada Tabel 2.4 di bawah ini.

**Tabel 2.5 Klasifikasi Jasa Lingkungan**

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
<b>Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>): jasa/produk yang didapat dari lingkungan</b>		
1	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
2	Air bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan
3	Serat ( <i>fiber</i> )	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material
4	Bahan bakar ( <i>energi/fuel</i> )	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar yang berasal dari fosil
5	Sumber daya genetik	Penyediaan sumber daya genetik termasuk flora dan fauna
<b>Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>): manfaat yang didapatkan dari pengaturan lingkungan</b>		
1	Iklm	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon
2	Tata aliran air dan banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air
3	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami
4	Pemurnian air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar
5	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah
6	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara
7	Penyerbukan alami ( <i>pollination</i> )	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami
8	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit
<b>Fungsi Budaya (<i>Cultural</i>): manfaat yang tidak bersifat material/terukur dari lingkungan</b>		
1	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah dan leluhur
2	Tempat tinggal dan ruang hidup ( <i>sense of place</i> )	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang memiliki nilai sentimental

Klasifikasi Jasa Lingkungan		Definisi Operasional
3	Rekreasi dan ekoturisme	Fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
4	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
5	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
<b>Fungsi Pendukung (<i>Supporting</i>): jasa lingkungan yang diperlukan manusia</b>		
1	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
2	Siklus hara ( <i>nutrient</i> )	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
3	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies
4	Biodiversitas	Habitat dan keanekaragaman hayati

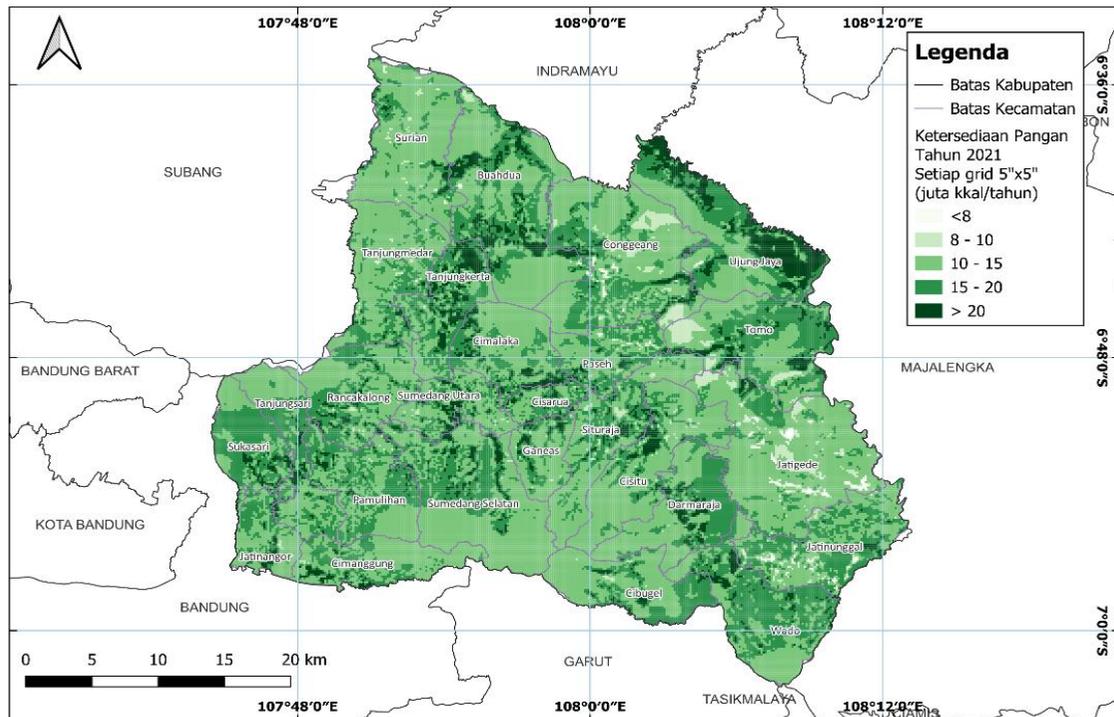
Sumber: *Millenium Ecosystem Assessment (2005)*; *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2011)*

## B. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Pangan

Pemodelan DDLH penyedia pangan dan ambang batasnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan menentukan kebutuhan, ketersediaan, dan selisih ketersediaan bahan pangan. Pemodelan ambang batas dan status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sumedang dilakukan dengan menggunakan unit spasial berupa grid ukuran 5"x5" ( $\pm 150 \text{ m} \times 150 \text{ m}$ ).

Ketersediaan pangan dihitung berdasarkan data produksi tanaman pangan, hortikultura, hasil perkebunan, dan hasil peternakan yang terdapat di Kabupaten Sumedang dan didistribusikan ke setiap grid dengan menggunakan nilai IJE penyedia bahan pangan sebagai bobot pendistribusian. Hasil dari pemodelan ketersediaan pangan di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Pada peta terlihat bahwa sumber ketersediaan energi bahan pangan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Buahdua. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kondisi penutup lahan di Kabupaten Sumedang bagian utara yaitu Kecamatan Buahdua, Conggeang, dan Kecamatan Ujungjaya memiliki jenis penutup lahan sebagai penghasil pangan utama yang cukup luas ada di seperti sawah, tegalan/ladang, dan perkebunan.

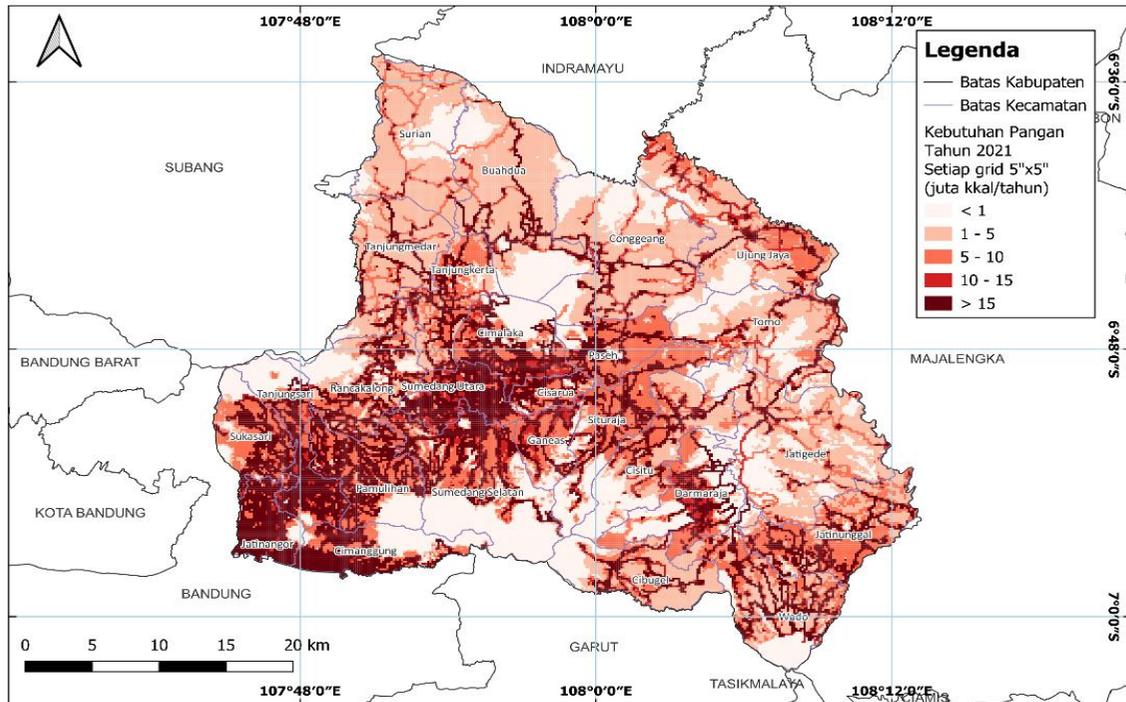
**Gambar 2.2 Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Seperti halnya dengan ketersediaan pangan, kebutuhan pangan di Kabupaten Sumedang juga dihitung pada setiap grid. Perhitungan kebutuhan pangan bergantung pada jumlah penduduk setiap grid yang dikalikan dengan besarnya kebutuhan energi bahan pangan setiap orang untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian. Nilai besarnya kebutuhan energi setiap orang ini disebut dengan Angka Kecukupan Energi (AKE). Oleh karena itu, semakin banyak jumlah penduduk di suatu grid akan memiliki kebutuhan energi pangan yang semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat pada hasil pemodelan kebutuhan pangan di Kabupaten Sumedang yang terdapat pada Gambar 2.3. Berdasarkan hasil pemodelan, terlihat bahwa kebutuhan pangan yang tinggi terdapat di bagian barat daya dan tenggara wilayah Kabupaten Sumedang, mengikuti pola distribusi atau sebaran penduduk.

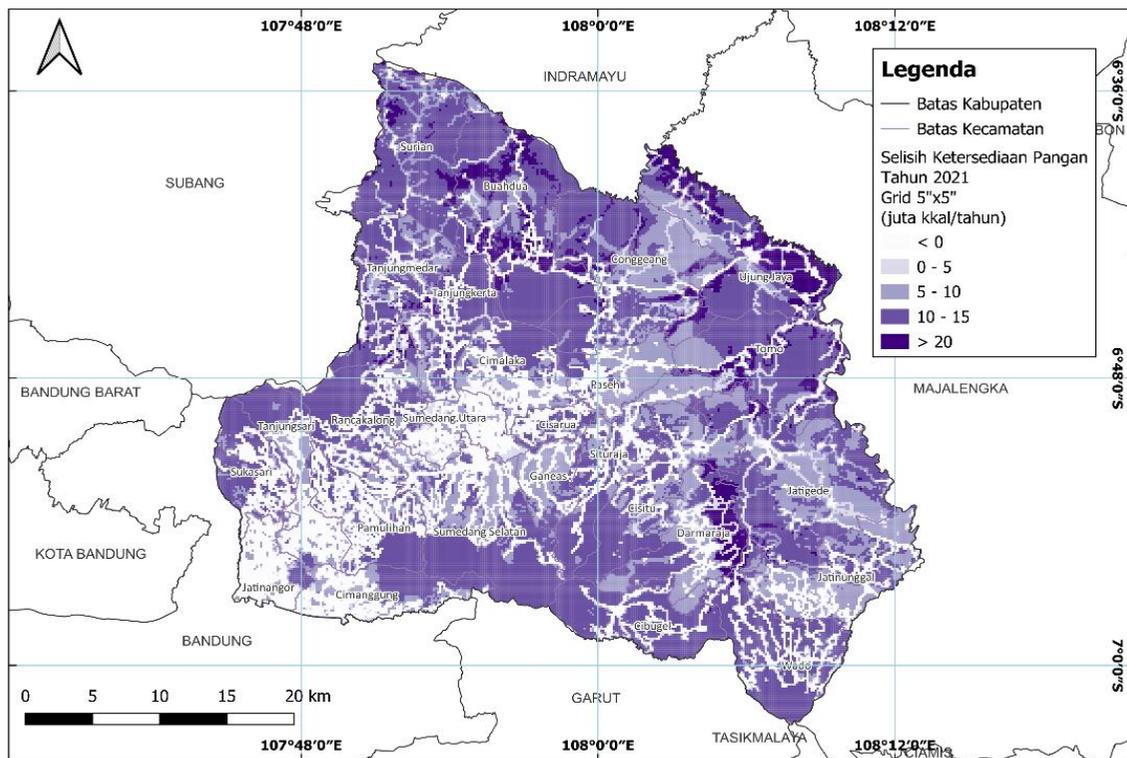
**Gambar 2.3 Kebutuhan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Setelah diperoleh nilai ketersediaan dan kebutuhan bahan pangan, maka selisih ketersediaan bahan pangan dapat dihitung. Selisih ketersediaan bahan pangan dihitung menggunakan konsep *in situ* yang hanya memperhitungkan ketersediaan di setiap grid tanpa melibatkan aliran dari dan/atau ke grid lain. Peta selisih ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Sumedang terdapat pada Gambar 2.4. Terlihat bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang memiliki selisih ketersediaan pangan yang bernilai positif. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang memiliki selisih ketersediaan pangan yang bernilai negatif, terutama di wilayah dengan jumlah penduduk lebih besar. Nilai selisih ketersediaan yang bernilai negatif bukan berarti bahwa pada wilayah tersebut terjadi kelaparan atau kekurangan pangan. Namun, selisih negatif menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah tidak dapat menunjang kebutuhan pangan di wilayahnya dengan produksi/ketersediaan dari wilayahnya sendiri. Dengan kata lain, wilayah yang memiliki selisih ketersediaan pangan negatif ini memerlukan aliran atau pasokan pangan dari wilayah lain.

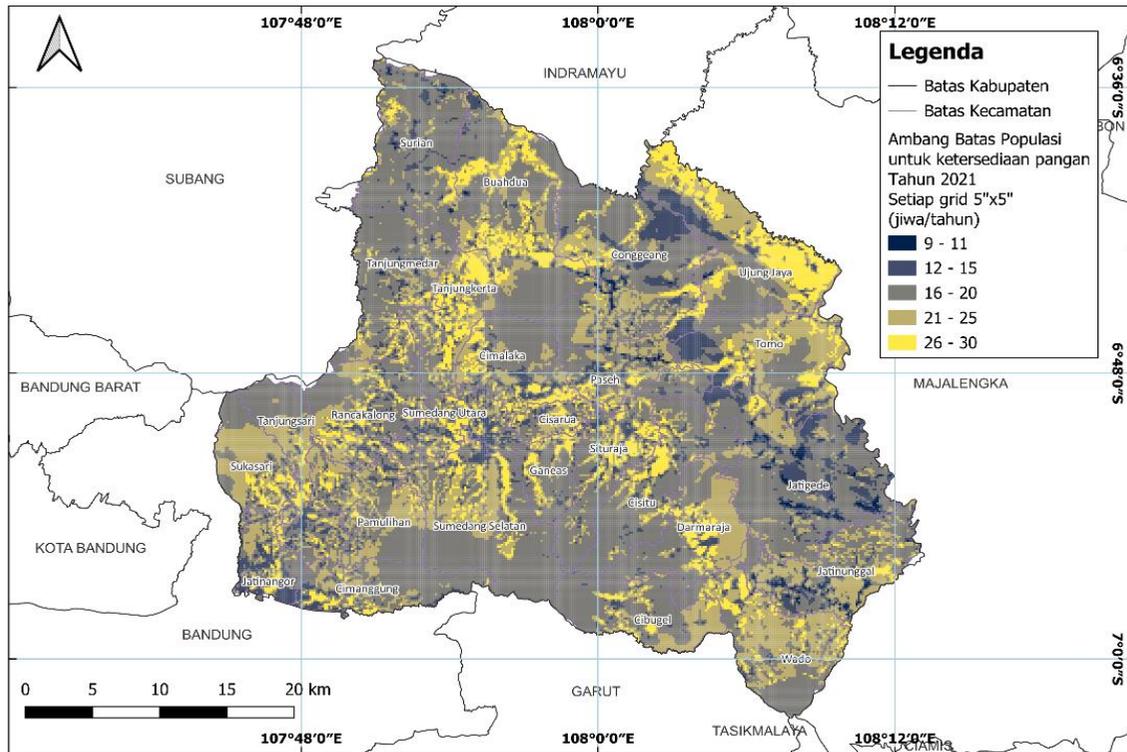
**Gambar 2.4 Selisih Ketersediaan Energi Bahan Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Selanjutnya, pemodelan ambang batas penduduk digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhannya dengan ketersediaan pangan yang ada di wilayah tersebut. Nilai ambang batas penduduk terhadap daya dukung pangan di Kabupaten Sumedang ditunjukkan oleh Gambar 2.5. Dapat dilihat dari legenda, bahwa ambang batas tertinggi di Kabupaten Sumedang adalah 4 penduduk di setiap grid 5"x5" (150mx150m). Artinya, di setiap grid Kabupaten Sumedang maksimal dapat memenuhi kebutuhan pangan untuk 30 orang penduduk yang tinggal di area grid tersebut. Wilayah dengan ambang batas penduduk yang tinggi ini sebagian besar berada di Kecamatan Buahdua dan Kecamatan Conggeang. Wilayah dengan ambang batas penduduk yang rendah berada di bagian barat daya Kabupaten Sumedang, yaitu Kecamatan Jatinangor, Tanjungsari, dan Cimanggung.

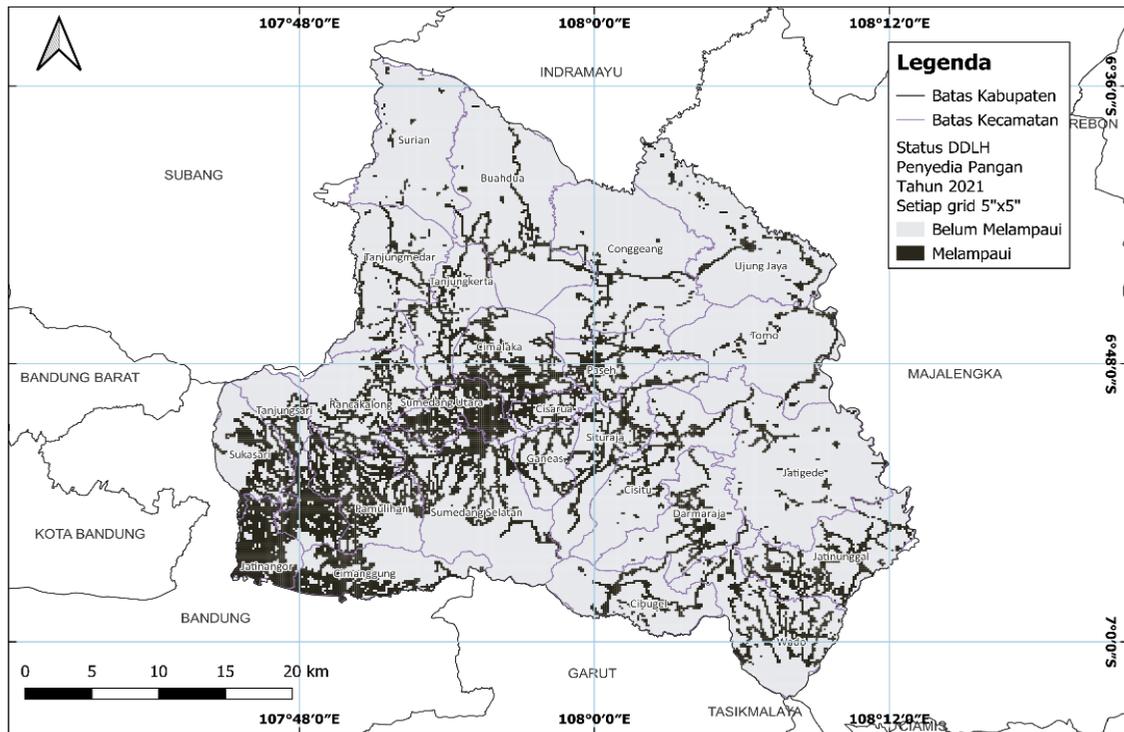
**Gambar 2.5 Ambang Batas Penduduk terhadap DDLH Penyedia Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Ambang batas penduduk di setiap grid kemudian dibandingkan dengan jumlah penduduk di setiap grid untuk mengetahui status daya dukung lingkungan hidup (DDLH) penyedia pangan di Kabupaten Sumedang. Jika jumlah penduduk di suatu grid lebih rendah dari ambang batasnya, maka status DDLH di grid tersebut belum melampaui. Sebaliknya, jika jumlah penduduk di suatu grid lebih tinggi dari ambang batasnya, maka status DDLH di grid tersebut sudah melampaui ambang batasnya. Hasil pemodelan status DDLH penyedia pangan di Kabupaten Sumedang terdapat pada Gambar 2.6. Hampir semua wilayah di Kabupaten Sumedang (77,6% wilayah Kabupaten Sumedang) memiliki status daya dukung penyedia pangan yang belum melampaui.

**Gambar 2.6 Status DDLH Penyedia Pangan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Apabila ditinjau di setiap kecamatan, akumulasi ketersediaan, kebutuhan, selisih ketersediaan, ambang batas penduduk, dan luasan yang belum melampaui ambang batas penyedia pangan di Kabupaten Sumedang terdapat pada Tabel 2.5. Berdasarkan hasil akumulasi tersebut, Kecamatan Surian memiliki luasan yang belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan yang paling luas (97,3% luas wilayahnya), diikuti dengan Kecamatan Jatigede dan Kecamatan Conggeang dengan masing-masing 94,1% dan 92,4% wilayahnya belum melampaui ambang batas DDLH penyedia pangan. Sementara itu, luasan terkecil wilayah yang belum melampaui DDLH pangannya adalah Kecamatan Jatinangor sebesar 21,6% dan Kecamatan Sumedang Utara sebesar 29%. Hanya kedua kecamatan tersebut yang memiliki luas status DDLH pangan belum melampaui kurang dari 50% dari total luas wilayahnya karena merupakan wilayah padat penduduk, pusat ekonomi dan pemerintahan Kabupaten Sumedang. Selain itu, 24 dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang memiliki status DDLH penyedia pangan yang baik dan belum melampaui ambang batas.

**Tabel 2.6 Akumulasi Ketersediaan, Kebutuhan, Selisih Ketersediaan, Ambang Batas Penduduk, dan Status DDLH Penyedia Pangan di Setiap Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

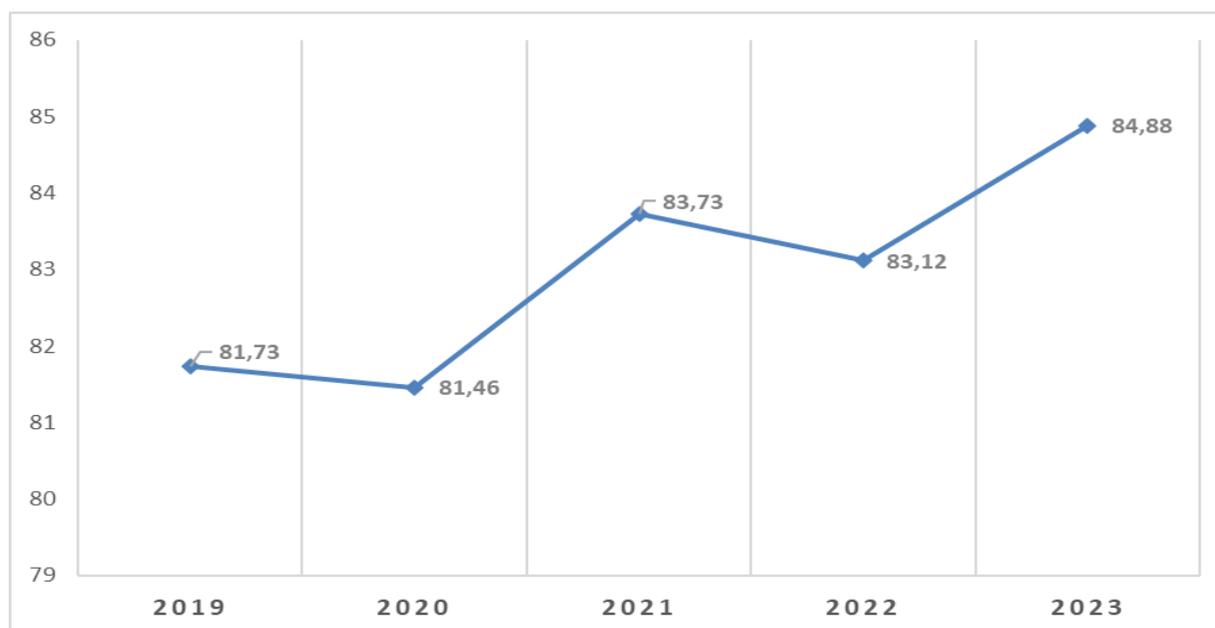
Kecamatan	Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	Kebutuhan Pangan (juta kkal/tahun)	Selisih Ketersediaan Pangan (juta kkal/tahun)	Ambang Batas Penduduk (jiwa)	Luas wilayah yang Belum Melampaui (%)	Status DDLH Pangan
BUAHDUA	75.784	25.325	50.460	96.294	90,9%	Belum Melampaui
CI BUGEL	33.669	18.701	14.967	42.960	84,9%	Belum Melampaui
CI MALAKA	31.125	48.971	-17.846	39.490	58,2%	Belum Melampaui
CI MANGGUNG	28.215	69.195	-40.980	35.868	56,2%	Belum Melampaui
CI SARUA	10.138	15.927	-5.789	12.922	53,4%	Belum Melampaui
CI SITU	40.598	23.823	16.774	51.839	86,2%	Belum Melampaui
CONGGEANG	68.003	22.279	45.724	86.544	92,4%	Belum Melampaui
DARMA RAJA	37.541	28.101	9.440	47.985	82,3%	Belum Melampaui
GANEAS	16.538	19.929	-3.391	21.109	69,6%	Belum Melampaui
JATI GEDE	65.699	17.137	48.562	83.885	94,1%	Belum Melampaui
JATI NANGOR	16.891	76.873	-59.981	21.555	21,6%	Melampaui
JATI NUNGGAL	42.285	35.395	6.890	53.677	72,0%	Belum Melampaui
PAMULIHAN	35.714	49.194	-13.481	45.438	47,9%	Belum Melampaui
PASEH	22.225	29.406	-7.181	28.254	68,0%	Belum Melampaui
RANCAKALONG	37.038	31.326	5.711	47.101	70,3%	Belum Melampaui
SITURAJA	36.352	32.779	3.573	46.490	73,7%	Belum Melampaui
SUKASARI	27.391	25.682	1.709	34.827	64,4%	Belum Melampaui
SUMEDANG SELATAN	61.015	62.005	-990	78.116	73,3%	Belum Melampaui
SUMEDANG UTARA	20.604	77.665	-57.061	26.251	29,0%	Melampaui
SURIAN	46.667	8.666	38.001	59.507	97,3%	Belum Melampaui
TANJUNGGAL	32.533	26.641	5.891	41.337	75,0%	Belum Melampaui
TANJUNGGAL	43.888	20.615	23.274	55.763	85,8%	Belum Melampaui
TANJUNGSARI	28.457	67.897	-39.439	36.131	50,9%	Belum Melampaui
TOMO	50.840	18.232	32.608	64.550	91,8%	Belum Melampaui
WIJUNG JAYA	66.793	24.746	42.048	84.864	91,5%	Belum Melampaui
WADO	51.796	33.999	17.797	65.864	76,5%	Belum Melampaui
<b>KABUPATEN SUMEDANG</b>	<b>1.027.799</b>	<b>910.509</b>	<b>117.290</b>	<b>1.308.621</b>	<b>77,6%</b>	<b>Belum Melampaui</b>

Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

**Grafik 2.6 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang  
Tahun 2019-2023**



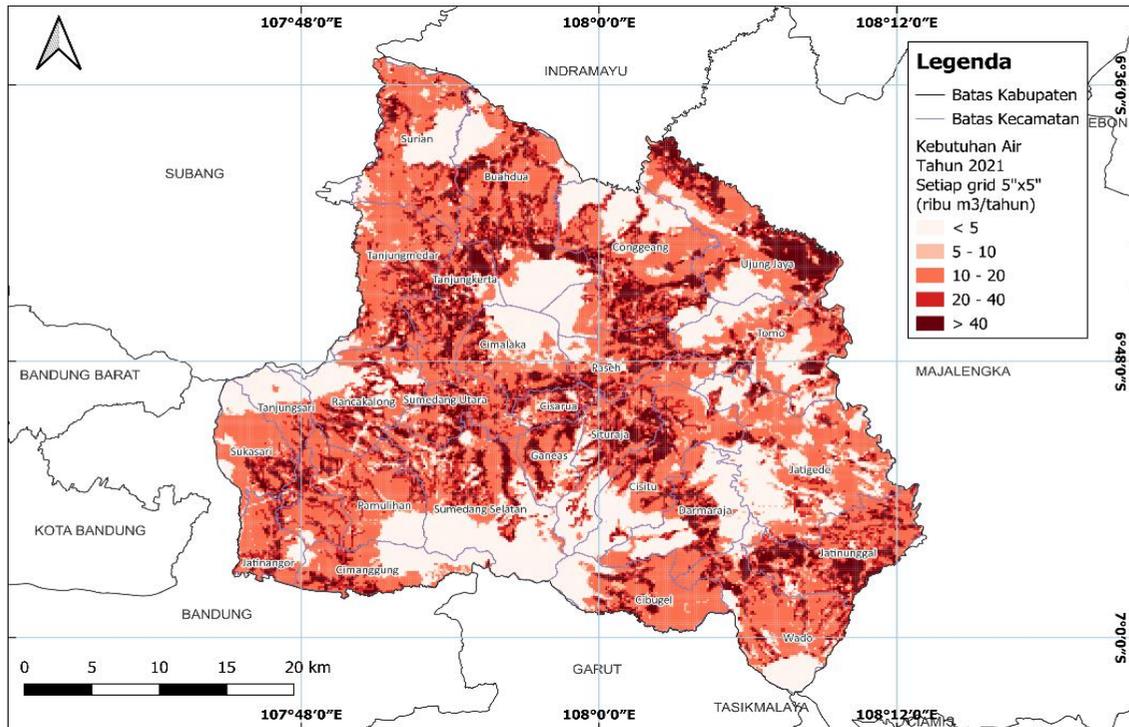
Sumber: Badan Pangan Nasional (BAPANAS), 2024

### **C. Ambang Batas dan Status DDLH Penyedia Air**

Seperti halnya penentuan status DDLH penyedia pangan, status daya dukung penyedia air bersih ditentukan berdasarkan perhitungan ambang batas penduduk dalam setiap grid 5"x5". Perhitungan ambang batas penduduk bergantung pada jumlah ketersediaan dan kebutuhan terhadap jasa lingkungan penyedia air. Dalam pemodelan ini, ambang batas dan status daya dukung penyedia air bersih dihitung berdasarkan sumber daya air permukaan saja.

Kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk penggunaan lahan. Kebutuhan domestik menggunakan acuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, yaitu sebesar 43,2 m<sup>3</sup>/kapita/Tahun. Sementara, kebutuhan air untuk penggunaan lahan yang diperhitungkan adalah kebutuhan air untuk lahan produksi seperti sawah, perkebunan, ladang, tambak, dan industri. Hasil pemodelan kebutuhan air di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 ditunjukkan pada Gambar 2.8. Pola sebaran kebutuhan air ini mengikuti pola penutup lahan, terutama yang berupa lahan pertanian atau sawah.

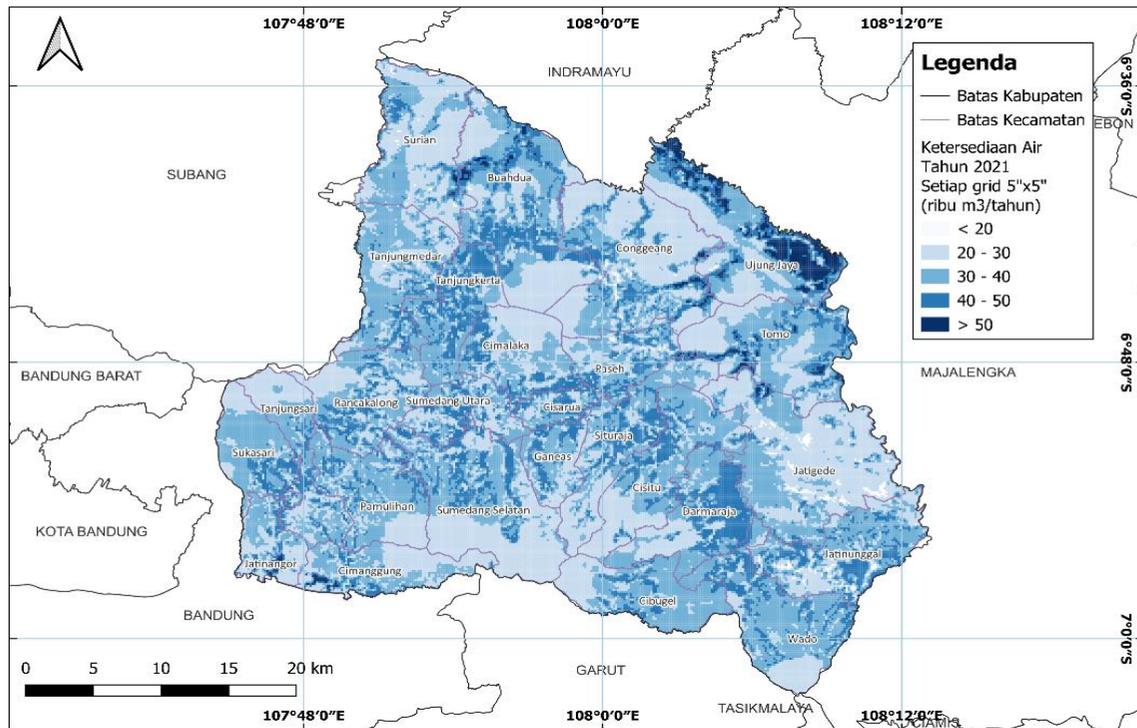
**Gambar 2.7 Peta Kebutuhan Air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Ketersediaan air dimodelkan menggunakan data jumlah ketersediaan air permukaan/air sungai pada Wilayah Sungai (WS) untuk lingkung Kabupaten Sumedang. Jumlah ketersediaan air tersebut didistribusikan pada setiap grid berdasarkan nilai IJE penyedia air sebagai bobot pendistribusiannya. Hasil model ketersediaan air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang tiap grid 5"x5" dapat dilihat pada Gambar 2.9. Ketersediaan air yang tinggi berada di beberapa titik, terutama di hutan produksi yang berada di utara Kecamatan Ujungjaya, di Kawasan konservasi yang ada di Kec. Buahdua, dan sebagian kecamatan Tomo.

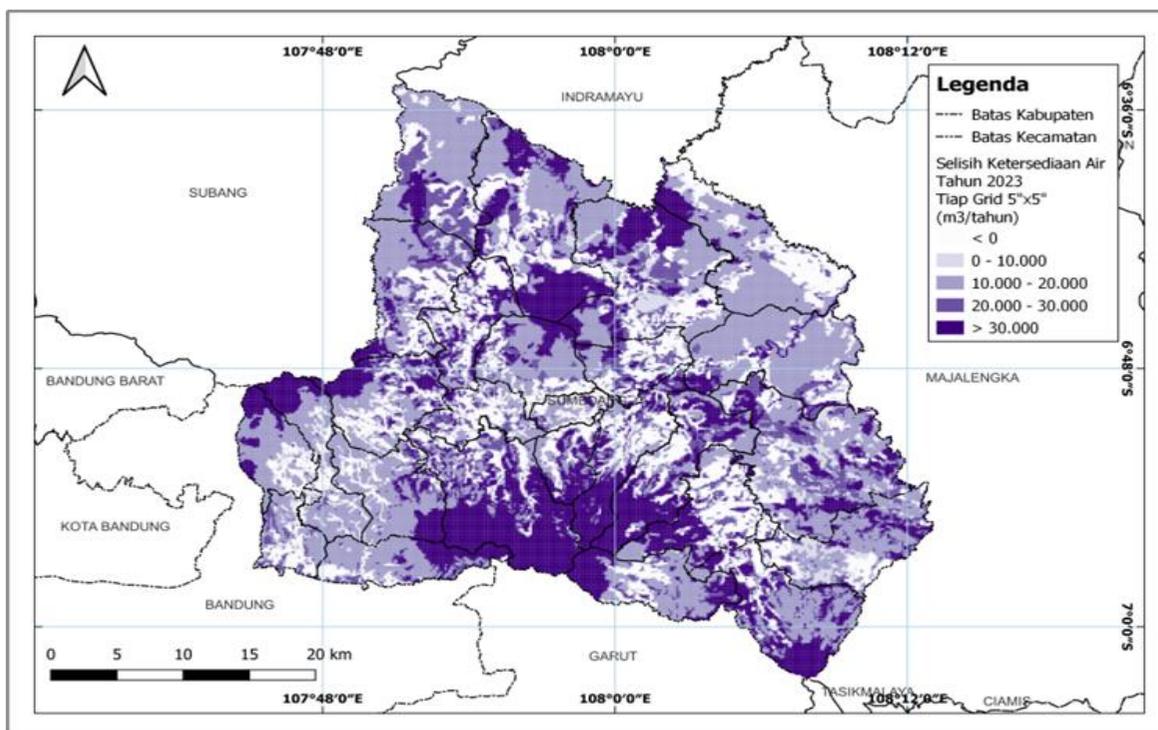
**Gambar 2.8 Peta Ketersediaan Air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Berdasarkan nilai kebutuhan dan ketersediaan air, dapat dihitung selisih ketersediaan air seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.10. Nilai ketersediaan air yang bernilai negatif artinya terjadi defisit atau jumlah ketersediaan air lebih kecil dari kebutuhannya, begitu sebaliknya. Namun, pada wilayah yang mengalami defisit tidak serta-merta terjadi kekeringan di wilayah tersebut karena model ini menggunakan konsep in situ, yang artinya sistemnya tertutup pada grid tersebut tanpa melibatkan aliran air dari dan/atau ke grid lainnya. Wilayah yang mengalami defisit air tersebut membutuhkan aliran penyediaan air dari wilayah lain di sekitarnya yang masih memiliki surplus ketersediaan air. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa wilayah yang memiliki surplus ketersediaan air tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan kondisi ekosistemnya agar dapat menjadi penopang pasokan air bagi wilayah lain yang membutuhkan.

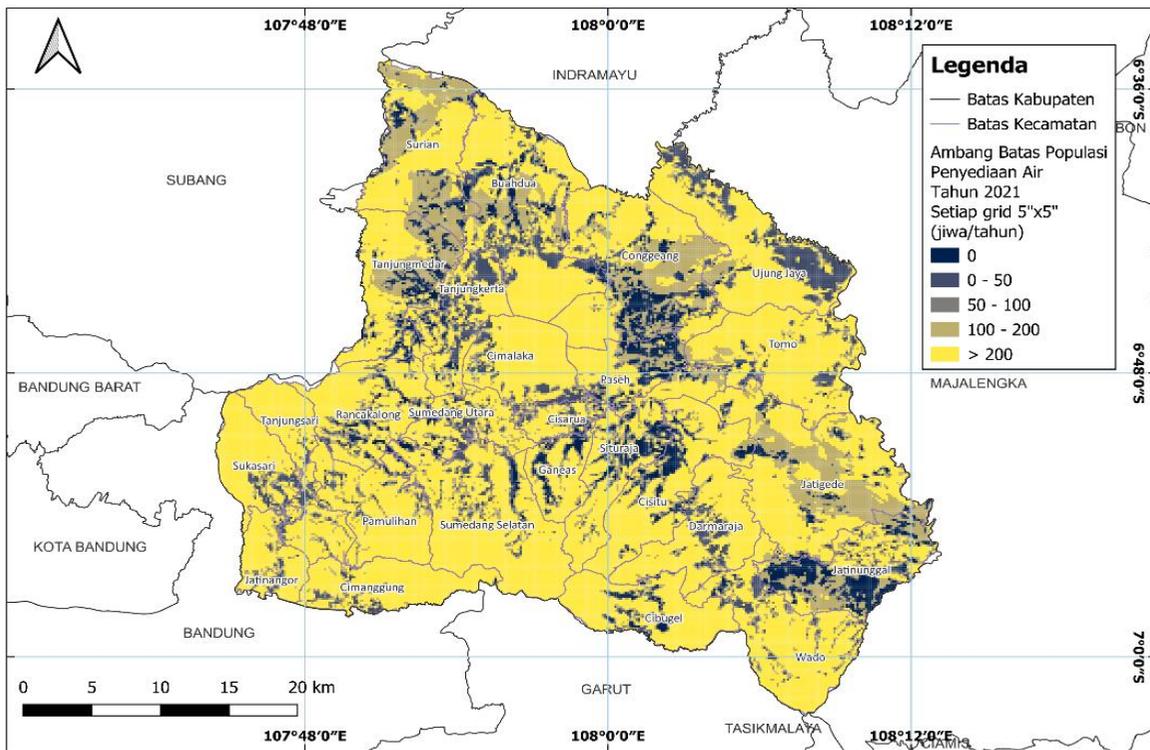
**Gambar 2.9 Peta Selisih Ketersediaan Air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Selain selisih ketersediaan air, terdapat ambang batas penduduk yang dapat dipenuhi kebutuhan airnya tiap grid (*in situ*) yang dihitung menggunakan perbandingan antara ketersediaan air (setelah dikurangi kebutuhan air untuk penggunaan lahan) dengan kebutuhan air domestik. Peta ambang batas penduduk dalam penyediaan air di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 2.10.

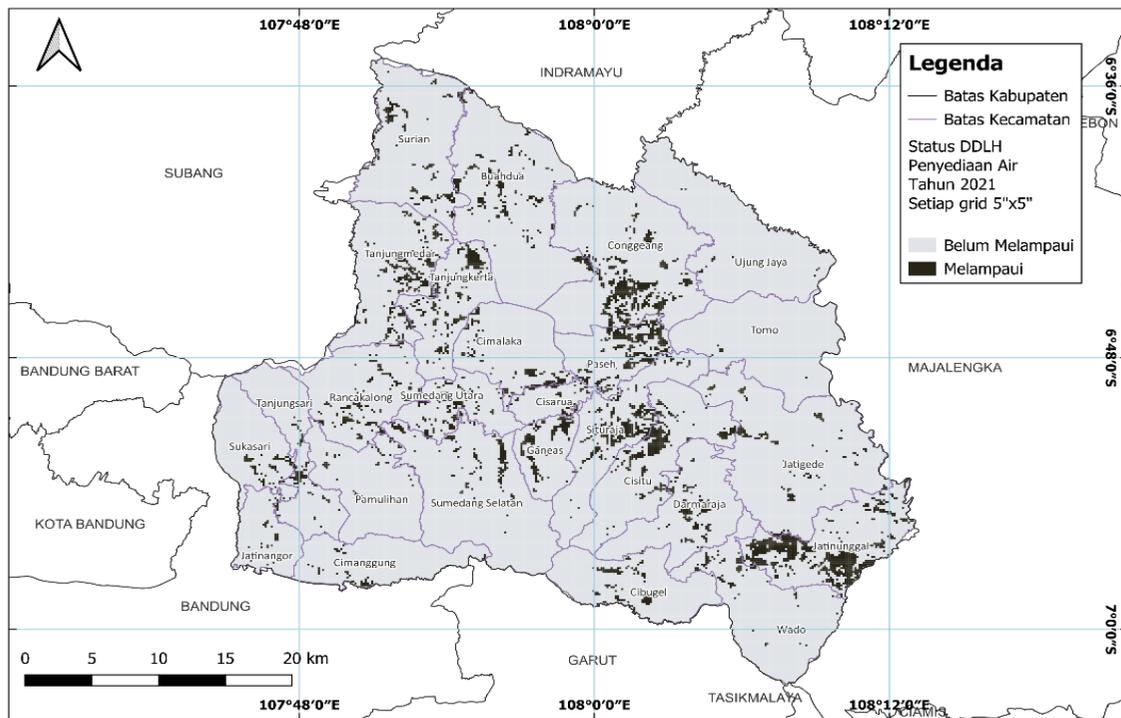
**Gambar 2.10 Peta ambang batas penduduk dalam penyediaan air Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam sistem grid 5"x5"**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

Berdasarkan peta ambang batas penduduk di atas, dapat ditentukan status daya dukung penyedia air dengan cara membandingkan jumlah ambang batas penduduknya dengan jumlah penduduk yang ada di tiap grid. Jika selisih antara ambang batas penduduk dan jumlah penduduk bernilai negatif, atau jumlah penduduknya lebih besar dari ambang batasnya, maka grid tersebut telah melampaui daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia air. Begitu juga sebaliknya. Peta status daya dukung penyedia air di Kabupaten Sumedang Tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 2.11. Dari peta tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Sumedang masih memiliki DDLH Air yang belum melampaui ambang batasnya, atau sekitar 92,8% luas wilayah Kabupaten Sumedang.

**Gambar 2.11 Status DDLH Penyedia Air Terhadap Ambang Batas Tahun 2021 di Kabupaten Sumedang dalam Sistem Grid 5”x5”**



Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

**Tabel 2.7 Proporsi status yang belum dan sudah melampaui DDLH Penyedia Air di tiap kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2021**

KECAMATAN	Belum Melampaui	Melampaui
KECAMATAN BUAHDUA	94,7%	5,3%
KECAMATAN CIBUGEL	94,5%	5,5%
KECAMATAN CIMALAKA	93,5%	6,5%
KECAMATAN CIMANGGUNG	97,4%	2,6%
KECAMATAN CISARUA	89,6%	10,4%
KECAMATAN CISITU	89,7%	10,3%
KECAMATAN CONGGEANG	89,9%	10,1%
KECAMATAN DARMARAJA	93,1%	6,9%
KECAMATAN GANEAS	85,4%	14,6%
KECAMATAN JATIGEDE	96,9%	3,1%
KECAMATAN JATINANGOR	96,9%	3,1%
KECAMATAN JATINUNGGAL	73,6%	26,4%
KECAMATAN PAMULIHAN	97,8%	2,2%
KECAMATAN PASEH	76,7%	23,3%
KECAMATAN RANCAKALONG	92,8%	7,2%
KECAMATAN SITURAJA	87,6%	12,4%
KECAMATAN SUKASARI	95,8%	4,2%
KECAMATAN SUMEDANG SELATAN	96,2%	3,8%
KECAMATAN SUMEDANG UTARA	89,3%	10,7%
KECAMATAN SURIAN	94,6%	5,4%
KECAMATAN TANJUNGGKERTA	87,0%	13,0%
KECAMATAN TANJUNGMEDAR	89,1%	10,9%
KECAMATAN TANJUNGSARI	94,8%	5,2%
KECAMATAN TOMO	99,7%	0,3%
KECAMATAN UJUNG JAYA	99,6%	0,4%
KECAMATAN WADO	97,1%	2,9%
<b>KABUPATEN SUMEDANG</b>	<b>92,8%</b>	<b>7,2%</b>

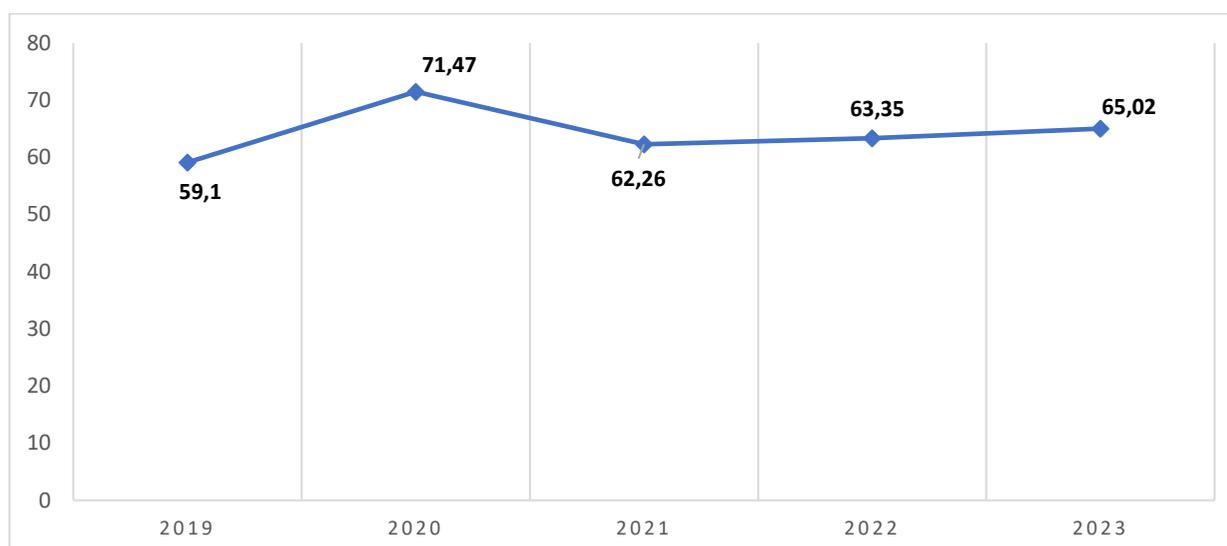
Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

#### 2.1.1.4. Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana

Pemanasan global dan perubahan iklim sampai sekarang masih menjadi permasalahan utama yang harus diperhatikan karena dapat memberikan dampak pada berbagai sektor. Pada sektor pertanian perubahan iklim akan mempengaruhi pola tanam, menurunkan hasil tanaman, mengubah intensitas tanam, tingkat serangan hama penyakit dan lain-lain, dan lain sebagainya (DLH, 2019).

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, berkurangnya luasan hutan, belum memadainya saluran pengendali banjir dan pengelolaan sampah, peningkatan bangunan yang berpotensi mengalami kerusakan dengan runtuh yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa, penataan tata ruang wilayah yang belum memperhatikan risiko iklim dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana akan menyebabkan tingkat kerentanan semakin tinggi. Kerentanan (*vulnerability*) adalah kondisi yang ditentukan berdasarkan faktor atau proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang meningkatkan kerawanan (*susceptibility*) suatu komunitas untuk terkena dampak bahaya (DLH, 2019). Semakin tinggi tingkat kerentanan maka akan berisiko pada semakin tingginya potensi dampak yang akan ditimbulkan oleh perubahan iklim.

**Grafik 2.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023**



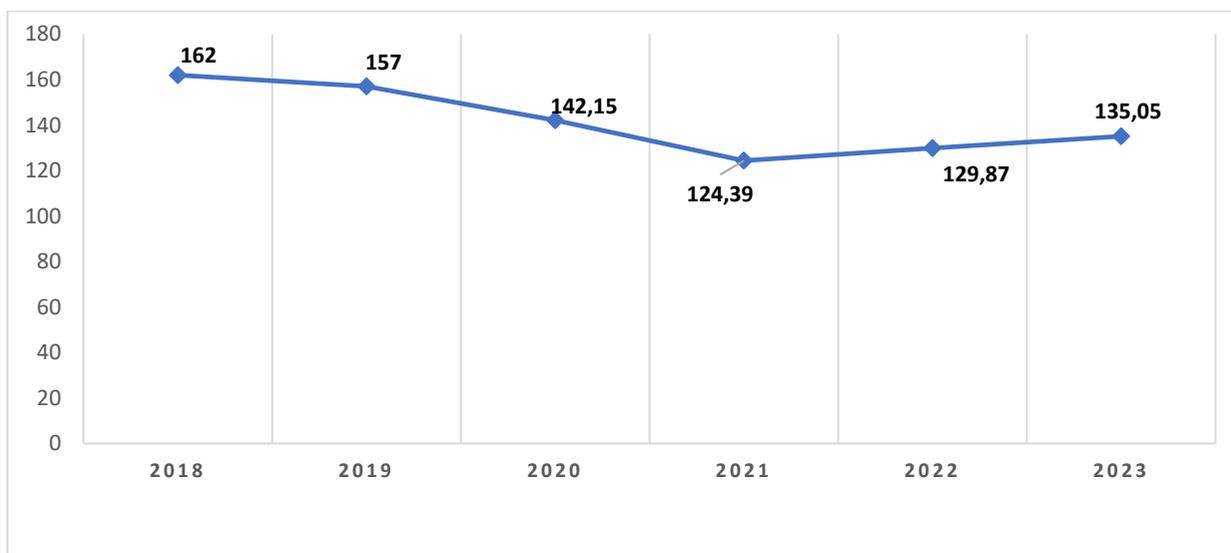
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang (2024)

Pengurangan risiko dan dampak, baik untuk perubahan iklim atau bencana pada umumnya, dapat dilakukan dengan melakukan kajian terkait potensi bahaya, tingkat kerentanan, dan/atau kapasitas adaptasi suatu

wilayah. Seperti yang dilakukan oleh BNPB di mana membahas terkait Kajian kerentanan yang dapat diperoleh pada portal InaRISK dengan keterangan bahwa Tahun dasar yang digunakan pada kajian tersebut adalah Tahun 2023, serta divisualisasikan per Kecamatan.

Kabupaten Sumedang termasuk wilayah dengan potensi bahaya bencana alam. Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, longsor, kekeringan, cuaca ekstrim, banjir bandang, angin puting beliung, dan gempa bumi. Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi (kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna lahan, morfologi, dan kegempaan.

**Grafik 2.8 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023**



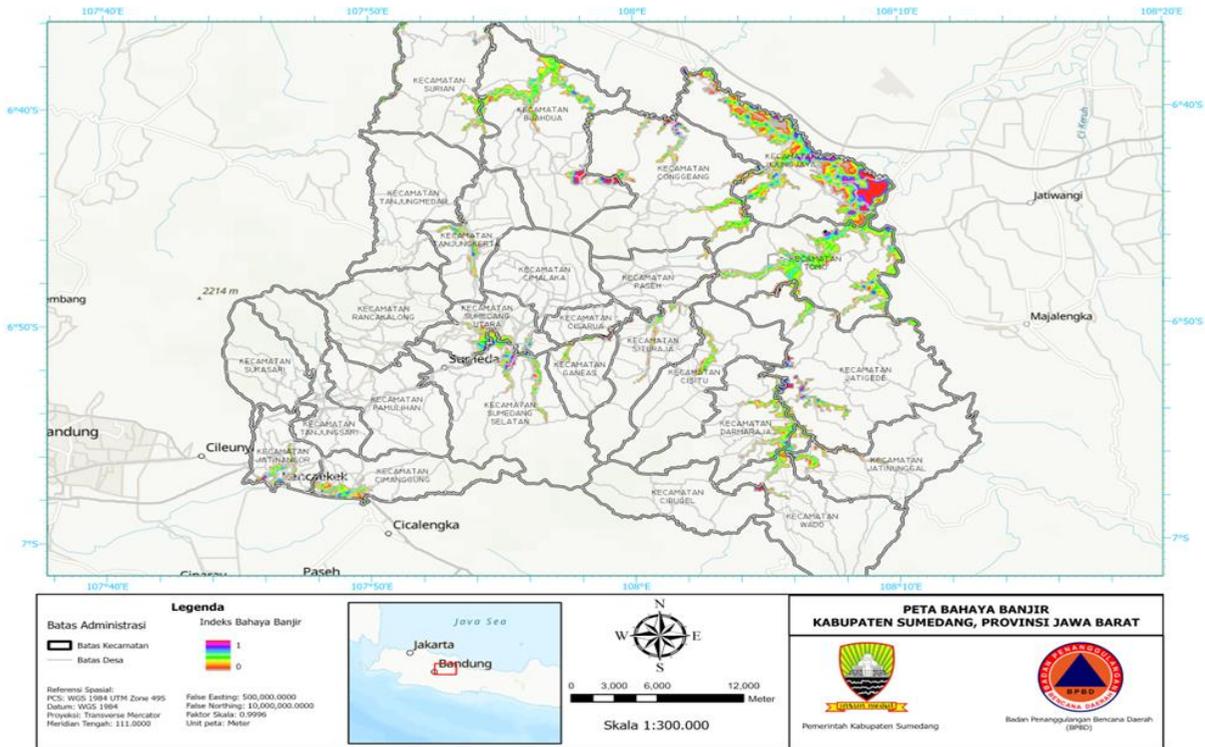
Sumber: BPBD Kabupaten Sumedang (2024)

Beberapa potensi kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) komponen yaitu komponen sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan. Dari analisis keempat komponen tersebut dapat digambarkan kerentanan bencana di Kabupaten Sumedang, antara lain:

#### 1. Kerentanan Bencana Banjir

Kerentanan banjir cenderung tinggi di wilayah pinggiran sungai utama, terutama Kecamatan Sumedang Utara dan Kecamatan Ujungjaya. Di wilayah bagian utara Kabupaten Sumedang berpotensi mengalami bencana banjir lebih tinggi dikarenakan wilayah tersebut merupakan pesisir sungai.

**Gambar 2.12 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Banjir di Kabupaten Sumedang**

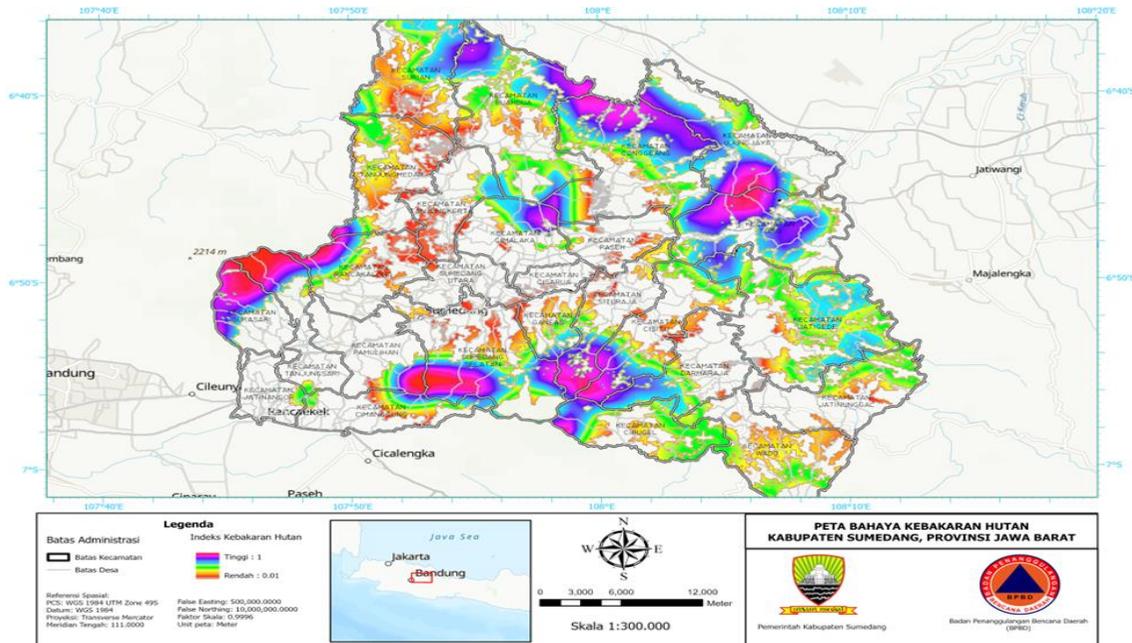


Sumber. Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

## 2. Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten Sumedang terdapat 4 (empat) area yang memiliki tingkat kerentanan kebakaran hutan yang tinggi yang tersebar secara merata di seluruh area Kabupaten Sumedang. Tingkat kerentanan bencana dibedakan berdasarkan klasifikasi warna, dan wilayah dengan tingkat kerentanan kebakaran hutan dan kekeringan tinggi ditunjukkan dengan warna merah keunguan sesuai dengan gambar berikut.

**Gambar 2.13 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sumedang**

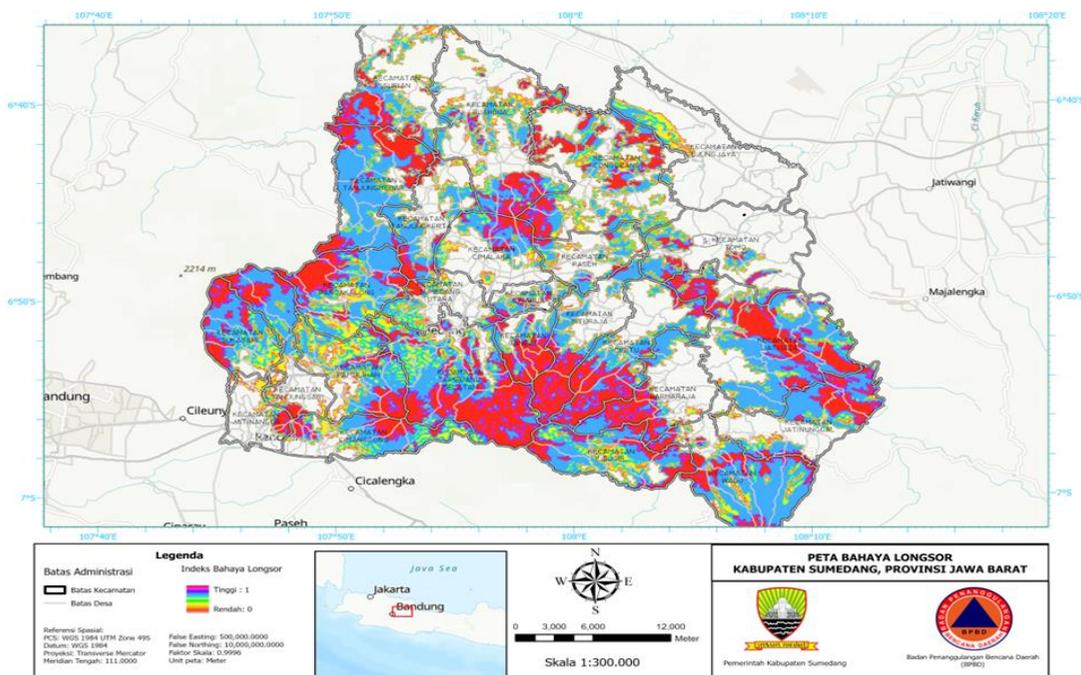


Sumber. Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

### 3. Kerentanan Bencana Tanah Longsor

Secara keseluruhan Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor dari klasifikasi sedang sampai tinggi. Area yang memiliki tingkat kerentanan bencana tanah longsor tinggi paling luas terdapat di bagian selatan wilayah Sumedang, sebagaimana terlihat dari gambar berikut.

**Gambar 2.14 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Sumedang**



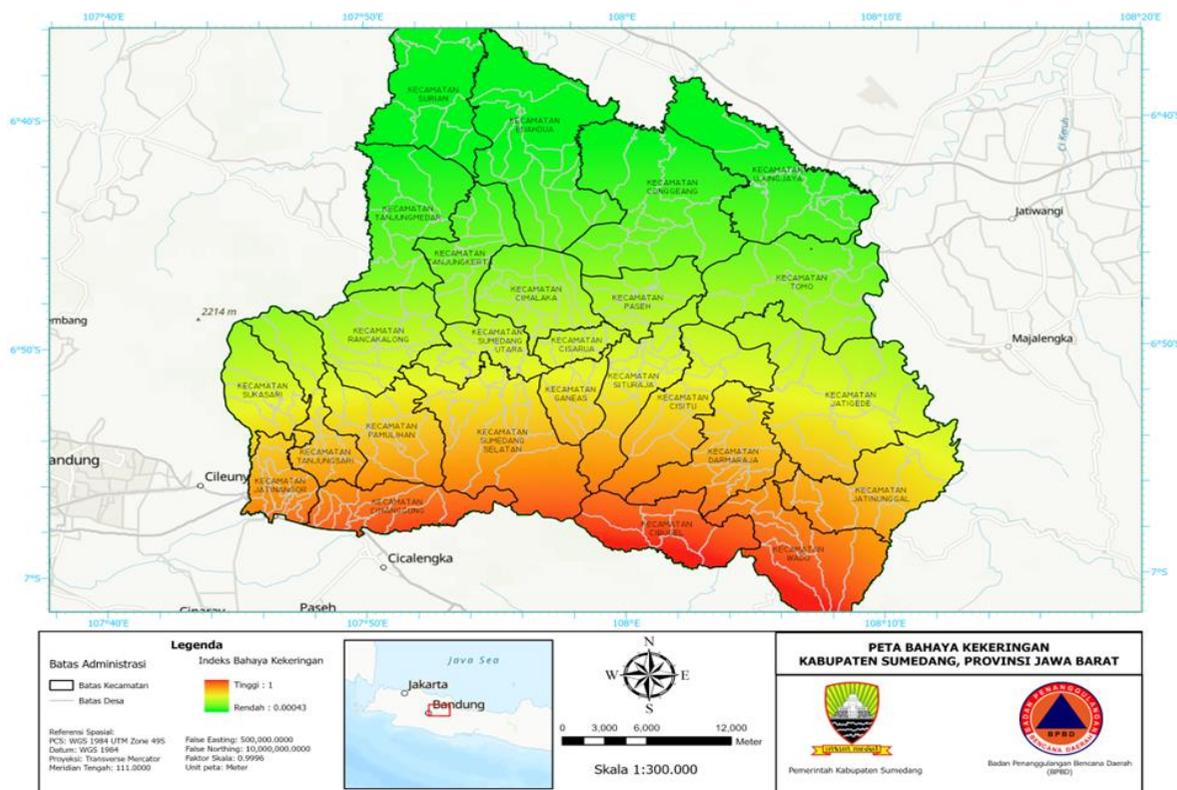
Sumber. Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

#### 4. Kerentanan Bencana Kekeringan

Berdasarkan data BNPB visualisasi untuk menggambarkan tingkat kekeringan di Kabupaten Sumedang terdiri dari 4 (empat) warna yaitu hijau untuk kerentanan kekeringan rendah, kuning untuk kerentanan kekeringan sedang, oranye untuk kerentanan kekeringan sedang menuju tinggi dan warna merah untuk menggambarkan tingkat kerentanan kekeringan tinggi.

Wilayah Kabupaten Sumedang dengan tingkat bencana kekeringan sedang hingga tinggi berada di wilayah bagian selatan Kabupaten Sumedang, seperti yang ditunjukkan gambar dibawah ini.

**Gambar 2.15 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Kekeringan di Kabupaten Sumedang**

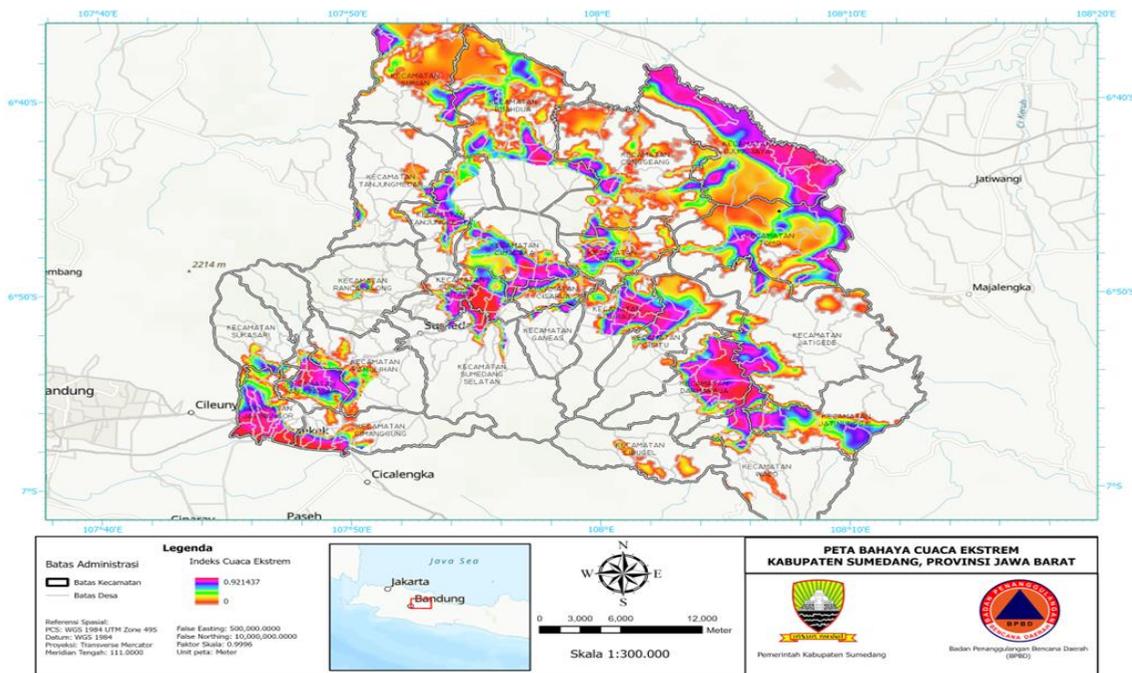


Sumber: Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

#### 5. Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem

Tingkat klasifikasi kerentanan cuaca ekstrem memiliki 7 (tujuh) tingkatan, dan Kabupaten Sumedang memiliki kerentanan terhadap bencana cuaca ekstrem dengan skala relatif tinggi hampir di seluruh wilayahnya seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut.

**Gambar 2.16 Peta Wilayah Kerentanan Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Sumedang**



Sumber. Laporan KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045

## 6. Kerentanan Bencana Gempa Bumi

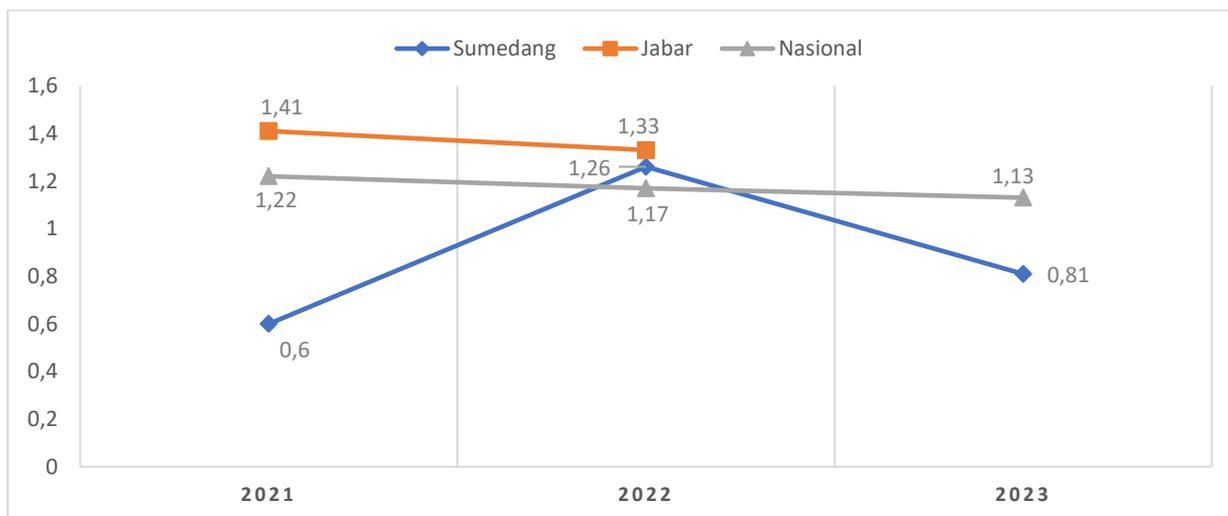
Kabupaten Sumedang saat ini menjadi daerah yang rawan terhadap bencana Gempa Bumi. Kejadian gempa Bumi yang menimbulkan kerusakan terjadi pada awal Tahun baru 2024 dengan dampak kerusakan yang cukup signifikan. Seiring ditemukannya sesar baru di wilayah kabupaten Sumedang menyebabkan Kabupaten Sumedang cukup rentan terhadap Bencana Gempa Bumi.

### 2.1.1.5. Aspek Demografi

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan karena perannya yang dominan dalam pencapaian tujuan pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk perempuan.

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Kabupaten Sumedang selama 3 Tahun terakhir cukup fluktuatif. LPP Tahun 2021 tercatat di bawah 1% yaitu 0,60% dan pada Tahun 2022 meningkat menjadi 1,26%. Sementara LPP Tahun 2023 sebesar 0,81%. LPP Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berada di bawah 1% dan berada di bawah LPP Nasional.

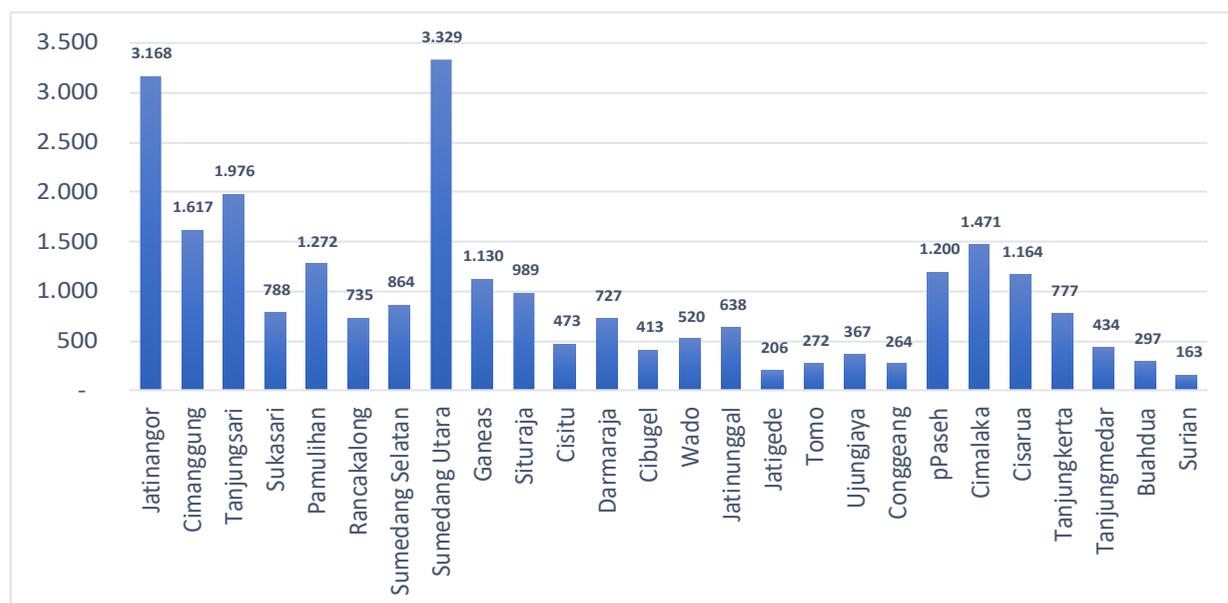
**Grafik 2.9 Perbandingan LPP Kabupaten Sumedang Dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 rata-rata 756 jiwa/km<sup>2</sup> dengan wilayah terpadat terdapat di Kecamatan Sumedang Utara dengan angka kepadatan 3.329 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Surian dengan angka 163 jiwa/km<sup>2</sup>. Berikut adalah data lengkap kepadatan penduduk di Kabupaten Sumedang per wilayah.

**Grafik 2.10 Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**



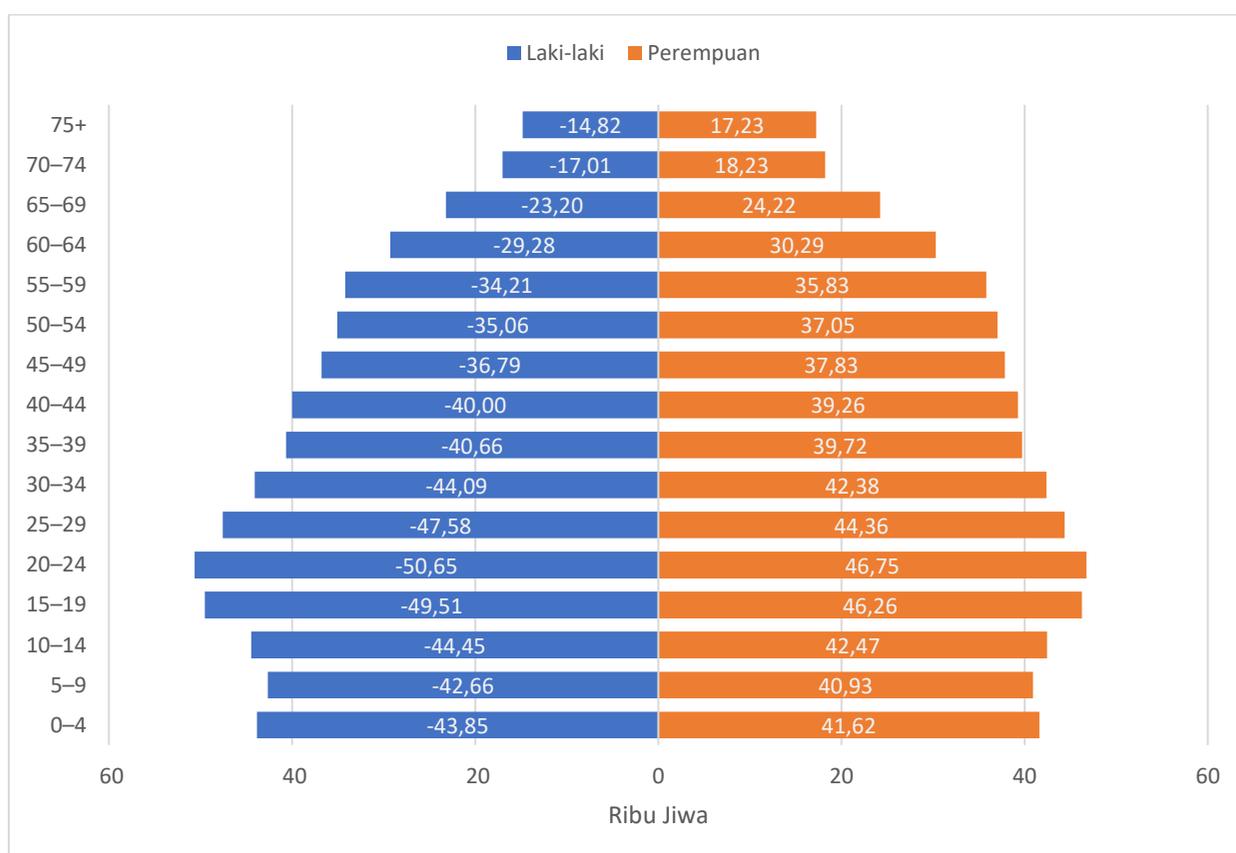
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (2023)

Jika berdasarkan jenis kelamin per usia, maka Kabupaten Sumedang mengalami bonus demografi, karena besarnya jumlah usia produktif (15-64 Tahun) dibandingkan dengan jumlah usia non produktif (usia tua).

Berdasarkan data, jumlah usia produktif di Kabupaten Sumedang sebanyak 807.560 jiwa, sementara kelompok usia 0-14 Tahun sebanyak 255.980 jiwa dan kelompok usia diatas 65 Tahun sebanyak 114.720 jiwa.

Secara lebih detail komposisi penduduk Kabupaten Sumedang seperti yang tersaji pada grafik dibawah ini.

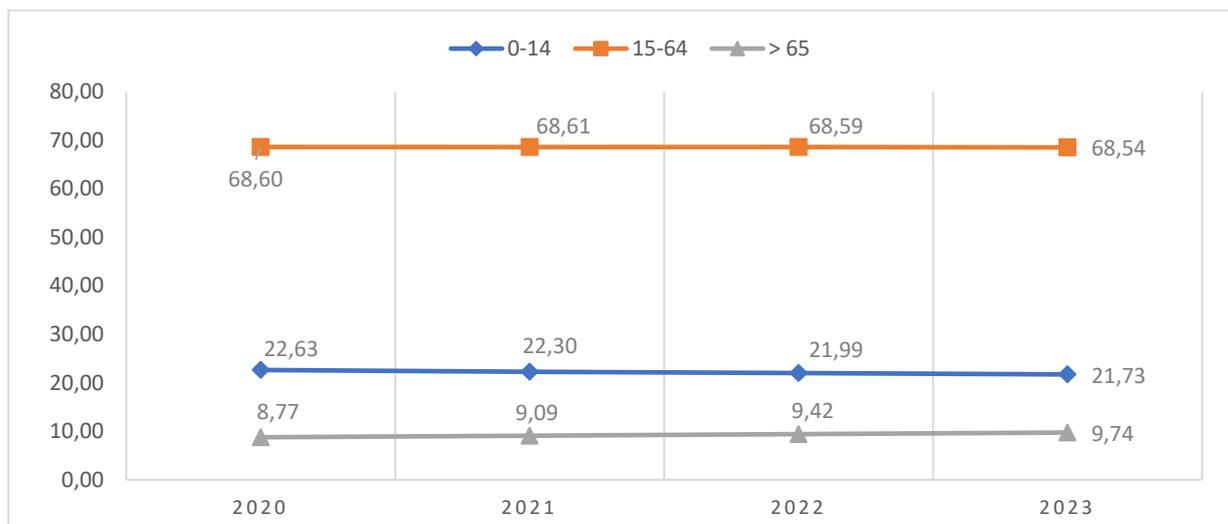
**Grafik 2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 (Ribu)**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2023)

Dengan proporsi bonus demografi seperti ini menjadi potensi bagi Kabupaten Sumedang, seperti (1) membuka peluang tenaga kerja; dan (2) perkembangan ekonomi. Namun jika bonus demografi gagal dimanfaatkan maka akan berdampak buruk, seperti (1) meningkatnya pengangguran; (2) ketidakseimbangan kualitas dan kuantitas SDM; dan (3) *aging population* atau peningkatan jumlah angka lansia yang tinggi dan mendominasi masyarakat dimana pada periode 2020-2023 jumlah usia di atas 65 Tahun trend nya terus meningkat.

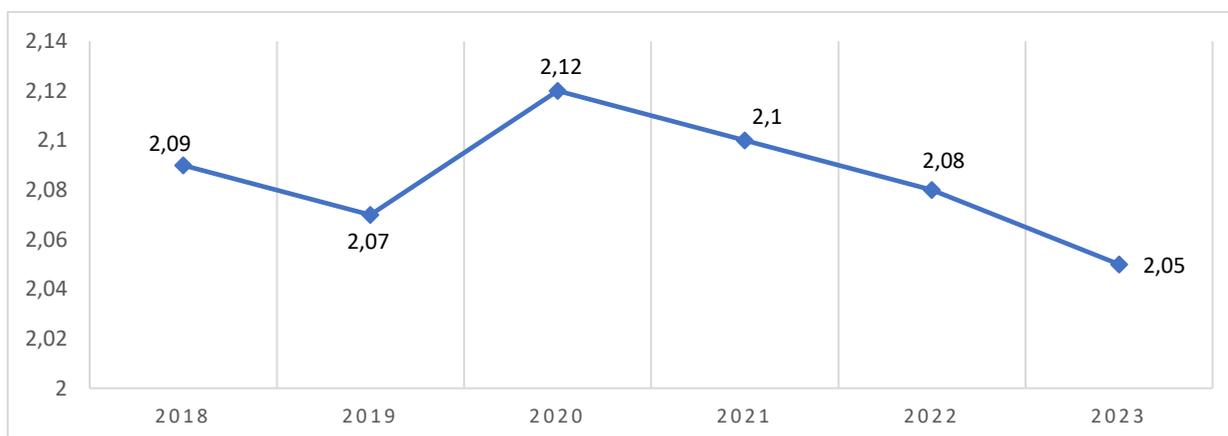
**Grafik 2.12 Persentase Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur Tahun 2020-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, diolah (2023)

Upaya pengendalian penduduk di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari angka *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita usia subur (15-49 Tahun). Angka kelahiran total (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya, apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Semakin rendah angka ini menunjukkan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk. TFR di bawah 2,1 dapat mengindikasikan bahwa populasi suatu wilayah cenderung menurun dalam jangka panjang (tanpa migrasi masuk), sementara TFR di atas 2,1 menunjukkan potensi pertumbuhan populasi.

**Grafik 2.13 TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023**



Sumber: DPPKBP3A Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan tabel diatas, kelahiran total di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah TFR Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 2,05. Target yang

ditetapkan pada Tahun 2023 untuk Kabupaten Sumedang adalah 2,04 sehingga capaian kinerja Tahun 2023 terhadap target nasional sudah mencapai 99,51%. Manfaat tercapainya TFR untuk masyarakat salah satunya adalah menunjang pencapaian bonus demografi dengan terciptanya SDM yang berkualitas, kecukupan pendidikan, dan kesehatan.

Upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang. Modernisasi yang semakin menguat di Tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya apresiasi terhadap budaya lokal. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, serta pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dan lembaga kebudayaan.

Di Kabupaten Sumedang saat ini terdapat 25 lembaga adat desa yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Sumedang. Keberadaan masyarakat adat ini menjadi kekayaan budaya tersendiri di Kabupaten Sumedang sekaligus sebagai salah satu pilar yang menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.8 Sebaran Lembaga Adat Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

No	Lembaga Adat Desa	Desa	Kecamatan
1	Kampung Pawenang	Pawenang	Jatinunggal
2	Kampung Cikuleu & Ujungjaya	Sukarjaya	Ujungjaya
3	Kampung Ujungjaya	Ujungjaya	Ujungjaya
4	Kampung Cibuluh	Cibuluh	Ujungjaya
5	Kampung Ujungjaya	Ujungjaya	Ujungjaya
6	Kampung Dangiag Jagakerti	Cipelang	Ujungjaya
7	Kampung Rancakalong	Rancakalong	Rancakalong
8	Kampung Cijere	Nagarawangi	Rancakalong
9	Kampung Cibunar	Cibunar	Rancakalong
10	Kampung Pasirbiru	Pasirbiru	Rancakalong
11	Kampung Pamekaran	Pamekaran	Rancakalong
12	Kampung Cigumentong	Sindulang	Cimanggung
13	Kampung Sekarwangi	Sekarwangi	Buahdua
14	Kampung Musaraka/kampung adat Karedok	Karedok	Jatigede
15	Kampung Mekarasih	Mekarasih	Jatigede
16	Kampung Ungkal	Ungkal	Conggeang
17	Kampung Cibubuan	Cibubuan	Conggeang
18	Kampung Padasih	Padasih	Conggeang
19	Kampung Congeangkulon	Congeangkulon	Conggeang
20	Kampung Cijolang, Citengah, Cisoka	Citengah	Sumedang Selatan
21	Kampung Cihawing, Karanganyar	Karangpakuan	Darmaraja
22	Kampung Kutamaya	Padasuka	Sumnedang Utara
23	Kampung Cijeler, Cisambeng, Cibogor, Cigumi	Cijeler	Situraja
24	Kampung Pajagan, Cicau	Pajagan	Cisitu
25	Kampung Cinangerang	Cinangerang	Pamulihan

Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2024

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

### **2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi**

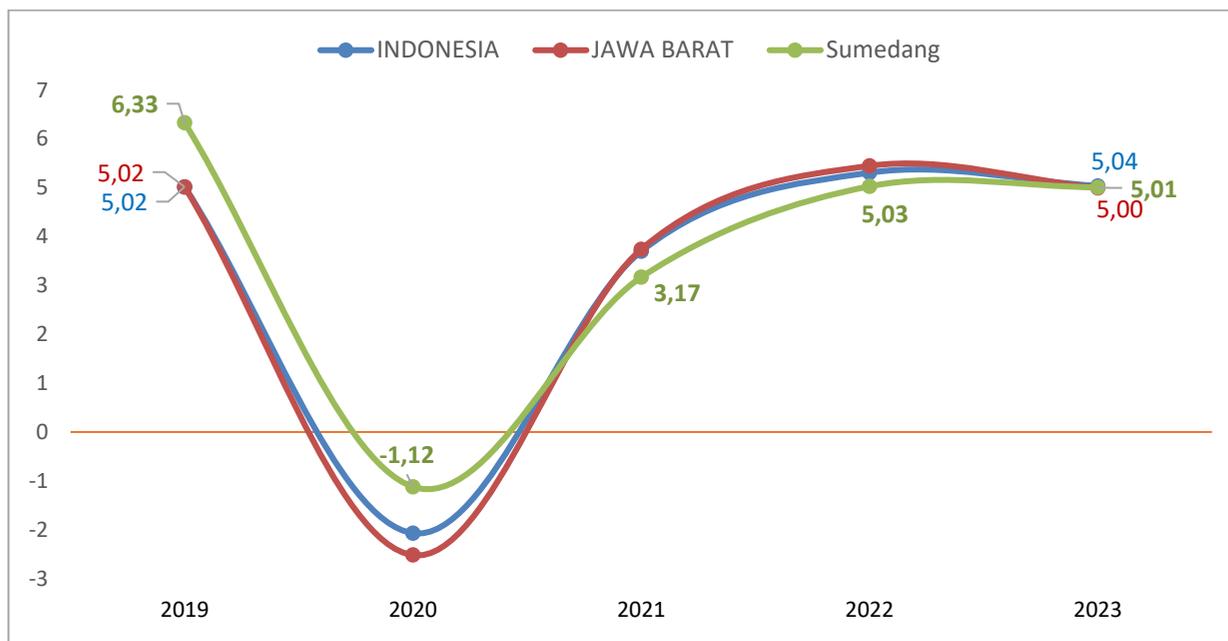
Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

Pasca COVID-19 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang Kembali menunjukkan perkembangan yang positif. Setelah mengalami perkembangan yang negatif pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 ekonomi di Kabupaten Sumedang tumbuh 2,97% dan pada Tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 5,03%. Memasuki Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang mencapai 5,01%, mengalami perlambatan namun hal ini secara umum terjadi pula di Jawa Barat dan nasional.

Banyak faktor yang memicu terjadi perlambatan ekonomi tersebut, diantaranya adalah ketidakpastian ekonomi global atau perlambatan pertumbuhan di beberapa negara mitra dagang Indonesia. Konflik negara lain seperti perang Rusia dan Ukraina juga mempengaruhi pemenuhan komoditas gandum yang menjadi bahan baku utama mie dan roti sebagai makanan pokok selain beras.

Fenomena perubahan iklim el nino di 2023 juga turut meyumbang perlambatan di sektor pertanian. El nino dapat menyebabkan kekeringan dan cuaca yang tidak teratur, yang dapat mengganggu produksi tanaman pangan dan komoditas pertanian lainnya. Ini dapat mengurangi produksi pertanian, menyebabkan peningkatan harga pangan, dan mengurangi pendapatan petani serta merosotnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi.

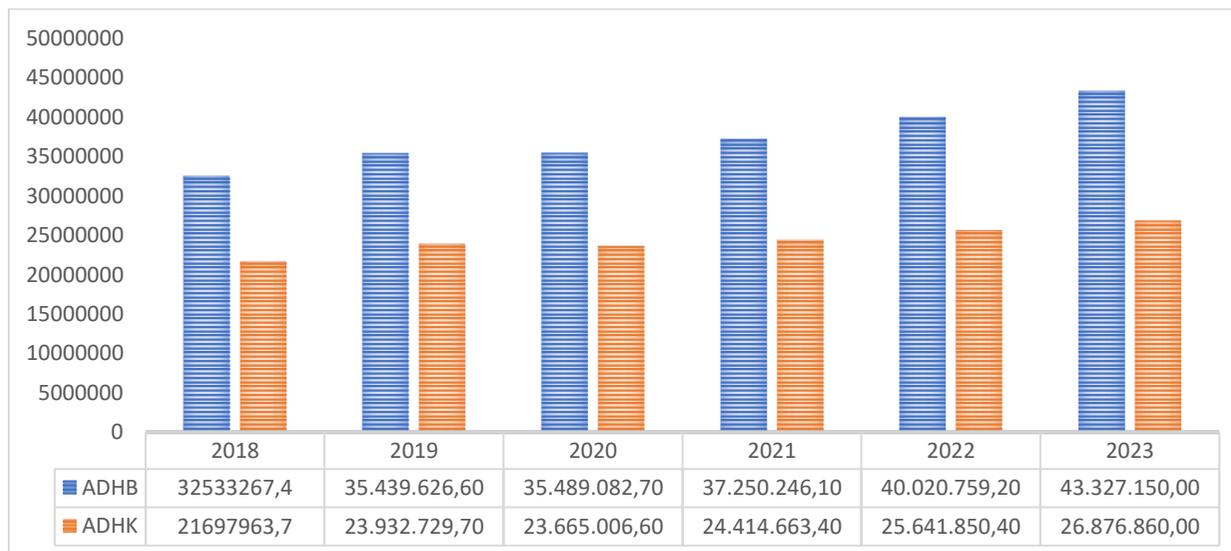
**Grafik 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan PDRB Kabupaten Sumedang atas dasar harga berlaku dan harga konstan sebagaimana tersaji dalam Grafik 2.15 berikut.

**Grafik 2.15 Produk Domestik Regional Bruto ADHK dan ADHB Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 (Dalam Juta)**



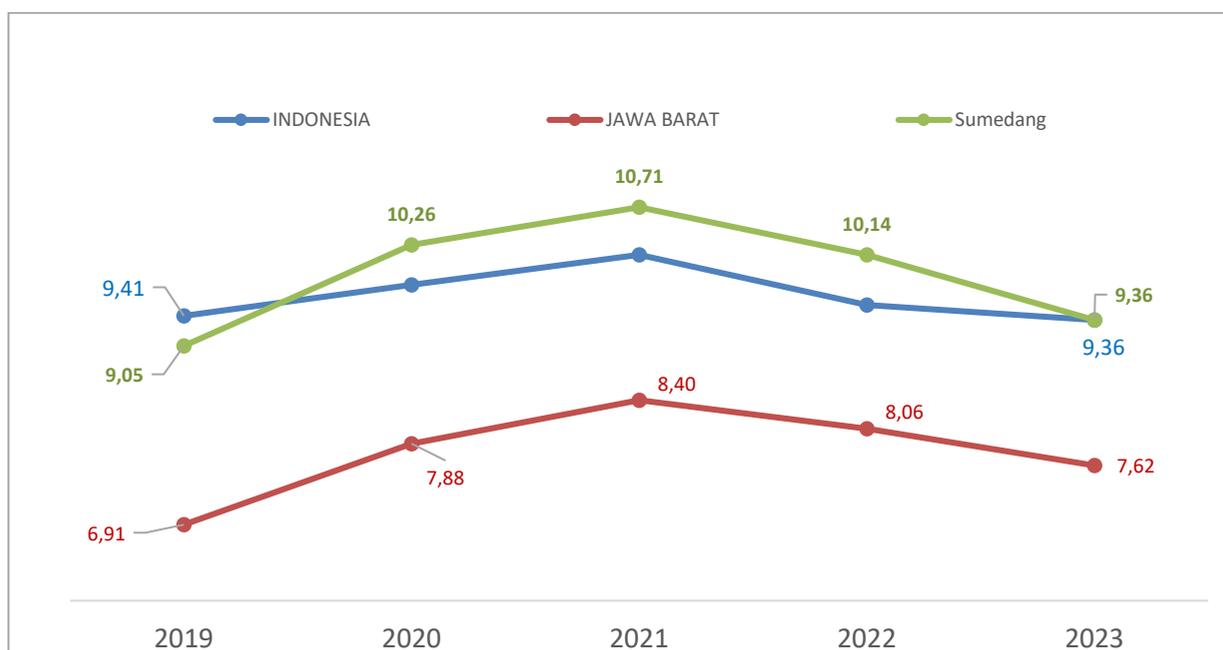
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Sumedang pada periode tahun 2018-2023 menunjukkan tren yang terus meningkat, walaupun kenaikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 tidak signifikan, bahkan berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) PDRB

tahun 2020 cenderung menurun disbanding tahun 2019. Hal ini tidak terlepas salah satunya akibat adanya pandemi COVID-19.

Perkembangan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang menunjukkan trend menurun pada dua Tahun terakhir Dimana sebelumnya mengalami kenaikan salah satunya akibat dampak Pandemi COVID-19 pada periode Tahun 2020-2021.

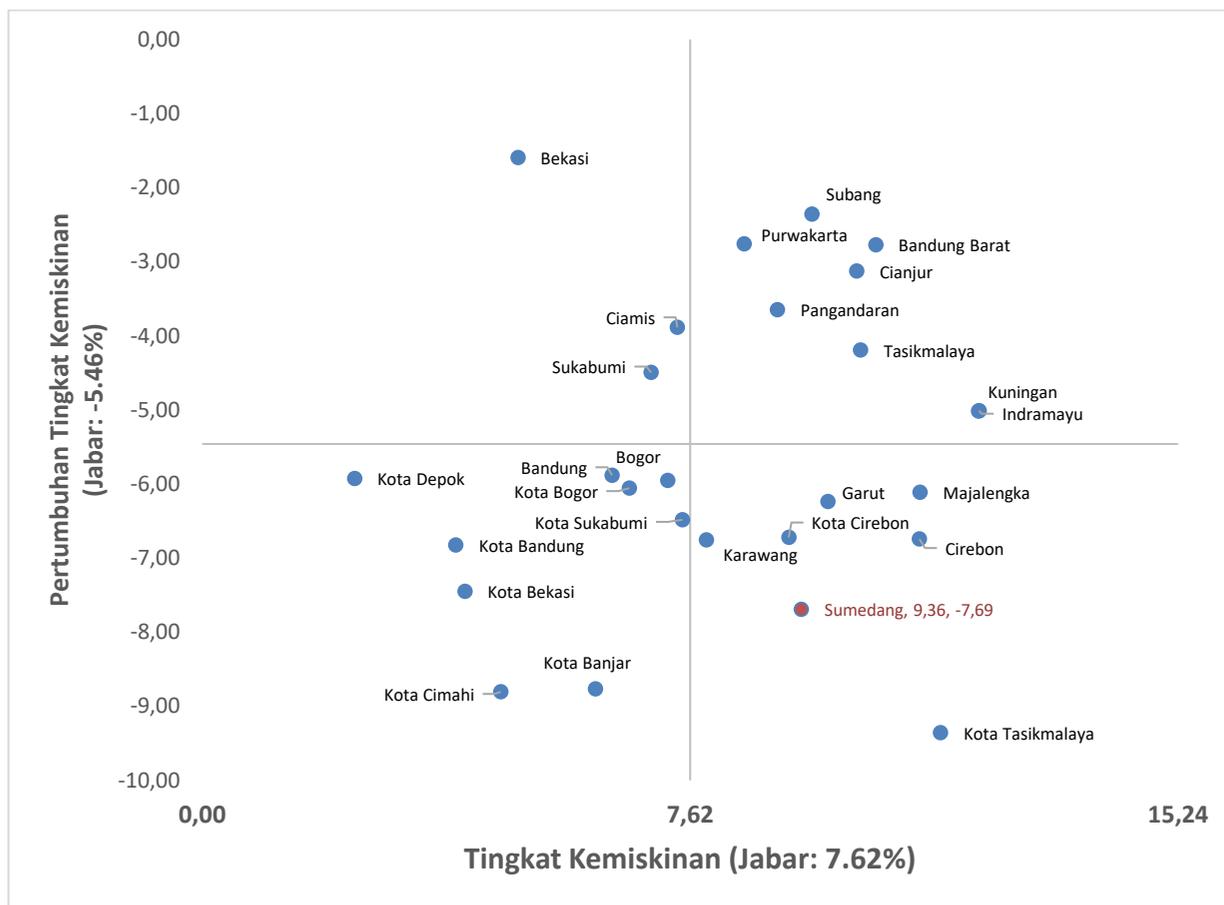
**Grafik 2.16 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perbandingan Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

**Gambar 2.17 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota dan Pertumbuhannya di Jawa Barat Tahun 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

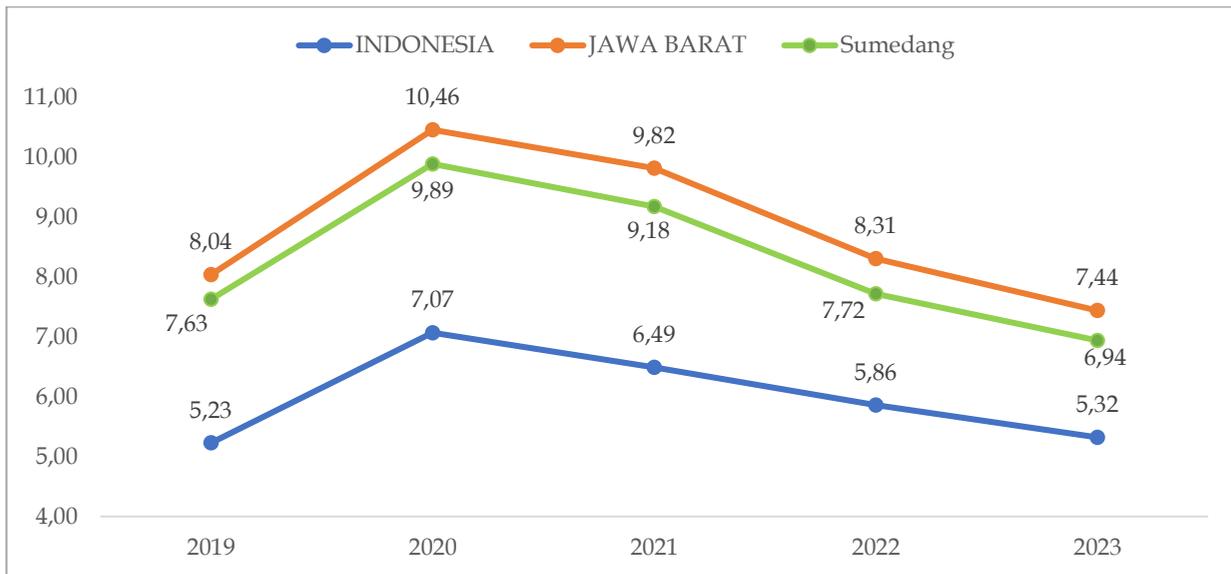
Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang di Tahun 2023 sebesar 9,36% masih berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun progress penurunannya lebih cepat dari Jawa Barat, dan jika dilihat dari gap penurunan (0,78 persen poin) berada di peringkat 3 terbaik di Jawa Barat.

Penurunan tingkat kemiskinan ini berbanding lurus dengan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin ekstrim yang ada di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan Surat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B-464/32/D-I/KPS.01.00/02/2024 tentang Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrim Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 bahwa jumlah penduduk miskin ekstrim di Kabupaten Sumedang tahun 2023 sebanyak 6.370 orang (0,53%) menurun dibanding tahun 2022 yang berjumlah 36.820 orang (3,11%), atau berkurang 30.450 orang.

Keberhasilan dalam penurunan angka kemiskinan tidak terlepas dari semakin efektifnya berbagai program penanganan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai intervensi seperti layanan kependudukan, Pelayanan Program Perlindungan Sosial, fasilitasi bantuan sosial dan fasilitasi pekerjaan.

Perkembangan angka pengangguran di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren yang terus menuru pada tiga Tahun terakhir.

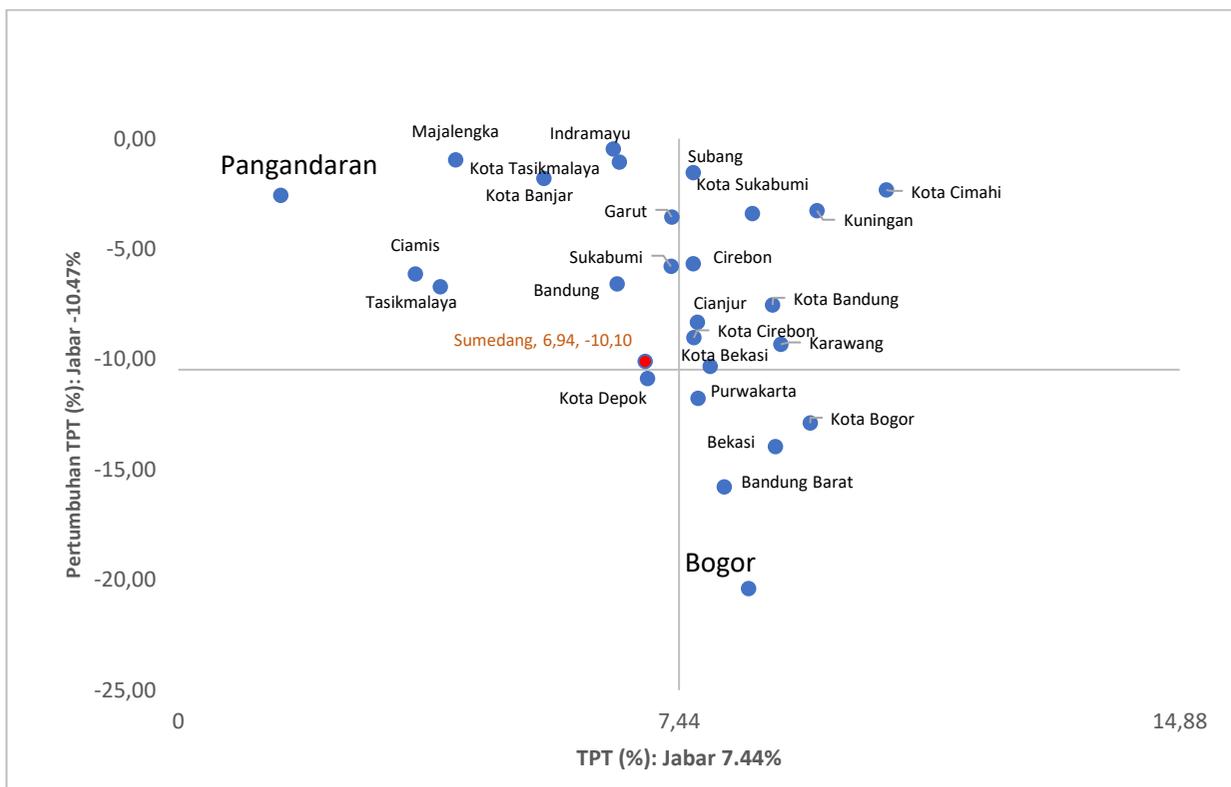
**Grafik 2.17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (diolah)

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sumedang dengan kabupaten/kota lain di Jawa Barat sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

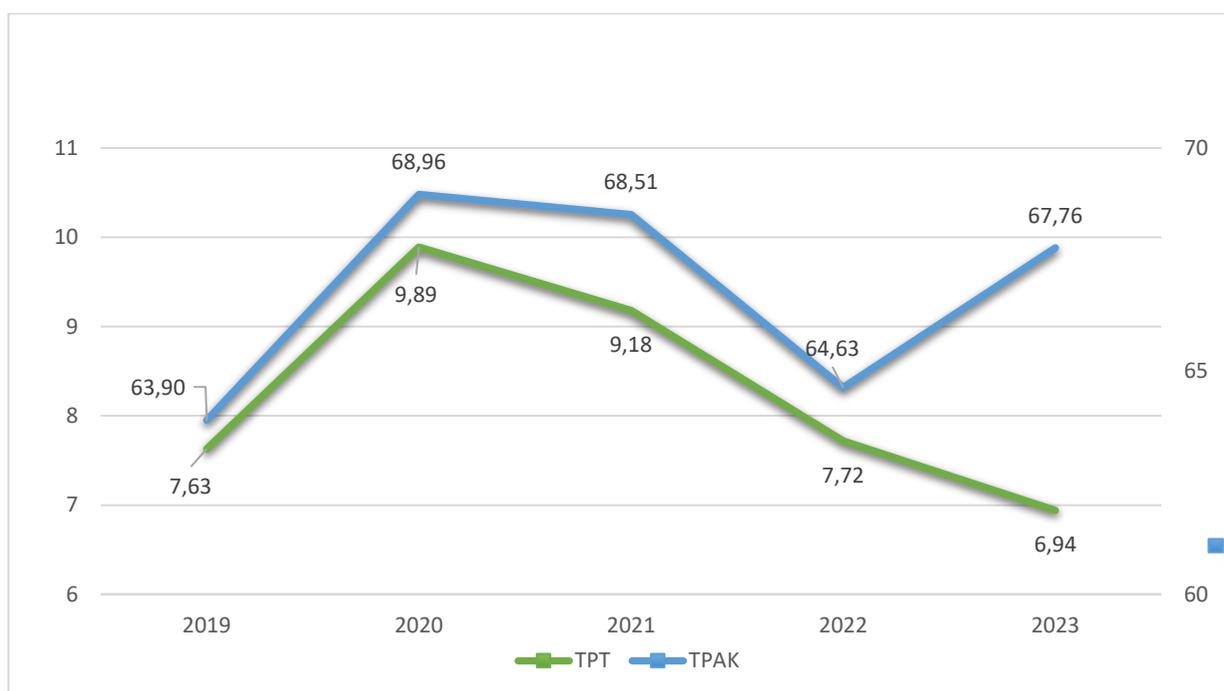
**Gambar 2.18 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Pertumbuhannya Tahun 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Tahun 2023, kondisi ketenagakerjaan lebih baik, ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai penurunan pengangguran, artinya sudah banyak Angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi COVID-19, bahkan TPT 2023 jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi.

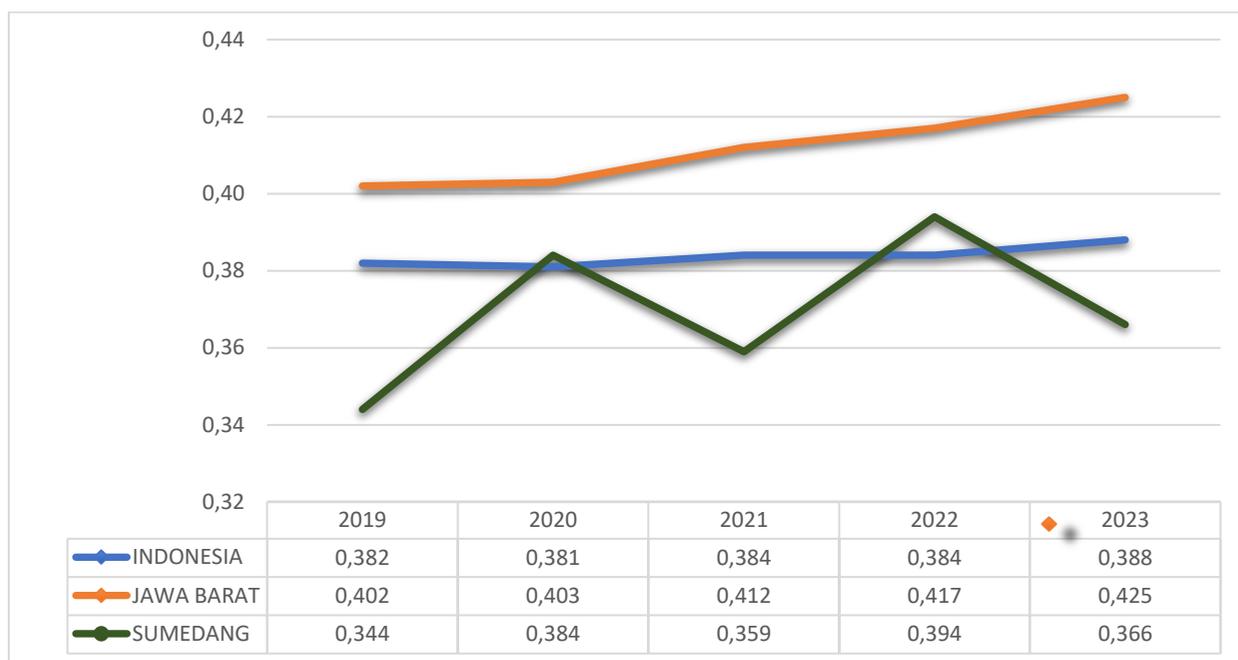
**Grafik 2.18 Hubungan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumedang**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi. Hal yang sama juga terlihat di level nasional namun tidak begitu signifikan. Pada saat Nasional dan Jawa Barat ketimpangan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 menunjukkan tren meningkat Kabupaten Sumedang justru menunjukkan penurunan. Pola tren data ketimpangan di Sumedang ternyata relatif sejalan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan.

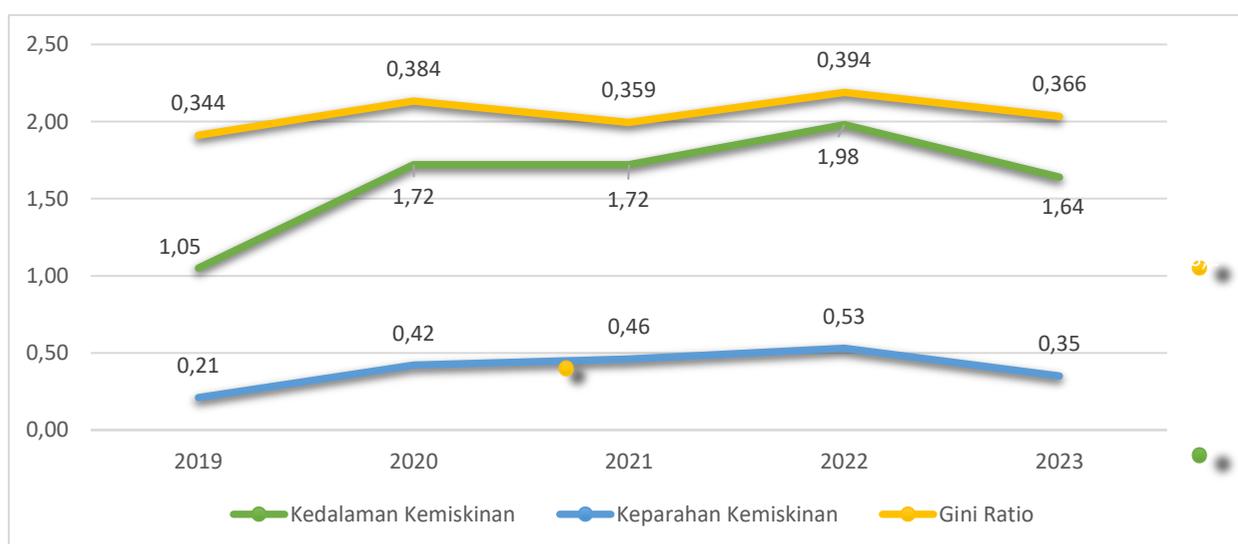
**Grafik 2.19 Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Meskipun ada peningkatan ketimpangan pada beberapa tahun tertentu, penurunan signifikan pada tahun 2023 menunjukkan upaya yang berhasil dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Upaya berkelanjutan dalam menciptakan lapangan kerja yang merata dan meningkatkan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan akan sangat penting untuk menjaga tren positif ini dan memastikan kesejahteraan masyarakat di Sumedang.

**Grafik 2.20 Hubungan Gini Ratio dengan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Grafik 2.20 menggambarkan hubungan antara Gini Ratio, yang mengukur ketimpangan pendapatan, dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023. Dari data tersebut, terlihat adanya korelasi antara peningkatan ketimpangan pendapatan dengan kenaikan kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Pada tahun 2020, Gini Ratio meningkat dari 0,344 menjadi 0,384, yang diikuti oleh lonjakan signifikan dalam kedalaman kemiskinan dari 1,05 ke 1,72 dan keparahan kemiskinan dari 0,21 menjadi 0,42. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ketimpangan pendapatan berhubungan dengan semakin dalamnya kemiskinan dan lebih parahnya kondisi orang-orang miskin. Tahun 2021 menunjukkan sedikit perubahan dalam Gini Ratio menjadi 0,359, sementara kedalaman kemiskinan tetap stabil di 1,72 dan keparahan kemiskinan meningkat sedikit menjadi 0,46, mengindikasikan bahwa ketimpangan yang relatif stabil masih disertai oleh kemiskinan yang cukup dalam dan parah.

Tahun 2022 mencatat Gini Ratio tertinggi pada 0,394, yang beriringan dengan kedalaman kemiskinan mencapai 1,98 dan keparahan kemiskinan mencapai puncaknya pada 0,53. Ini mempertegas bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi cenderung meningkatkan kedalaman dan keparahan kemiskinan. Namun, pada tahun 2023, Gini Ratio menurun ke 0,366 diiringi dengan penurunan kedalaman kemiskinan menjadi 1,64 dan keparahan kemiskinan menjadi 0,35, menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan dapat berkontribusi pada pengurangan baik kedalaman maupun keparahan kemiskinan.

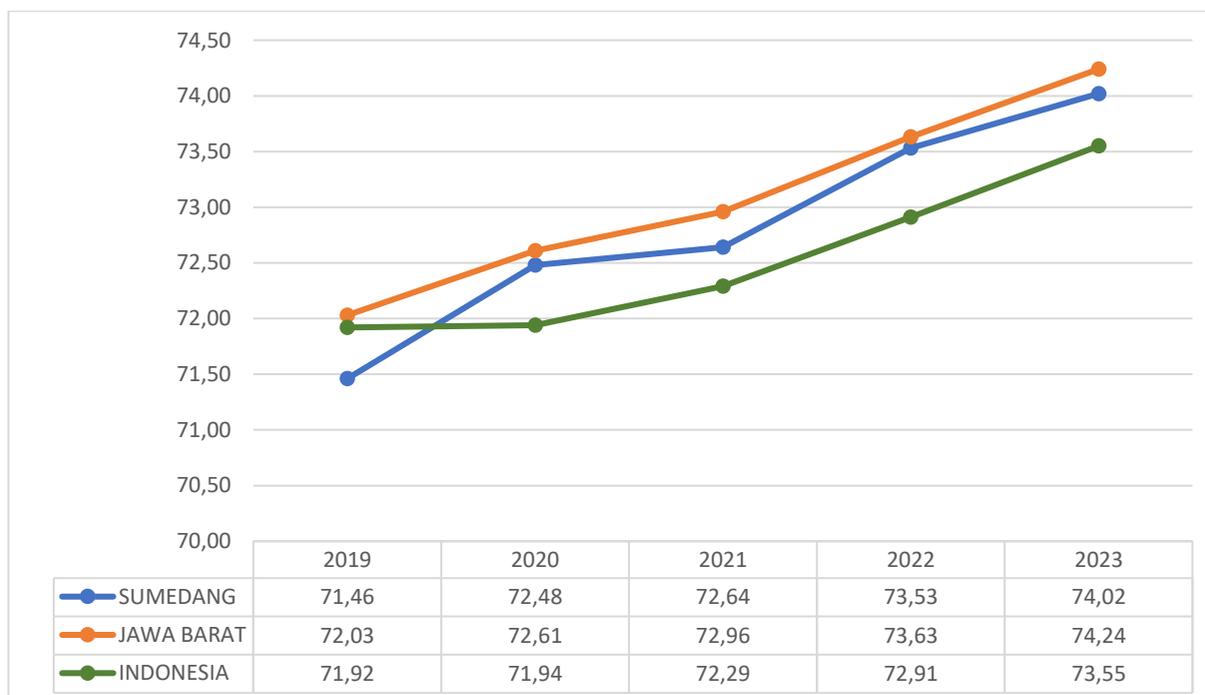
Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara ketimpangan pendapatan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan di Sumedang. Peningkatan ketimpangan pendapatan cenderung memperdalam dan memperparah kemiskinan, sementara penurunan ketimpangan pendapatan dapat membantu mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya kebijakan ekonomi yang dapat menurunkan ketimpangan pendapatan untuk mengurangi kemiskinan secara efektif.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non fisik suatu daerah yang

direpresentasikan oleh 3 (tiga) dimensi, yakni umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana masyarakat/penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dengan pengukuran IPM terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, diantaranya adalah: 1) IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); 2) IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

Pencapaian IPM Kab. Sumedang Tahun 2023 sebesar 74,02 hasil update sensus penduduk 2020, berada di atas nasional namun masih di bawah Provinsi Jawa Barat. Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang dari tahun 2019-2023 sebagaimana tersaji pada grafik berikut.

**Grafik 2.21 Perkembangan IPM Sumedang, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Perkembangan IPM di Kabupaten Sumedang menunjukkan perkembangan tren yang positif. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Sumedang berada di sekitar 71,5 poin, lebih rendah dibandingkan dengan capaian Jawa Barat dan nasional. Namun, setelah tahun 2020 IPM Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Kabupaten Sumedang mencapai 74,02 poin. Meskipun masih berada di bawah rata-rata

IPM Jawa Barat, tren peningkatan IPM yang semakin baik di Sumedang mencerminkan keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Sumedang khususnya Pembangunan non fisik.

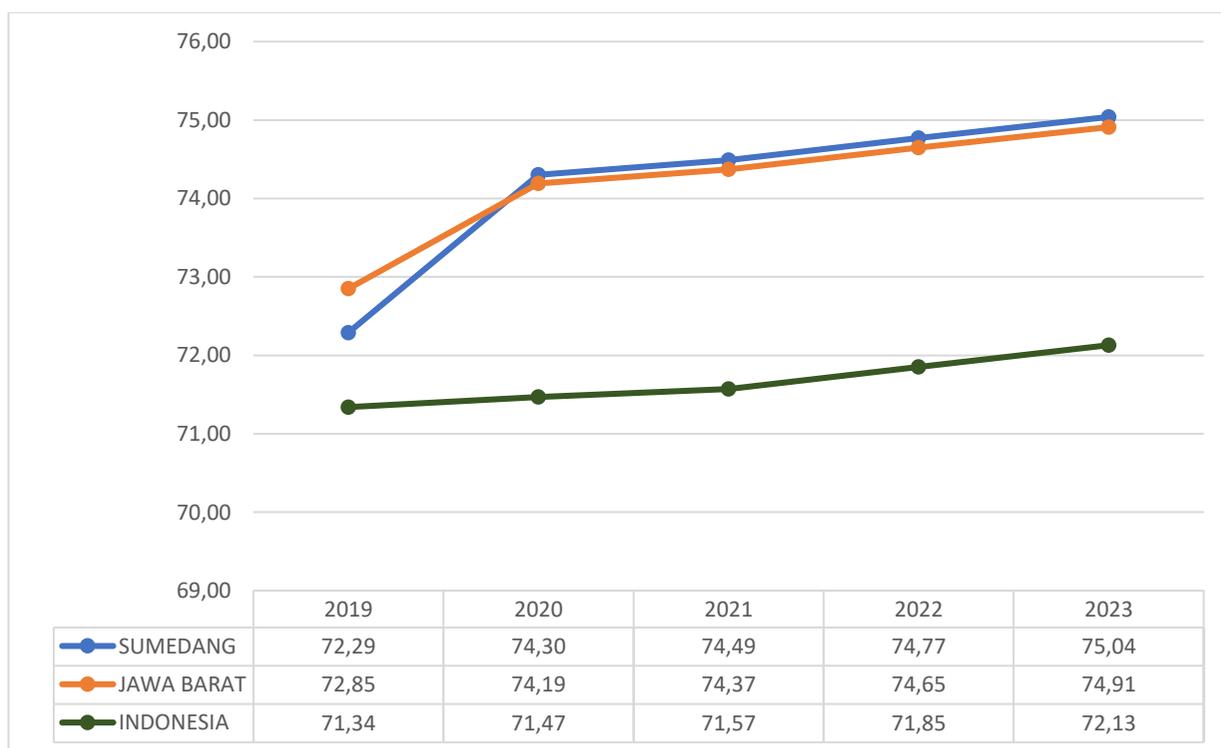
Perbedaan laju peningkatan IPM ini berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk efektivitas kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan di tingkat lokal. Pengembangan infrastruktur seperti pembukaan jalan tol Cisumdawu telah berkontribusi dalam memperbaiki aksesibilitas dan merangsang aktivitas ekonomi. Selain itu, program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Sumedang juga memberikan peran yang penting.

Untuk dapat terus meningkatkan capaian IPM yang lebih signifikan, peningkatan upaya dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak perlu terus ditingkatkan.

#### a. Usia Harapan Hidup

Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 memperlihatkan perkembangan yang terus meningkat.

**Grafik 2.22 Capaian Usia Harapan Hidup Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

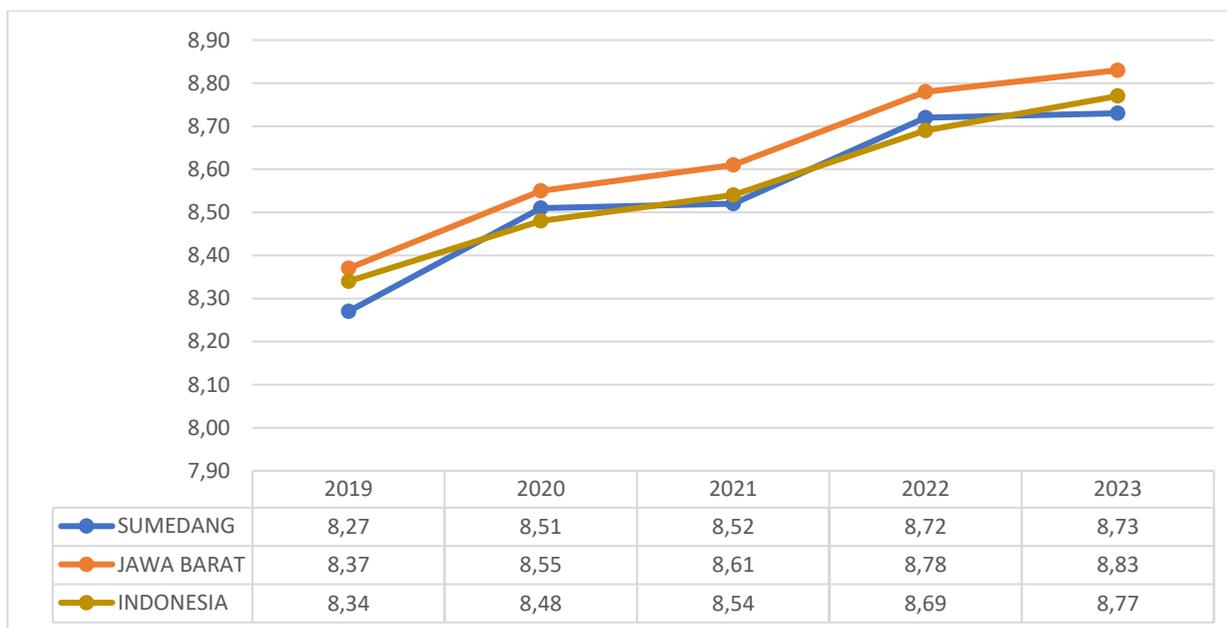
Pada tahun 2019, UHH Sumedang berada di sekitar 72,5 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata UHH Jawa Barat tetapi masih di atas rata-rata nasional. Namun, Sumedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama setelah tahun 2020. Pada tahun 2023 UHH Sumedang mencapai 75,04 tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata UHH Jawa Barat dan nasional.

Capaian UHH yang semakin baik ini mencerminkan keberhasilan Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Sumedang. Perbaikan aksesibilitas terhadap sarana Kesehatan dan ketersediaan tenaga Kesehatan yang merata di seluruh wilayah kabupaten Sumedang terus diupayakan dan perlu terus ditingkatkan.

#### b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia, Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren yang terus meningkat.

**Grafik 2.23 Capaian Rata-rata Lama Sekolah Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Pada tahun 2019, RLS di Kabupaten Sumedang berada di sekitar 8,30 tahun, lebih rendah dibandingkan dengan capaian RLS di Jawa Barat dan nasional. RLS di Kabupaten Sumedang menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2020 dan 2022. Namun, memasuki tahun 2023, peningkatan RLS di Kabupaten Sumedang tidak terlalu signifikan dan

baru mencapai 8,73 tahun, sehingga capaian ini masih ada di bawah rata-rata Jawa Barat dan nasional.

Perkembangan RLS ini menjadi tantangan di Kabupaten Sumedang sehingga berbagai program Pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas terhadap fasilitas pendidikan, program beasiswa, pelatihan dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik, pemerataan sebaran tenaga pendidik dan program pendidikan kesetaraan perlu terus ditingkatkan.

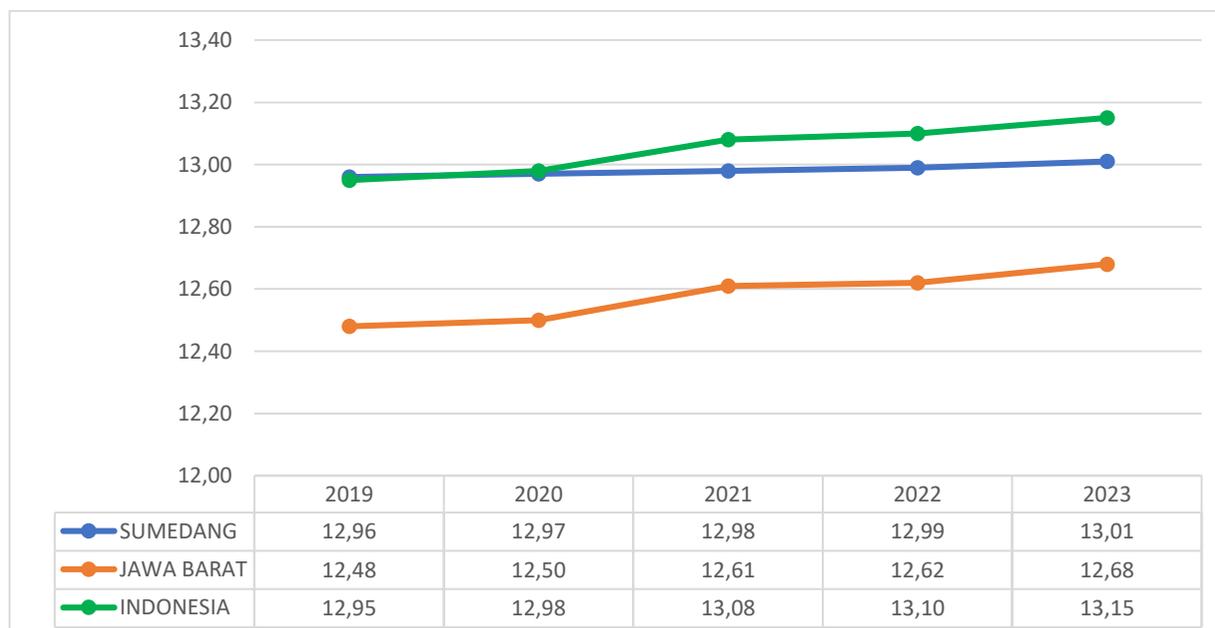
### c. Harapan Lama Sekolah

Pada tahun 2019, HLS di Sumedang berada sedikit di atas angka nasional dan Jawa Barat, dengan nilai sekitar 12,68. Namun, pada tahun 2020, HLS di Sumedang mulai menunjukkan peningkatan yang stabil, mencapai 12,90 pada tahun 2021, dan terus bertambah hingga mencapai 13,01 pada tahun 2023.

Sebaliknya, HLS Jawa Barat mengalami peningkatan yang lebih signifikan dari tahun 2020, naik dari sekitar 12,50 pada tahun 2019 menjadi 12,68 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun Sumedang memulai dengan posisi lebih baik, pertumbuhan HLS di Jawa Barat lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, HLS nasional menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mulai dari sekitar 13,00 pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga mencapai 13,15 pada tahun 2023.

**Grafik 2.24 Capaian Harapan Lama Sekolah Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023**



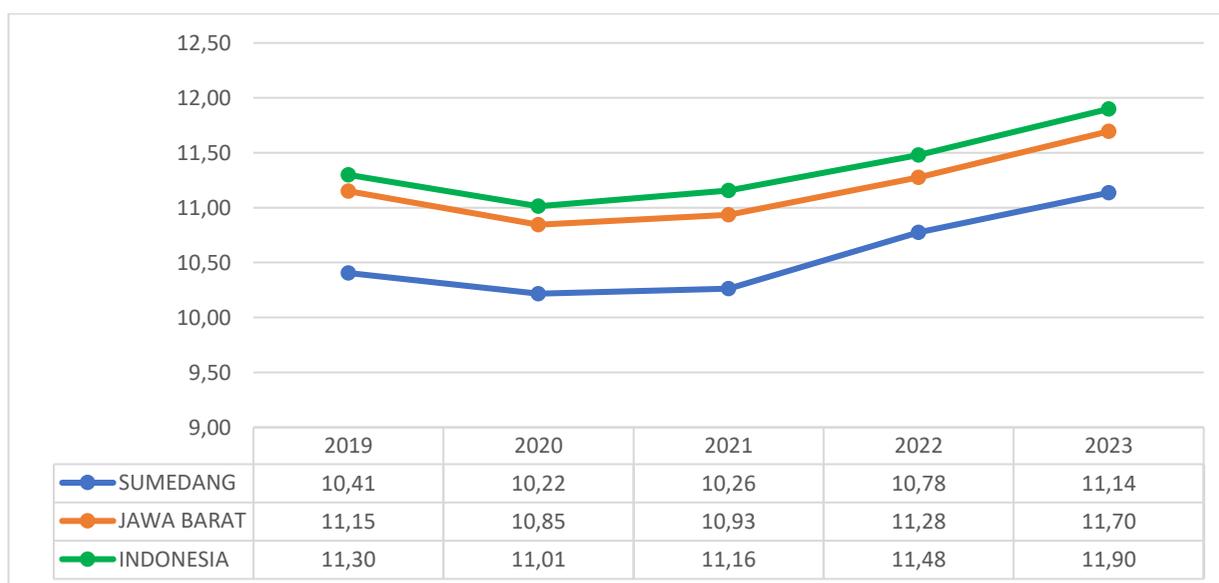
Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Berbagai Upaya untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) seperti meningkatkan jumlah dan sebaran guru, memberikan pelatihan dan sertifikasi, pemberian tunjangan guru, merehabilitasi dan melengkapi fasilitas sekolah, membangun sekolah baru, meningkatkan aksesibilitas lokasi sekolah, melakukan program sosialisasi Pendidikan, melakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta untuk menghimpun dana CSR yang dialokasikan untuk program pendidikan dan melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk melakukan pengabdian perlu terus ditingkatkan.

#### d. Pengeluaran per Kapita

Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita di Sumedang berada pada posisi terendah dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat, yaitu sekitar 10,40 juta rupiah. Pengeluaran ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020, mencapai titik terendah di sekitar 10,20 juta rupiah yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19, sebelum kemudian mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya sehingga mencapai 11,14 juta rupiah pada tahun 2023. Perkembangan pengeluaran per kapita di Jawa Barat dan nasional juga menunjukkan pola yang mirip dengan perkembangan di Kabupaten Sumedang namun dengan tingkat capaian yang lebih tinggi.

**Grafik 2.25 Capaian Pengeluaran per Kapita Sumedang, Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

Indikator yang mempengaruhi tingkat pengeluaran per kapita relatif lebih kompleks dibanding komponen IPM lainnya. Untuk meningkatkan tingkat pengeluaran per kapita maka berbagai upaya yang dilakukan mulai dari sisi

pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan energi perlu terus ditingkatkan. Infrastruktur yang baik dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita.

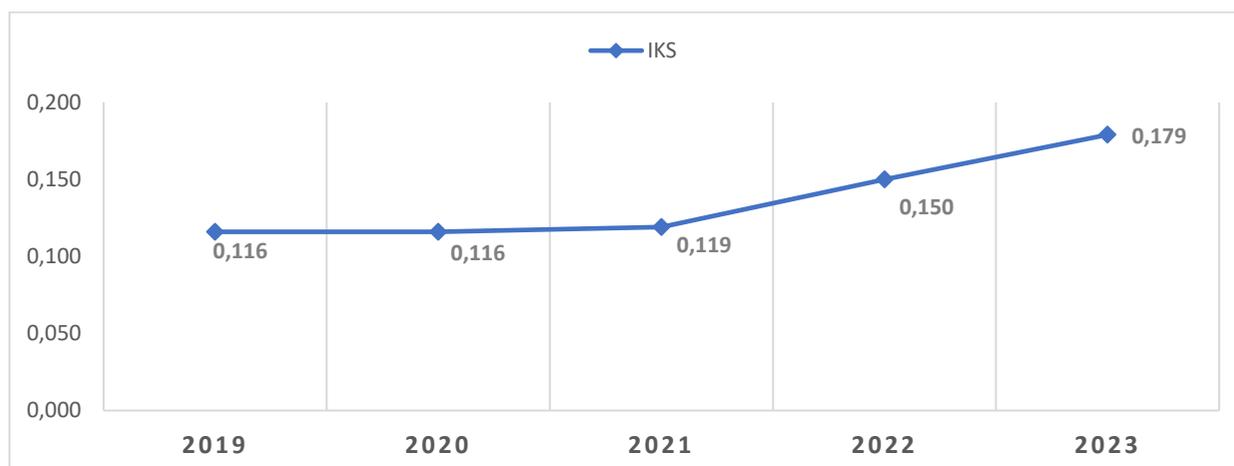
### **2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

Selain indikator Umur Harapan Hidup Masyarakat Kabupaten Sumedang yang semakin tinggi, terdapat indikator lain yang bisa menggambarkan atau mengukur derajat kesehatan masyarakat yaitu Indeks Keluarga Sehat. Pembangunan kesehatan dapat dimulai dari unit terkecil dari masyarakat yaitu keluarga. Indeks Keluarga Sehat adalah indeks yang menggambarkan kondisi perilaku hidup bersih dan sehat yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan dan dilaksanakan oleh setiap keluarga. Indikator Keluarga sehat terdiri dari perhitungan 12 (dua belas) Indikator yaitu:

1. Keluarga Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB);
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas Kesehatan;
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4. Bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6. Penderita tuberculosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak diterlantarkan;
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh dalam pedoman Program Indonesia Sehat-Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan.

**Grafik 2.26 Capaian Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Perkembangan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2019-2023 semakin baik. Bahkan pada Tahun 2020 saat Pandemi COVID-19 merebak tidak sampai menurunkan Indeks Kesehatan Keluarga di Kabupaten Sumedang.

Indikator Kesehatan lainnya yang menunjang terhadap penentuan kualitas sumber daya manusia dijelaskan melalui Prevalensi Stunting, Jumlah/Angka Kematian Bayi, dan Jumlah/Angka Kematian Ibu sebagaimana tertera pada Tabel 2.9 di bawah ini.

**Tabel 2.9 Indikator Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023**

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prevalensi Stunting (SSGI)	32,2	24,43	-	22	27,6	-
2	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	32,2	24,43	17,5	10,99	8,27	7,89
3	Prevalensi Stunting (Survei Kesehatan Indonesia)	-	-	-	-	-	14,4
4	Jumlah Kematian Bayi (jiwa)	155	134	137	161	212	148
5	Jumlah Kematian Ibu (jiwa)	16	13	21	36	17	22

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

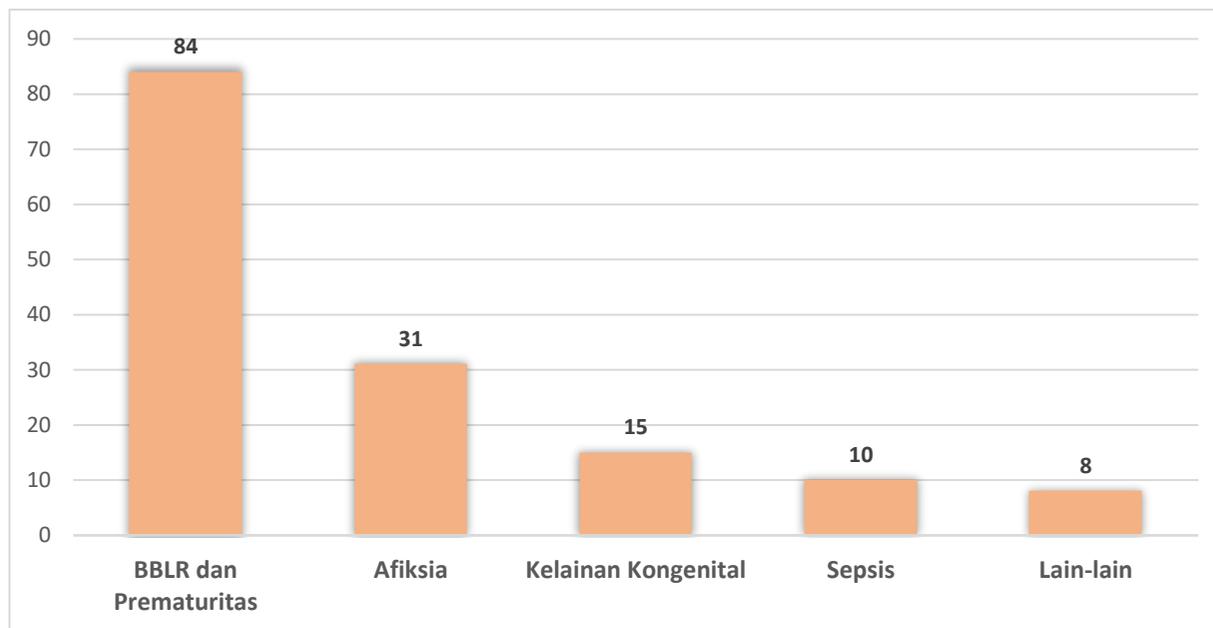
Stunting merupakan kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur dibandingkan dengan menggunakan standar WHO. Prevalensi stunting merupakan indikator untuk mengukur persentase anak balita yang tingginya di bawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Berdasarkan data pada tabel di atas, terkait dengan data prevalensi stunting terdapat 2 (dua) data yang dihasilkan, 1) data berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM); 2) data berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia. Melalui kedua cara perhitungan data tersebut didapatkan perbedaan data prevalensi stunting yang cukup signifikan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan metode pengumpulan data. Data yang dihasilkan berdasarkan EPPGBM dilakukan melalui pengisian aplikasi oleh kader posyandu di seluruh wilayah setiap bulan penimbangan. Survei Kesehatan Indonesia merupakan survei integrasi antara Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). SSGI dilakukan dengan memilih rumah tangga balita hasil pemutakhiran secara *systematic sampling* dengan *implicit stratification* pendidikan kepala rumah tangga, dalam hal ini dilakukan dengan sampel sebanyak 1.162 balita pada tahun 2023.

Jumlah kematian bayi dan kematian ibu yang perkembangannya masih fluktuatif selama periode tahun 2018-2023 mengindikasikan masih ada permasalahan dalam penanganannya sehingga berbagai program dan upaya perlu lebih difokuskan untuk penanganan kematian bayi dan kematian ibu tersebut mulai dari aksesibilitas terhadap sarana prasarana Kesehatan sampai dengan ketersediaan tenaga Kesehatan seperti bidan yang merata di seluruh wilayah kabupaten Sumedang.

Data jumlah kematian bayi berkurang dari 212 bayi pada Tahun 2022 menjadi 148 pada tahun 2023 dengan penyebab kematian terbesar karena BBLR. Penyebab kematian bayi digambarkan pada grafik di bawah ini.

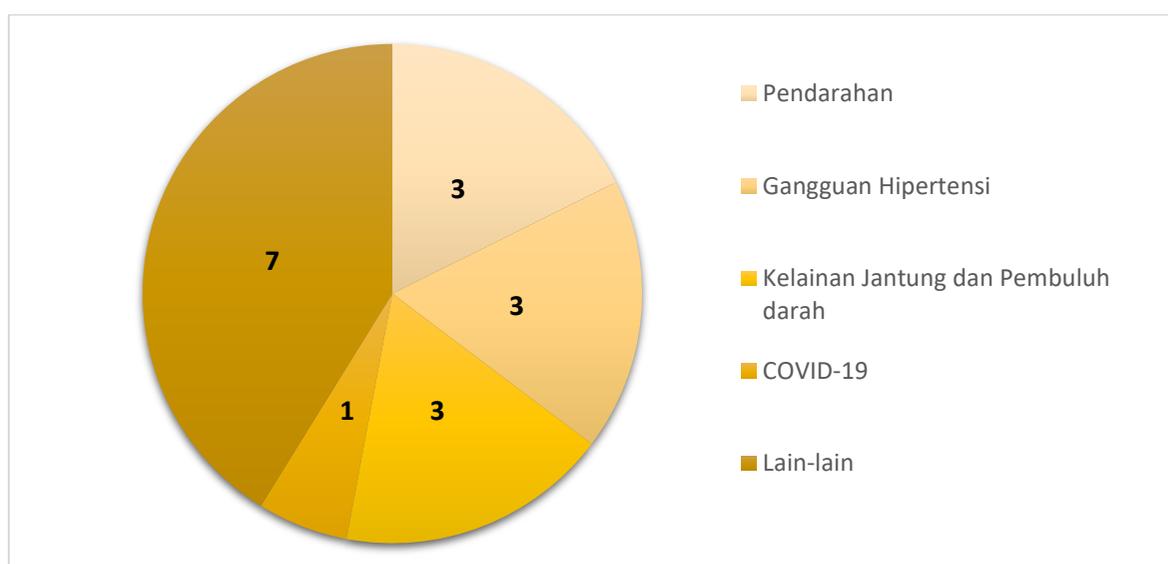
**Grafik 2.27 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2023**



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Sedangkan untuk data Angka Kematian Ibu (AKI) mencerminkan kualitas pelayanan Kesehatan selama hamil, penanganan persalinan dan masa nifas. Jumlah AKI di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2022 turun pada angka 17 orang. Penyebab kematian ibu digambarkan pada grafik berikut.

**Grafik 2.28 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2023**

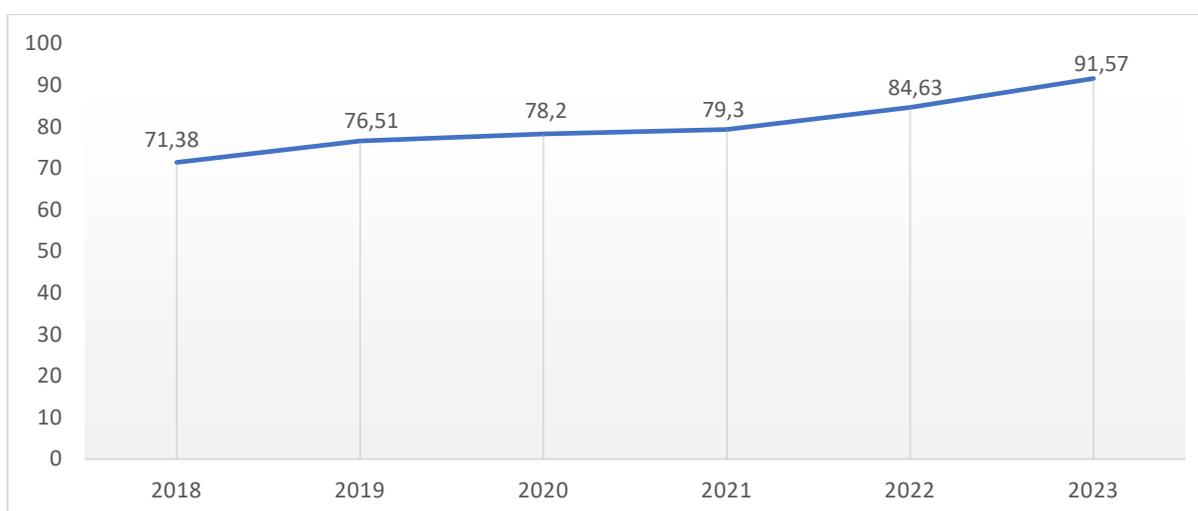


Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

*Universal Health Coverage* (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau. *Universal Health Coverage* (UHC) atau

Jaminan Kesehatan Semesta dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program yang memberikan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia. Program ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. JKN memberikan perlindungan kesehatan dan manfaat pemeliharaan kesehatan kepada peserta. Cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Sumedang dari tahun 2018-2023 terus meningkat dan sampai tahun 2023 mencapai 91,57%.

**Grafik 2.29 Perkembangan Cakupan JKN di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 (%)**



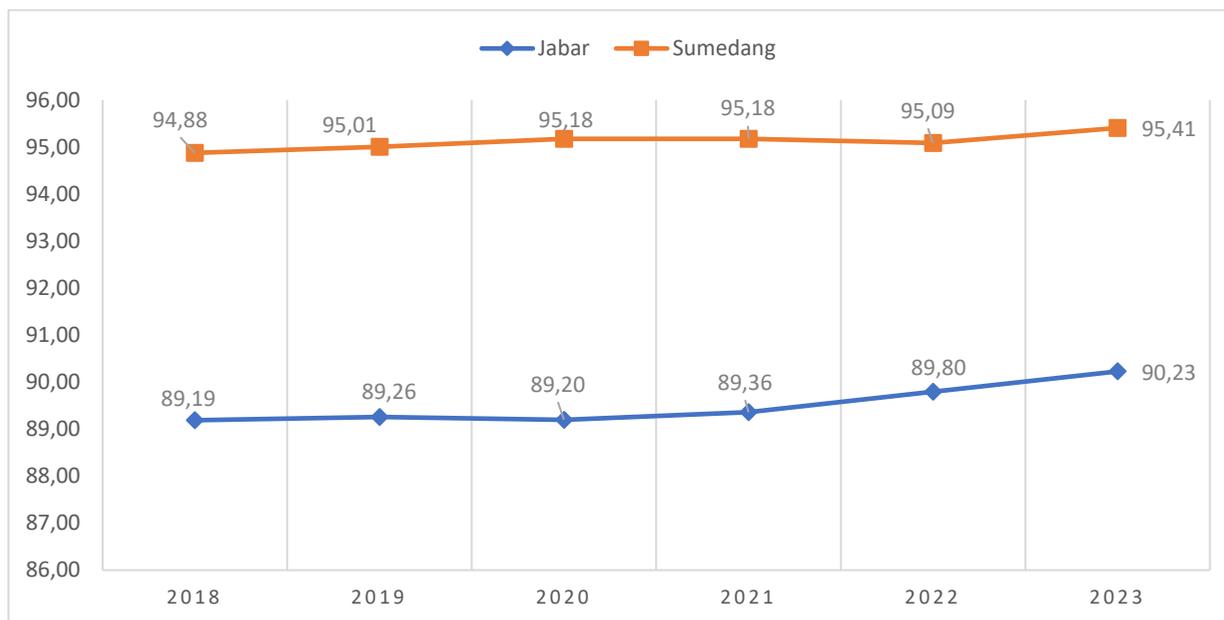
Sumber: Dinas Kesehatan (2023)

Indeks Pembangunan Manusia bisa dilihat secara lebih spesifik dari perbedaan gender. Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. Data IPD dan IDG sangat membantu pemerintah daerah untuk dapat mengurangi kesenjangan dalam suatu wilayah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 95,41 poin, naik 0,32 poin

disbanding Tahun 2022. Nilai IPG ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat.

**Grafik 2.30 IPG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2023**

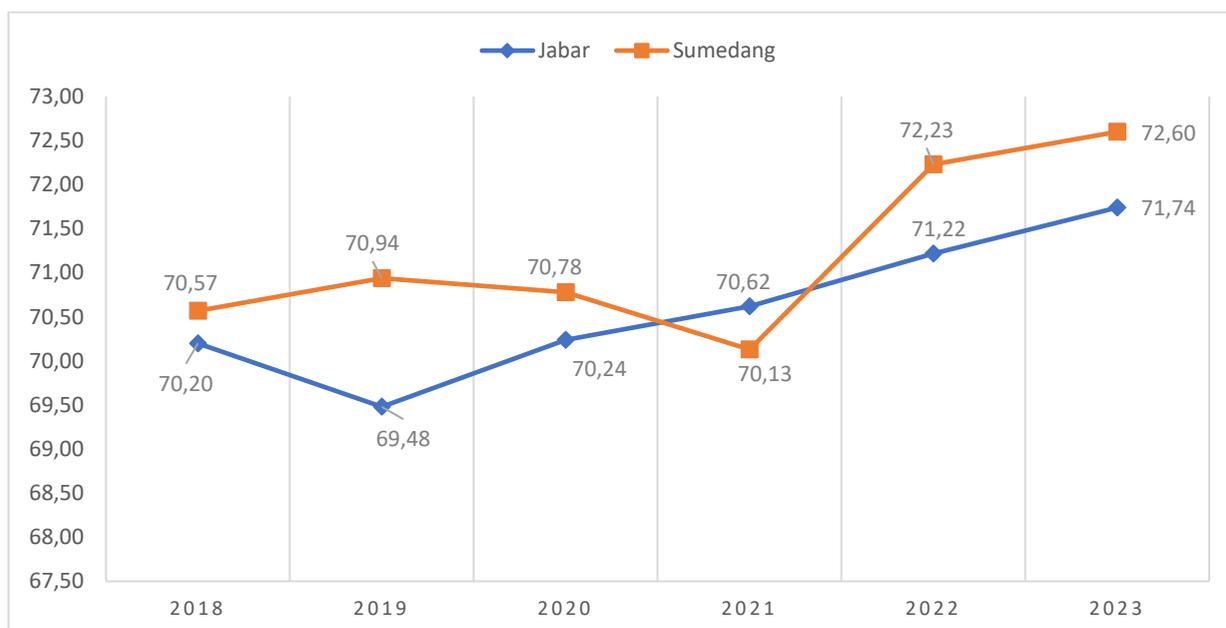


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dengan indikator persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2023 sebesar 72,60 poin atau di atas Provinsi Jawa Barat dengan 71,74 poin. Nilai IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibanding Tahun 2022, dimana IDG Kabupaten Sumedang baru mencapai 72,23 poin atau naik 0,37 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi politik dan pengambilan keputusan dibanding Tahun sebelumnya.

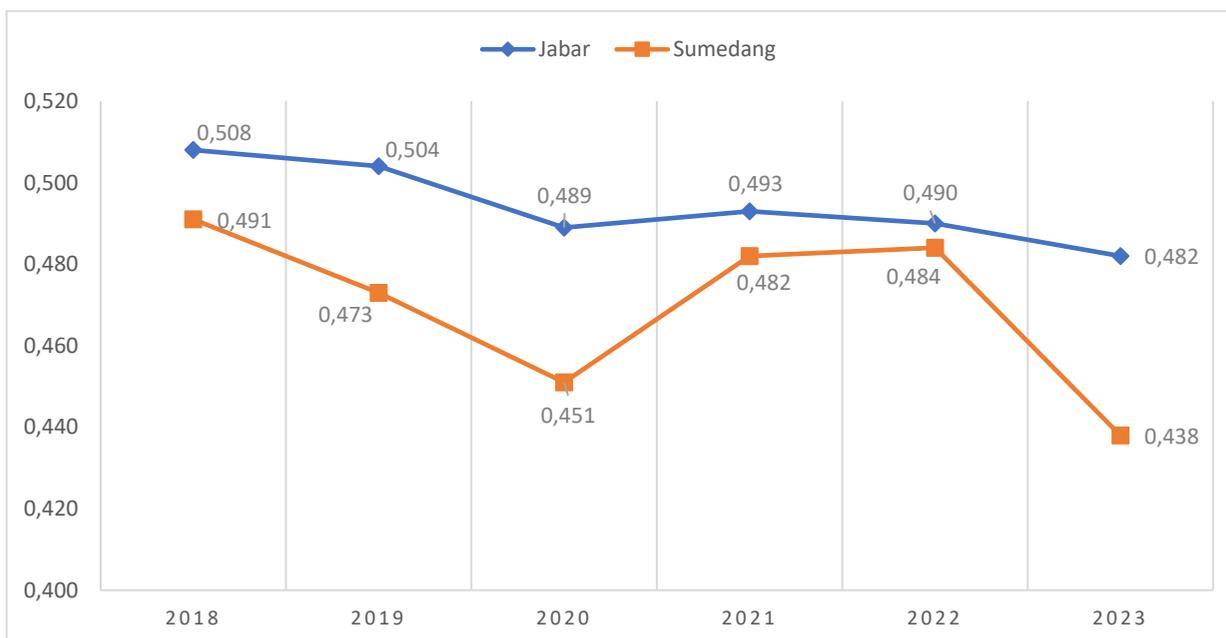
**Grafik 2.31 IDG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018-2023**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (diolah)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan (loss) dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Semakin kecil IKG berarti semakin rendah ketimpangan gender, dan sebaliknya.

**Grafik 2.32 IKG Kabupaten Sumedang dan Jawa Barat Tahun 2018 - 2023**

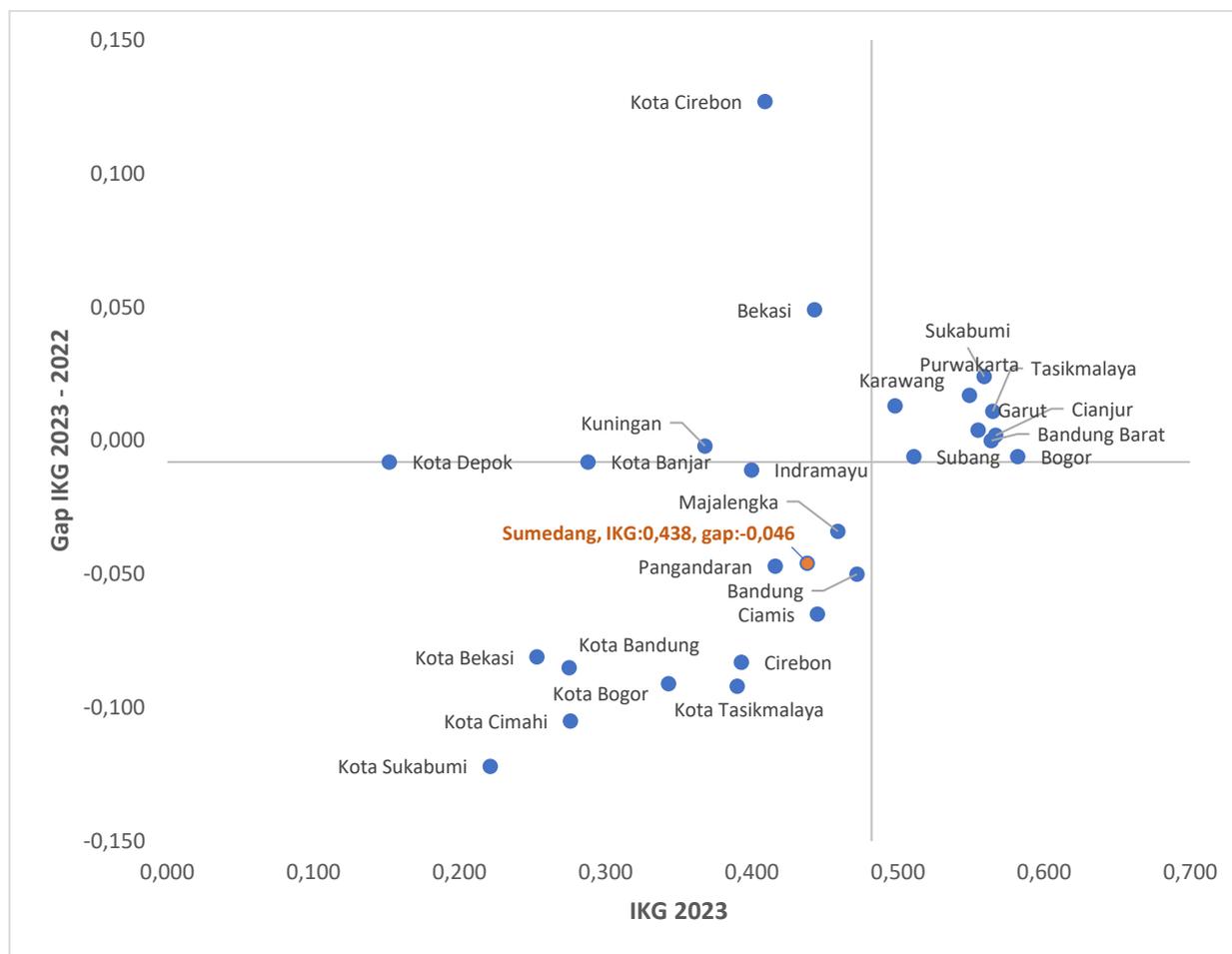


Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

IKG dinilai rendah jika nilainya kurang dari 0,399, menengah bawah jika IKG berada dalam interval 0,400-0,449, menengah atas jika IKG berada pada interval 0,450-0,499 dan dinilai tinggi jika IKG di atas atau sama dengan 0,500.

IKG Sumedang Tahun 2023 masih berada dalam kategori menengah bawah dengan nilai IKG sebesar 0,438, dan mengalami penurunan 0,046 poin dari 2022 ke 2023. Nilai ini lebih rendah dari IKG Jabar sebesar 0,482.

**Gambar 2.19 IKG Kabupaten Sumedang, Kota Jabar dan Perubahannya Tahun 2023**



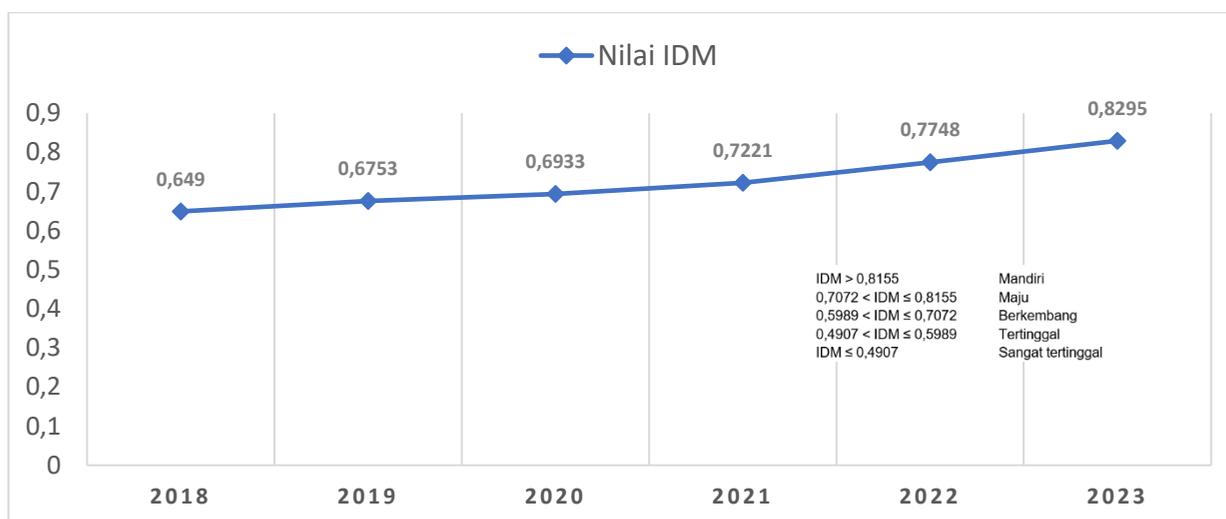
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024 (Diolah)

Mencermati ketimpangan gender di Kabupaten Sumedang yang masih pada kategori menengah bawah, maka peran semua pihak dibutuhkan untuk perbaikan dalam berbagai dimensi agar perempuan memiliki kesempatan lebih untuk meningkatkan akses dan kapasitasnya.

Terkait dengan Pembangunan Desa, salah satu indikator keberhasilan yang saat ini digunakan adalah Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan

Ekologi/Lingkungan. IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa.

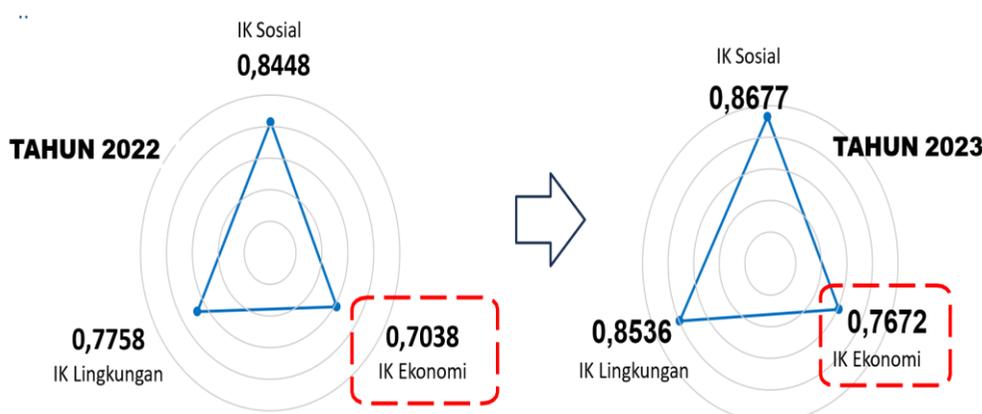
**Grafik 2.33 IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023**



Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2024

Selama Tahun 2018-2020, IDM Provinsi Kabupaten Sumedang berada pada status berkembang, tetapi Tahun pada 2021-2022 sudah mengalami kenaikan status menjadi maju dan pada Tahun 2023 menjadi berstatus Mandiri dengan indeks sebesar 0,8295 meningkat dibanding Tahun 2022 dari indeks sebesar 0,7748. Jika dilihat dari nilai IDM nya, Kabupaten Sumedang selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

**Gambar 2.20 Nilai Indeks komposit IDM Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2023**



Sumber: DPMD Kabupaten Sumedang, 2024

Dari ketiga indeks komposit IDM, pada Tahun 2023 Kabupaten Sumedang memiliki nilai tertinggi pada Indeks Ketahanan Sosial yaitu sebesar 0,8677, nilai Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,8536, dan nilai terendah pada Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu sebesar 0,7672. Hal ini menjadi rekomendasi bagi Pemerintah maupun stakeholders dalam membangun desa untuk dapat meningkatkan pada pengembangan aspek ekonomi.

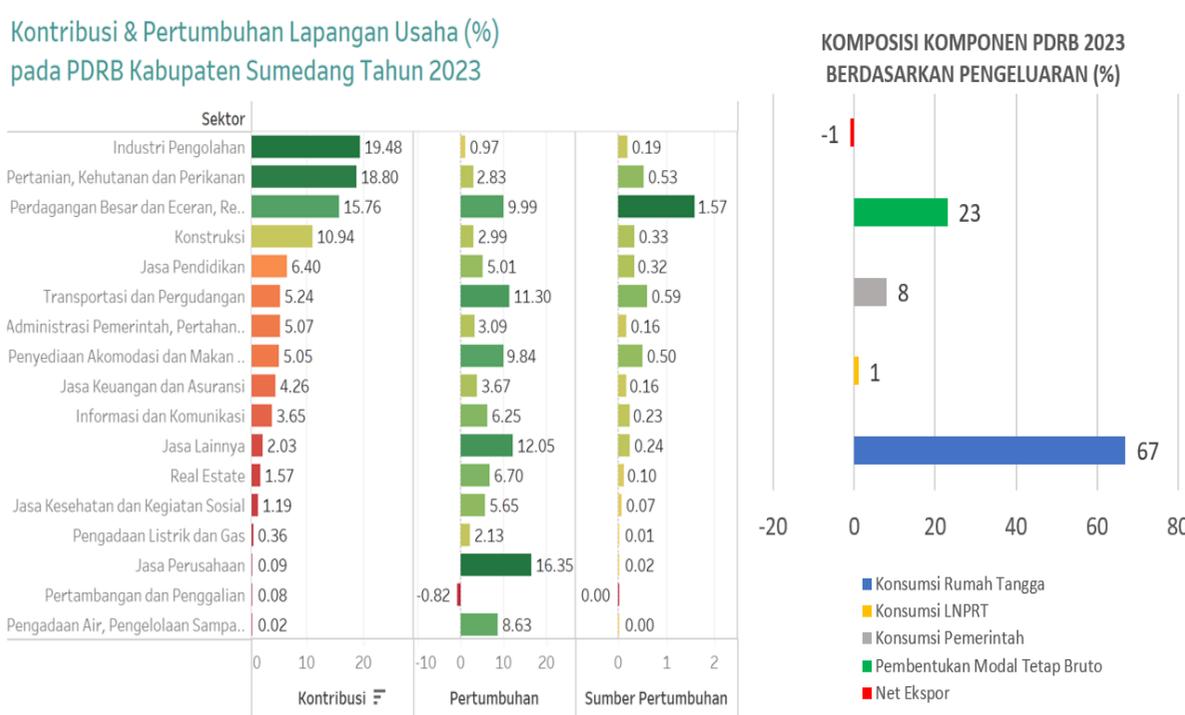
## 2.3. Aspek Daya Saing

### 2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan). Di Tahun 2023 sektor perdagangan menjadi sumber pertumbuhan PDRB. Dari sisi pengeluaran, peran konsumsi rumah tangga sangat menentukan perekonomian Sumedang.

Seiring berfungsinya tol Cisumdawu dan Bandara Kertajati, serta pengembangan Kawasan wisata Jatigede, Kawasan perkotaan Jatinangor, Sumedang Industrialpolis, Kabupaten Sumedang berpeluang mengakselerasi ekonomi wilayah melalui kegiatan industri, pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan dengan inovasi dan kolaborasi antar para pemangku kepentingan.

**Grafik 2.34 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang Tahun 2023 dan Komposisi Komponen PDRB Berdasarkan Pengeluaran (%)**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Adapun perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut.

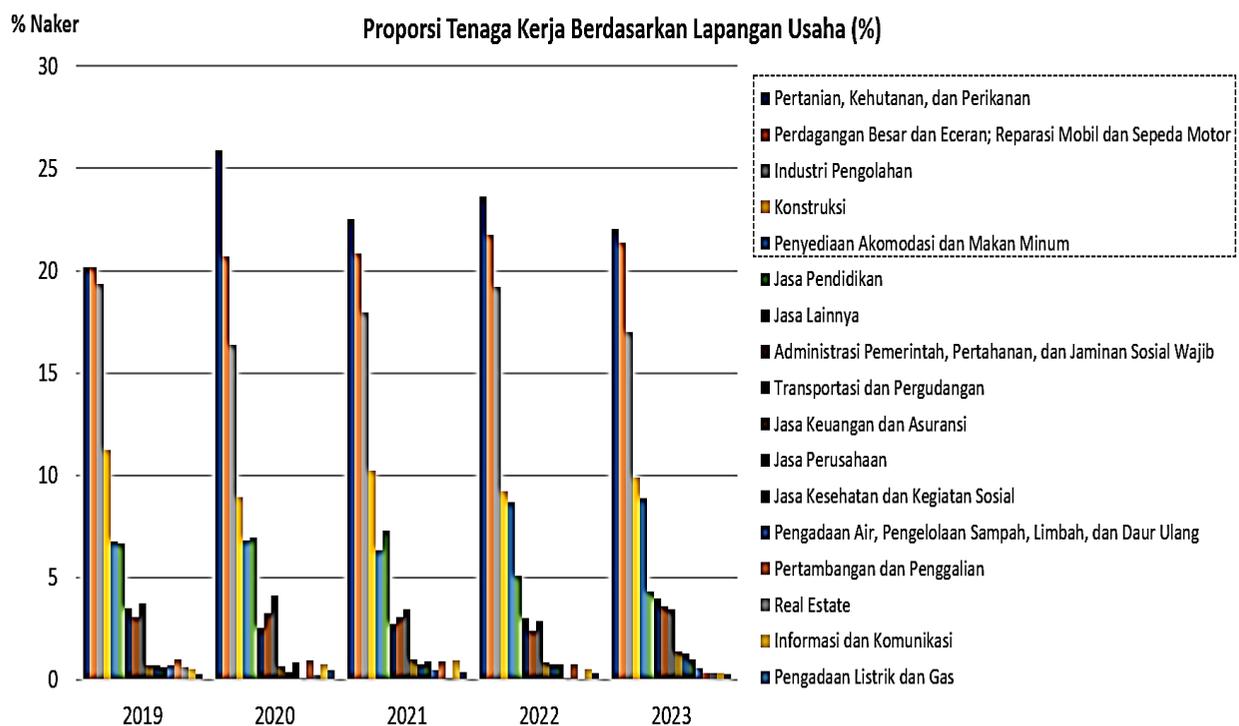
**Grafik 2.35 Kontribusi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2019 – 2023**

Sektor	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	19.99	20.02	20.22	20.45	19.48
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	19.05	19.81	18.42	18.68	18.80
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15.62	14.57	14.87	14.60	15.76
Konstruksi	10.41	9.98	11.18	11.26	10.94
Jasa Pendidikan	6.54	7.03	6.91	6.54	6.40
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.95	5.89	5.90	5.34	5.07
Transportasi dan Pergudangan	5.02	4.80	4.53	4.78	5.24
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.60	4.52	4.45	4.90	5.05
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.56	4.44	4.55	4.41	4.26
Informasi dan Komunikasi	3.13	3.88	3.87	3.75	3.65
Jasa Lainnya	1.82	1.77	1.69	1.94	2.03
Real Estate	1.61	1.53	1.59	1.57	1.57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.14	1.19	1.24	1.20	1.19
Pengadaan Listrik dan Gas	0.39	0.38	0.39	0.38	0.36
Jasa Perusahaan	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
Pertambangan dan Penggalian	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perkembangan proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha dapat dilihat pada gambar berikut.

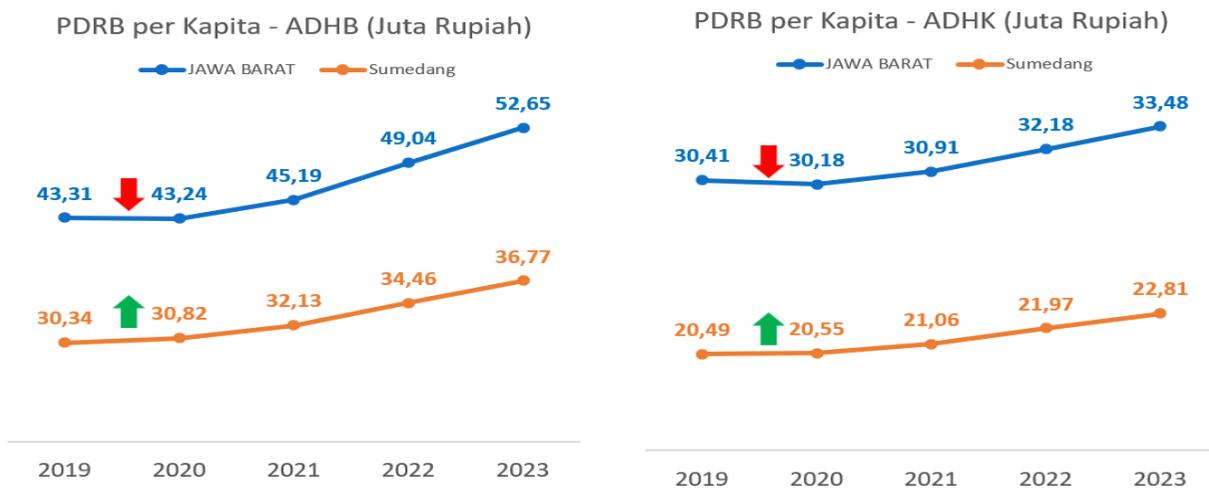
**Grafik 2.36 Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang relatif lebih resiliens saat terjadi pandemi Covid-19 yang masih tumbuh positif, namun gap nya masih cukup lebar.

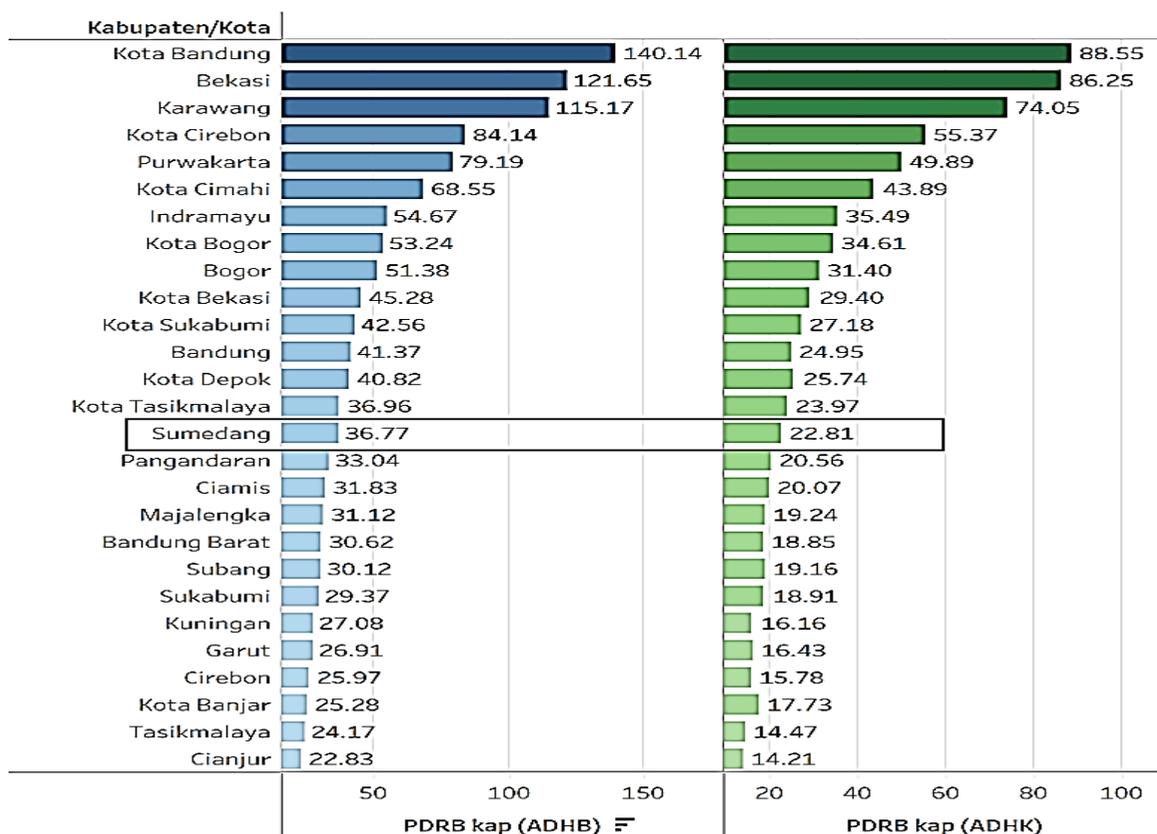
**Grafik 2.37 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2.38 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

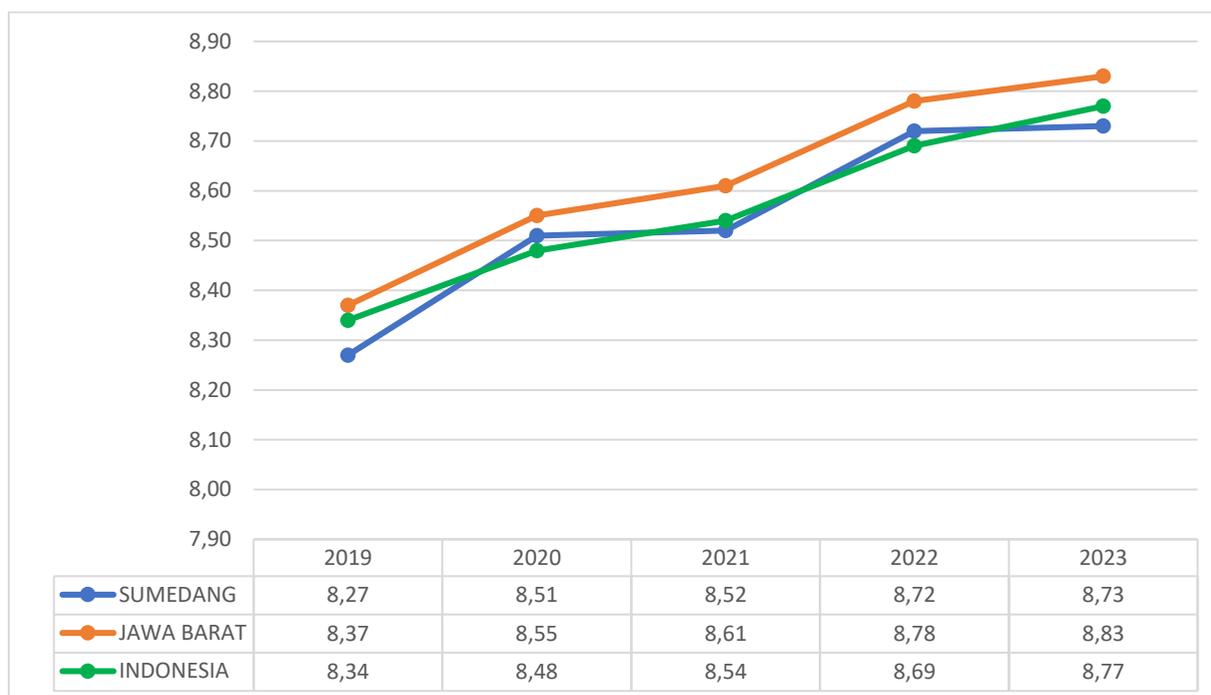
Indonesia telah meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau (*Green Economy Index/GEI*), inisiatif yang bertujuan mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ekonomi hijau merupakan kegiatan ekonomi yang selain dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga diharapkan memberi dampak tercapainya keadilan, baik keadilan bagi masyarakat maupun lingkungan dan sumber daya alam itu sendiri. GEI Indonesia terdiri dari 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi meliputi enam indikator, seperti intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Pilar sosial terdiri dari empat indikator, termasuk tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Sementara pilar lingkungan mencakup lima indikator, seperti tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan. Sebagai sebuah indeks baru, capaian indeks ekonomi hijau Kabupaten Sumedang tahun 2023 adalah sebesar 49,00 poin.

### **2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pusat dari pembangunan sosial ekonomi karena mempunyai kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang menentukan daya saing SDM adalah tingkat Pendidikan.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2023 berdasarkan data dari BPS baru 8,73 Tahun. Capaian ini masih lebih rendah disbanding RLS Provinsi Jawa Barat dan RLS Nasional.

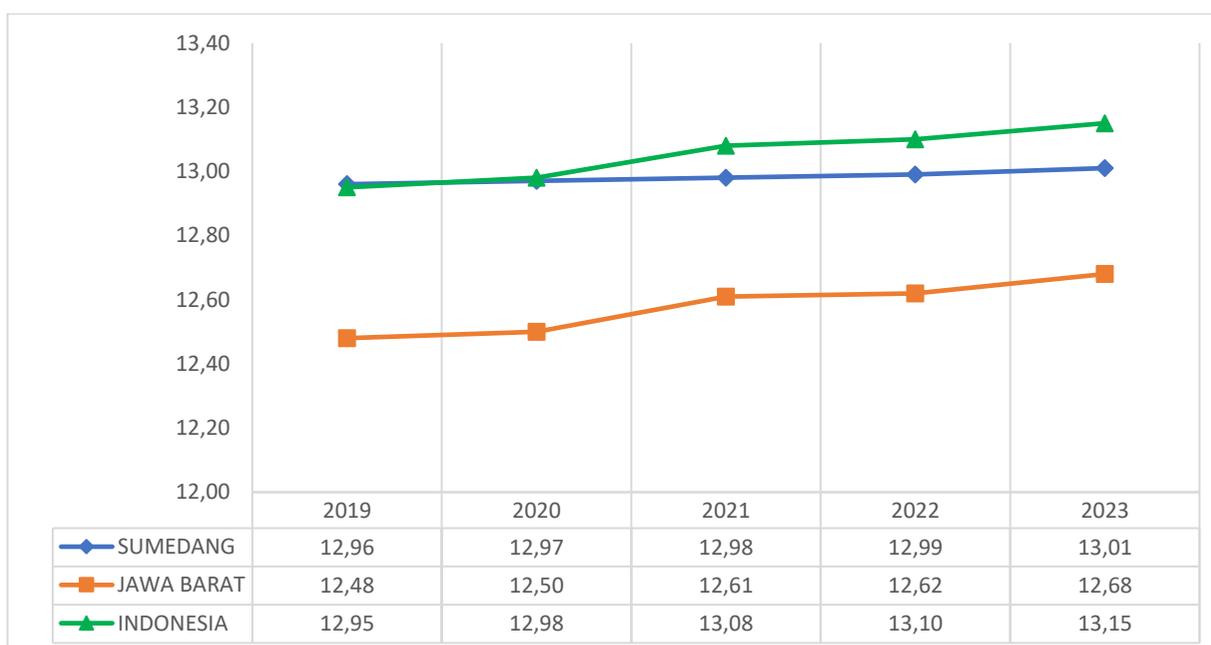
**Grafik 2.39 Rata-Rata Lama Sekolah  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang sebagai lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terus meningkat.

**Grafik 2.40 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Harapan lama sekolah anak usia tertentu di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 13,01 Tahun. Lebih tinggi dibanding HLS Provinsi Jawa Barat namun masih berada di bawah HLS Nasional. Tingkat Pendidikan ini tentunya

akan memperbesar peluang untuk anak mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang.

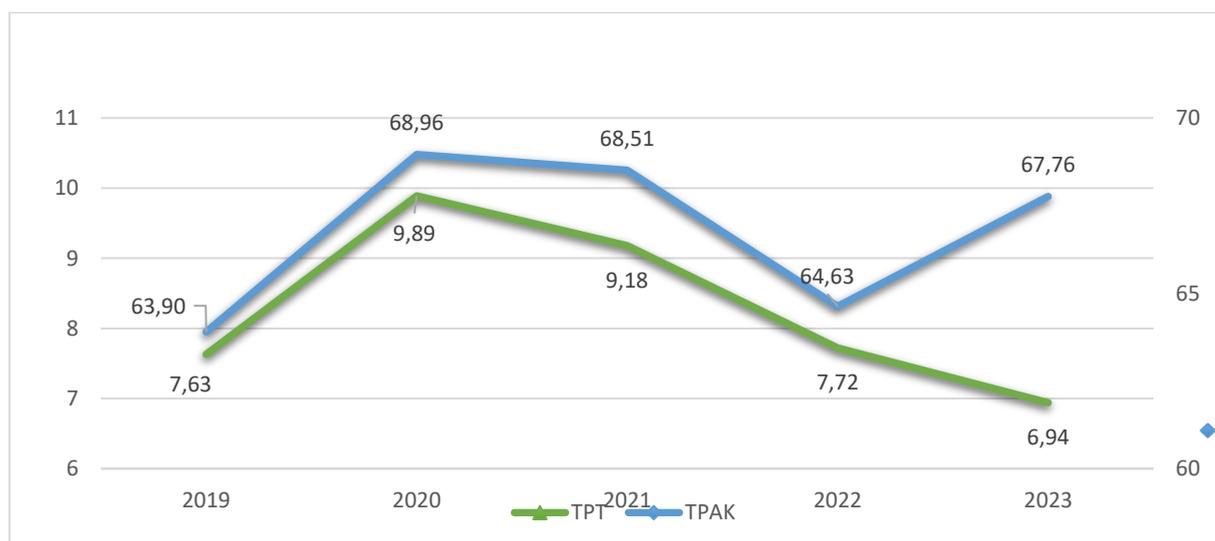
Terkait dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 sebesar 97,31%. Untuk tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama di Kabupaten Sumedang sebesar 91,55%.

Sementara itu, tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 adalah sebesar 59,60%.

Angka partisipasi sekolah setiap jenjang yang belum mencapai 100% salah satunya karena ada penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar Kabupaten Sumedang dimana hal ini masih sulit untuk dideteksi secara komprehensif.

Salah satu indikator lainnya yang dapat menggambarkan daya saing sumber daya manusia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2023 sebesar 67,76% meningkat dibanding Tahun 2022, artinya bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan.

**Grafik 2.41 TPT dan TPAK di Kabupaten Sumedang Tahun 2019 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Pada Tahun 2023 berdasarkan data BPS jumlah Angkatan kerja di Kabupaten Sumedang sebanyak 609.471 orang. Dari jumlah tersebut 562.416 orang telah bekerja terdiri dari 355.449 orang laki-laki dan 206.967 orang Perempuan. Sementara 47.055 orang lainnya belum bekerja yang terdiri dari 27.874 orang laki-laki dan 19.181 orang Perempuan.

Tingkat ketergantungan penduduk Kabupaten Sumedang dari Tahun 2018 sebesar 47,76, Tahun 2019 naik menjadi 47,78 dan Tahun 2020 menjadi 47,87. Namun demikian pada Tahun 2022 tingkat ketergantungan penduduk Kembali menurun pada angka 46,26, artinya setiap 100 orang penduduk yang produktif harus menanggung 46 orang penduduk yang tidak produktif.

### 2.3.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah

Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2020 tidak berubah sepanjang 774.368 Km. dengan kondisi jalan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 2.10 Data Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2020 – 2023**

No	Kondisi Jalan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Mantap	76,96%	83,21%	86,54%	88,45%
	a. Baik	54,53%	50,69%	60,04%	67,84%
	b. Sedang	22,44%	32,53%	26,50%	20,61%
2	Rusak Ringan	3,79%	9,04%	7,92%	5,89%
3	Rusak Berat	19,25%	7,75%	5,54%	5,66%

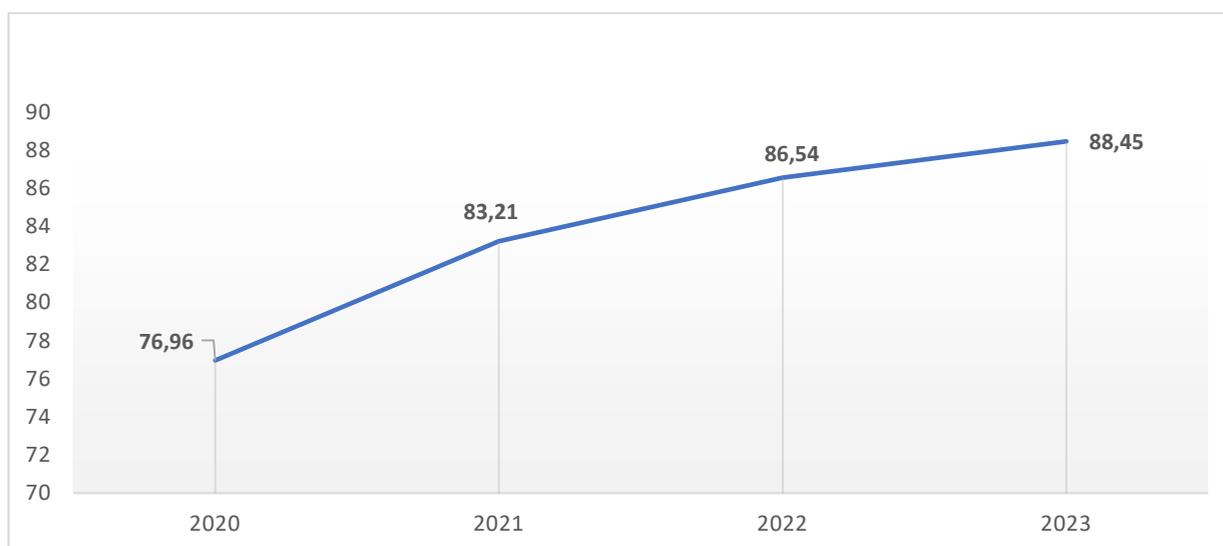
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang, 2024

Kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu unsur penting bagi peningkatan daya saing daerah, selain akan mendorong aktivitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan di suatu wilayah manfaat jalan sangat dirasakan langsung oleh Masyarakat sebagai hasil dari Pembangunan.

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah adalah Tingkat kemantapan jalan Kabupaten. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan sedang berdasarkan hasil pelaksanaan survey kondisi jalan yang dilakukan dengan

metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan analisis perhitungan *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga.

**Grafik 2.42 Tingkat Kemantapan Jalan (%) di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2023**



Sumber: Dinas PUTR Kabupaten Sumedang, 2024 (Diolah)

Dalam mengukur indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) diperlukan adanya data enam unsur utama, yaitu: (1) ketersediaan fisik (*availability*) terkait menghasilkan output yang berupa barang fisik secara konkret; (2) kualitas fisik (*quality*) harus baik dan optimal; (3) kesesuaian (*appropriateness*) berkaitan dengan penyelerasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat; (4) efektivitas pemanfaatan (*utility*) berkaitan dengan tepatnya sasaran infrastruktur; (5) penyerapan tenaga kerja (*job creation*) terkait memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat; (6) kontribusi terhadap perekonomian.

Sementara ini di Kabupaten Sumedang baru bisa menyajikan 3 (tiga) variabel dari 6 (enam) variabel untuk pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur yaitu: (1) ketersediaan fisik (*availability*) terkait menghasilkan output yang berupa barang fisik secara konkret; (2) kualitas fisik (*quality*) harus baik dan optimal; dan (3) kesesuaian (*appropriateness*) berkaitan dengan penyelerasan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Untuk nomor (1) dan (2) sebagaimana sudah disajikan sebelumnya, sementara yang nomor (3) dapat dijelaskan bahwa infrastruktur merupakan kebutuhan Masyarakat yang harus dipenuhi, sehingga dalam dokumen perencanaan salah satu kebijakan

yang diatur adalah terkait dengan infrastruktur baik fisik maupun non fisik. Untuk poin (4) sampai (6) memerlukan data melalui survai/penelitian.

Keberadaan proyek strategis Nasional jalan Tol CISUMDAWU saat ini telah mendorong mobilitas barang dan jasa dari dan menuju wilayah Kabupaten Sumedang, karena ruas jalan tol tersebut mempunyai 6 pintu tol yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Pintu Tol Jatinangor;
2. Pintu Tol Pamulihan;
3. Pintu Tol Sumedang Kota;
4. Pintu Tol Cimalaka;
5. Pintu Tol Paseh;
6. Pintu Tol Ujungjaya.

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses Masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

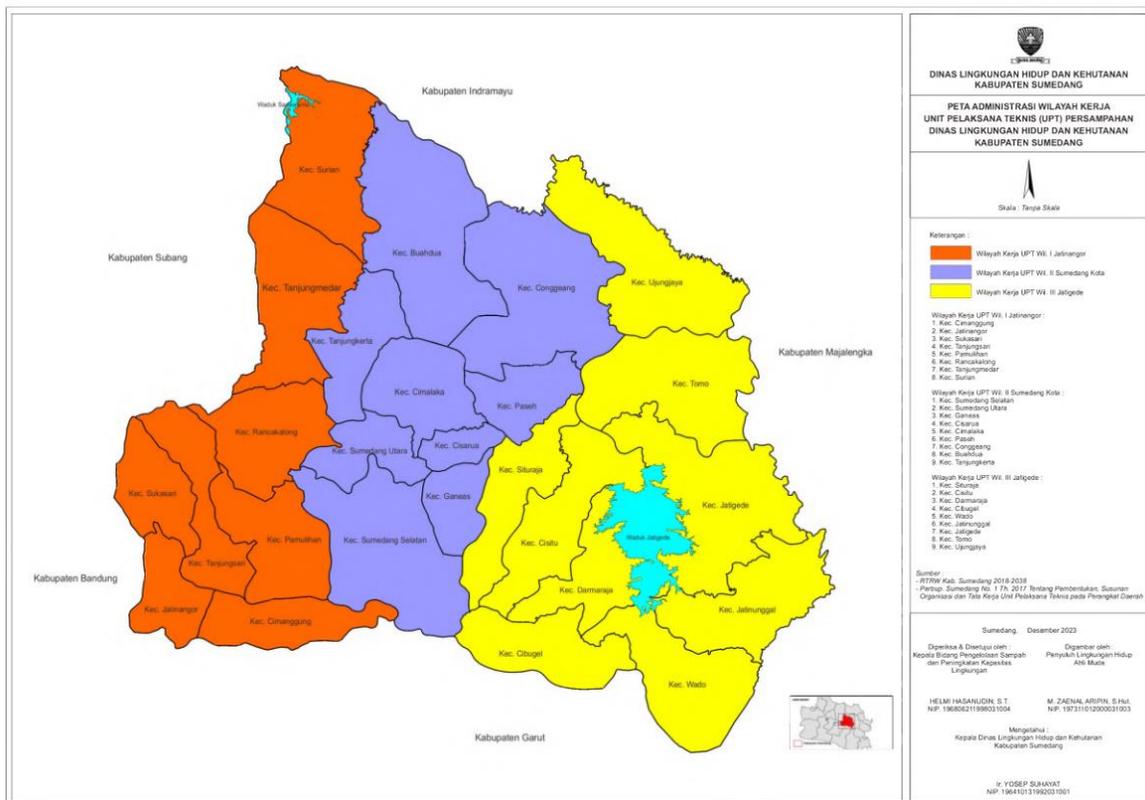
Sebelum Tahun 2021 penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak Tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG).

Di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2023 persentase cakupan pelayanan akses air minum layak baru 81,87% yang terus diupayakan melalui program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dari sisi penanganan persampahan, Kabupaten Sumedang dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- Wilayah I Jatinangor meliputi 8 kecamatan;
- Wilayah II Sumedang Kota meliputi 9 kecamatan;
- Wilayah III Jatigede meliputi 9 kecamatan.

**Gambar 2.21 Peta Wilayah Penanganan Persampahan di Kabupaten Sumedang**



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang, 2024

Berbagai Upaya penanganan sampai di wilayah Kabupaten Sumedang terus dilakukan. Hasilnya persentase sampah yang tidak terkelola semakin menurun. Pada Tahun 2022 dari 161.592,02 ton sampah jumlah yang tertangani mencapai 48.362,50 ton atau 29,93% dan 64,86% selebihnya belum terkelola.

Pada Tahun 2023 dengan volume sampah yang terus meningkat mencapai 174.806,09 ton dapat ditangani sebanyak 52.738,85 ton atau 30,17%, artinya jumlah sampah yang tidak terkelola di Tahun 2023 sebanyak 64,59%.

**Tabel 2.11 Upaya Penanganan Persampahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023**

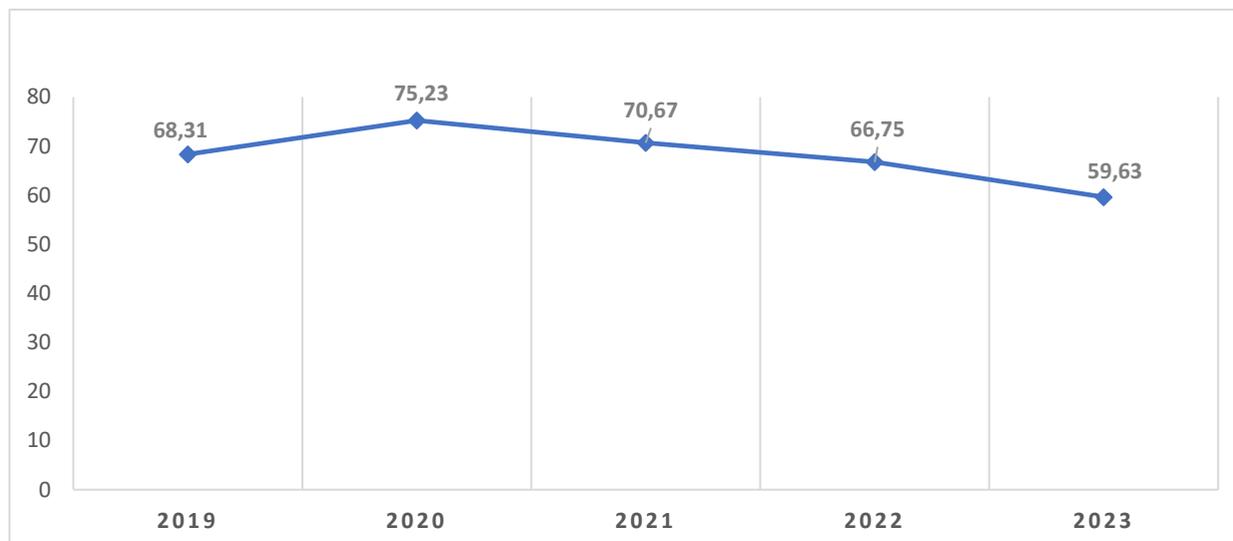
KETERANGAN	Tahun 2022	Tahun 2023	Perubahan	
			Tahun 2023 - Tahun 2022	
	Ton/Tahun	Ton/Tahun	Ton/Tahun	Persen (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I. JUMLAH TIMBULAN SAMPAH</b> (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	161.592,02	174.806,09	13.214,07	8,18
<b>II. JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH</b>	8.428,37	9.157,55	729,18	8,65
<b>Persentase pengurangan sampah</b>	5,22	5,24		
a. Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	0,00	4,01	4,01	
b. Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00	39,12	39,12	
c. Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	8.428,37	9.114,42	686,05	8,14
<b>III. JUMLAH PENANGANAN SAMPAH</b>	48.362,50	52.738,85	4.376,35	9,05
<b>Persentase penanganan sampah</b>	29,93	30,17		
d. Pemilahan/Pengumpulan	0,00	0,00	0,00	
e. Pengangkutan	0,00	0,00	0,00	
<i>Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)</i>	0,00	0,00	0,00	
f. Pengolahan	0,00	0,00	0,00	
<i>Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi</i>	0,00	0,00	0,00	
g. Pemrosesan akhir	48.362,50	52.738,85	4.376,35	9,05
<i>Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir</i>	48.362,50	52.738,85	4.376,35	9,05
<b>IV. SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)</b>	56.790,87	61.896,40	5.105,53	8,99
<b>Persentase sampah terkelola</b>	35,14	35,41		
<b>V. SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)</b>	104.801,15	112.909,69	8.108,54	7,74
<b>Persentase sampah tidak terkelola</b>	64,86	64,59		

Sumber: Dinas LHK Kabupaten Sumedang, 2024

Untuk sektor perumahan, sejak Tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m<sup>2</sup>; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Persentase RTHL Kabupaten Sumedang 3 (tiga) Tahun terakhir (2019-2023) terus menurun, terakhir pada angka 59,63 di Tahun 2023. Adapun perkembangan RTHL di Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 sebagaimana berikut.

**Grafik 2.43 RTHL Kabupaten Sumedang Periode 2019 – 2023 (%)**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

#### **2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi**

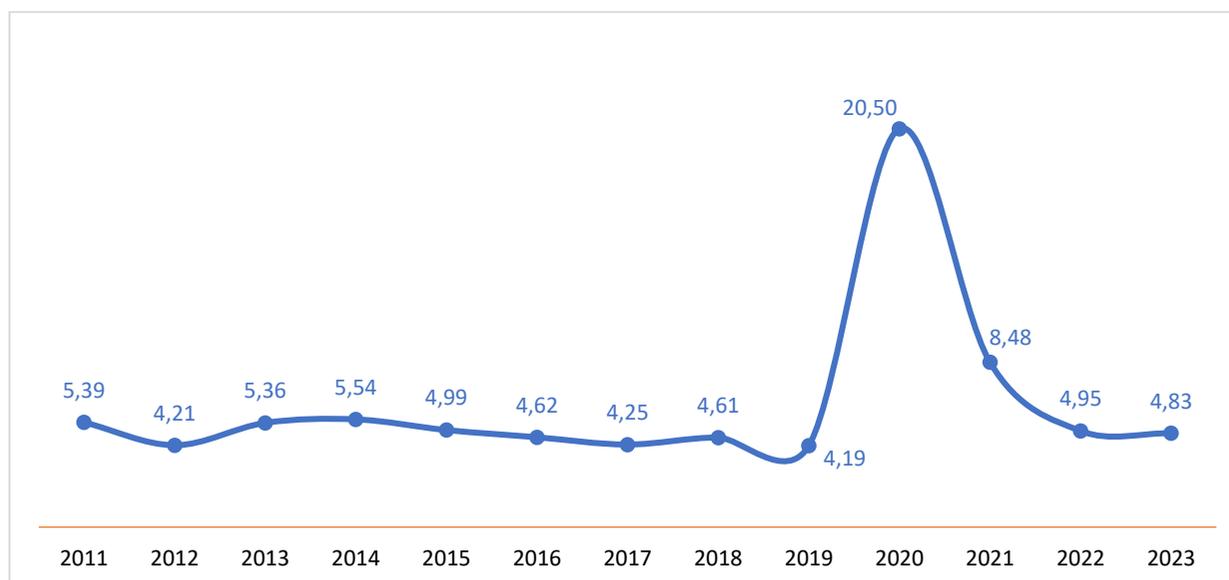
Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini sudah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Sumedang dari Tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 Tahun terakhir dicapai Tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada Tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada Tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19. Investasi yang dilakukan selama Tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.

**Grafik 2.44 Perkembangan ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Seiring pemulihan pandemi Covid-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Pencapaian di Tahun 2023 sebesar 4,83 mengindikasikan untuk meningkatkan 1 triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 4,83 triliun investasi. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi pada Tahun 2023 hampir kembali ke tingkat pra-pandemi (2019). Ini merupakan indikasi pemulihan ekonomi yang semakin baik, dengan investasi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, masih sedikit lebih tinggi dibandingkan 2019, menunjukkan ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi. Terkait hal ini beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mendorong investasi antara lain:

#### 1. Meningkatkan Efisiensi Investasi

Pemerintah Daerah perlu terus mendorong investasi yang lebih efisien dengan fokus pada sektor-sektor produktif dan berpotensi tinggi untuk pertumbuhan.

#### 2. Penguatan Infrastruktur

Investasi dalam infrastruktur dasar seperti transportasi, pengairan, dan digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

#### 3. Diversifikasi Ekonomi

Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor baru yang potensial dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap guncangan eksternal.

#### 4. Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Menginvestasikan dalam pendidikan dan pelatihan vokasional untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sehingga dapat mendukung produktivitas yang lebih tinggi dan efisiensi investasi.

Melalui langkah-langkah tersebut, Kabupaten Sumedang dapat terus memperbaiki efisiensi investasi dan stabilitas ekonominya, serta membangun daya saing yang lebih kuat di masa mendatang.

Selain dukungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung daya saing iklim investasi. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang adalah terus naik dari 75,32 (Tahun 2022) menjadi 76,95 (Tahun 2023). Angka 76,95 berarti dapat disimpulkan bahwa “pada populasi masyarakat di 26 kecamatan se-Kabupaten Sumedang, skor Indeks Kerukunan Umat Beragama di angka 76,95

yang berarti Indeks Kerukunan Umat Beragama termasuk ke dalam kategori Optimal (> 60.00).

**Tabel 2.12 Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023**

No	Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama	Skor 2022	Skor 2023
1	Toleransi	96,40	96,61
2	Kesetaraan	84,07	82,78
3	Kerjasama	33,40	51,89

Sumber: Bagian Kesra Setda Kabupaten Sumedang, 2024

## 2.4. Aspek Pelayanan Umum

### 2.4.1. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi yang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrument kebijakan yang dapat menjadi tolok ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokrasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi,

penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang mengagendakan Reformasi Birokrasi mencakup 9 (Sembilan) program, yaitu:

1. Program Manajemen Perubahan;
2. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Program Penguatan Pengawasan;
6. Program Penataan dan Penguatan Organisasi;
7. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
8. Program Penataan Tata Laksana; dan
9. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Hasil yang diharapkan setelah pelaksanaan Reformasi Birokrasi antara lain:

1. Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas penyusunan dan penerapan regulasi daerah yang efektif, efisien, harmonis dan tidak tumpang tindih;
4. Terlaksananya perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat miskin secara profesional;
5. Terwujudnya organisasi kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
6. Penerapan system, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien, serta berbasis e-government;
7. Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai;
8. Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, dan mempertahankan opini WTP dari BPK;

9. Penerapan SAKIP dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat di semua Perangkat Daerah, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan Kepala Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai SAKIP dari B menjadi A; dan
10. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 81,98. Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada Tahun 2023 mencapai 77,16, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Demikian juga capaian indikator lainnya di Tahun 2023, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,20, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Indeks Sistem Merit Tahun 2023 sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten.

Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemda Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,19. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3. Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya cukup baik sebesar 92,35. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91,50,

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2023 menyatakan bahwa Kabupaten Sumedang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 (sepuluh) kali berturut-turut, yang diindikasikan sebagai salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah.

**Tabel 2.13 Capaian Indikator Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten Sumedang Tahun 2022 – 2023**

No	Indikator	Satuan	2022	2023	Keterangan
1	Nilai Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB)	Poin	71,82	81,98	Naik Level dari BB menjadi A
2	Nilai SAKIP (Kementerian PANRB)	Poin	76,15	77,16	Kategori BB
3	Indeks Sistem Merit (KASN)	Poin	343,5	348	Sangat Baik
4	Indeks Profesionalitas ASN (BKN)	Poin	63,90	83,20	Meningkat
5	Indeks Pelayanan Publik (Kementerian PANRB)	Poin	4,66	4,19	Menuurun, karena perangkat Daerah yang dinilai berbeda
6	Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Ombudsman)	Poin	79,57	92,35	Naik level dari B menjadi A
7	Maturitas SPIP (BPKP)	Poin	2,80	3,20	Kapabilitas APIP Level 3
8	Opini BPK	-	WTP	WTP	Telah diraih 10 Tahun berturut-turut
9	Nilai MCP KPK	Poin	95,45	91,50	Indikator penilaian tiap Tahun berbeda

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan berbagai indikator tersebut di atas, tampak bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kinerja yang sangat baik di tingkat Jawa Barat maupun tingkat Nasional. Sebuah capaian luar biasa, yang dapat diraih dalam tempo 4 (empat) Tahun. Sebelumnya pada Tahun 2018, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang termasuk salah satu yang terbawah di Jawa Barat. Salah satu contohnya, capaian SAKIP Kabupaten Sumedang 48,58 atau peringkat ke 27 dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

#### **2.4.2. Pelayanan Publik**

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan publik di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang

pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2023 adalah 4,19. Nilai ini sedikit menurun dibanding Tahun 2022 yang mencapai 4,66 poin. Penurunan ini salah satunya karena perangkat daerah yang dinilai berbeda dari yang dinilai pada Tahun 2022.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) Tahun terakhir menunjukkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan. Nilai Tahun 2022 hasil penilaian Ombudsman adalah 79,57 dengan kategori B (opini Kualitas Tinggi). Untuk Tahun 2023 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,35 dengan kategori A (opini Kualitas Tertinggi).

**Tabel 2.14 Hasil Penilaian Kepatuhan atas Penerapan Standar Pelayanan Publik**

HASIL PENILAIAN OMBUDSMAN					
2022			2023		
NILAI	KATEGORI	OPINI	NILAI	KATEGORI	OPINI
79,57	B	KUALITAS TINGGI	92,35	A	KUAIITAS TERTINGGI

NO	UNIT LAYANAN	NILAI 2022	NILAI 2023	KATEGORI	OPINI
1.	Dinas Sosial	87,44	91,68	A	Kualitas Tertinggi
2.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu	85,38	93,39	A	Kualitas Tertinggi
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,83	92,61	A	Kualitas Tertinggi
4.	Dinas Pendidikan	79,29	87,52	B	Kualitas Tinggi
5.	UPTD Puskesmas Ranap Situ	80,97	94,64	A	Kualitas Tertinggi
6.	UPTD Puskesmas Ranap Sumedang Selatan	64,53	94,24	A	Kualitas Tertinggi
	Rata-Rata	79,57	92,35	A	Kualitas Tertinggi

Sumber: Ombudsman, 2024 (diolah)

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Sumedang semakin baik berdasarkan hasil penilaian dari pengguna layanan.

**Tabel 2.15 Indeks Kepuasan Masyarakat**

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TAHUN 2019-2023				
2019	2020	2021	2022	2023
82,27	83,38	85,60	88,19	88,51

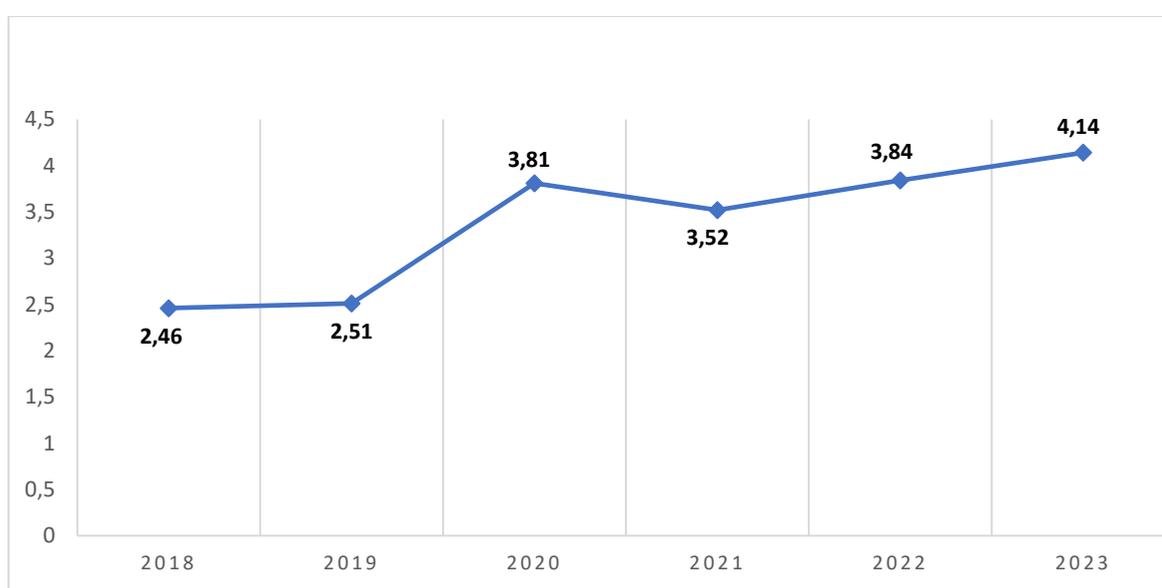
Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang, 2024

### 2.4.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Berikut merupakan capaian nilai SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

**Grafik 2.45 Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2018 – 2023**



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, 2024

Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diperoleh nilai per Domain dan Sub Domain sebagai berikut.

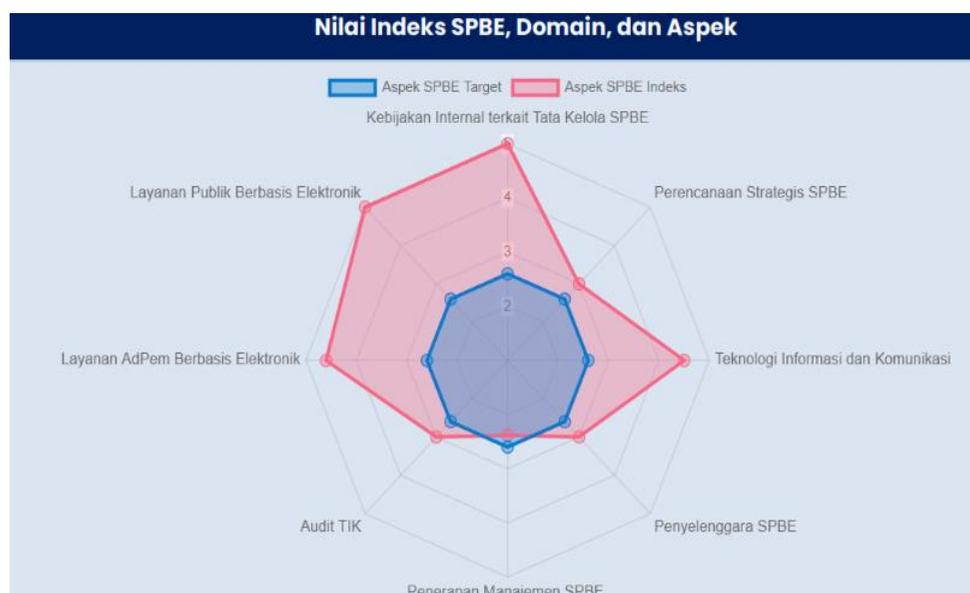
**Tabel 2.16 Nilai Domain dan Sub Domain SPBE Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

Nama Indeks	Nilai
Domain Kebijakan SPBE	5,00
<i>Kebijakan internal Tata Kelola SPBE</i>	5,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,60
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	3,00
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	4,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,55

Nama Indeks	Nilai
Penerapan Manajemen SPBE	2,38
Audit TIK	3,00
Domain Layanan SPBE	4,76
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	5,00

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

**Gambar 2.22 Nilai Indeks SPBE, Domain dan Aspek**



Sumber: Kementerian PAN-RB, 2024

Perolehan nilai tersebut berkat daya dukung berupa:

1. Telah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah secara lengkap memuat berbagai komponen SPBE, Peraturan tersebut telah direview dan ditindak lanjuti;
2. Adanya dokumen lengkap peta Proses Bisnis pada aspek perencanaan strategis;
3. Adanya standar pengembangan aplikasi dan pemanfaatan sistem penghubung layanan pada aspek teknologi dan komunikasi;
4. Adanya kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan pemangku kepentingan baik pihak swasta maupun masyarakat dalam penyelenggaraan SPBE;
5. Terpenuhinya pelaksanaan audit dengan perangkat standar nasional;
6. Pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum Pusat secara optimal. Pemanfaatan tersebut telah direview dan ditindaklanjuti; dan

7. Tercapainya proses tahapan integrasi pada aspek layanan publik serta melakukan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan Kabupaten.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indikator SPBE sesuai tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

#### **2.4.4. Inovasi Daerah**

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Dalam konteks daerah, pembangunan berbasis inovasi sudah menjadi keniscayaan, bahkan sudah menjadi kebutuhan. Hal ini seiring dengan tumbuhnya kesadaran bersama bahwa majunya suatu daerah sangat

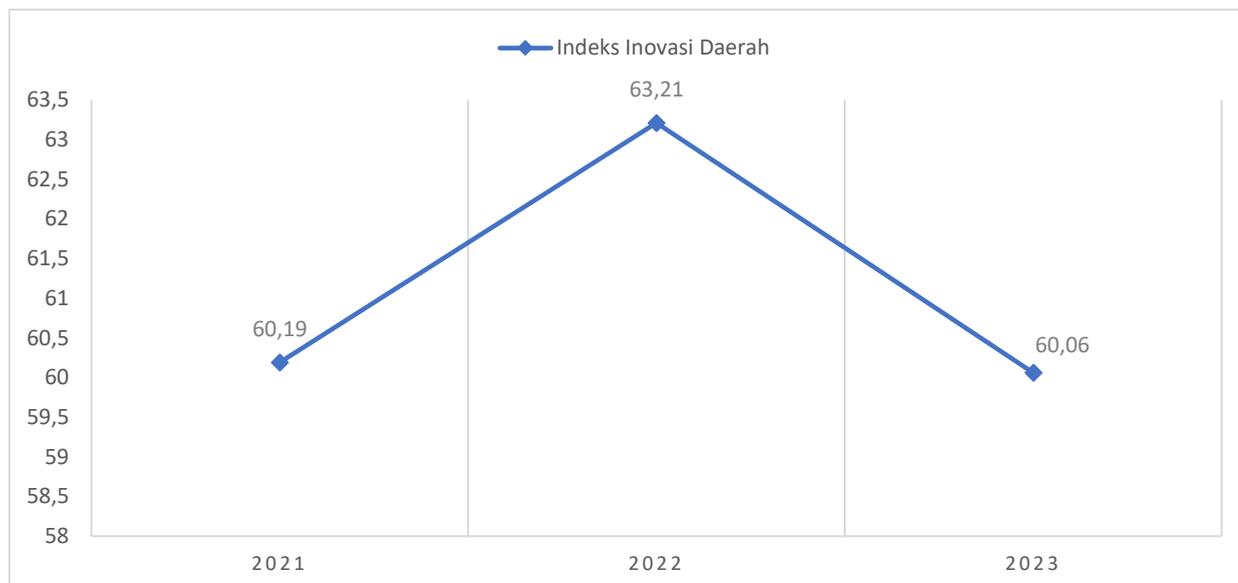
ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya acuan kebijakan terhadap berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kreativitas keinovasian daerah. Peningkatan keinovasian masyarakat serta merta akan meningkatkan dan memacu kreativitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar *stakeholders* pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyusunan inovasi di Kabupaten Sumedang. Dalam kurun waktu 2021-2022 telah tersusun sebanyak 330 inovasi.

Inovasi yang telah disusun oleh Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) dan pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) setiap Tahunnya. Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 2021-2023 adalah sebagai berikut.

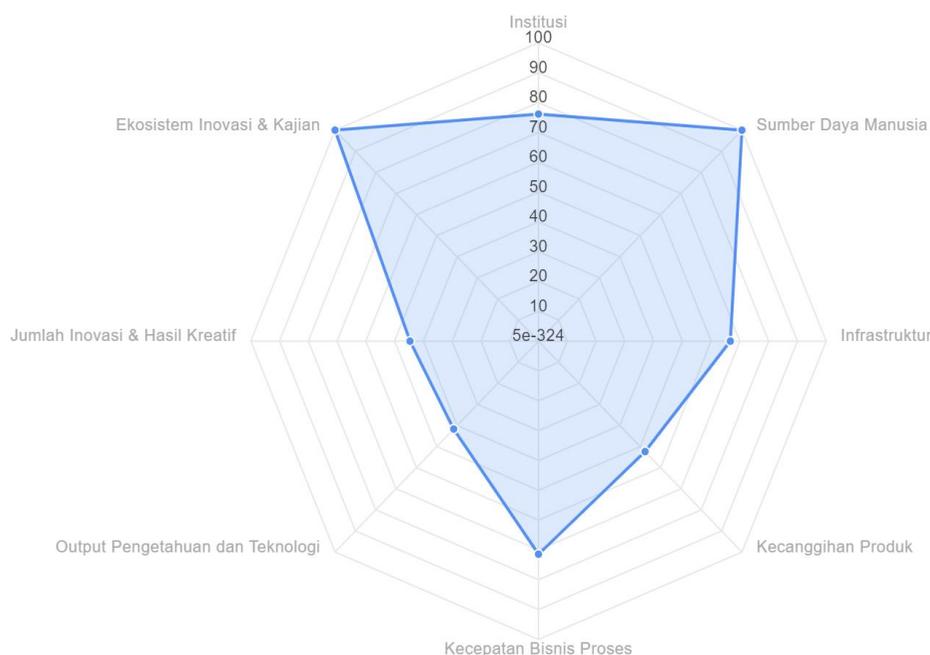
**Grafik 2.46 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang**



Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 Tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 21 indikator. Pada Tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Namun berdasarkan pengukuran tersebut, Kabupaten Sumedang masih mendapatkan predikat Sangat Inovatif. Adapun hasil Hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini.

**Gambar 2.23 Hasil Pengukuran Komponen Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023**



*Sumber: Indeks Inovasi Daerah Kemendagri, 2024*

Variabel yang memiliki indeks tinggi diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (100 point), Ekosistem Inovasi dan Kajian (100 point), Institusi (76,11 point), Kecepatan Bisnis Proses (71,43 point), Infrastruktur (66,67 point). Sedangkan variable yang masih rendah diantaranya Kecanggihan Produk (52,38 point), Jumlah Inovasi dan Hasil Kreatif (44,66 point) serta Output Pengetahuan dan Teknologi (41,67 point).

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah berjalan dengan baik di lapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

Kabupaten Sumedang memiliki beberapa inovasi unggulan yang menjuarai beberapa event inovasi tingkat nasional dan provinsi. Diantaranya penilaian inovasi tingkat nasional lainnya yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Inovasi yang lolos menjadi Top Inovasi yaitu Pantasi Mart (Pusat Pengadaan Fasilitas Sanitasi Masyarakat – Top 40/2017) dan Angka Stunting Sumedang Turun 20 Persen Dalam Waktu 3 Tahun dengan Aplikasi SIMPATI – Top 45/2023. Sedangkan di tingkat provinsi melalui Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB), Kabupaten

Sumedang telah menjuarai sebanyak 4 kali berturut-turut. Adapun inovasi tersebut adalah Sakip Desa (Juara 1 KIJB 2020); E Office Kabupaten Sumedang (Juara 1 KIJB 2021); Penurunan stunting melalui Aplikasi SIMPATI (Juara 1 KIJB 2022); dan WA KEPO (Juara 1 dan Best of The Best Innovation KIJB 2023).

Untuk menjaga agar semangat berinovasi tetap tinggi, maka dilaksanakan lomba inovasi tingkat kabupaten melalui Gelar Inovasi Daerah yang dilaksanakan setiap Tahunnya. Inovasi tersebut dinilai secara objektif oleh tim penilai independent. Peserta gelar inovasi terbagi menjadi 3 kategori yang meliputi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang telah mengusulkan inovasinya melalui aplikasi SIKOMPLIT (Sistem Informasi Kompilasi Inovasi Terintegrasi) pada E-Office Kabupaten Sumedang. Kedepannya, inovasi yang dilombakan tidak hanya terbatas pada 3 kategori tersebut, namun akan diperluas lagi sehingga dapat memotret kondisi inovasi di Kabupaten Sumedang secara lebih komprehensif.

## **2.5. Evaluasi RPJPD Tahun 2005 – 2025**

Evaluasi konsistensi sasaran RPJPD dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang dilakukan dengan melihat apakah sasaran Pembangunan RPJPD diintegrasikan ke dalam RPJMD menjadi indikator kinerja pembangunan pada periode tertentu atau tidak. Jika dalam rentang periode RPJPD 2005-2025 terdapat periode RPJMD yang mengintegrasikan sasaran RPJPD menjadi indikator kinerja pembangunannya, maka evaluasi ini akan menilai bahwa sasaran RPJPD telah diterapkan dalam RPMD.

**Misi 1: Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat.**

**Tabel 2.17 Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 1**

Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang misi 1

RPJPD 2005-2025		RPJMD	Konsistensi Penerapan RPJPD Pada Tiap Periode RPJMD					Kesesuaian/ Relevans		
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	2005-2008	2008-2014	2014-2019	2019-2023	Jumlah	Ya	Tidak	
Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat	Terwujudnya masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat	IPM		1	1	1	3	√		
		Rata-Rata Lama Sekolah		1	1	1	3	√		
		Harapan Lama Sekolah		1	1	1	3	√		
		Angka Harapan Hidup		1	1	1	3	√		
		Indeks Pembangunan Gender					1	1	√	
		Indesk Pemberdayaan Gender					1	1	√	
		Indeks Pembangunan Pemuda					1	1	√	
		Persentase Penduduk Miskin		1	1	1	3	√		
		Pengangguran Terbuka		1	1	1	3	√		

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

**Misi 2: Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industry.**

**Tabel 2.18 Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 2**

RPJPD 2005-2025		RPJMD	Konsistensi Penerapan RPJPD Pada Tiap Periode RPJMD					Kesesuaian/ Relevans	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	2005-2008	2008-2014	2014-2019	2019-2023	Jumlah	Ya	Tidak
Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri	Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri	Laju Pertumbuhan Ekonomi		1	1	1	3	√	
		Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan				1	1	√	
		Laju pertumbuhan sector perdagangan besar, Eceran, reparasi mobil dan sepeda Motor				1	1	√	
		Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan				1	1	√	
		Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan				1	1	√	
		Akomodasi dan Makan Minum							
		Indeks Kualitas Infrastruktur				1	1	√	
		Persentase Peningkatan Penanaman Modal di Kabupaten Sumedang				1	1	√	
		Indeks Resiko Bencana				1	1	√	
		Indeks Ketahanan Daerah				1	1	√	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			1	1	2	√	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

**Misi 3: Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila.**

**Tabel 2.19 Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 3**

Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang misi 3

RPJPD 2005-2025		RPJMD	Konsistensi Penerapan RPJPD Pada Tiap Periode RPJMD					Kesesuaian/Relevans	
Misi	Sasaran Pokok		Indikator Kinerja	2005-2008	2008-2014	2014-2018	2019-2023	Jumlah	Ya
Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila	Terwujudnya masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila	Indeks kerukunan beragama		1	1	1	3	√	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

**Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.**

**Tabel 2.20 Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 4**

Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang misi 4

RPJPD 2005-2025		RPJMD	Konsistensi Penerapan RPJPD Pada Tiap Periode RPJMD					Kesesuaian/Relevans	
Misi	Sasaran Pokok		Indikator Kinerja	2005-2008	2008-2014	2014-2019	2019-2023	Jumlah	Ya
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik,	Indeks RB		0	1	1	2	√	
		Indeks Profesional ASN		0	1	1	2	√	
		Nilai Sakip		1	1	1	3	√	
		Nilai LPPD		0	1	1	2	√	
		Indeks Pelayanan Publik		0	1	1	2	√	
		Indeks SPBE		0	1	1	2	√	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

**Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.**

**Tabel 2.21 Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang Misi 5**

Konsistensi Sasaran RPJPD dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Sumedang misi 5

RPJPD 2005-2025		RPJMD	Konsistensi Penerapan RPJPD Pada Tiap Periode RPJMD					Kesesuaian/ Relevans	
Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja	2005-2008	2008-2013	2014-2018	2018-2023	Jumlah	Ya	Tidak
Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia	Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia	IPG	0	1	1	1	3	√	
		IDG	0	1	1	1	3	√	

Sumber: BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan bahwa terdapat konsistensi antara RPJPD dan RPJMD pada sasaran yang sedang dievaluasi. Berikut akan disajikan penjelasan mengenai konsistensi antara RPJPD dan RPJMD Kabupaten Sumedang yang dibagi berdasarkan misi RPJPD-nya.

Capaian Pembangunan di Kabupaten Sumedang dalam rangka mewujudkan visi “Sumedang Sejahtera, Agamis dan Demokratis Tahun 2025” telah menunjukkan berbagai kemajuan. Dalam proses pelaksanaan pembangunan tentunya dihadapkan kepada berbagai dinamika yang berkembang dan cukup kompleks. Berbagai capaian yang diraih mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mendorong Pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Dengan adanya berbagai dinamika tentunya berdampak pada Tingkat ketercapaian indikator Pembangunan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan Pembangunan periode selanjutnya.

Evaluasi Capaian kinerja RPJPD dilakukan untuk menilai capaian dari misi, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan melihat capaian indikator kinerja pembangunan yang diturunkan pada tiap periode RPJMD. RPJPD Kabupaten Sumedang memiliki satu visi dan 5 (lima) misi. Misi tersebut kemudian dijabarkan melalui 5 (lima) sasaran pokok pembangunan. Sasaran yang secara operasional dijabarkan melalui arah kebijakan/pembangunan, kemudian diterapkan dan dilaksanakan melalui indikator kinerja pembangunan yang diintegrasikan dalam RPJMD pada tiap periodenya.

Keberhasilan Pembangunan ini juga tidak terlepas dari arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 yang telah dijabarkan dalam 4 (empat) periode RPJMD Kabupaten Sumedang dan dioperasionalkan dalam perencanaan Pembangunan Tahunan di dalam dokumen RKPD.

**Tabel 2.22 Indikator Makro Kabupaten Sumedang**

Variabel	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Kemiskinan</b>															
Jumlah Penduduk Miskin	Ribu Jiwa	141.40	139.40	132.90	127.40	122.00	129.00	120.60	120.60	112.10	104.20	118.40	126.30	120.12	111.39
Persentase Penduduk Miskin	Persen	12.94	12.48	11.87	11.31	10.78	11.36	10.57	10.53	9.76	9.05	10.26	10.71	10.14	9.36
Kedalaman Kemiskinan	Poin	1.93	2.03	1.79	1.48	1.31	1.82	1.57	1.97	1.72	1.05	1.72	1.72	1.98	1.64
Keparahan Kemiskinan	Poin	0.47	0.50	0.44	0.32	0.26	0.45	0.35	0.54	0.47	0.21	0.42	0.46	0.53	0.35
<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>															
IPM	Poin	66.04	66.16	67.36	68.47	68.76	69.29	69.45	70.07	70.99	71.46	72.48	72.64	73.53	74.02
UHH	Tahun	71.68	71.74	71.8	71.86	71.89	71.91	71.96	72	72.14	72.29	74.30	74.49	74.77	75.04
RLS	Tahun	7.51	7.51	7.51	7.51	7.66	7.66	7.72	7.98	8.17	8.27	8.51	8.52	8.72	8.73
HLS	Tahun	10.9	10.93	11.95	12.83	12.89	12.9	12.91	12.93	12.94	12.96	12.97	12.98	12.99	13.01
Pengeluaran per kapita (PPP)	Juta Rupiah	8.60	8.65	8.70	8.83	8.84	9.28	9.34	9.57	10.15	10.41	10.22	10.26	10.78	11.14
TPT	Persen	7.9	8.04	7.42	6.41	7.51	9.00	NA	7.15	7.52	7.63	9.89	9.18	7.72	6.94
Gini Ratio	Poin	0.267	0.325	0.367	0.337	0.328	0.349	0.367	0.387	0.420	0.344	0.384	0.359	0.394	0.366
LPE	Persen	4.22	4.79	6.56	4.84	4.71	5.25	5.7	6.23	5.79	6.33	-1.12	3.17	5.03	5.01
PDRB (ADHB)	Trilyun Rupiah	14.69	16.39	18.14	20.26	22.35	24.83	27.01	29.64	32.53	35.44	35.49	37.25	40.22	43.33
PDRB (ADHK)	Trilyun Rupiah	14.69	15.39	16.40	17.19	18.00	18.95	20.03	21.28	22.51	23.93	23.67	24.41	25.64	26.88
PDRB per kapita (ADHB)	Juta Rupiah	13.33	14.77	16.23	18.01	19.75	21.83	23.65	25.85	28.29	30.34	30.82	32.13	34.46	36.77
PDRB per kapita (ADHK)	Juta Rupiah	13.33	13.86	14.67	15.28	15.91	16.66	17.54	18.56	19.57	20.49	20.55	21.06	21.97	22.81

2019 : Baseline (Sebelum Pandemi)

Capaian lebih baik

Capaian lebih buruk

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Kemajuan dan keberhasilan Pembangunan Kabupaten Sumedang dapat digambarkan dengan capaian indikator-indikator makro Pembangunan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Pertumbuhan Ekonomi

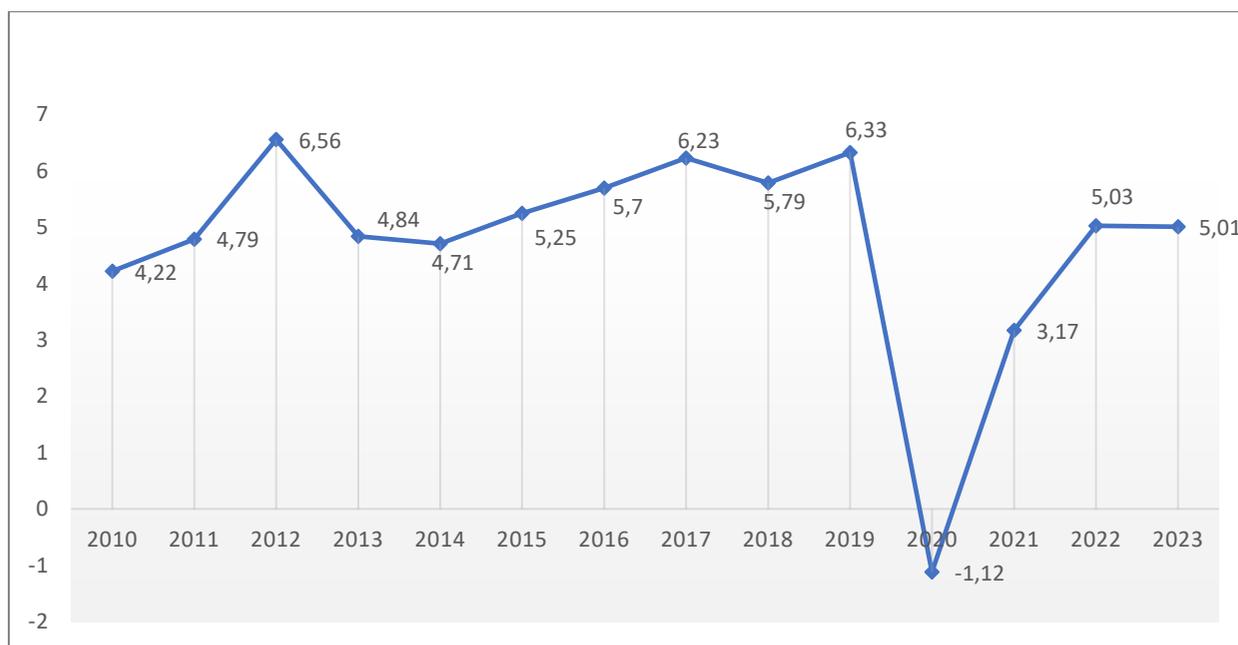
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2019 menunjukkan tren positif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2019 sebesar 5,44%. Pertumbuhan ekonomi Tahun 2012, 2017 dan 2019 cukup tinggi menembus di atas 6%. Sementara pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2010, 2011, 2013 dan 2014 melambat dengan pertumbuhan dibawah 5%.

Memasuki Tahun 2020 seiring dengan merebaknya Pandemi Covid-19 perekonomian mengalami guncangan yang cukup signifikan tidak hanya di Kabupaten Sumedang namun terjadi juga di Jawa Barat dan Nasional secara lebih luas. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 turun signifikan sampai menembus minus (-) 1,12%.

Ekonomi di Kabupaten Sumedang Kembali tumbuh positif 3,17% pada Tahun 2021, kemudian naik menjadi 5,03 pada Tahun 2023 dan pada

Tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga pertumbuhan ekonomi berada pada 5,01%. Perlambatan ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Sumedang tetapi rata-rata Jawa Barat dan Nasional juga mengalami perlambatan.

**Grafik 2.47 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Pada periode 2019-2023 Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dari Tahun ke Tahun masih berganti-ganti. Hal ini menunjukkan belum adanya sektor yang betul-betul menjadi andalan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sumedang. Pada Tahun 2019 yang menjadi sumber pertumbuhan terbesar adalah industri pengolahan sebesar 2,74% kemudian bergeser ke sektor Informasi dan Komunikasi pada Tahun 2020 sebesar 0,89%. Pada Tahun 2023 sumber pertumbuhan ekonomi kembali berubah dimana sektor konstruksi paling dominan di angka 1,46% dan Tahun 2022 kembali bergeser ke sektor industri pengolahan sebesar 1,40%. Pada Tahun 2023 sektor utama yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi di Sumedang adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 1,57%.

**Tabel 2.23 Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumedang  
Tahun 2019 – 2023**

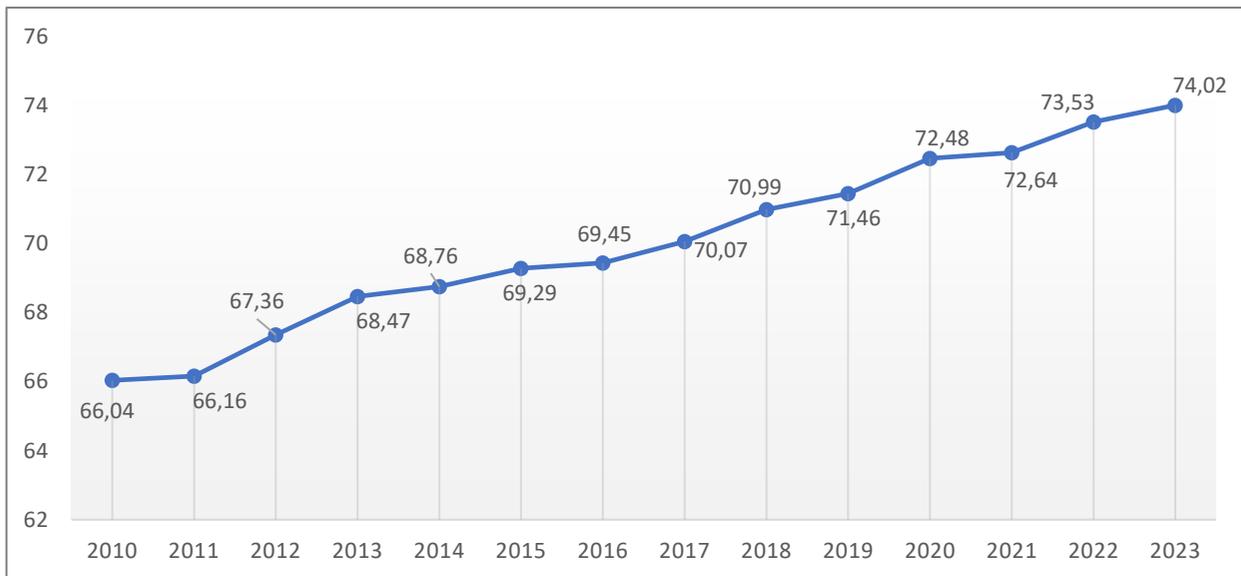
Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.41	0.56	(0.22)	0.97	0.53
Pertambangan dan Penggalian	(0.00)	0.00	0.01	0.00	(0.00)
<b>Industri Pengolahan</b>	<b>2.74</b>	(0.29)	0.50	<b>1.40</b>	0.19
Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	(0.01)	0.03	0.01	0.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.00	(0.00)	0.00	0.00	0.00
<b>Konstruksi</b>	0.28	(0.42)	<b>1.46</b>	0.41	0.33
<b>Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	0.82	(1.13)	0.59	0.46	<b>1.57</b>
Transportasi dan Pergudangan	0.24	(0.32)	(0.19)	0.53	0.59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.28	(0.20)	0.09	0.74	0.50
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	0.29	<b>0.89</b>	0.19	0.22	0.23
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.30	(0.08)	0.17	(0.05)	0.16
Real Estate	0.13	(0.08)	0.12	0.08	0.10
Jasa Perusahaan	0.01	(0.01)	-	0.01	0.02
Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.20	(0.13)	0.03	(0.10)	0.16
Jasa Pendidikan	0.40	0.23	0.05	0.01	0.32
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.08	0.04	0.09	0.05	0.07
Jasa Lainnya	0.11	(0.06)	-	0.39	0.24
<b>Pertumbuhan PDRB</b>	<b>6.33</b>	<b>(1.12)</b>	<b>2.97</b>	<b>5.03</b>	<b>5.01</b>

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

## 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perkembangan Pembangunan manusia di Kabupaten Sumedang terus menunjukkan peningkatan terlihat dari tren positif yang ditunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang. Target IPM Kabupaten Sumedang selalu tercapai setiap Tahunnya, namun dari sektor kunci seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup ini capaian pengeluaran per kapita merupakan yang paling rendah dibanding Umur Harapan Hidup (UHH), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) maupun Harapan Lama Sekolah (HLS), Dimana nilainya di bawah rata-rata nasional maupun Jawa Barat.

**Grafik 2.48 Perkembangan IPM Kabupaten Sumedang**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Melihat perkembangan IPM Kabupaten Sumedang, upaya untuk meningkatkan capaian variabel kunci pembentuk IPM perlu terus dilakukan, sehingga diharapkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sumedang dapat terus ditingkatkan.

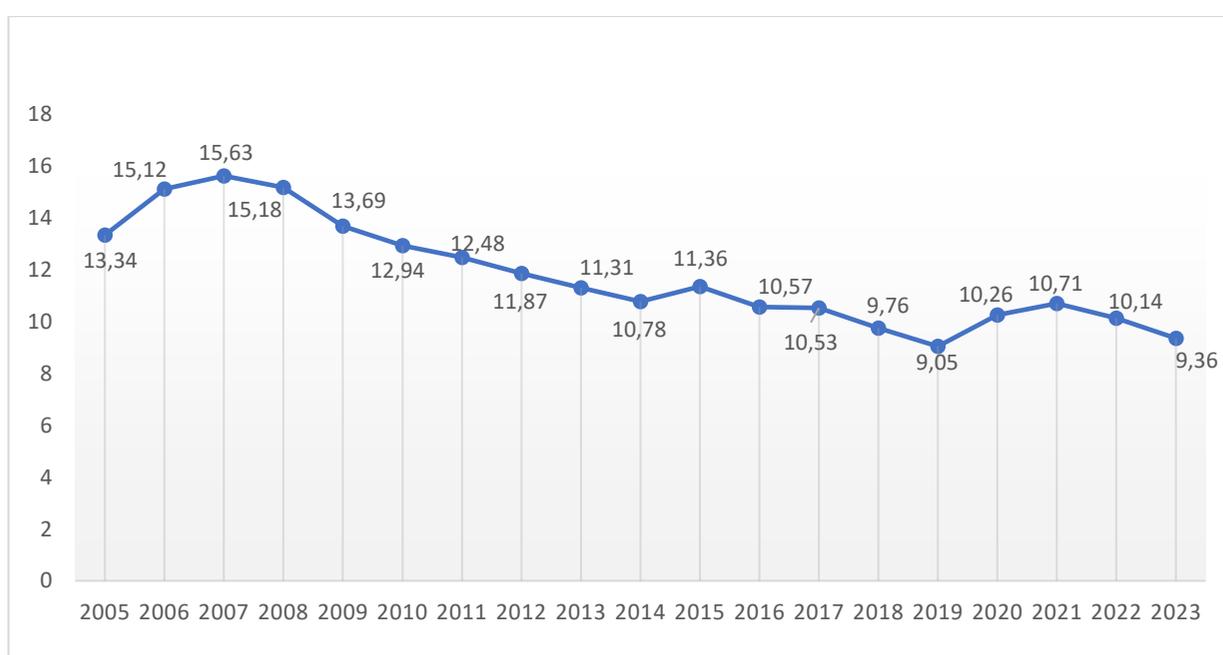
### 3. Kemiskinan

Dalam rentang periode Tahun 2005–2007, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang mengalami kenaikan dari 13,34% Tahun 2005 menjadi 15,63% pada Tahun 2007. Memasuki periode Tahun 2008-2014 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang terus menurun hingga mencapai angka 10,78% Tahun 2014 dan Kembali naik sampai angka 11,36% di Tahun 2015. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2006 diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dunia, pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), konversi minyak tanah ke gas, dan tekanan inflasi (inflasi nasional mencapai 17,11 persen). Sementara itu kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin Tahun 2015 diakibatkan oleh kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada kebijakan moneter negara mitra dagang, pelemahan nilai tukar rupiah yang mengakibatkan menurunnya nilai ekspor, dan tekanan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat melemah.

Tahun 2016-2019 perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang terus menurun bahkan mulai 2018-2019 menembus 1 digit di angka 9,05% pada Tahun 2019. Pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Tahun 2020

mengakibatkan angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang Kembali naik menjadi 2 (dua) digit yaitu 10,26% Tahun 2020 dan 10,71% Tahun 2021. Dengan berbagai upaya pemerintah yang dilakukan terutama penanganan Covid-19 baik di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat maupun Nasional hasilnya angka kemiskinan di Tahun 2022 kembali turun pada angka 10,14% bahkan pada Tahun 2023 kembali menembus satu digit di angka 9,36%.

**Grafik 2.49 Angka Kemiskinan di Kabupaten Sumedang Tahun 2005 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Capaian Tingkat kemiskinan Kabupaten Sumedang di Tahun 2023 masih berada di atas rata-rata Jawa Barat, namun progress penurunannya lebih cepat dari Jawa Barat, dan jika dilihat dari gap penurunan (0,78 persen poin) berada di peringkat 3 terbaik di Jawa Barat.

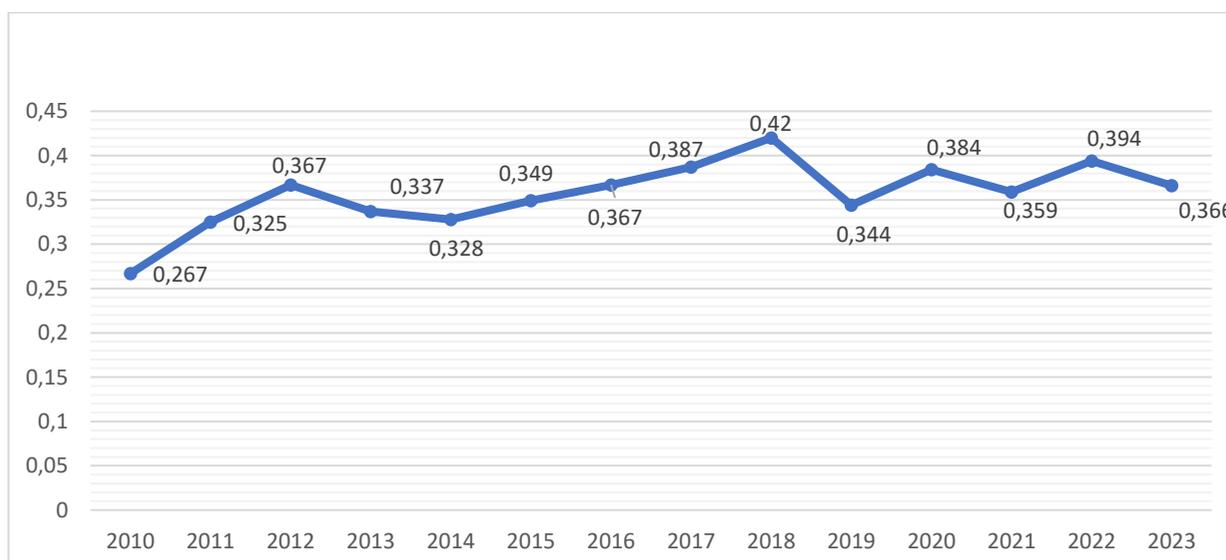
#### 4. Ketimpangan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur Tingkat Ketimpangan Pembangunan di suatu daerah adalah dengan Rasio Gini (*Gini Ratio*). Semakin tinggi nilai ratio gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Jika ratio gini di suatu daerah meningkat, diartikan bahwa jurang ketimpangan pendapatan masyarakat daerah tersebut semakin melebar.

Berbagai tantangan dihadapi dalam penanganan ketimpangan di Kabupaten Sumedang antara lain terkait dengan peningkatan aksesibilitas

bagi semua warga masyarakat agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya dan peluang, antara lain melalui perbaikan infrastruktur yang menghubungkan antar wilayah terutama ibu kota kecamatan dan mendekatkan akses layanan publik. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara luas melalui kolaborasi kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media dan sektor swasta dalam balutan *Pentahelix*.

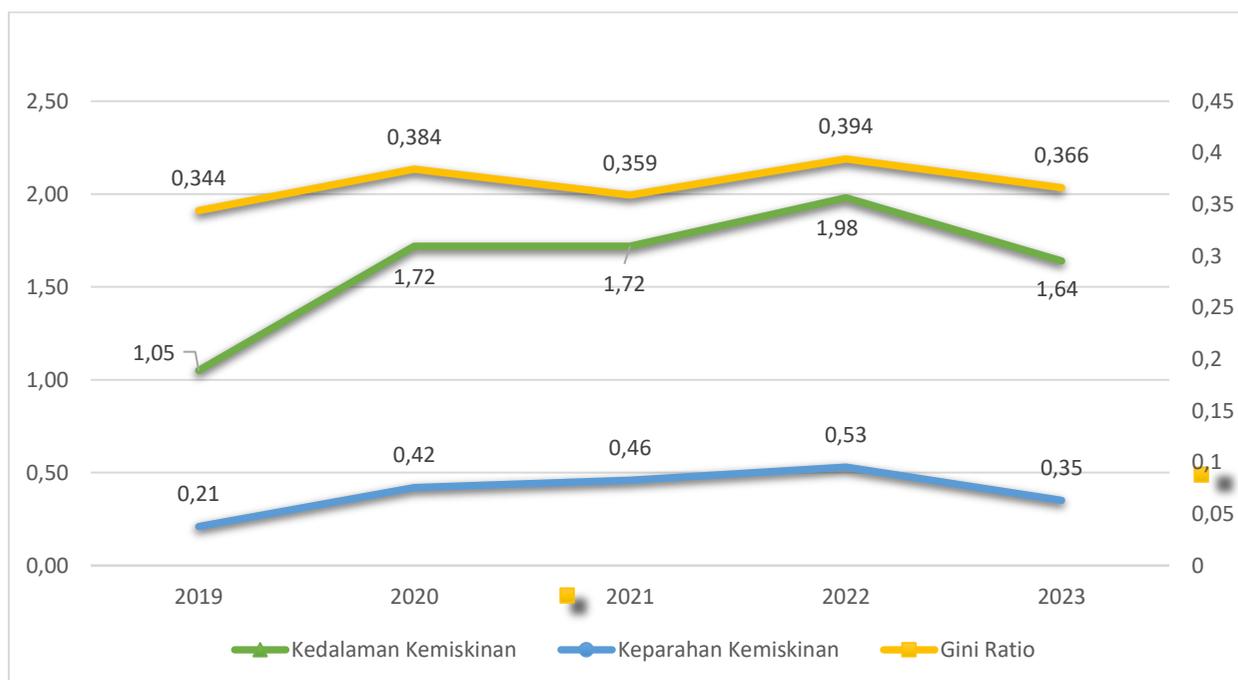
**Grafik 2.50 Perkembangan Gini Ratio di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, diolah

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi. Hal yang sama juga terlihat di level provinsi maupun nasional namun tidak begitu signifikan. Pada saat Nasional dan Jawa Barat ketimpangan Tahun 2023 dibanding Tahun 2022 menunjukkan tren meningkat Kabupaten Sumedang justru menunjukkan penurunan yaitu di angka 0,366. Pola tren data ketimpangan di Sumedang ternyata relatif sejalan dengan kedalaman dan keparahan kemiskinan.

**Grafik 2.51 Hubungan Gini Ratio Dengan Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2019 – 2023**

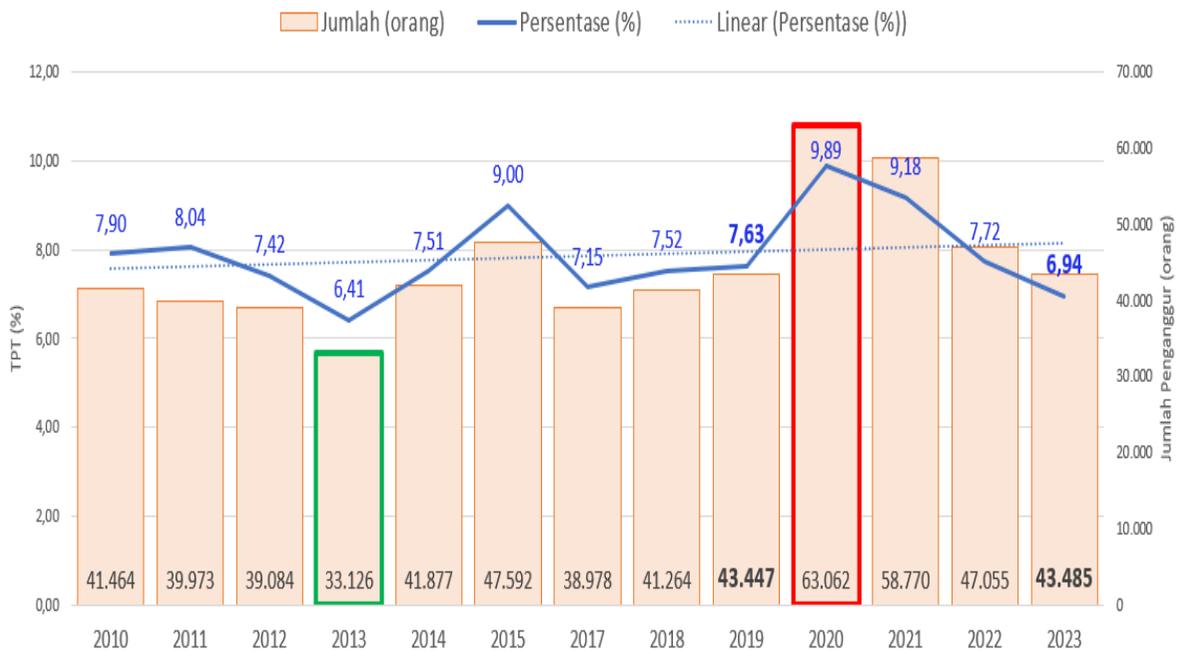


Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

## 5. Pengangguran

Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sumedang selama periode Tahun 2005-2023 cukup fluktuatif pada besaran satu digit. Dimana TPT paling rendah terjadi pada Tahun 2013 sebesar 6,41% dan TPT tertinggi terjadi pada Tahun 2020 pada saat pucak Pandemi Covid-19 yang mencapai 9,89%. Namun demikian mulai Tahun 2021-2023 TPT di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren menurun, bahkan untuk Tahun 2023 kondisi ketenagakerjaan lebih baik, ditandai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang disertai penurunan pengangguran, artinya sudah banyak Angkatan kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan setelah sebelumnya terdampak pandemi Covid-19. Bahkan TPT jauh lebih baik dibandingkan Tahun 2019 sebelum pandemi.

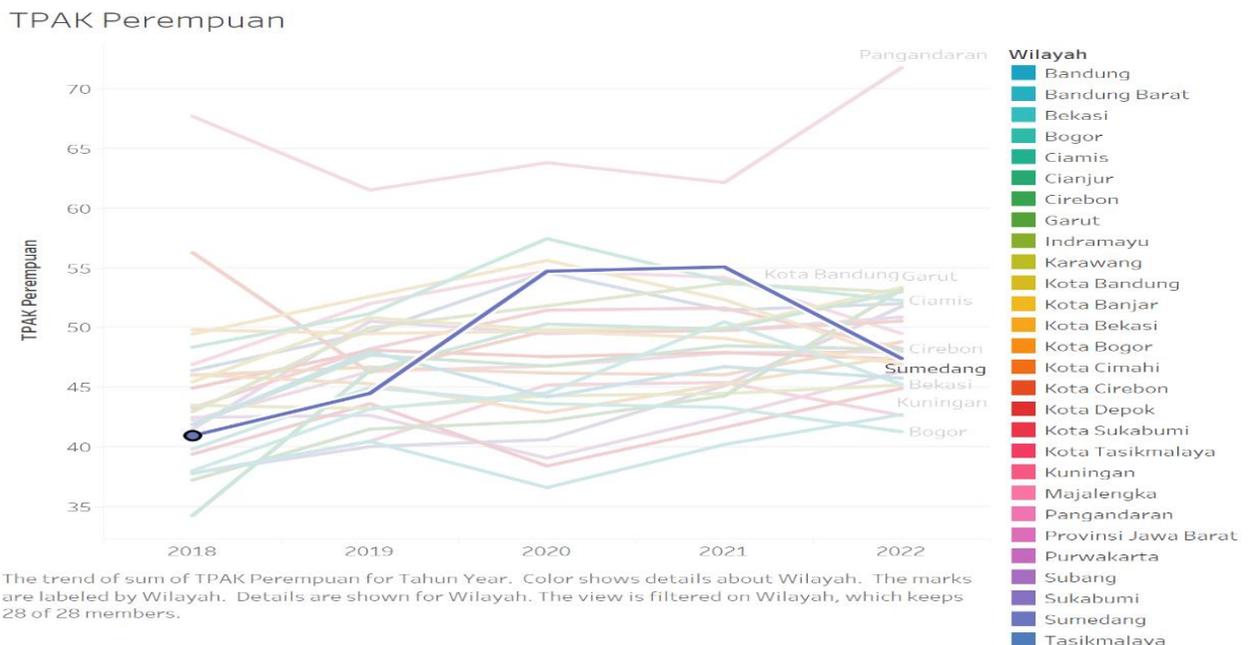
**Grafik 2.52 Jumlah Persentase Pengangguran di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

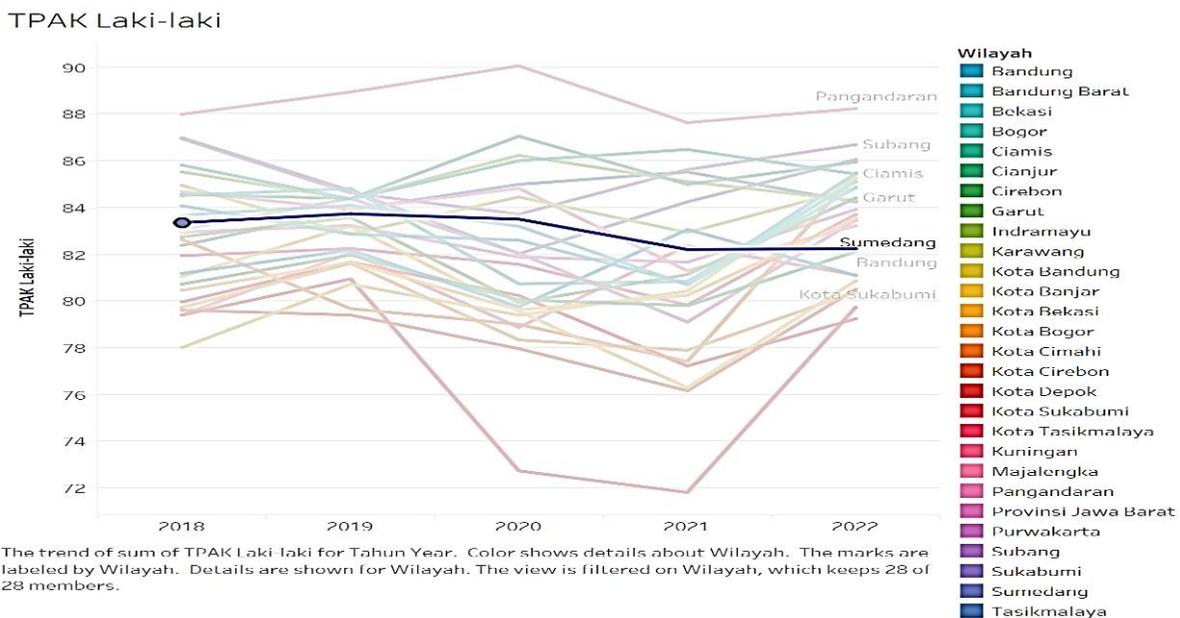
TPAK Perempuan Sumedang meningkat tajam (23%) saat pandemi covid-19 dan menurun setelahnya, mengindikasikan banyak perempuan masuk menjadi angkatan kerja, sementara pada Laki-laki sebaliknya. Namun, berdasarkan data Sakernas 2019-2021, banyak angkatan kerja perempuan minim keahlian yang akhirnya berdampak pada peningkatan TPT.

**Grafik 2.53 TPAK Perempuan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2022**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Sakernas), 2024 (diolah)

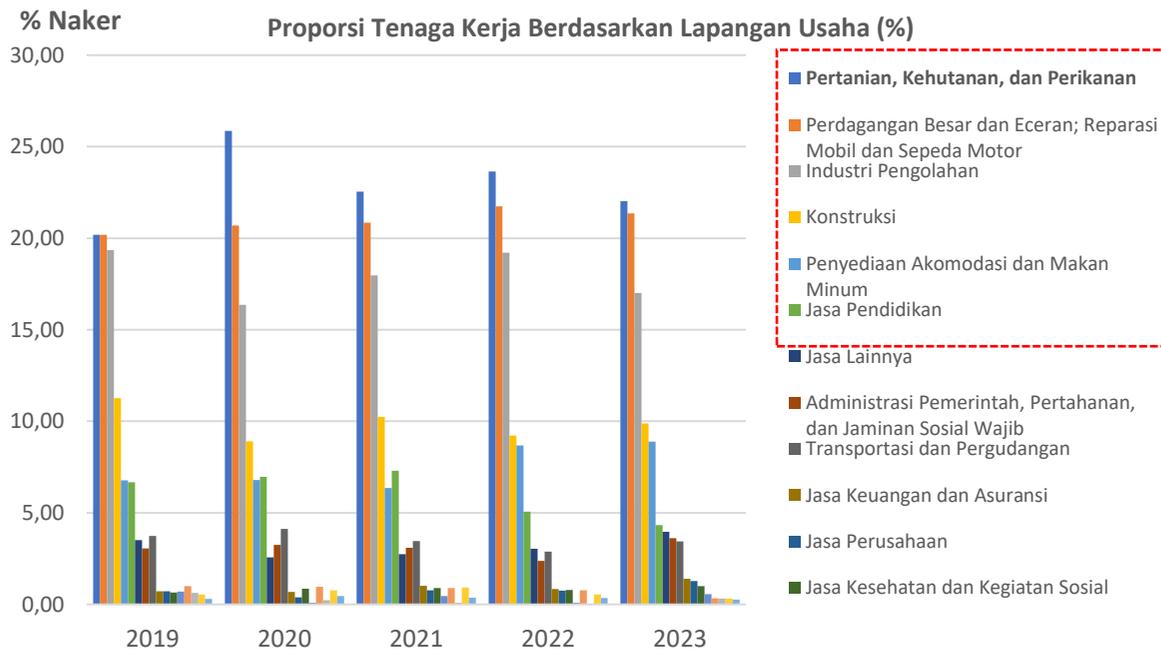
**Grafik 2.54 TPAK Laki-laki di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (Sakernas), 2024 (diolah)

Serapan tenaga kerja terbesar masih di sektor pertanian, terutama ketika terjadi pandemi COVID-19 (2020).

**Grafik 2.55 Proporsi Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (%)**

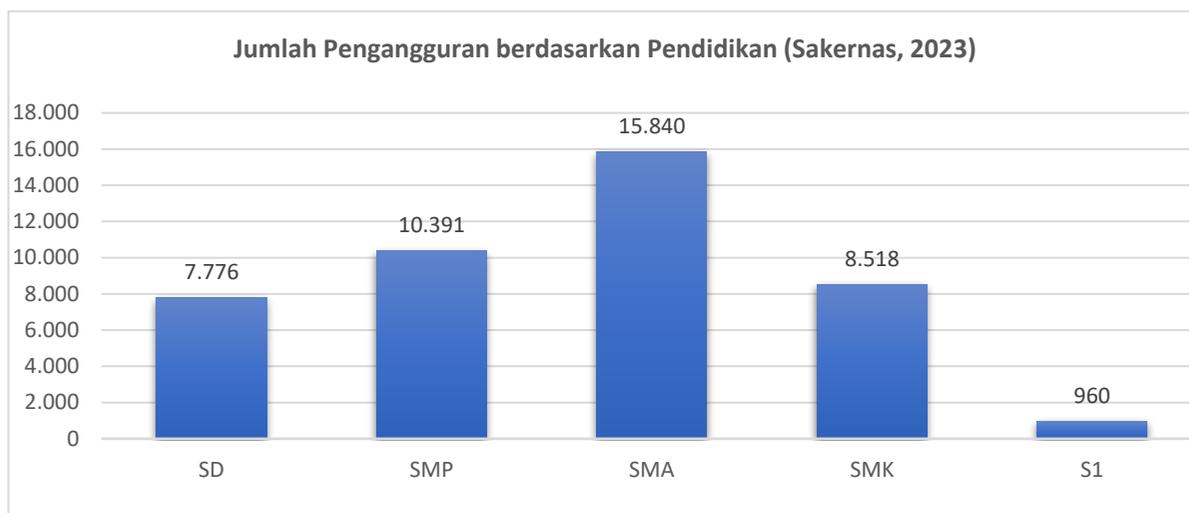


Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Sebaran jumlah pengangguran berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 masih didominasi lulusan SMA sebanyak 15.840 orang disusul lulusan SMP sebesar 10.391 orang. Lulusan

S1 menjadi penyumbang pengangguran paling rendah di Kabupaten Sumedang.

**Grafik 2.56 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang (Sakernas), 2024

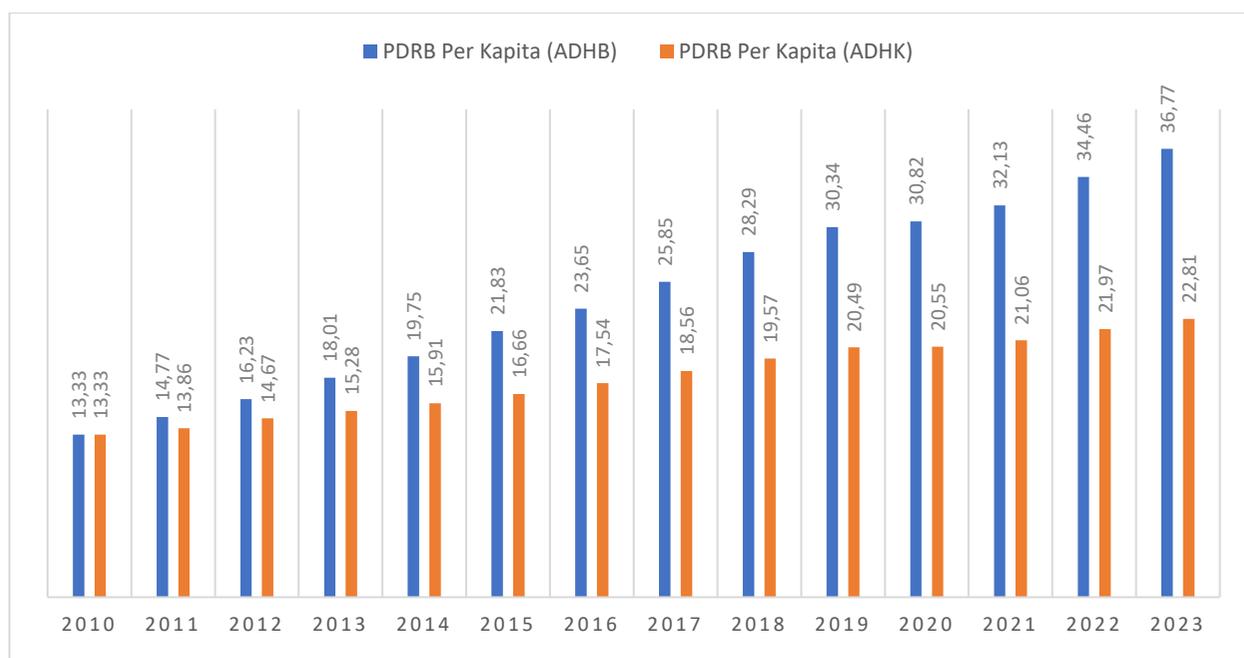
Secara umum untuk Tahun 2023 pencapaian TPT di Kabupaten Sumedang sudah lebih rendah dari rata-rata TPT kab/kota di Jabar. Namun, pada 2023 progress penurunannya masih sedikit di bawah rata-rata Jabar.

## 6. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Sumedang terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama periode waktu 2005-2023. Peningkatan PDRB per kapita yang terus menerus ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi yang positif di Kabupaten Sumedang. Tantangan yang perlu diperhatikan untuk lebih meningkatkan kinerja PDRB ini antara lain menjaga produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat. Kestabilan Indeks Perkembangan Harga (IPH), juga perlu tetap dijaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk juga perlu diperhatikan mengingat PDRB per kapita sangat erat terkait dengan jumlah penduduk.

PDRB per Kapita Kabupaten Sumedang relatif lebih resiliens saat terjadi pandemi Covid-19 dibandingkan rata-rata Jawa Barat yang masih tumbuh positif, namun gap nya masih cukup lebar.

**Grafik 2.57 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Sumedang Tahun 2010 – 2023**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024

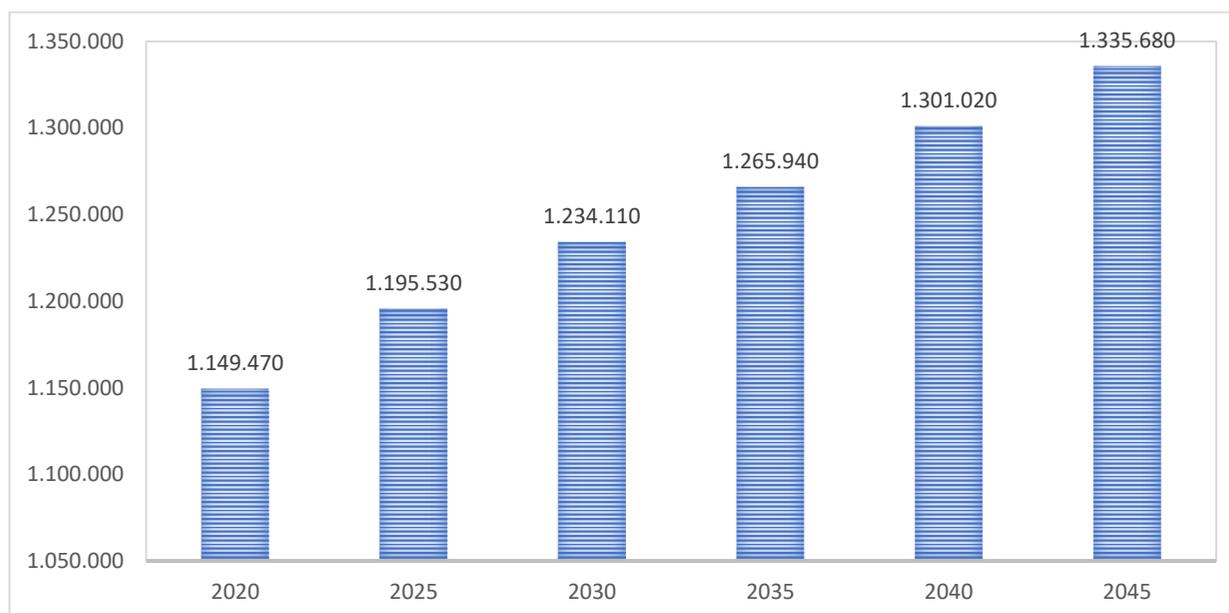
## 2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

### 2.6.1. Tren Demografi

Dengan melihat perkembangan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang diperkirakan sampai Tahun 2045 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang akan terus meningkat dibarengi dengan perubahan komposisi penduduknya. Proyeksi penduduk perlu dilakukan karena dinamika struktur penduduk yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Perubahan struktur penduduk umumnya terjadi pada distribusi usia, jenis kelamin, Pendidikan dan pekerjaan.

Berdasarkan data BPS, penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2023 jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang sebanyak 1.178.235 jiwa yang terdiri atas 593.815 jiwa penduduk laki-laki dan 584.420 jiwa penduduk Perempuan. Pada Tahun 2045 diperkirakan berjumlah 1.335.680 jiwa. Adapun proyeksi penduduk untuk periode lima Tahunan sebagaimana grafik berikut.

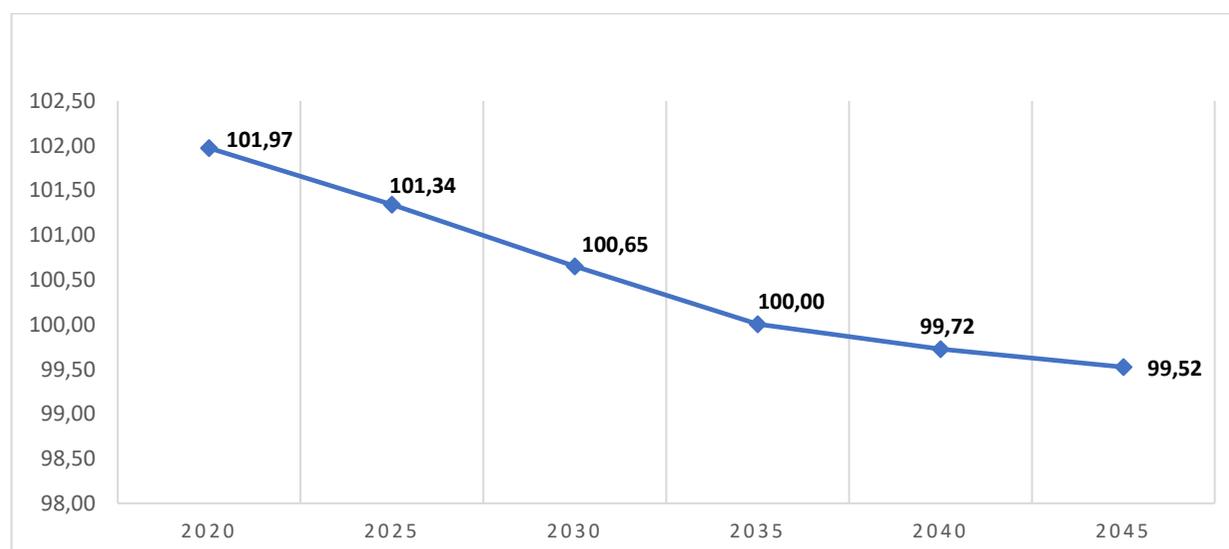
**Grafik 2.58 Proyeksi jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Komposisi penduduk di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2023 masih didominasi laki-laki dibandingkan dengan Perempuan. Namun mulai Tahun 2035 diperkirakan komposisi penduduk laki-laki dan Perempuan akan seimbang, bahkan jumlah penduduk Perempuan akan lebih dominan mulai Tahun 2040. Perubahan komposisi ini dapat digambarkan dengan *sex ratio* dimana Tahun 2040 berada pada angka 99,72 artinya dari setiap 99 orang laki-laki terdapat 100 orang Perempuan, sebagaimana grafik berikut.

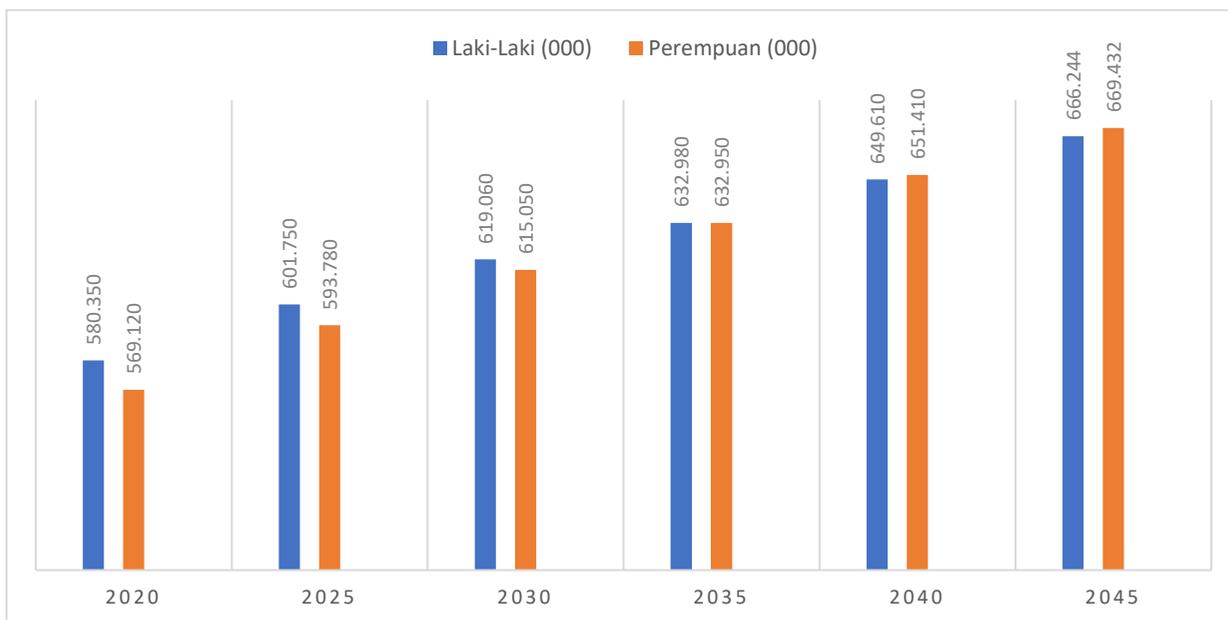
**Grafik 2.59 Proyeksi Sex Ratio Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Seiring perubahan komposisi jumlah penduduk mulai Tahun 2040, maka proyeksi jumlah penduduk laki-laki dan Perempuan di Kabupaten Sumedang dari Tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

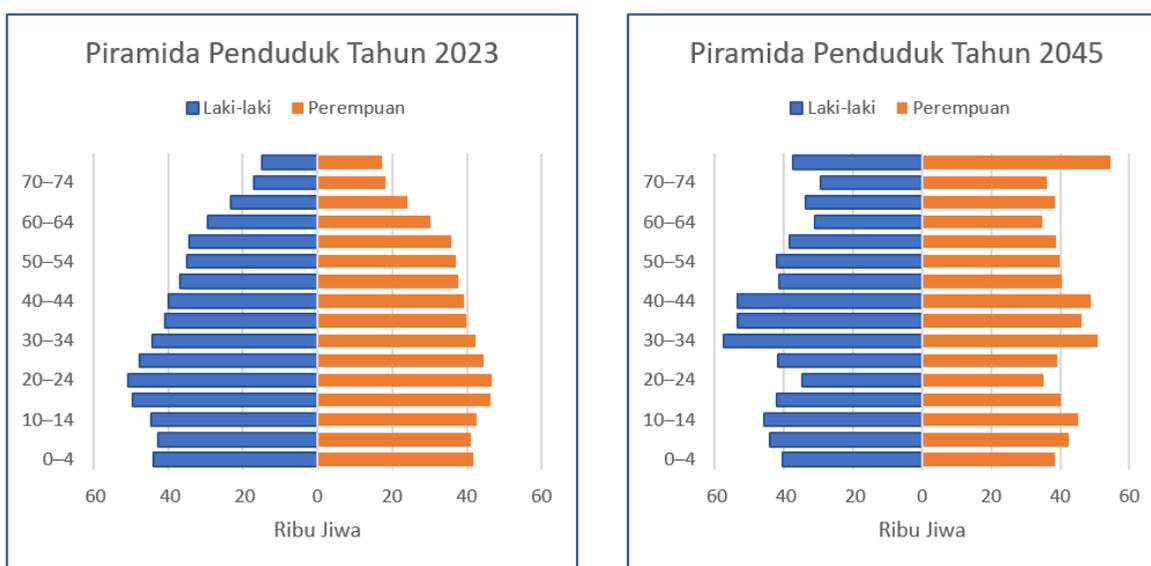
**Grafik 2.60 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 – 2045**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Untuk periode 20 tahun kedepan diproyeksikan struktur penduduk berdasarkan kelompok umur juga akan mengalami perubahan signifikan. Bonus demografi yang diproyeksikan sampai tahun 2030 akan mulai berkurang pada tahun-tahun berikutnya seiring bertambahnya penduduk usia tua.

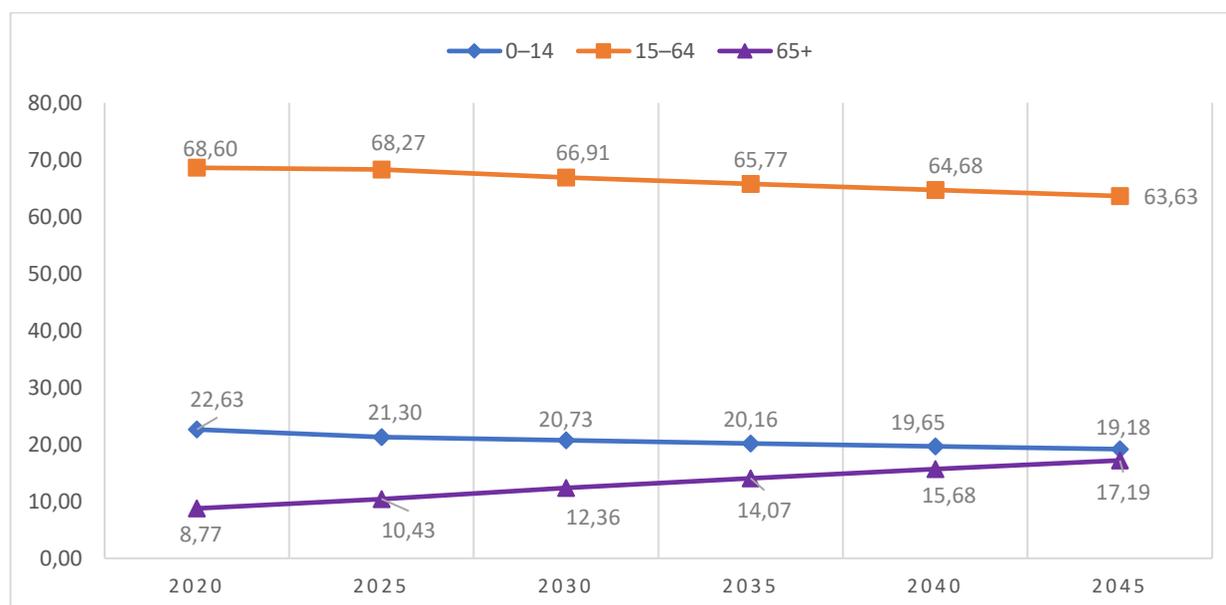
**Grafik 2.61 Perbandingan Piramida Penduduk Tahun 2023 dengan Proyeksi Piramida Penduduk Tahun 2045**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Kelompok penduduk usia muda 0-14 Tahun dan kelompok usia produktif 15-64 Tahun diperkirakan jumlahnya akan mengalami penurunan. Sebaliknya, penduduk usia tua (di atas 65 Tahun) jumlahnya diperkirakan akan mengalami kenaikan. Walaupun demikian jumlah penduduk usia produktif tetap masih dominan di atas 63% pada Tahun 2045.

**Grafik 2.62 Proyeksi Perkembangan Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2025 – 2045**

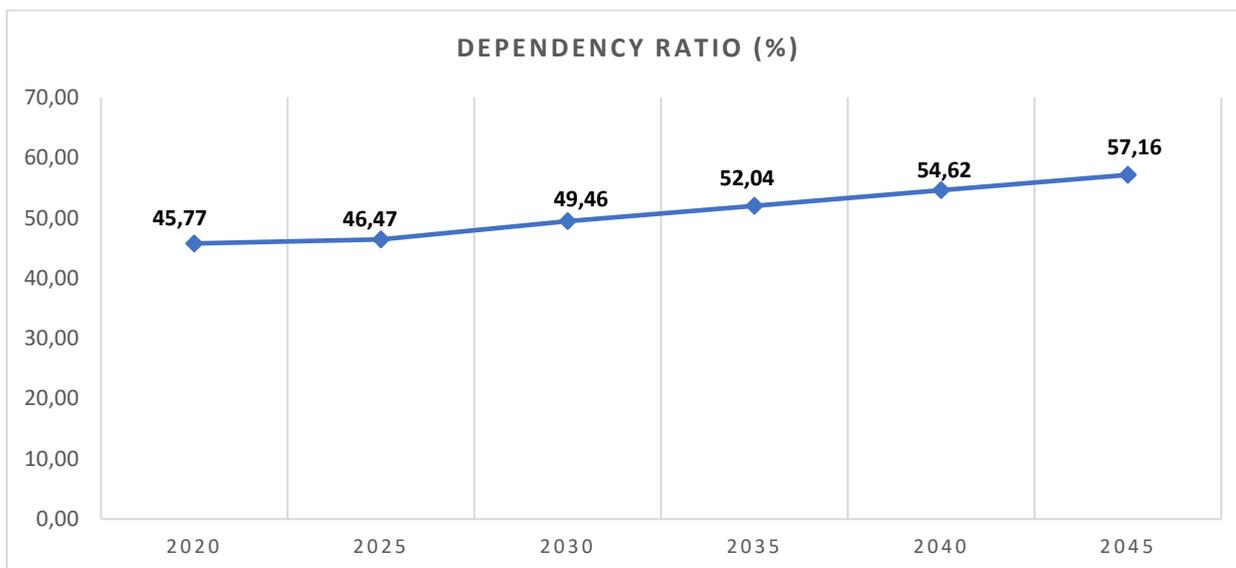


Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Penurunan jumlah usia produktif di masa yang akan datang dibarengi dengan peningkatan jumlah penduduk usia non produktif (di atas 65 Tahun) akan mengakibatkan meningkatnya rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Sumedang. Rasio Ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif.

Angka ketergantungan penduduk Tahun 2025 diperkirakan 46,47 artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung beban 47 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga akan teralokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Rasio ketergantungan diproyeksikan terus meningkat sampai Tahun 2045 pada angka 57,16 atau setiap 100 penduduk produktif harus menanggung beban 58 orang yang tidak produktif sebagaimana disajikan dalam grafik berikut.

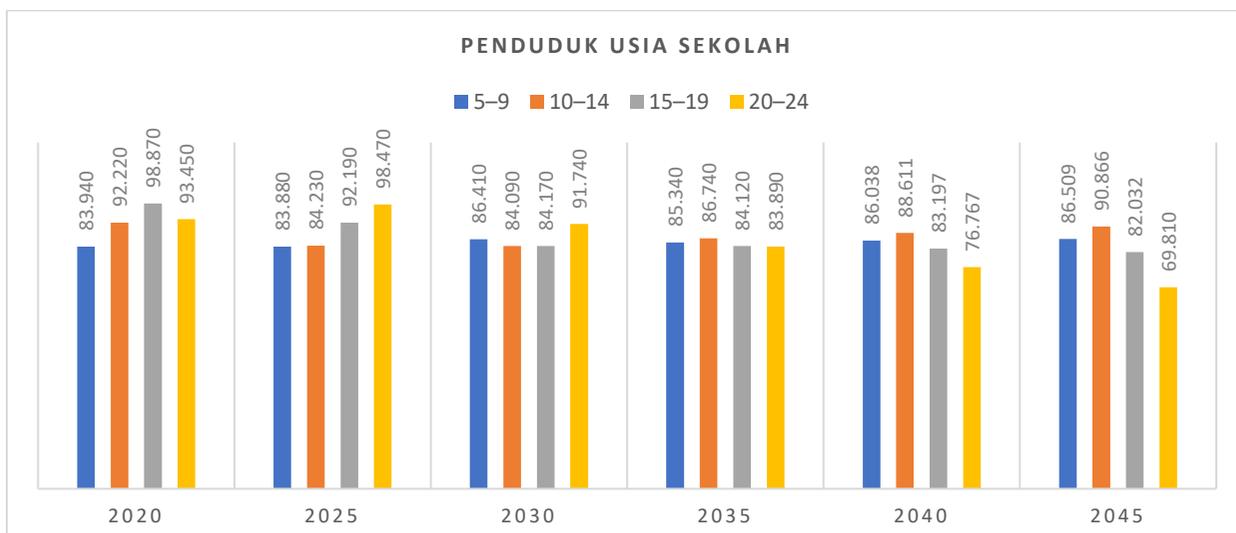
**Grafik 2.63 Proyeksi Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Dari hasil proyeksi penduduk Kabupaten Sumedang, diperkirakan jumlah penduduk usia sekolah juga mengalami perubahan. Dari Grafik berikut mulai Tahun 2025-2045 penduduk usia 5-9 Tahun dan 10-14 Tahun yang didalamnya merupakan kelompok usia Pendidikan Tingkat SD dan SLTP menunjukkan tren meningkat, sementara penduduk usia 15-19 yang didalamnya ada kelompok usia Pendidikan Tingkat SLTA jumlahnya menunjukkan tren menurun. Proyeksi ini bisa dijadikan bahan pertimbangan pengambilan kebijakan terkait kebutuhan sarana prasarana Pendidikan di Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang dalam upaya mendukung peningkatan kualitas Pendidikan di Kabupaten Sumedang.

**Grafik 2.64 Proyeksi Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**



Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

## 2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

Sarana dan prasarana memiliki peran penting dalam pembangunan Kabupaten Sumedang. Hal ini didasarkan fakta bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sumedang untuk 20 (dua puluh) Tahun ke depan akan makin meningkat. Untuk itu, proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana untuk 20 (dua puluh) Tahun ke depan adalah hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sumedang.

**Tabel 2.24 Jumlah Rumah di Kabupaten Sumedang Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Rumah 2022 (Unit)	Jumlah KK	Backlog Eksisting (Unit)
1	Jatinangor	25.253	31.066	7.882
2	Cimanggung	25.934	30.744	8.106
3	Tanjungsari	24.808	30.313	8.580
4	Sukasari	10.530	12.696	4.101
5	Pamulihan	18.402	23.281	7.236
6	Rancakalong	12.739	15.980	5.499
7	Sumedang Selatan	20.610	29.815	9.284
8	Sumedang Utara	25.677	35.612	10.295
9	Ganeas	6.536	9.141	2.553
1	Situraja	14.627	16.325	5.541
1	Cisitu	9.372	11.696	3.924
1	Darmaraja	12.843	13.910	4.511
1	Cibugel	6.930	9.038	2.745
1	Wado	12.223	16.210	4.964
1	Jatinunggal	14.013	17.659	6.038
1	Jatigede	7.805	9.221	3.549
1	Tomo	6.799	9.153	3.247
1	Ujungjaya	9.176	12.619	4.674
1	Conggeang	10.595	12.194	4.842
2	Paseh	11.467	14.523	4.840
2	Cimalaka	16.732	23.366	7.517
2	Cisarua	5.533	7.859	2.522
2	Tanjungkerta	10.534	13.425	4.604
2	Tanjungmedar	8.878	10.283	3.544
2	Buahdua	10.483	13.629	5.260
2	Surian	3.914	4.865	1.863
<b>JUMLAH</b>		<b>342.413</b>	<b>434.623</b>	<b>137.718</b>

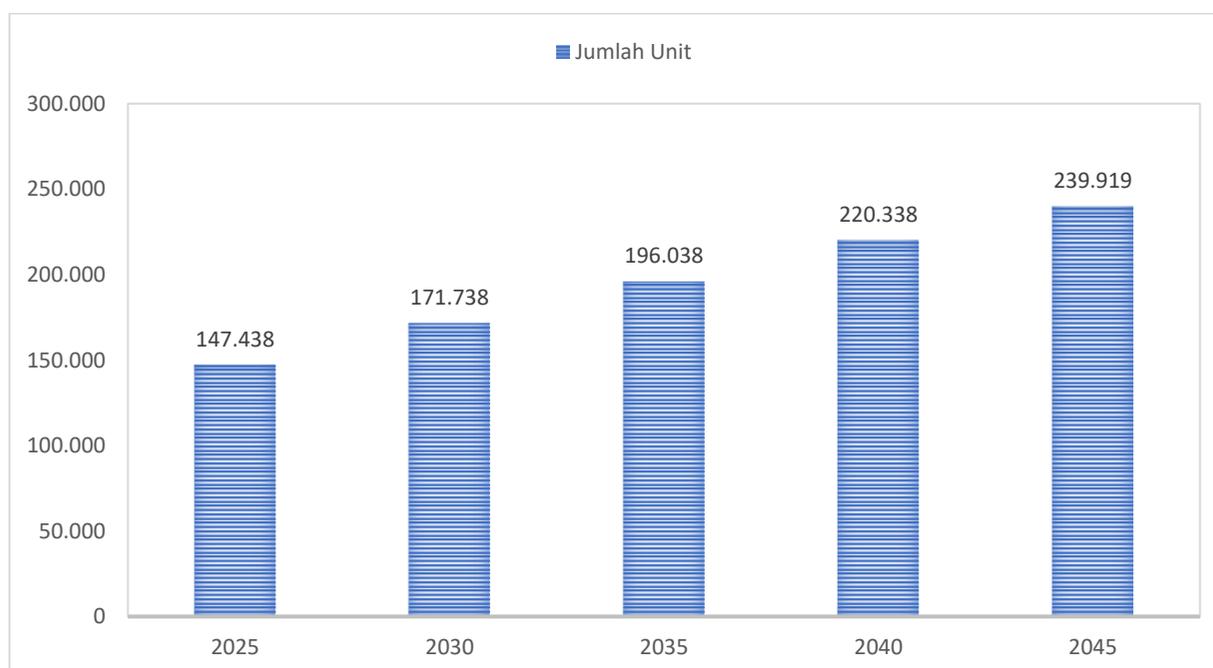
Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, 2023

Dalam menghitung kebutuhan rumah, terdapat 2 (dua) pendekatan yang dapat digunakan, yaitu data demografi dan data backlog. Data demografi berkaitan dengan proyeksi jumlah penduduk dan asumsi jumlah kepala keluarga yang menghuni tiap-tiap rumah. Sementara itu, data backlog dihitung dengan mengurangi jumlah rumah yang sudah ada dari jumlah kebutuhan rumah. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumedang Tahun

2023-2043, jumlah rumah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2022 sebanyak 342.413 dengan rata-rata per rumah dihuni 3-4 jiwa.

Berdasarkan hasil Kajian Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043, bahwa Prediksi pertambahan jumlah rumah rata-rata mencapai 46.984 unit setiap 5 Tahun. Berdasarkan data dasar jumlah rumah Tahun 2022 maka proyeksi kebutuhan hunian untuk periode 20 Tahun kedepan adalah sebagai berikut.

**Grafik 2.65 Proyeksi Kebutuhan Penambahan Hunian di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**



Sumber: Hasil Perhitungan Bappppeda berdasarkan Data RP3KP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang, 2024

Untuk Kebutuhan Air bersih berdasarkan Dokumen Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2040 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.25 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Sumedang (Liter/detik)**

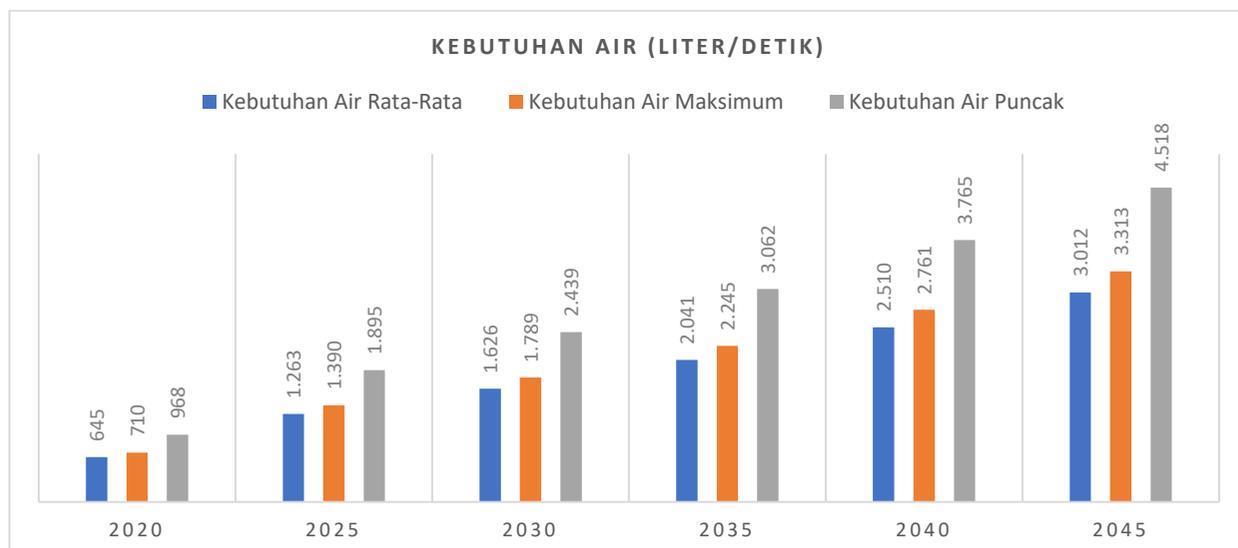
No	Kecamatan	Kebutuhan Air Rata-rata (Liter/detik)					
		Eksisting	2020	2025	2030	2035	2040
1	Jatinangor	21,0	31,0	90,7	138,5	196,0	263,5
2	Cimanggung	25,9	33,5	77,7	107,7	142,6	182,0
3	Tanjungsari	38,4	47,3	99,7	132,9	171,6	216,0
4	Sukasari	22,4	25,9	47,2	57,8	69,8	83,2
5	Pamulihan	25,3	31,1	66,3	89,7	117,5	150,4
6	Rancakalong	8,8	12,5	22,7	26,6	30,5	34,4
7	Sumedang Selatan	46,5	54,3	99,6	121,8	146,5	173,6

No	Kecamatan	Kebutuhan Air Rata-rata (Liter/detik)					
		Eksisting	2020	2025	2030	2035	2040
8	Sumedang Utara	31,5	41,5	102,3	148,4	204,8	272,5
9	Ganeas	4,8	8,1	15,3	18,1	21,1	24,1
10	Situraja	31,2	41,5	102,3	148,4	204,8	272,5
11	Cisitu	10,3	13,4	31,5	43,8	58,1	74,3
12	Darmaraja	21,3	25,2	47,6	58,8	71,0	84,3
13	Cibugel	7,3	8,7	15,7	18,1	20,6	23,0
14	Wado	33,8	38,5	64,9	74,7	84,8	95,3
15	Jatinunggal	29,0	34,0	63,1	77,7	93,8	111,5
16	Jatigede	17,0	19,5	33,3	38,6	44,1	49,7
17	Tomo	24,8	26,6	36,4	41,9	47,6	53,6
18	Ujungjaya	20,8	23,8	40,9	47,6	54,6	61,9
19	Conggeang	6,7	9,0	17,2	20,5	23,6	26,7
20	Paseh	35,3	38,0	52,8	62,7	73,4	84,7
21	Cimalaka	23,9	29,6	62,3	82,8	106,4	133,2
22	Cisarua	8,4	10,2	20,5	26,4	32,9	40,0
23	Tanjungkerta	10,8	14,0	32,4	45,0	59,5	76,1
24	Tanjungmedar	3,4	4,7	11,1	14,6	18,0	21,5
25	Buahdua	20,7	23,9	42,3	50,3	58,8	67,9
26	Surian	3,8	5,0	7,7	8,2	8,5	8,9
<b>Rekapitulasi Kabupaten Sumedang</b>							
<b>Kebutuhan Air Rata-rata</b>		<b>553</b>	<b>645</b>	<b>1263</b>	<b>1626</b>	<b>2041</b>	<b>2510</b>
<b>Kebutuhan Air Maksimal (Qmaks)</b>		<b>586</b>	<b>710</b>	<b>1390</b>	<b>1789</b>	<b>2245</b>	<b>2761</b>
<b>Kebutuhan Air Puncak (Qpeak)</b>		<b>800</b>	<b>968</b>	<b>1895</b>	<b>2439</b>	<b>3062</b>	<b>3765</b>

Sumber: Dokumen Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2040

Berdasarkan data RISPAM tersebut, untuk Tahun 2045 dengan asumsi kenaikan kebutuhan 20% dari proyeksi kebutuhan Tahun 2040 maka proyeksi kebutuhan air Tahun 2025-2045 sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.

**Grafik 2.66 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**



Sumber: Dokumen Reviu Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Sumedang Tahun 2020 – 2040 (diolah)

Salah satu permasalahan lainnya yang perlu diantisipasi kaitan dengan perkembangan jumlah penduduk adalah penanganan persampahan. Perkembangan pengelolaan sampah yang terjadi akhir-akhir ini memperlihatkan munculnya paradigma baru yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dimana pendekatannya berkembang menjadi “kumpul – pilah – olah – angkut – buang”. Paradigma ini memperhatikan keberadaan proses pemilahan dan pengolahan untuk menghasilkan buangan yang sudah sangat minim untuk mengurangi risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu ciri penerapan paradigma ini antara lain melalui perkembangan prasarana dan sarana persampahan, termasuk dalam aspek keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menjadi Tempat Pemrosesan/Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS).

Dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sumedang, perencanaan infrastruktur persampahan menjadi sangat penting. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kebutuhan aktual dan kapasitas pengelolaan sampah yang ada. Karena itu, kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sumedang perlu difokuskan pada penanganan sampah di hulu sehingga tidak ada penambahan TPA, sehingga pendekatan yang berbasis pada pengurangan, daur ulang, dan pengelolaan sampah yang efisien perlu diperkuat. Langkah-langkah strategis juga harus diambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai modal sosial tentang pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab.

Fasilitas Kesehatan (Faskes) merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

**Tabel 2.26 Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Rumah Sakit Umum	3
Puskesmas Rawat Inap	17
Puskesmas Non Rawat Inap	18

Fasilitas Kesehatan	Jumlah
Puskesmas Pembantu	66
Klinik Pratama	74
Klinik Utama	9
Tempat Praktik Mandiri Dokter	91
Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	27

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Sumedang berjumlah 3 rumah sakit. Berikut nama rumah sakit dengan jumlah tempat tidur.

**Tabel 2.27 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

No	Rumah Sakit	Jumlah Tempat Tidur
1.	RSUD Kabupaten Sumedang	363
2.	RSU Pakuwon	115
3.	RS Harapan Keluarga	68
<b>Jumlah</b>		<b>546</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Berdasarkan proyeksi data BPS Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Sumedang adalah 1.178.240 jiwa. Sesuai standar minimal WHO di mana jumlah ideal tempat tidur di rumah sakit adalah 1:1.000, sehingga jumlah ideal tempat tidur adalah 1.178 tempat tidur, sehingga masih terdapat kekurangan 632 tempat tidur. Ketidakseimbangan jumlah tempat tidur setidaknya dapat teratasi dengan adanya 17 puskesmas dengan pelayanan rawat inap. Tabel berikut daftar puskesmas dengan pelayanan rawat inap.

**Tabel 2.28 Puskesmas dengan Pelayanan Rawat Inap di Kabupaten Sumedang Tahun 2023**

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Tempat Tidur
1.	Jatinangor	Jatinangor	18
2.	Tanjungsari	Tanjungsari	19

No	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Tempat Tidur
3.	Sumedang Utara	Kotakaler	10
4.	Cisitu	Cisitu	8
5.	Darmaraja	Darmaraja	15
6.	Wado	Wado	10
7.	Tomo	Tomo	13
8.	Ujungjaya	Ujungjaya	12
9.	Conggeang	Conggeang	14
10.	Tanjungkerta	Sukamantri	15
11.	Jatinunggal	Jatinunggal	14
12.	Cibugel	Cibugel	9
13.	Surian	Surian	6
14.	Cimalaka	Cimalaka	12
15.	Buahdua	Buahdua	14
16.	Jatigede	Jatigede	9
17.	Sumedang Utara	Situ	14
<b>Jumlah</b>			<b>212</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Ketersediaan tempat tidur pada puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama berjumlah 212 unit. Jumlah tersebut belum memadai sebagai daya dukung jumlah tempat tidur pada rumah sakit, namun dapat mengurangi beban pelayanan rumah sakit dan mempercepat pelayanan kesehatan di daerah.

Berdasarkan proyeksi Penduduk Kabupaten hingga Tahun 2045, maka kebutuhan jumlah tempat tidur rawat inap dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.29 Proyeksi Kebutuhan Tempat Tidur Rawat Inap  
di Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045**

No	Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk	Jumlah Tempat Tidur Ideal
1.	2025	1.195.530	1.196
2.	2030	1.234.110	1.234
3.	2035	1.265.940	1.266
4.	2040	1.301.020	1.301
5.	2045	1.335.680	1.336

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, 2024

Jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2016-2021 berjumlah 35 puskesmas. Hal ini menggambarkan bahwa dari 26 kecamatan seluruhnya telah memiliki fasilitas puskesmas. Adapun kecamatan yang memiliki puskesmas lebih dari satu yakni Kecamatan Jatinangor (2 puskesmas), Cimanggung (2 puskesmas), Pamulihan (2 puskesmas), Tanjungsari (2 puskesmas), Sumedang Selatan (2 puskesmas), Sumedang Utara (3 puskesmas), Tanjungkerta (2 puskesmas), dan Buahdua (2 puskesmas). Berdasarkan SPM Kemenkes rasio puskesmas adalah 1:10.000 atau dengan kata lain satu puskesmas diperuntukan melayani 10.000 penduduk. Melihat hal tersebut maka jumlah puskesmas di Kabupaten Sumedang masih sangat kurang.

### **2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah**

Pusat pertumbuhan wilayah merujuk pada daerah atau lokasi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menjadi pusat kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Pusat pertumbuhan wilayah biasanya memiliki berbagai faktor yang mendukung pertumbuhan, seperti investasi, infrastruktur, akses ke pasar, sumber daya manusia, dan sebagainya. Pusat pertumbuhan wilayah dapat berupa kawasan perkotaan, ibu kota kecamatan, maupun kawasan fungsional tertentu. Tujuan dari pengembangan pusat pertumbuhan wilayah adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dan meningkatkan kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut.

Wilayah Kabupaten Sumedang yang terbagi atas 26 kecamatan memiliki berbagai pusat pertumbuhan, baik yang tumbuh secara organik maupun didorong untuk tumbuh melalui intervensi kebijakan. Dalam hal ini pusat pertumbuhan dapat dipandang sebagai suatu simpul (node) wilayah yang menjadi pusat kegiatan, maupun kawasan aglomerasi yang memiliki keterkaitan fungsi.

Beberapa indikasi program untuk pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang antara lain:

1. Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah (Prasarana Transportasi, Prasarana Energi, Prasarana Telekomunikasi, Prasarana Sumber Daya Air, Prasarana Pengelolaan Lingkungan, dan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya)
2. Pengembangan Kawasan Lindung (Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya, Kawasan Rawan Bencana Alam, Kawasan Lindung Geologi Dan Kawasan Lindung Lainnya)
3. Pengembangan Kawasan Budidaya (Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Strategis Lainnya).

### **2.7.1. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Kabupaten**

Dalam Upaya mendorong pengembangan wilayah di Kabupaten Sumedang mengacu kepada terminologi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung meliputi Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sukasari.
- 2) Pusat Pelayanan Kawasan BUTOM meliputi: Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya, Kecamatan Tomo. Dalam mendukung pengembangan wilayah ini telah terbit Peraturan Bupati Sumedang Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Detail tata Ruang Wilayah Perencanaan Ujungjaya Tahun 2024-2044.
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan Jatigede meliputi Kecamatan Jatigede, Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Cisitu.

- 4) Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Ibu Kota Perkotaan Sumedang yang telah didukung dengan adanya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Sumedang Tahun 2020-2040.

### **2.7.2. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Provinsi Jawa Barat**

Kebijakan pengembangan wilayah dalam perspektif provinsi adalah strategi dan rencana yang dibuat oleh pemerintah provinsi untuk mengatur pertumbuhan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya di wilayah provinsi. Tujuan utama dari kebijakan pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup penduduk, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh wilayah provinsi. Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif provinsi dalam hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042.

Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yaitu pembangunan berbasis kewilayahan. Pendekatan kewilayahan ini mengacu pada terminologi Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana diamanatkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat. WP Provinsi Jawa Barat terbagi habis ke dalam 6 WP, yaitu WP Bodebekpunjur, WP Purwasuka, WP Ciayumajakunig, WP Priangan Timur dan Pangandaran, WP Cekungan Bandung, dan WP Sukabumi dan sekitarnya.

**Tabel 2.30 Pengembangan Wilayah WP di Provinsi Jawa Barat**

No	WP	Lingkup Wilayah
1	Bodebekpunjur	Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Daerah Provinsi dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabekpunjur serta antisipasi terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok dan sebagian Wilayah di Kabupaten Cianjur
2	Purwasuka	Penjabaran dari kawasan andalan Purwasuka, meliputi daerah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang
3	Ciayumajakuning	Penjabaran dari kawasan andalan Ciayumajakuning yang bersifat antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang
4	Priangan Timur-Pangandaran	Penjabaran dari kawasan andalan Priangan Timur Pangandaran dengan kesetaraan fungsi dan peran Kawasan di KSN Pacangsanak yaitu Pangandaran Kalipucang-Segara Anakan yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciarnis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran
5	Sukabumi dan Sekitarnya	Penjabaran dari kawasan andalan Sukabumi yang antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah perbatasan, meliputi daerah Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, dan sebagian wilayah di Kabupaten Cianjur
6	Cekungan Bandung	Meliputi daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian wilayah di Kabupaten Sumedang

Sumber: Perda Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022

Fokus pengembangan Kabupaten Sumedang (Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimangung, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan) dalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung diarahkan sebagai bagian dari PKN, dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, kegiatan tanaman pangan dan hortikultura, agroindustri, serta industri nonpolutif dan non-ekstraktif atau tidak mengganggu irigasi dan cadangan air serta tidak mengakibatkan alih fungsi lahan pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

### **2.7.3. Pengembangan Kewilayahan dalam Perspektif Nasional**

Kebijakan pengembangan kewilayahan dalam perspektif nasional merepresentasikan upaya Pemerintah Pusat untuk memajukan dan mengembangkan wilayah-wilayah di Indonesia secara merata dan berkelanjutan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang seimbang di seluruh wilayah NKRI, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil.

#### **Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung**

Kawasan perkotaan Cekungan Bandung dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Dalam Peraturan Presiden ini dinyatakan bahwa Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk Kawasan Metropolitan. Kawasan Perkotaan Inti terdiri dari Kota Bandung dan Kota Cimahi. Adapun Kawasan Perkotaan di Sekitarnya terdiri dari:

- a. Kawasan Perkotaan Padalarang-Ngamprah, Kawasan Perkotaan Cipatat, Kawasan Perkotaan Batujajar, Kawasan Perkotaan Cihampelas, Kawasan Perkotaan Lembang, Kawasan Perkotaan Cipeundeuy-Cikalong Wetan, dan Kawasan Perkotaan Cililin di Kabupaten Bandung Barat;
- b. Kawasan Perkotaan Soreang-Kutawaringin-Katapang, Kawasan Perkotaan Margahayu-Margaasih, Kawasan Perkotaan MajalayaCiparay, Kawasan Perkotaan Baleendah-Dayeuhkolot-Bojongsoang, Kawasan Perkotaan Banjaran, Kawasan Perkotaan Cicalengka, dan Kawasan Perkotaan Cileunyi-Rancaekek di Kabupaten Bandung; dan
- c. Kawasan Perkotaan Jatinangor-Tanjungsari di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kawasan Cekungan Bandung meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan yang berkelas dunia sebagai salah satu pusat perekonomian nasional yang produktif dan efisien melalui keterpaduan sistem pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan infrastruktur yang handal;

- a. Menetapkan Kawasan perkotaan inti sebagai pusat kegiatan utama kawasan dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen;
  - b. Mengembangkan pusat Kawasan Perkotaan di Sekitarnya yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana transportasi dan sistem angkutan massal;
  - c. Meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya;
  - d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya serta distribusi kegiatan industri;
  - e. Memantapkan keterkaitan fungsional antarpusat kegiatan; dan
  - f. Mengembangkan jaringan jalan yang mendukung transportasi massal dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan Kawasan Hutan. Pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.
2. Pengembangan dan peningkatan fungsi utama masing-masing pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung
- a. Menetapkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat aktivitas utama kawasan dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai pusat pendukung yang memiliki fungsi khusus, berhierarki, dan interdependen;
  - b. Mengembangkan kawasan permukiman kepadatan tinggi di Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan berbasis pada pelestarian, daya dukung, dan daya tampung lingkungan;
  - c. Mengembangkan industri kreatif dan industri berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan serta membatasi pengembangan industri di Kawasan Perkotaan Inti;
  - d. Mengembangkan permukiman secara vertikal untuk menunjang fungsi kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung di zona dengan intensitas kegiatan tinggi dan sedang;

- e. Meningkatkan keterkaitan antarkawasan dan antarpusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya melalui keterpaduan sistem transportasi dan sistem prasarana lainnya;
  - f. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian utara dan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung bagian selatan secara terbatas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung kegiatan permukiman, pertanian, pariwisata, dan konservasi;
  - g. Meningkatkan koordinasi lintas wilayah dalam rangka pelaksanaan pembangunan kawasan;
  - h. Melakukan pemantauan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkala melalui kerja sama antardaerah;
  - i. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan;
  - j. Mengendalikan kerusakan lingkungan dengan cara memantau secara berkala;
  - k. Mengembangkan sistem pengendalian banjir dan menjamin ketersediaan air baku permukaan tanah;
  - l. Mempertahankan dan meningkatkan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luasan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
  - m. Mengembalikan fungsi serta mencegah alih fungsi situ dan waduk.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang handal, merata, dan terpadu
- a. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya;
  - b. Mengembangkan transportasi massal yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya;
  - c. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung;

- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;
- e. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; dan
- f. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu antarkawasan di Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat serta kerja sama antar daerah.

### **Kawasan Rebana**

Kawasan Cirebon-Patimban-Kertajati (Rebana) dan Jawa Barat bagian Selatan dinaungi oleh Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Dalam Peraturan Presiden ini dinyatakan bahwa Percepatan pembangunan di Kawasan Rebana meliputi: Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Kabupaten Kuningan.

Rencana pembangunan Kawasan Rebana berlokasi di 7 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 13 titik pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang terdiri atas: 3 titik di Kabupaten Subang; 6 titik di Kabupaten Indramayu; 2 titik di Kabupaten Majalengka; 1 titik di Kabupaten Sumedang; dan 1 titik di Kabupaten Cirebon. Seluruh pengembangan kawasan tersebut berbasis *ecoindustry*, yang dilakukan melalui pembangunan *eco-industrial park* atau kawasan industri berwawasan lingkungan.

#### **2.7.4. Proyek/Kegiatan Strategis Nasional di Kabupaten Sumedang**

Arahan pembangunan infrastruktur strategis dari perspektif Pemerintah Pusat dituangkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Berikut ini daftar PSN yang berada di lingkup wilayah Provinsi Jawa Barat yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang.

- a. Jalan dan Jembatan  
Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan.
- b. Bendungan dan Irigasi  
Bendungan Cipanas.
- c. Air Bersih dan Sanitasi  
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatigede.
- d. Sumber Daya Air  
Modernisasi Daerah Irigasi Renrang, WS Cimanuk-Cisanggarung.

#### **2.7.5. Arah Kebijakan Kewilayahan RPJPN 2025 – 2045**

Arah Pengembangan Kabupaten Sumedang dalam Prespektif Makro meliputi:

- a. *Urban, commerce, & industrial area*  
Dalam cakupan lintasan pergerakan orang dan barang di Wilayah Metropolitan Bandung.
- b. *Agropolitan & agro-industry*  
Didorong untuk menjadi kawasan agropolitan dan agroindustri melalui pengembangan urban agriculture.
- c. *Natural conservation & eco-geotourism*  
Kawasan lindung dalam menjaga ketahanan lingkungan, kebencanaan, biodiversitas serta kemegahan bentang alam.

#### **2.7.6. Arah Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038**

Arah kebijakan Penataan Ruang Wilayah pada RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 meliputi:

- a. Pembangunan Kawasan agribisnis komoditas unggulan Kabupaten Sumedang;
- b. Pengembangan Kawasan pertanian di seluruh wilayah kabupaten;
- c. Pengembangan Kawasan perikanan dan peternakan di seluruh wilayah kabupaten;
- d. Penetapan dan pengembangan Kawasan pariwisata dan daya Tarik wisata yang berbasis ekowisata;
- e. Penetapan dan pengembangan Kawasan industri, sentra industri kecil dan industri rumah tangga;

- f. Peningkatan fungsi Kawasan lindung untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- g. Peningkatan sistem pusat kegiatan secara berimbang;
- h. Peningkatan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
- i. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengelolaan lingkungan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- j. Penataan Kawasan ibu kota Perkotaan Sumedang;
- k. Pengembangan Kawasan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
- l. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Jatigede;
- m. Pengembangan Kawasan strategis dan cepat tumbuh;
- n. Pengamanan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1. Permasalahan Pembangunan

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan Kabupaten Sumedang pada periode RPJPD Tahun 2005-2025 serta yang akan dihadapi pada periode RPJPD Tahun 2025-2045. Permasalahan pembangunan yang dihadapi mencakup aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah dan aspek pelayanan umum.

##### 3.1.1. Aspek Geografi

###### 1. Struktur Geologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berada di daerah dengan topografi pegunungan dan berbukit yang memiliki ketinggian 25 sampai 1.667 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sumedang merupakan daerah dengan tingkat gerakan tanah rendah hingga tinggi. Luas kawasan rawan bencana gerakan tanah mencapai kurang lebih 21.671 (dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu) hektar tersebar di sebagian Wilayah Kabupaten. Struktur geologi Kabupaten Sumedang tersusun dari jenis batuan aluvial, produk gunung api muda, dan produk gunung api tua. Proses pelapukan yang terjadi pada batuan vulkanik akan menyebabkan terbentuknya batuan lapuk dan tanah yang bersifat residual. Sifat dari tanah residual sendiri yaitu mudah terlepas dan rentan akan terjadinya proses tanah longsor.

Disamping itu, Kabupaten Sumedang dilalui sejumlah sumber gempa patahan aktif yang berpotensi menyebabkan terjadinya gempa di antaranya Sesar Lembang, Sesar Baribis, Sesar Cicalengka, Sesar Cileunyi-Tanjungsari dan Sesar Tomo. Pada akhir tahun 2023 terjadi gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang yang bersumber dari sesar baru yang aktif akibat dari aktivitas sesar aktif yaitu Sesar Cileunyi-Tanjungsari. Akibat gempa bumi tersebut ditemukan sesar aktif baru yang melewati Sumedang yaitu Sesar Cipeles (*Sumber: BMKG, Tahun 2024*).

## 2. Ancaman Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem

Bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang tidak lepas dari pengaruh perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Selain dipengaruhi struktur geologi, risiko bencana pergerakan tanah longsor semakin meningkat ketika curah hujan Tahunan ekstrem diatas 3.000 mm atau saat fenomena *la nina* terjadi di wilayah Indonesia khususnya Jawa Barat. Bencana banjir juga kerap terjadi pada wilayah Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Sumedang Selatan saat curah hujan tinggi.

Ketika terjadi perubahan iklim dengan curah hujan yang rendah atau saat adanya fenomena *el nino* beberapa wilayah di timur dan utara Kabupaten Sumedang rentan mengalami kekeringan. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Jatinangor rentan kekeringan akibat daya dukung air yang telah melampaui ambang batas.

Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan kekeringan menyebabkan kerugian pada sektor pertanian, ketahanan pangan dan permukiman. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga menyebabkan timbulnya penyakit seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), Diare, dan Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

## 3. Alih Fungsi Lahan Khususnya Lahan Produktif

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah pertanian di Jawa Barat. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata 20% dari total PDRB Kabupaten Sumedang. Dalam dua dekade terakhir terdapat sejumlah proyek strategis nasional yang mengharuskan terjadinya alih fungsi lahan produktif di Kabupaten Sumedang. Proyek strategis nasional tersebut antara lain Bendungan Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, Bendungan Sadawarna, dan Bendungan Cipanas.

Meskipun alih fungsi lahan pertanian mencapai lebih dari 1.000 hektar, namun Pemerintah Daerah melakukan upaya untuk meningkatkan produktivitas produksi pertanian dan pencetakan sawah baru.

Namun disisi lain alih fungsi lahan pertanian juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan petani gurem di Kabupaten Sumedang.

Alih fungsi lahan produktif juga disebabkan urban sprawl atau penyebaran permukiman yang tidak terkendali dari Kawasan Metropolitan Bandung telah menyebabkan. Urban Sprawl akan berpotensi meningkat di

wilayah yang berdekatan dengan Kawasan Segitiga Emas Rebana. Pembangunan permukiman di Kabupaten Sumedang juga mendesak ke lahan yang berada di lereng dengan kemiringan landai dan agak curam.

### **3.1.2. Aspek Demografi**

Pertambahan penduduk yang terus meningkat akan berdampak pada pembangunan kualitas sumber daya manusia, kesetaraan peluang dalam aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tekanan terhadap lingkungan hidup. Dengan proyeksi rata-rata pertambahan penduduk 3,81% hingga Tahun 2045, diperlukan peningkatan dan pemerataan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, hunian, sanitasi, air bersih, pangan dan energi. Peningkatan pelayanan dasar perlu memperhatikan pada kelompok perempuan dan usia lanjut yang diproyeksi akan semakin meningkat.

Proyeksi 20 (dua puluh) tahun kedepan, Kabupaten Sumedang akan tetap memperoleh bonus demografi pada rentang usia 30-44 Tahun. Bonus demografi ini akan menjadi modal dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu infrastruktur konektivitas dan mobilitas masyarakat akan semakin dibutuhkan. Infrastruktur jalan harus dapat menghubungkan seluruh wilayah simpul-simpul perekonomian. Begitu pula jaringan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah.

Peningkatan kepadatan penduduk diproyeksikan masih berada di Kecamatan Jatinangor, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan. Kepadatan di empat kecamatan tersebut akibat peningkatan kebutuhan hunian di Wilayah Metropolitan Bandung. Kepadatan penduduk juga tetap terkonsentrasi di Kecamatan Sumedang Utara, Kecamatan Sumedang Selatan dan Kecamatan Cimalaka sebagai wilayah perkotaan Kabupaten Sumedang. Peningkatan kepadatan penduduk dapat terjadi di Kecamatan Buahdua, Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo sebagai dampak pengembangan Kawasan Segitiga Rebana.

Sistem pengelolaan sampah dan limbah perlu dipersiapkan sebagai eksternalitas pertambahan penduduk dan aktivitas sosial ekonominya. Pengelolaan sampah harus dimulai dengan mengurangi timbunan sampah dari rumah tangga dan pengolahan sampah di tingkat lingkungan. Aktivitas ekonomi yang meningkat juga perlu menjaga kawasan lindung dalam tata ruang

sehingga tetap dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

### **3.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

#### **3.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi**

##### **1. Kemiskinan**

Tren kemiskinan absolut di Kabupaten Sumedang menurun dalam 20 Tahun terakhir. Namun demikian persentase penduduk miskin sebesar 9,36% (Tahun 2023) masih menjadi permasalahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Kabupaten Sumedang terkonsentrasi pada penduduk yang bermata pencaharian petani atau penduduk yang tergantung pada sektor pertanian. Dengan sumber daya alam yang mendukung hampir sepertiga rumah tangga di Kabupaten Sumedang bergantung pada sektor pertanian. Jika diproporsikan, kelompok penduduk miskin di sektor pertanian mencapai sebesar 35,71% pada Tahun 2022.

Secara kewilayahan proporsi penduduk miskin tertinggi berada di sentra pertanian seperti Kecamatan Wado, Kecamatan Jatinunggal, Kecamatan Jatigede, Kecamatan Cibugel dan Kecamatan Tanjungmedar. Sedangkan Kecamatan Cimanggung dan Kecamatan Pamulihan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin lebih banyak dibandingkan wilayah lainnya.

Beberapa akar permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di sektor pertanian antara lain pendapatan yang rendah, pola pertanian yang masih subsisten, penguasaan dan akses lahan yang makin terbatas, perubahan iklim, rendahnya kemampuan untuk melakukan pengolahan hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, dan rantai niaga yang tidak efektif.

##### **2. Ketimpangan**

Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Sumedang dalam dua puluh Tahun terakhir masih berada dalam kategori rendah ( $< 0,4$ ) meski sempat berada di kategori moderat pada 2018 (0,42). Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan *gini ratio* di Kabupaten Sumedang lebih dirasakan pada penduduk yang berdomisili di perkotaan. Pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023, *gini ratio* perkotaan berada pada rentang 0,371 sampai dengan 0,466. Sedangkan *gini ratio* perdesaan berada pada rentang 0,299 sampai dengan 0,374. Ketimpangan di perkotaan lebih tinggi

karena disparitas upah tenaga kerja yang lebih lebar dan diversitas jenis pekerjaan yang lebih beragam. Adapun ketimpangan di pedesaan lebih rendah dikarenakan jenis pekerjaan yang lebih homogen yaitu sektor pertanian dengan disparitas pendapatan yang kecil.

Ketimpangan distribusi pendapatan disebabkan ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakses menuju sumber-sumber ekonomi. Kelompok penduduk yang telah mapan lebih mudah untuk mengelola sumber daya dan menguasai rantai ekonomi. Disamping itu kebijakan yang mengatur redistribusi pendapatan dan pajak belum menjadi instrumen yang mengurangi ketimpangan. Hal tersebut tercermin pada separuh atau 45 % pendapatan di Kabupaten Sumedang yang dikuasai oleh 20% kelompok terkaya (desil 9 & 10), sementara 20% kelompok termiskin (desil 1- 2) hanya mendapatkan 7%. Bahkan, desil 10 menguasai 29% atau hampir 10 kali dari pendapatan desil 1 (satu).

### **3. Pengangguran**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih menjadi permasalahan pembangunan daerah dalam periode RPJPD 2005-2025. TPT tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 9,89% dan TPT terendah terjadi pada Tahun 2013 yaitu sebesar 6,41%. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja serta pembatasan aktivitas pada saat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 menyebabkan peningkatan TPT.

TPT Kabupaten Sumedang masih didominasi penduduk usia 15-24 Tahun dengan proporsi diatas 50 % dari keseluruhan angkatan kerja. Tingginya TPT juga didominasi para pengangguran terdidik sebesar akibat ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja (*job-education mismatch*). Ketidaksiapan mental bagi angkatan kerja usia muda menjadi faktor yang cukup mempengaruhi peningkatan jumlah pengangguran. Selepas masa pandemi jumlah pengangguran dengan karakteristik putus asa semakin meningkat, sedangkan pengangguran dengan karakteristik sedang mencari pekerjaan jumlahnya menurun.

Rendahnya tingkat serapan tenaga kerja di Kabupaten Sumedang dipengaruhi pula oleh tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang tergolong tinggi. UMK Kabupaten Sumedang hampir setara dengan UMK Kabupaten Bandung dan UMK Kabupaten Bandung Barat yang tergolong daerah industri.

Hal ini menyebabkan penanaman modal untuk industri padat karya lebih bergeser ke arah pengembangan Kawasan Segitiga Rebana terutama Kabupaten Majalengka dengan UMK lebih rendah dari Kabupaten Sumedang.

#### **4. Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang sejak Tahun 2010 menunjukkan tren yang positif meningkat meskipun kontraksi perekonomian yang dalam pernah terjadi saat Pandemi Covid-19 di Tahun 2020 hingga mencapai -1,12%. Pertumbuhan ekonomi daerah pada rentang antara 4,0 – 6,5 %, belum dapat menjadi akselerator penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Tiga kontributor PDRB terbesar yaitu Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan menjadi kantong kemiskinan dikarenakan distribusi dari pertumbuhan yang tidak inklusif. Daya lenting (resiliensi) perekonomian Kabupaten Sumedang juga tergolong lambat. Tercatat perlu waktu enam Tahun untuk memulihkan ekonomi kembali diatas 6% sejak perekonomian tertekan pada Tahun 2014. Begitu pula sejak disrupsi ekonomi akibat Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang belum dapat kembali tumbuh diatas 6%. Beberapa faktor penyebab tingkat resiliensi perekonomian Kabupaten Sumedang yang lambat antara lain ketergantungan ekonomi pada sektor padat karya, infrastruktur yang belum merata, serta begitu kompleksnya penanganan krisis ekonomi karena tidak hanya ditataran lokal tapi dipengaruhi juga oleh pengaruh regional yang tidak sepenuhnya bisa dikendalikan pemerintah daerah.

##### **3.1.3.2. Kesejahteraan Sosial Budaya**

###### **1. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap perlu diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025-2045. Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia untuk menumbuhkan produktivitas. Pada aspek pendidikan, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sumedang masih tergolong rendah. Pembangunan pendidikan selama dua puluh tahun terakhir menghantarkan RLS Tahun 2023 mencapai 8,73 tahun dan HLS Tahun 2023 mencapai 13,01 tahun.

Pada aspek kesehatan, Usia Harapan Hidup (UHH) terus meningkat hingga pada Tahun 2023 mencapai 73,19 tahun. Hal ini mencerminkan

kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang terus meningkat. Adapun pengeluaran per kapita yang mengindikasikan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya telah mencapai 11,14 juta rupiah pada Tahun 2023.

Pembangunan manusia khususnya kelompok perempuan perlu lebih ditingkatkan pada aspek pendidikan dan daya beli. IPM laki-laki Tahun 2023 mencapai 75,96 poin sedangkan IPM perempuan mencapai 72,23 poin. Komponen RLS dan pengeluaran per kapita laki-laki lebih baik dibandingkan perempuan. Sedangkan komponen HLS dan UHH perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki.

Masih tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan menjadi penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sumedang. Faktor lainnya adalah keterbatasan dan ketidaksetaraan akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

## **2. Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya**

Keseimbangan pembangunan selain pembangunan secara fisik tapi harus juga diperkuat dan mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Hal tersebut akan membangun kekuatan secara mental dan spiritual sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif dan harmonis dalam berbagai aspek pembangunan.

Selain dukungan regulasi, kondusifitas wilayah juga sangat berperan dalam mendukung iklim investasi dan pembangunan. Terkait hal tersebut, dalam rangka Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban terutama kerukunan umat beragama di Kabupaten Sumedang telah terbentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang berperan dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmoni, damai, serta keseimbangan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bernegara maupun kehidupan beragama; dengan tujuan menguatkan Komitmen kebangsaan, memelihara toleransi, membangun tindakan anti kekerasan serta penerimaan terhadap tradisi.

Selain itu upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal menjadi hal yang sangat penting dalam upaya melestarikan budaya lokal di Kabupaten Sumedang.

Modernisasi yang semakin menguat di tengah perkembangan global mengakibatkan berkurangnya menjaga nilai-nilai agama dan budaya. Hal ini tentunya perlu diperhatikan seiring dengan teknologi informasi yang berkembang cepat perlu dioptimalkan pemanfaatannya untuk menjaga nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan.

### **3.1.4. Aspek Daya Saing**

#### **3.1.4.1. Daya Saing Ekonomi Daerah**

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang masih lambat, hal tersebut dikarenakan Struktur ekonomi Kabupaten Sumedang sejak 2019 masih didominasi 3 sektor utama (Industri, Pertanian, dan Perdagangan), sehingga sangat rentan terhadap guncangan eksternal dapat dicirikan ketergantungan terhadap Industri pengolahan yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB sebesar 19,48% pada Tahun 2023 yang terus menurun dari tahun 2021, dikarenakan Kawasan industri hanya di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor. Sedangkan untuk sektor pertanian masih mendominasi tenaga kerja namun secara proporsi terus menurun sejak tahun 2020 dikarenakan profesi sebagai petani bukan menjadi harapan untuk generasi muda.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan masih terbatasnya kapasitas fiskal menjadi salah satu faktor penyebab program pembangunan belum menjangkau seluruh wilayah dan terasa oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai sektor perekonomian masih belum dikembangkan optimal dalam dalam rangka meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Sektor-sektor tersebut antara lain meliputi pariwisata, kelautan dan perikanan, ekonomi kreatif, serta industri pengolahan skala kecil (IKM/UMKM).

#### **3.1.4.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi pusat dari pembangunan sosial ekonomi karena mempunyai kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan dalam proses pembangunan. Salah satu indikator yang menentukan daya saing SDM adalah tingkat Pendidikan.

Rata-rata Lama sekolah (RLS) di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2023 berdasarkan data dari BPS baru 8,73 tahun. Capaian ini masih lebih rendah dibanding RLS Provinsi Jawa Barat dan RLS Nasional. Sementara untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumedang sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang terus meningkat. Harapan Lama Sekolah anak usia tertentu di Kabupaten Sumedang Tahun 2023 adalah 13,01 tahun. Lebih tinggi dibanding HLS Provinsi Jawa Barat namun masih berada di bawah HLS Nasional. Tingkat Pendidikan ini tentunya akan memperbesar peluang untuk anak mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang.

Salah satu indikator lainnya yang dapat menggambarkan daya saing sumber daya manusia adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan data BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sumedang pada tahun 2023 sebesar 67,76% meningkat dibanding tahun 2022, artinya bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang kembali mendapatkan pekerjaan.

#### **3.1.4.3. Daya Saing Infrastruktur Wilayah**

Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Sumedang dari tahun 2020 tidak berubah sepanjang 774.368 Km. Kualitas infrastruktur jalan merupakan salah satu unsur penting bagi peningkatan daya saing daerah, selain akan mendorong aktivitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan di suatu wilayah manfaat jalan sangat dirasakan langsung oleh Masyarakat sebagai hasil dari Pembangunan.

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur jalan adalah Tingkat kemantapan jalan Kabupaten. Indikator tersebut menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan kondisi jalan sedang berdasarkan hasil pelaksanaan survei kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) dan atau dengan analisis perhitungan *Surface Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga. Tingkat kemantapan jalan pada Tahun 2023 hanya mencapai 88,45% namun keseluruhan Jalan kabupaten belum memenuhi standar yang ditentukan sehingga perlu peningkatan kualitas dan kapasitas jalan.

Infrastruktur perumahan dan permukiman menjadi sektor yang perlu mendapat perhatian karena menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan bersifat konkuren dalam rangka penyediaan akses Masyarakat terhadap pelayanan dasar (air minum, sanitasi dan perumahan) untuk pemenuhan kebutuhan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Di Kabupaten Sumedang sampai tahun 2023 persentase cakupan pelayanan akses air minum layak baru 81,87% yang terus diupayakan melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Dari sisi penanganan persampahan, Kabupaten Sumedang dibagi kedalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- A. Wilayah I Jatinangor meliputi 8 kecamatan;
- B. Wilayah II Sumedang Kota meliputi 9 kecamatan;
- C. Wilayah III Jatigede meliputi 9 kecamatan.

Berbagai Upaya penanganan sampah di wilayah Kabupaten Sumedang terus dilakukan. Hasilnya persentase sampah yang tidak terkelola semakin menurun. Pada tahun 2022 dari 161.592,02 ton sampah jumlah yang tertangani mencapai 48.362,50 ton atau 29,93% dan 64,86% selebihnya belum terkelola.

Pada tahun 2023 dengan volume sampah yang terus meningkat mencapai 174.806,09 ton dapat ditangani sebanyak 52.738,85 ton atau 30,17%, artinya jumlah sampah yang tidak terkelola di tahun 2023 sebanyak 64,59%.

Untuk sektor perumahan, sejak tahun 2021 dikembangkan indikator Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (RTHL) yang memiliki definisi operasional yakni rumah yang harus memenuhi keseluruhan aspek: 1) secara teknis memenuhi syarat ketahanan bangunan; 2) memiliki luas per kapita minimal 7,2 m<sup>2</sup>; 3) memiliki akses air minum layak; dan 4) memiliki akses sanitasi layak.

Capaian Persentase RTHL Kabupaten Sumedang 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2023) terus menurun, Tahun 2022 pada angka 66,75 dan terakhir pada angka 59,63 di tahun 2023.

Sebelum Tahun 2021 penyelenggaraan infrastruktur permukiman diukur dengan indikator cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air

limbah, dan cakupan pelayanan persampahan. Namun sejak tahun 2021 indikator penyelenggaraan infrastruktur permukiman diubah untuk menyesuaikan dengan *Sustainable Development Goals* (SDG).

#### **3.1.4.4. Daya Saing Iklim Investasi**

Dalam Upaya mendorong daya saing Investasi di Kabupaten Sumedang saat ini telah terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi yang telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomor 126 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Kemudahan Investasi sehingga akan menjamin adanya kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah.

Dengan adanya regulasi ini adalah untuk diharapkan akan meningkatkan Investasi di Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis mengenai nilai ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) Kabupaten Sumedang dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan beberapa tren yang signifikan, terutama dampak dari pandemi COVID-19. Nilai ICOR terendah dalam 13 tahun terakhir dicapai tahun 2019, sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Angka ini menunjukkan efisiensi yang relatif baik dalam investasi untuk menghasilkan output ekonomi. ICOR yang lebih rendah menunjukkan bahwa investasi yang dilakukan pada tahun ini cukup efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lonjakan besar dalam ICOR pada tahun 2020 mengindikasikan penurunan efisiensi investasi yang drastis. Hal ini disebabkan oleh gangguan ekonomi yang parah akibat pandemi COVID-19. Investasi yang dilakukan selama tahun 2020 tidak mampu menghasilkan pertumbuhan output yang signifikan karena pembatasan aktivitas ekonomi, gangguan rantai pasok, dan penurunan permintaan agregat.

Seiring pemulihan pandemi COVID-19, penurunan ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi terus membaik, mendekati tingkat pra-pandemi. Ini menandakan bahwa ekonomi Sumedang mulai stabil dan investasi mulai

memberikan hasil yang lebih baik dalam hal pertumbuhan output. Pencapaian di tahun 2023 sebesar 4,83 mengindikasikan untuk meningkatkan 1 (satu) triliun rupiah pada PDRB maka diperlukan 4,83 triliun investasi. Angka ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi pada tahun 2023 hampir kembali ke tingkat pra-pandemi (2019). Ini merupakan indikasi pemulihan ekonomi yang semakin baik, dengan investasi yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, masih sedikit lebih tinggi dibandingkan 2019, menunjukkan ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam efisiensi investasi.

### **3.1.5. Aspek Pelayanan Umum**

#### **3.1.5.1. Reformasi Birokrasi**

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi yang menjadi suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Arah perubahan tersebut lebih diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas regulasi, peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Sumedang diperlukan suatu instrumen kebijakan yang dapat menjadi tolak ukur dari keberlanjutan pelaksanaan birokrasi tersebut.

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada perbaikan kinerja birokrasi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024, di mana dirasakan terdapat kekurangan pada aspek manajemen SDM, kepemimpinan, kebijakan, penentuan perundang-undangan, SOP, sistem penganggaran berbasis kinerja, tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi, penyusunan perencanaan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan dalam struktur organisasi.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2023 berdasarkan publikasi Kementerian PANRB, menembus angka 81,98. Demikian juga capaian indikator lainnya di tahun 2023, seperti Indeks Profesionalitas ASN (IPA) berdasarkan informasi dari BKN, menembus 83,20, ini pun sama menjadi salah satu yang terbaik di tingkat nasional. Terkait Indeks Pelayanan Publik, Kementerian PANRB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai salah satu yang terbaik tingkat nasional dengan capaian sebesar 4,19. Untuk Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP dari BPKP, capaiannya cukup baik yakni ada pada level 3. Adapun untuk Kepatuhan Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Ombudsman, nilainya cukup baik sebesar 92,35. Sedangkan untuk hasil MCP yang dirilis KPK, nilainya menembus 91,50.

Indikator lainnya untuk melihat kinerja birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dilihat dari capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dipublikasikan Kementerian PANRB, dimana pada tahun 2023 mencapai 77,16, salah satu yang terbaik di tingkat Jawa Barat maupun Nasional. Terakhir, untuk Indeks Sistem Merit tahun 2023 sebagaimana disampaikan KASN mencapai 348, terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori kabupaten.

Namun dengan Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sumedang yang sudah cukup baik belum berdampak langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### **3.1.5.2. Pelayanan Publik**

Salah satu indikator yang dapat mengukur Tingkat kualitas pelayanan publik di suatu Kabupaten/Kota adalah Indeks Pelayanan Publik yang pengukurannya dilakukan oleh Kementerian PAN RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang berdasarkan data yang dirilis Kementerian PANRB untuk Tahun 2023 adalah 4,19 poin. Nilai ini sedikit menurun dibanding tahun 2022 yang mencapai 4,66 poin. Penurunan ini salah satunya karena Perangkat Daerah yang dinilai berbeda dari yang dinilai pada tahun 2022.

Selain Indeks Pelayanan Publik, hasil penilaian Lembaga Ombudsman selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan kualitas pelayanan publik yang

semakin baik dilihat dari sisi kepatuhan dalam menerapkan standar pelayanan. Nilai Tahun 2022 hasil penilaian Ombudsman adalah 79,57 dengan kategori B (Opini Kualitas Tinggi). Untuk tahun 2023 nilai kepatuhan semakin baik pada angka 92,35 dengan kategori A (Opini Kualitas Tertinggi).

Dari hasil penilaian tersebut belum berdampak terhadap optimalisasi pelayanan kepada masyarakat secara merata di setiap wilayah karena perlu dukungan sarana prasarana dan sumber daya aparatur pelayanan yang memadai.

### **3.1.5.3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE dengan harapan menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan optimal.

Nilai SPBE diperoleh dari akumulasi nilai masing-masing Domain penyangga SPBE. Pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Sumedang yang dihasilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Untuk pencapaian yang lebih baik, perlu dilakukan proses evaluasi pada berbagai aspek tidak hanya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik saja, tetapi juga dilakukan oleh Perangkat Daerah lain terkait aspek SPBE. Dokumen Arsitektur SPBE perlu diperbarui sesuai dengan format terbaru. Konten Arsitektur SPBE dan Peta Rencana harus diselaraskan dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Perlunya standar proses pengembangan aplikasi yang mengikuti kebutuhan namun tetap memenuhi dokumentasi SDLC. Diperlukan pemberdayaan pada Perangkat Daerah yang mempunyai peran masing-masing indikator SPBE sesuai tugas dan fungsi pokok serta diperlukan kerja Tim Koordinasi SPBE. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi perlu melibatkan Inspektorat Daerah sebagai PIC utama dan Manajemen SPBE perlu dilaksanakan pada semua aktivitas oleh semua Perangkat Daerah.

#### **3.1.5.4. Inovasi Daerah**

Kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan daerah tersebut. Untuk itu maka diperlukan adanya kreativitas daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Berdasarkan banyak bukti empiris, inovasi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pencapaian daya saing sebuah daerah. Inovasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya, melainkan harus didukung berbagai elemen lain. Dukungan nyata agar inovasi dapat berkembang dengan optimal adalah dengan membangun suatu sistem, yaitu sistem inovasi.

Batasan atau definisi tentang inovasi sangatlah beragam, tetapi secara umum, yang dimaksud dengan inovasi adalah penerapan atau implementasi dari sesuatu yang baru. Lebih luas lagi, inovasi merupakan tindakan penerapan ide-ide baru yang menciptakan nilai bagi organisasi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa inovasi merupakan (penerapan) cara yang lebih baik dan cerdas dalam melakukan sesuatu.

Seiring berjalannya waktu, perkembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terus meningkat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya penyusunan inovasi di Kabupaten Sumedang. Dalam kurun waktu 2021-2022 telah tersusun sebanyak 330 inovasi.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kematangan inovasi yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri melalui 2 aspek yakni aspek Satuan Pemerintah Daerah yang terbagi menjadi 3 variabel dan 15 indikator. Serta Aspek Satuan Inovasi terbagi menjadi 5 variabel dan 21 indikator. Pada tahun 2021 Kabupaten Sumedang memperoleh Indeks Inovasi sebesar 60,19 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 dengan indeks 63,21. Sedangkan pada Tahun 2023 mengalami sedikit penurunan menjadi 60,06 point. Namun berdasarkan pengukuran tersebut, Kabupaten Sumedang masih mendapatkan predikat Sangat Inovatif.

Dari hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tersebut dapat diketahui bahwa inovasi yang disusun oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sumedang, tingkat kematangannya belum optimal. Inovasi tersebut sudah

berjalan dengan baik dilapangan, namun belum dilengkapi dengan data dukung administrasi.

### **3.2. Isu Strategis**

#### **3.2.1. Isu Global Pembangunan**

##### **a. Perubahan Iklim**

Tantangan pemanasan global akibat perubahan iklim berdampak pada peningkatan suhu global yang terus meningkat hingga 3,5°C pada skenario *intermediate*, jika tidak ada penurunan emisi GRK yang tinggi pada durasi Tahun 2020-2050. Dampak perubahan iklim ini yang kemudian melahirkan kesepakatan kebijakan global dalam pembangunan rendah karbon untuk menurunkan intensitas emisi pada sektor-sektor tertentu. Keikutsertaan Indonesia dalam penandatanganan Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim dinyatakan melalui *Nationally Determined Contribution* (NDC). Komitmen ini menjadi dasar bagi Indonesia dalam merancang berbagai kebijakan nasional dalam menurunkan intensitas emisi karbon dalam pembangunan nasional. Terlebih lagi laporan dari *World Meteorological Organization* (WMO) dalam *State of The Climate 2022* menyebutkan bahwa Tahun 2022 menempati peringkat ke-6 Tahun terpanas (peringkat ke-1). Tahun 2015-2022 menjadi 8 (delapan) Tahun terpanas dalam catatan WMO, sehingga perubahan iklim ini menjadi 1 (satu) isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan kedepan.

##### **b. Geopolitik dan Geoekonomi.**

Rivalitas dan dominasi negara-negara besar dalam perekonomian dan politik global memberikan dampak terhadap stabilitas perekonomian negara-negara lain dunia. Konflik yang saat ini berlangsung di kawasan Timur Tengah, Eropa Timur, dan Laut Cina Selatan – Indo Pasifik, efeknya dapat merambat secara langsung dan tidak langsung dalam skala global. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendorong deglobalisasi dimana setiap negara membangun kemandirian dan ketahanan dalam memitigasi risiko keterpaparan dampak potensi krisis yang merambat melalui jalur perdagangan dan keuangan internasional, serta komoditas dalam rantai pasok global. Di tengah tensi geopolitik yang ada, Kawasan Indo-Pasifik yang diprediksi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berpotensi membuka berbagai peluang yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan luar negeri, menjadi

*windows of opportunity* sebagai bagian dari rantai pasok produksi dan perdagangan global.

**Gambar 3.1 Isu Global**



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 (diolah)

### c. Demografi Global.

Proyeksi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menunjukkan bahwa penduduk global pada Tahun 2030 dan 2045 masing-masing tumbuh menjadi 8,5 miliar dan 9,5 miliar penduduk. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya tingkat kematian dan meningkatnya angka harapan hidup saat lahir. Terkait proporsi demografi seperti bertambahnya kelompok penduduk usia tua (*aging population*) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Menurut UNDP, dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan pada Tahun 2050, di mana 95 persen pertambahan tersebut berada di negara *emerging economies*. Di Asia dalam 4 (empat) dekade ke depan, penduduk perkotaan akan meningkat sebesar 1,7 kali lipat. Sebanyak 25–30 persen penduduk perkotaan masih tinggal di kawasan pemukiman tanpa pelayanan dasar seperti air, drainase, sanitasi, listrik, dan jalan yang memadai.

### d. Disrupsi Teknologi

Saat ini, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) bahkan bisa melakukan tugas-tugas berpikir yang sebelumnya harus dilakukan oleh manusia, seperti menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Ke depan, akan banyak pekerjaan yang dapat tergantikan oleh pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi di setiap

tahapan/proses pembentukan peraturan perundang-undangan, mendorong penataan regulasi, memetakan berbagai regulasi yang berpotensi tumpang tindih secara vertikal maupun horizontal, mengkaji regulasi yang inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik dalam semua proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta membantu menganalisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

#### **e. Perdagangan Internasional**

Meningkatnya jumlah kelas menengah masyarakat global akan mendorong sisi permintaan produk dan peningkatan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menjadi tantangan peluang pasar ekspor produk dari Provinsi Jawa Barat ke negara-negara potensial. Produk yang berdaya saing serta penguatan sistem logistik yang efisien diperlukan dalam meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat.

#### **f. Urbanisasi Dunia**

Menurut data *World Population Prospects (2022)*, populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Porsi lansia di Asia juga meningkat yaitu sebesar 55 persen. Hal tersebut memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Kebutuhan pangan, energi, dan air akan semakin meningkat pula seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Selain itu, urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik juga telah menyebabkan perkembangan kota yang menyebar ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada perubahan guna lahan pertanian menjadi tempat bermukim dan Kawasan perdagangan/jasa.

### **3.2.2. Isu Strategis Nasional**

#### **1. Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN)**

Dari DKI Jakarta ke Kalimantan diperkirakan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta baik dari sisi konsumsi, impor ekspor perdagangan antar daerah, serta belanja pemerintah pusat di wilayah tersebut. Potensi kehilangan belanja pemerintah pusat ke wilayah DKI diperkirakan mencapai 90 persen dari total keseluruhan belanja. Keterkaitan aktivitas perekonomian yang erat menjadikan perpindahan IKN akan berdampak langsung terhadap kinerja perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dampak yang

diakibatkan berupa penurunan PDRB sebesar 0,06 persen, serta upah nyata di sektor pertanian turun sebesar 0,49 persen, sehingga dampaknya perlu diantisipasi karena dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan yang telah menjadi permasalahan di Provinsi Jawa Barat saat ini.

**Gambar 3.2 Isu Nasional**



*Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 (diolah)*

## 2. Bonus Demografi Indonesia

Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah penduduk ke 4 (empat) terbesar di dunia yaitu sebesar 277 juta jiwa dan diproyeksikan pada Tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa. Dengan besarnya jumlah penduduk dapat menjadikan potensi sumber daya pembangunan yang besar jika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Selain itu, besarnya jumlah penduduk dapat memberikan potensi tenaga kerja yang besar untuk menunjang sektor-sektor ekonomi potensial menghasilkan lapangan kerja yang besar seperti sektor industri, pertanian dan pariwisata. Namun dengan besarnya penduduk Indonesia saat ini masih terdapat tantangan yaitu kualitas pendidikan yang masih rendah yang dilihat dari capaian rata-rata nilai PISA siswa Indonesia Tahun 2018 untuk semua aspek (membaca, matematika dan sains) yaitu sebesar 382,00 dimana capaian tersebut masih dibawah siswa dari negara-negara OECD yaitu sebesar 488,33. Selain itu produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal yaitu sebesar 7.274,9 USD dimana angka tersebut berada dibawah rata-rata kawasan ASEAN. Komposisi struktur penduduk Indonesia masih dapat dioptimalkan, dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diproyeksikan akan berlangsung sekitar 15 (lima belas) Tahun ke depan. Dengan penduduk usia produktif yang dominan akan

semakin berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi apabila adanya peningkatan kualitas penduduk usia produktif melalui peningkatan produktivitasnya.

### **3. Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru**

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kerangka transformasi ekonomi dengan ekonomi hijau sebagai salah satu strategi yang dipersiapkan tidak hanya dalam rangka pemulihan dari pandemi COVID-19 namun juga untuk membawa Indonesia mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan **Visi Indonesia Emas 2045**.

Ekonomi hijau merupakan model pembangunan yang mensinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan rendah karbon sebagai “tulang punggung” nya.

Penerapan ekonomi hijau dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau.

Sementara itu, paradigma ekonomi biru merupakan kerangka pembangunan berkelanjutan untuk membantu menangani isu-isu seperti kesenjangan pembangunan, pengembangan, dan pemerataan kesejahteraan dari sumber daya laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan, serta pertumbuhan ekonomi.

### **4. Konektivitas dan Infrastruktur Dasar**

Terbatasnya sistem angkutan umum massal perkotaan terutama di wilayah metropolitan dan kota-kota, konektivitas *hinterland* (intra pulau) yang terdiri dari jaringan jalan, kereta api, serta angkutan perairan danau dan sungai masih perlu ditingkatkan. Rendahnya jangkauan jaringan serat optic sebagai layanan digital yang berkualitas, dan masih belum meratanya jangkauan jaringan internet seluler di daerah terpencil menjadi tantangan nasional. Ke depannya, selain permasalahan tersebut, terdapat beberapa masalah lain yang perlu diatasi seperti lemahnya tata kelola dan koordinasi antar lembaga, kurangnya pendanaan untuk pembangunan infrastruktur termasuk untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan infrastruktur yang telah dibangun. Dalam pemenuhan infrastruktur dasar, tantangan utama yang dihadapi adalah belum terpenuhinya kebutuhan atas hunian layak dan terjangkau, terbatasnya rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi

yang aman dan berkelanjutan, dan masih tingginya rumah tangga yang mempraktikkan Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta sarana dan prasarana dasar belum berketahanan bencana. Selain itu, pelayanan tenaga listrik belum optimal dan belum berkelanjutan.

## **5. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Serta Ketahanan Bencana**

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian dan kesehatan. Kerugian ekonomi akibat bencana perubahan iklim diperkirakan mencapai rata-rata Rp22,8 triliun per Tahunnya. Di Indonesia terdapat 18.000 km garis Pantai berkategori rentan dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, peningkatan musim kemarau yang menyebabkan beberapa wilayah mengalami penurunan intensitas cuaca curah hujan juga berdampak pada meningkatnya potensi kekeringan, ketersediaan air, dan penurunan produksi padi. Kondisi tersebut diperparah dengan daya dukung hutan dan lahan sawah yang diperkirakan akan terus menurun. Selain itu, daya dukung ketersediaan air juga menunjukkan tren menuju kelangkaan khususnya di wilayah Jawa. Adapun, daya dukung ekosistem laut diprediksi akan mengalami kerentanan seiring dengan kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut yang diakibatkan pengelolaan yang tidak berkelanjutan.

## **6. Desentralisasi dan Otonomi Daerah**

Reformasi sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menimbulkan tren pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan peluang yang lebih besar dari potensi daerah yang ada. Tujuan pemekaran wilayah pada dasarnya untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum dan daya saing daerah. Tren pemekaran wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah alokasi transfer ke daerah yang memiliki peranan stimulan yang lebih besar terhadap belanja daerah dibandingkan dengan PAD. Alokasi transfer ke daerah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap sektor-sektor terkait pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. Di samping itu perlu adanya peningkatan kualitas

belanja yang dilakukan Pemerintah Daerah dimana kualitas belanja daerah sangat mempengaruhi terhadap pencapaian indikator makro daerah.

### 3.2.3. Isu Regional Jawa Bali

Pulau Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat pertumbuhan industri berbasis inovasi, riset dan teknologi serta pariwisata dan ekonomi kreatif. Kebijakan kewilayahan tersebut penting untuk Provinsi Jawa Barat yang memang potensi dan kontribusinya bagi nasional cukup besar. Peluang besar Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan arahan tersebut tentunya didukung dengan modalitas yang ada dan adanya perubahan peran Jakarta.

**Gambar 3.3 Isu Regional**



Sumber: RPJPN Tahun 2025-2045 (diolah)

**Perubahan peran Jakarta sebagai Kota Global** akan mempengaruhi Provinsi Jawa Barat secara langsung dan provinsi-provinsi lain di sekitarnya. Sebagai kota global, Jakarta akan menjadi kota yang melayani dan membiayai kegiatan internasional dalam bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga baik nasional, regional maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional. Perubahan peran tersebut tentunya menciptakan nilai ekonomi yang besar dan akan mempengaruhi daerah sekitarnya.

Sebagai penopang perekonomian terbesar nasional, Jawa-Bali masih menjadi magnet bagi SDM berkualitas. Namun demikian, daya saing SDM secara umum masih perlu ditingkatkan terlebih di Provinsi Jawa Barat yang jumlah penduduknya terbesar. Dengan wilayah yang luas, ketersediaan akses pendidikan juga masih belum merata. Selain itu, masih adanya

kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha perlu menjadi perhatian ke depannya.

Pulau Jawa-Bali yang merupakan magnet bagi pendatang tentunya sangat rentan terhadap perubahan tatanan sosial budaya yang ada. Didorong dengan kemajuan teknologi informasi menyebabkan pertukaran informasi berlangsung makin cepat sehingga mempengaruhi kondisi sosial budaya masyarakat. Provinsi Jawa Barat pun mengalami gejala demikian. Salah satunya ditunjukkan dengan rendahnya persentase penduduk yang pernah terlibat dalam pertunjukan seni, kegiatan organisasi, serta menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat.

**Ketimpangan wilayah utara-selatan** memang sudah berlangsung sejak lama dan akan tetap terjadi ke depannya. Hal tersebut tercermin dari ketersediaan infrastruktur yang lebih baik dan lengkap serta konsentrasi berbagai industri di sepanjang wilayah utara. Ketimpangan tersebut juga terlihat dari angka kemiskinan dan pengangguran yang relatif banyak terkonsentrasi di wilayah selatan. Kondisi demikian juga terjadi di Provinsi Jawa Barat sehingga ke depannya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi ketimpangan yang sudah berlarut-larut terjadi itu.

**Perubahan iklim dan bencana alam** menjadi hal yang patut menjadi perhatian utama di Pulau Jawa-Bali untuk ke depannya. Tekanan pembangunan dan wilayah yang berada pada ancaman gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan tsunami menuntut kesiapsiagaan, mitigasi, peringatan dini, penanganan darurat, dan pemulihan pasca bencana. Kondisi tersebut juga berlaku dalam konteks Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi jumlah penduduk yang makin besar, maka diperlukan **tata kelola pemerintahan** yang responsif seiring dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi ke depannya. Tuntutan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan terintegrasi dengan teknologi informasi mutlak menjadi suatu keharusan. Kondisi demikian juga berlaku untuk Provinsi Jawa Barat yang ke depannya juga makin kompleks permasalahan yang dihadapi.

### **3.2.4. Isu Berdasarkan West Java Development Forum (WJDF)**

#### **1) Fokus Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan**

Isu layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas dalam menghadirkan SDM yang unggul dan sejahtera, mencakup: akses layanan

kesehatan bersama; tuntas wajib belajar sampai dengan SMA; *stunting*; pemenuhan layanan pendidikan masyarakat; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama; pemenuhan akses layanan dasar yang berkualitas (kesehatan, pendidikan); dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung bonus demografi. Adapun isu perlindungan sosial terintegrasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, mencakup: kemiskinan dan rumah tidak layak huni; penanganan kemiskinan melalui ekonomi keluarga; sistem informasi PPKS; perlindungan masyarakat miskin secara tepat sasaran; pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal; layanan kesehatan dan kemiskinan bersama wilayah perbatasan; pemberdayaan masyarakat miskin petani dan nelayan; layanan terpadu dalam penanggulangan kemiskinan wilayah perbatasan; dan skenario mitigasi bertambahnya penduduk miskin.

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan peningkatan pendapatan masyarakat menengah ke bawah, mencakup: pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; pemerataan pertumbuhan wilayah dan ekonomi sesuai dengan potensi lokal; ketimpangan akses sosial dan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif; kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat; pemerataan kualitas hidup berbasis teknologi; dan skenario mitigasi melebarnya tingkat ketimpangan.

Isu penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja, mencakup; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; optimalisasi kuantitas dan kualitas BLK; pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; ketersediaan BLK dan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; *digital skill* kepada tenaga kerja pemuda; kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja; SDM tenaga kerja yang kompeten; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan. Isu kesejahteraan petani (petani, pekebun, petani ikan dan nelayan), mencakup: konflik antar nelayan dalam pemanfaatan ruang laut; pengelolaan ekosistem pesisir dan perikanan tangkap bersama pada batas wilayah laut 12 mil; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; produktivitas sumber

daya kelautan dan keamanan laut; dan pemanfaatan bersama pelabuhan perikanan.

Sedangkan isu sistem pangan yang berkelanjutan, meliputi: produktivitas pertanian dan perikanan; adaptasi varietas pertanian berketahanan iklim; sistem pangan berkelanjutan; kelancaran distribusi ternak wilayah perbatasan; belum optimalnya penerapan pola konsumsi pangan yang berkelanjutan; pemanfaatan ruang pesisir dan laut yang berkelanjutan; produktivitas sumber daya kelautan dan keamanan laut; produktivitas kegiatan usaha tani dan kegiatan usaha ekonomi pertanian; regenerasi petani; ketersediaan pangan berkelanjutan; ketersediaan dan akses pangan; dan optimalisasi *logistic global value chain* dan *blue economy*.

## 2) Fokus Penguatan Infrastruktur Berkelanjutan

Isu infrastruktur yang terintegrasi, efisien, merata serta adaptif terhadap bencana, meliputi: aglomerasi perkotaan di Bodebekpunjur, Rebana, dan Cekungan Bandung sebagai *engine of growth*; infrastruktur persampahan berkelanjutan dan sistem transportasi yang efisien; penyediaan dan layanan infrastruktur sumber daya air, air bersih, limbah, jalan, sampah yang merata; penyediaan dan layanan sistem transportasi; konektivitas antar pusat kegiatan; persampahan serta rantai pasok pangan yang efisien; infrastruktur berkelas dunia; keselamatan pelayaran ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan) lintas provinsi; infrastruktur wilayah dan logistik terintegrasi (kereta, sistem logistik pelabuhan dan bandara, air bersih, transportasi darat); infrastruktur perbatasan terintegrasi, handal dan adaptif bencana (jalan, sampah, air bersih, pelabuhan kereta, air limbah); dan peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung perekonomian.

Untuk isu infrastruktur digital yang merata dan berkualitas, mencakup: pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam ekonomi digital; kesiapan transformasi digital yang berkelanjutan; keterjangkauan akses digital yang merata; dan penggunaan teknologi digital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun isu transformasi energi fosil ke energi baru terbarukan, mencakup pengembangan EBT untuk mendukung *green economy* dan transisi energi.

Sementara, isu infrastruktur sumber daya air yang andal dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, mencakup: penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan; penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan, ketersediaan air baku dan air bersih yang berkualitas dan kontinyu; serta penanganan banjir terintegrasi dan berkelanjutan.

### **3) Fokus Peningkatan Produktivitas Daerah**

Isu produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa sektor-sektor perekonomian, mencakup: Kawasan Pantura sebagai basis industri hijau, perikanan dan ketahanan pangan; optimalisasi pengembangan ekowisata terintegrasi; pengembangan IKM dan UKM; optimalisasi kinerja sektor-sektor ekonomi pariwisata dan ekraf; peningkatan investasi dan promosi investasi industri; peningkatan produktivitas tenaga kerja industri; pengembangan pariwisata kelas dunia; kerjasama perdagangan dalam penguatan rantai pasok pangan berkualitas; Jawa Barat sebagai bagian dari rantai pasok pangan berkualitas; *link and match* antara industri dan sektor hulu; dan mengembangkan rantai nilai regional pada produk-produk yang berdaya saing di pasar internasional.

Adapun isu UMKM yang unggul, berdaya saing serta menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, mencakup: peran pemuda dalam kewirausahaan; peningkatan produktivitas dan partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi; optimalisasi pertumbuhan *startup*; pemberdayaan UMKM dan *startup*; penguatan IKM dan UMKM; pemberdayaan UMKM dan koperasi; peningkatan kinerja sektor-sektor ekonomi spesifik wilayah (pariwisata, UMKM dan Industri); pelatihan dan pemasaran digital produk UMKM; integrasi pengembangan ekraf; pemberdayaan UMKM dan koperasi wilayah perbatasan; kewirausahaan yang berkelanjutan melalui UKM; dan komoditas pertanian sebagai komoditas wirausaha/bisnis.

### **4) Fokus Penguatan Daya Saing SDM Berkelanjutan**

Isu pendidikan vokasi dan keselarasan subsidi pendidikan antar wilayah perbatasan dan pendidikan karakter berlandaskan nilai budaya, mencakup: pendidikan usia dini berbasis lingkungan hidup; peningkatan kualitas pendidikan pada usia dini (0-5 Tahun); pemajuan kebudayaan; pengelolaan SDM yang terintegrasi (publik, swasta, dan masyarakat); penguatan kurikulum adaptif berbasis TIK; pengembangan dan penguatan

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); pelestarian masyarakat adat dan cagar budaya; optimalisasi kompetensi tenaga kerja; pendidikan vokasi; keselarasan subsidi pendidikan; akses pendidikan lintas batas wilayah perbatasan; pemajuan kebudayaan daerah; dan peningkatan kualitas dan akses pendidikan.

Adapun isu kesetaraan entitas sosial dan individu dalam pembangunan, meliputi: pemberdayaan masyarakat yang inklusif; pembangunan yang merata dan inklusif; dan inklusivitas dalam pembangunan bagi semua kalangan. Adapun isu ketersediaan infrastruktur digital meliputi: peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital; peningkatan kemampuan SDM digital (*digital skill*); akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi melalui peningkatan literasi digital; transformasi digital; dan *digital divide*/kesenjangan untuk mengakses teknologi digital.

#### **5) Fokus Penguatan Lingkungan Sosial Masyarakat yang Sehat dan Budaya Masyarakat Maju**

Isu pembangunan keluarga yang berkualitas, mencakup: sistem informasi PPKS; Jabar sebagai provinsi yang memperhatikan lansia; meminimalisir *gangster*; dan *awareness* terhadap kesehatan mental. Adapun isu pemajuan kebudayaan, mencakup: aspek regulasi muatan lokal kebudayaan daerah; platform kebudayaan; dan penanaman nilai agama dan budaya bangsa.

#### **6) Fokus Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan yang berkualitas dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan bagi pembangunan, meliputi: penanganan kualitas lingkungan terintegrasi; alih fungsi lahan; peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup; kerusakan pesisir pantai; pengelolaan sampah; Banjir Rob Pantai Utara akibat perubahan iklim; alih fungsi lahan; ekonomi berkelanjutan berbasis industri hijau; pemenuhan kawasan lindung; pengelolaan limbah; RTH dan imbal jasa ekologis; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; ekonomi hijau berbasis digital; dan dampak pengembangan industri manufaktur terhadap lingkungan.

Adapun isu mitigasi risiko bencana berbasis masyarakat, meliputi: mitigasi tsunami pada zona *megathrust* pantai selatan; penanganan bencana

yang belum optimal karena terbatasnya penyebaran informasi kepada masyarakat; mitigasi bencana dan perubahan iklim; timbulnya abrasi di pesisir laut yang menyebabkan luas daratan berkurang; dan perlindungan sosial adaptif.

### **7) Fokus Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Isu tata kelola pemerintahan kolaboratif, meliputi: kelembagaan kerjasama antar daerah; struktur organisasi yang efektif; kolaborasi *pentahelix* dalam penanganan berbagai masalah infrastruktur dasar; tata kelola pemerintahan yang inklusif; *environmental leadership*; dan perbaikan regulasi dalam semua aspek birokrasi. Adapun isu pelayanan publik terintegrasi berbasis elektronik, meliputi: pelayanan adaptif dan terintegrasi pada kawasan *greater* metro; pemanfaatan citra digital dalam pendataan kendaraan bermotor; optimalisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara berkualitas dalam pelayanan publik; digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi, dan kemudahan izin berusaha dan investasi.

Sementara isi sistem inovasi daerah untuk percepatan pembangunan, meliputi: kawasan perbatasan yang berdaya saing; penyiapan teknologi secara inovatif, efektif dan efisien; transformasi digital; pencarian alternatif sumber pendanaan yang lain belum optimal; pemimpin 4.0 yang adaptif dan responsif; insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah; pembangunan inklusif yang berkelanjutan; pemanfaatan teknologi digital dalam menciptakan inovasi dalam pembangunan berkelanjutan; dan Peningkatan partisipasi pada forum-forum inovasi IPTEK dan sains.

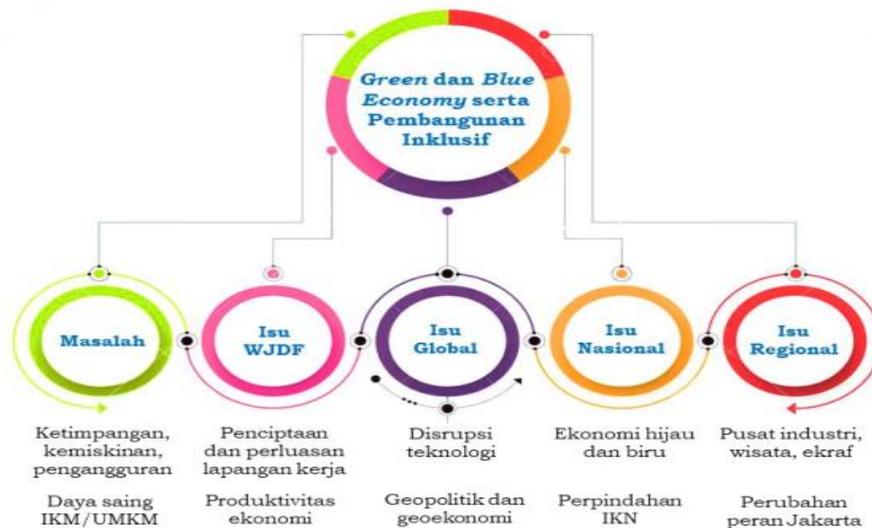
#### **3.2.5. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat**

##### **1) Green dan blue economy serta pembangunan inklusif**

Perekonomian yang berkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih, pengarusutamaan *green economy* dan *blue economy*. Perekonomian yang bersih atau "*clean economy*" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Ekonomi biru atau "*blue Economy*" mengacu pada konsep Pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut dan kelautan secara berkelanjutan. Ini mencakup pemanfaatan laut, samudra, dan sumber daya

yang terkait, sambil mempertimbangkan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan Pembangunan inklusif adalah pembangunan yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

**Gambar 3.4 Isu Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif**

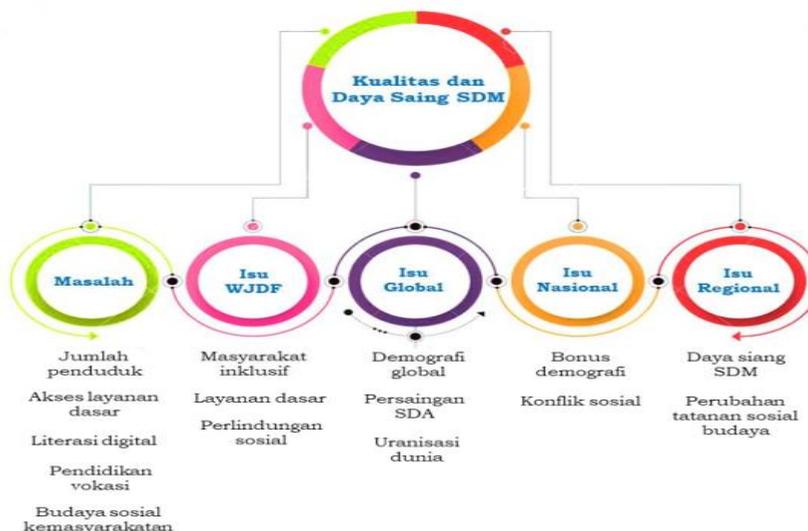


Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

## 2) Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Pada Tahun 2045, proyeksi jumlah penduduk dan penduduk usia produktif di Provinsi Jawa Barat masih menjadi yang terbesar di Indonesia. Demikian halnya, rasio ketergantungan dan jumlah penduduk usia lanjut cenderung meningkat.

**Gambar 3.5 Isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia**



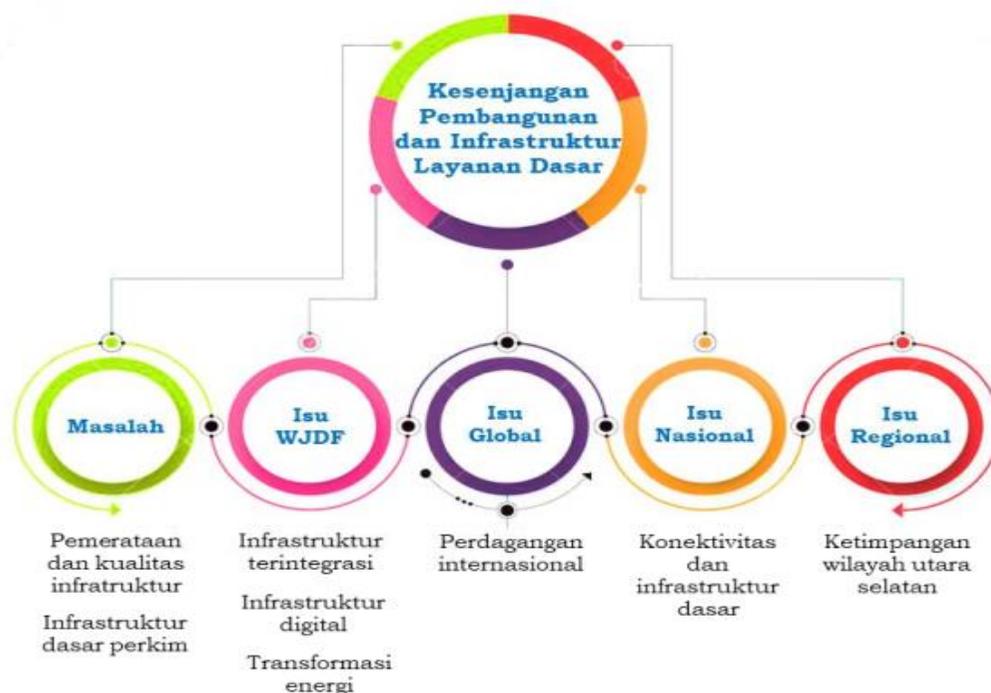
Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Provinsi Jawa Barat untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk mendukung pembangunan inklusif diperlukan karakter sosial budaya yang inklusif. Karakter sosial budaya yang inklusif adalah sosial budaya yang terbuka dan ramah serta saling menghargai. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

### 3) Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar

Kesenjangan pembangunan dan infrastruktur dasar antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat serta antara perkotaan dan perdesaan mengakibatkan ketimpangan pertumbuhan ekonomi dan akses layanan dasar masyarakat di wilayah tersebut.

**Gambar 3.6 Isu Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar**



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

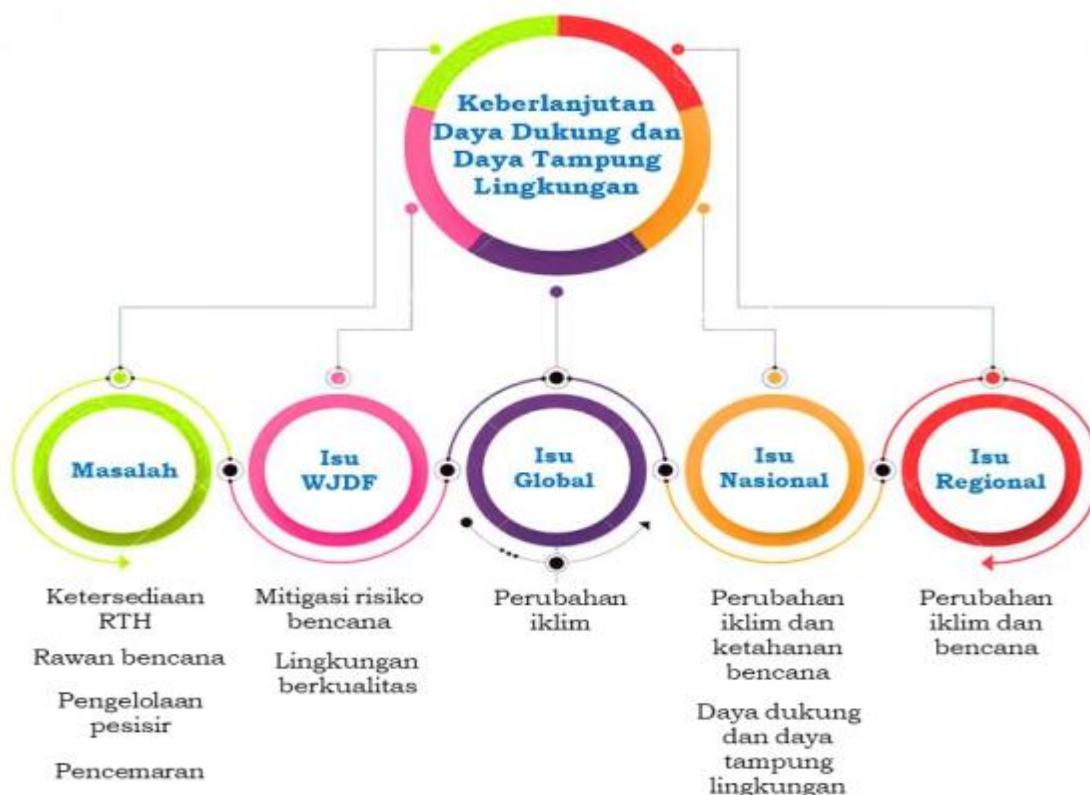
Percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Provinsi Jawa Barat bagian selatan seperti infrastruktur jalan, sumber daya air dan irigasi, Kesehatan, pendidikan, dan digital akan meningkatkan pemerataan

pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah perkotaan dan perdesaan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perdesaan. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

#### 4) Keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Selain mempercepat aspek pertumbuhan, penyelenggaraan Pembangunan daerah dalam jangka panjang juga lebih mengedepankan prinsip-prinsip keberlanjutan dari daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penggunaan bahan baku yang lebih efisien dan terbarukan, serta mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya perekonomian, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang ditimbulkannya.

**Gambar 3.7 Isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan**



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

Inovasi teknologi yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya serta kehidupan sosial budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam meningkatkan batas-batas pertumbuhan serta mewujudkan keberlanjutan

daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam pembangunan jangka panjang.

### 5) Keberlanjutan Penataan Ruang

Pertumbuhan penduduk dan perekonomian wilayah dalam jangka panjang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan lahan yang meningkat untuk memenuhi kebutuhan hal tersebut di atas akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pemanfaatan ruang serta upaya pengendaliannya menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

**Gambar 3.8 Isu Keberlanjutan Penataan Ruang**



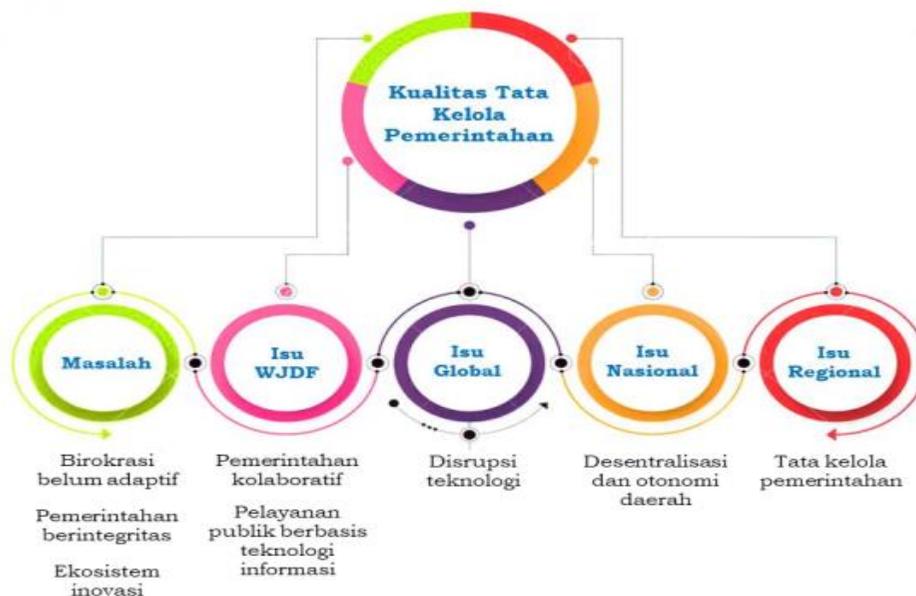
Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

### 6) Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Wilayah Provinsi Jawa Barat yang luas dan jumlah penduduk yang besar merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan daerah yang semakin kompleks. Birokrasi yang terikat dengan seperangkat regulasi juga dihadapkan dengan tuntutan perubahan yang cepat dan responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Kolaborasi dan partisipasi akan menjadi

keharusan dalam pengelolaan daerah seiring dengan meningkatnya pendidikan masyarakat.

**Gambar 3.9 Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**

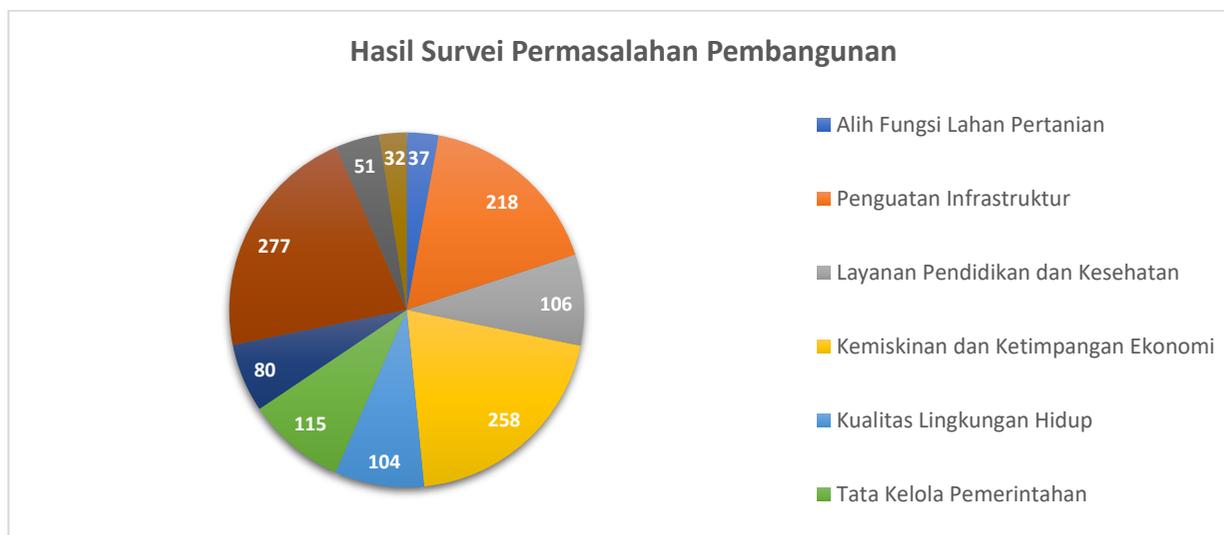


Sumber: Rancangan awal RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045

### 3.2.6. Isu Berdasarkan Masukan Publik

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah melakukan survei melalui media elektronik untuk menjangring permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang harus diselesaikan dalam masa 20 (dua puluh) tahun ke depan. Survei dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sumedang. Hasil penjangringan permasalahan yang telah masuk dapat dilihat pada tabel dibawah.

**Grafik 3.1 Hasil Survei Permasalahan Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**



Sumber: Hasil analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### **1. Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan**

Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan menjadi permasalahan utama yang dipilih terbanyak oleh masyarakat Kabupaten Sumedang dalam survei yang dilakukan. Maka Isu penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan serta pembentukan SDM tenaga kerja yang kompeten sesuai pasar kerja menjadi isu strategis yang diberikan oleh masyarakat di Kabupaten Sumedang perlu menjadi prioritas oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah daerah perlu mendukung dan menyiapkan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan kerja; *event-event job fair* untuk menjaring tenaga kerja baru; industri padat karya untuk penyerapan tenaga kerja lokal; pencetakan wirausaha baru yang tangguh dan berdaya saing; *digital skill* kepada tenaga kerja pemuda; dan perluasan kesempatan kerja untuk semua kalangan.

### **2. Penguatan Infrastruktur**

Isu penguatan infrastruktur dipilih oleh masyarakat Kabupaten Sumedang sebagai permasalahan yang perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Daerah. Meskipun tidak menjadi pilihan utama, permasalahan infrastruktur di Kabupaten Sumedang harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah 20 (dua puluh) tahun kedepan. Isu penguatan infrastruktur ini berdampak pada perekonomian, kesehatan, dan meningkatkan konektivitas. Permasalahan infrastruktur yang jadi masukan dari hasil survei adalah: 1) Kualitas jalan; 2) Drainase dan pengelolaan air; 3) Jaringan air bersih; 4) elektrifikasi dan jaringan listrik; 5) Fasilitas pendidikan dan kesehatan; 6) Konektivitas dan transportasi umum; dan 7) Pengelolaan sampah.

### **3. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi**

Isu Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi juga menjadi pilihan prioritas permasalahan dari hasil survei yang dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Sumedang. Isu kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus Pemerintah Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Berikut aspek-aspek terkait kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang menjadi fokus:

### 1. Kemiskinan

- 1) Akses Terbatas terhadap Pelayanan Dasar;
- 2) Keterbatasan Kesempatan Kerja;
- 3) Keterbatasan Infrastruktur; dan
- 4) Pendapatan dan Pekerjaan.

### 2. Ketimpangan Ekonomi

- 1) Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata;
- 2) Perbedaan Pembangunan Antar Wilayah;
- 3) Akses terhadap Sumber Daya dan Modal; dan
- 4) Kualitas Pendidikan dan Pelatihan.

### **3. Kualitas Lingkungan Hidup**

Isu lingkungan hidup yang berkualitas dan daya dukung lingkungan menjadi permasalahan selanjutnya yang dipilih oleh masyarakat di Kabupaten Sumedang. Permasalahan terkait isu lingkungan hidup hasil penjarangan masukan dari hasil survei meliputi: pengelolaan sampah; Banjir akibat perubahan iklim; pengelolaan limbah; Pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor dan aktivitas industri; pengarusutamaan pembangunan berwawasan lingkungan; dan dampak pengembangan industri pada lingkungan.

### **4. Layanan Pendidikan dan Kesehatan**

Isu layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mencapai pembangunan yang inklusif. Berikut adalah gambaran mengenai permasalahan hasil penjarangan survei dari masyarakat.

#### 1. Layanan Pendidikan

- 1) Ketimpangan Akses;
- 2) Kualitas Pendidikan;
- 3) Kebijakan Zonasi;
- 4) Fasilitas Sekolah; dan
- 5) Transportasi.

#### 2. Layanan Kesehatan

- 1) Fasilitas Kesehatan;
- 2) Tenaga Kesehatan;
- 3) Peralatan dan Obat; dan
- 4) Pelayanan Kesehatan Primer.

## **5. Penataan Kota dan Kawasan Wisata**

Isu penataan kota dan wisata juga menjadi prioritas Pemerintah Daerah dikarenakan Kabupaten Sumedang ingin menjadi pilihan destinasi wisata dalam negeri dan luar negeri. Kabupaten Sumedang memiliki banyak objek wisata yang bisa menjadi referensi untuk didatangi wisatawan baik dalam negeri atau luar negeri. Namun penataan kota dan wisata menjadi permasalahan yang dihadapi, beberapa aspek permasalahan yang ada berdasarkan hasil survei sebagai berikut: Keterbatasan infrastruktur; Sistem transportasi; Pengelolaan sampah dan kebersihan; Pengelolaan yang tidak memadai; Fasilitas dan aksesibilitas; Kurangnya promosi; dan Pengembangan produk wisata.

## **6. Alih Fungsi Lahan**

Isu alih fungsi lahan di Kabupaten Sumedang merupakan tantangan penting yang berpotensi memengaruhi berbagai aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Alih fungsi lahan mengacu pada perubahan penggunaan lahan dari tujuan semula, seperti pertanian, hutan, atau ruang terbuka, menjadi penggunaan baru seperti pemukiman, industri, atau komersial. Berikut adalah beberapa aspek dari isu alih fungsi lahan hasil survei yang dilaksanakan sebagai berikut: Penurunan kualitas tanah, udara dan air; Keterbatasan lahan pertanian; dan Hilangnya mata pencaharian.

## **7. Tata Kelola Pemerintahan**

Isu strategis tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sumedang mencakup berbagai tantangan dalam mengelola pemerintahan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dimasukkan dalam survei yang dilakukan: Transparansi pengelolaan anggaran; Efisiensi dan efektivitas pelayanan; aksesibilitas dan kualitas layanan; Digitalisasi dan teknologi; dan Inovasi dalam pelayanan.

## **8. Transportasi Umum**

Isu transportasi umum di Kabupaten Sumedang mencakup berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi mobilitas masyarakat, pengembangan ekonomi, dan kualitas hidup. Berikut adalah beberapa permasalahan terkait transportasi umum di Kabupaten Sumedang hasil survei yang dilakukan:

Kurangnya aksesibilitas; Frekuensi dan jadwal; Kondisi kendaraan; Infrastruktur pendukung; Tarif dan aksesibilitas ekonomi; dan Keamanan pengguna transportasi.

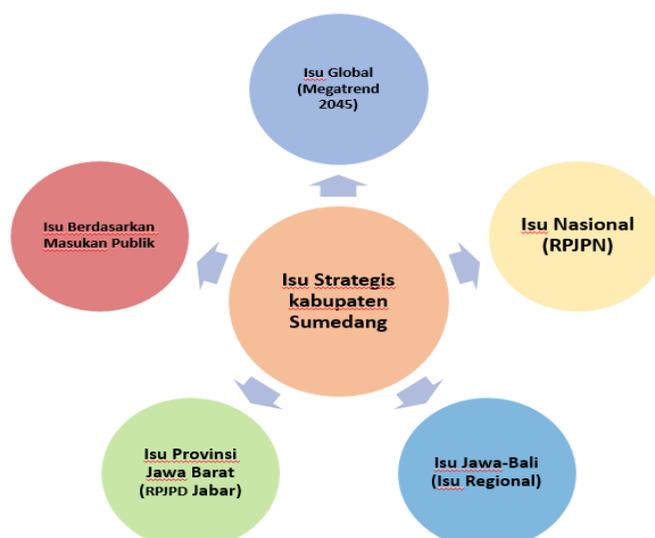
## 9. Pergeseran Nilai Agama, Moral, dan Budaya

Isu pergeseran nilai agama, moral, dan budaya di Kabupaten Sumedang mencerminkan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan sosial dan globalisasi. Pergeseran ini dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di daerah tersebut. Berikut adalah beberapa permasalahan dari hasil survei yang dilakukan: Pengaruh globalisasi; Modernisasi dan sekularisasi; Perubahan etika sosial; Pengaruh media dan teknologi; Perubahan dalam keluarga; Kehilangan tradisi; serta Perubahan dalam seni dan kreativitas.

### 3.2.7. Isu Strategis Daerah

Isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan menggunakan kriteria-kriteria sebagai berikut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; dan kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola. Selain itu memperhatikan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional (Jawa-Bali), Isu Provinsi Jawa Barat dan Isu hasil masukan publik.

**Gambar 3.10 Perumusan Isu Strategis Daerah**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

Hasil perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025 sampai dengan 2045 meliputi:

### **1. Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2045 di proyeksikan akan didominasi oleh usia produktif dan usia rentan, dengan proyeksi rasio ketergantungan (*dependency ratio*) akan mencapai 57,16%. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Kabupaten Sumedang untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia yang produktif (usia dini, anak-anak, dan remaja) serta pelayanan sosial bagi penduduk lanjut usia untuk menyediakan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Tantangan lain yaitu terkait optimalisasi aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang harus berdampak pada menurunnya angka kematian ibu dan bayi, upaya penurunan prevalensi *stunting* penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular dengan tantangan terkait varian virus baru serta upaya peningkatan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. dalam membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing tentunya harus didukung penguatan nilai Agama, budaya serta norma kearifan lokal jangan sampai tergerus oleh perkembangan teknologi dan isu global. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dilakukan untuk mendukung Sumedang sebagai kabupaten *smart city* juga harus dijadikan outcomenya. Pada akhirnya sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung pelayanan publik yang optimal.

**Gambar 3.11 Isu Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

## 2. Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan

Kondisi ketahanan lingkungan di Kabupaten Sumedang menjadi faktor penting untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan di masa mendatang. Saat ini secara umum daya dukung dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Sumedang masih dapat menopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Akan tetapi terdapat beberapa tantangan dan ancaman yang dapat mempengaruhi daya tampung dan daya dukung lingkungan di masa mendatang.

Perubahan iklim merupakan ancaman yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan di masa mendatang, dengan tingkat ketidakpastian yang cukup tinggi. Fenomena el nino dan la nina serta cuaca ekstrem sangat mempengaruhi pola pertanian di Kabupaten Sumedang. Bencana hidrometeorologi tentunya dapat menurunkan produksi pangan sehingga dapat meningkatkan kerawanan pangan. Ancaman untuk Ketahanan Pangan juga dipengaruhi oleh rantai pasok global dan nasional. Ketidakpastian tekanan politik dan ekonomi di masa mendatang dapat mempengaruhi rantai pasok ini. Akibatnya pola produksi dan distribusi pangan dapat terganggu.

Tekanan pertumbuhan penduduk di masa mendatang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan hidup terutama timbulan sampah rumah

tangga yang dapat mencemari air dan tutupan lahan. Permasalahan sampah ini perlu ditangani secara komprehensif dari titik awal timbulan sampah. Di masa mendatang sistem pengelolaan sampah diupayakan dilakukan dalam skala lingkungan, sehingga tidak diperlukan adanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah skala lingkungan akan mengedepankan pendekatan berbasis komunitas, dengan memberdayakan masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam menjaga kelestarian alam dan memanfaatkan potensi sumber daya setempat secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian serta industri yang mendukung keberlanjutan, masyarakat akan didorong untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri, seperti energi terbarukan dan pertanian organik. Pengelolaan ini akan mengutamakan sinergi antara kearifan lokal, inovasi teknologi, serta kerja sama lintas sektor, memastikan keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial.

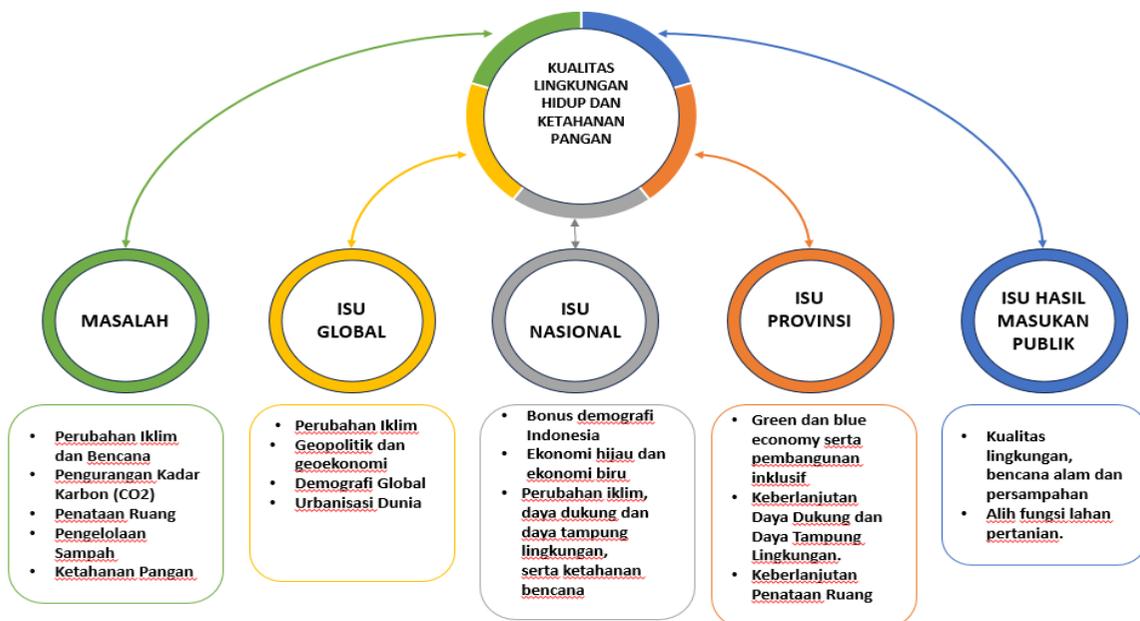
Pengelolaan limbah *greywater* (air limbah dari cucian, mandi, dan wastafel) dan *blackwater* (limbah dari toilet) juga perlu dikembangkan pada skala lingkungan melalui pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem pengolahan *greywater* dapat dilakukan dengan menggunakan biofilter, dan teknologi filtrasi sederhana yang memungkinkan pemanfaatan kembali air untuk irigasi atau penyiraman tanaman. Sementara itu, *blackwater* membutuhkan pengolahan yang lebih kompleks, seperti penggunaan biodigester atau sistem septik komunal yang terhubung ke fasilitas pengolahan limbah terpusat untuk mengolah kotoran manusia menjadi pupuk organik dan biogas.

Pengelolaan limbah dari rumah tangga ini berperan penting dalam meminimalkan pencemaran air tanah dan permukaan, mengurangi penggunaan air bersih, dan meningkatkan sanitasi lingkungan secara keseluruhan. Selain itu, edukasi dan partisipasi masyarakat dalam sistem ini akan memastikan bahwa infrastruktur dan teknologi yang digunakan dijaga dan dioperasikan dengan benar, mendukung kesehatan dan kesejahteraan komunitas dalam jangka panjang.

Untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di masa mendatang, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu mengembangkan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan serta dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim. Pembangunan dimasa mendatang harus berbasis rendah karbon. Hal ini adalah upaya untuk menempuh *net zero emission* dan berketahanan iklim, berfokus pada penurunan emisi gas rumah kaca dengan cara meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mengadopsi kendaraan listrik, meningkatkan efisiensi energi di rumah tangga dan industri, serta mengaplikasikan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan akan sangat dipengaruhi oleh tindakan manusia dan kebijakan pemerintah yang diambil. Penting untuk meningkatkan kesadaran, mengadopsi teknologi berkelanjutan, dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan dan memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

**Gambar 3.12 Isu Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### 3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berbasis Teknologi

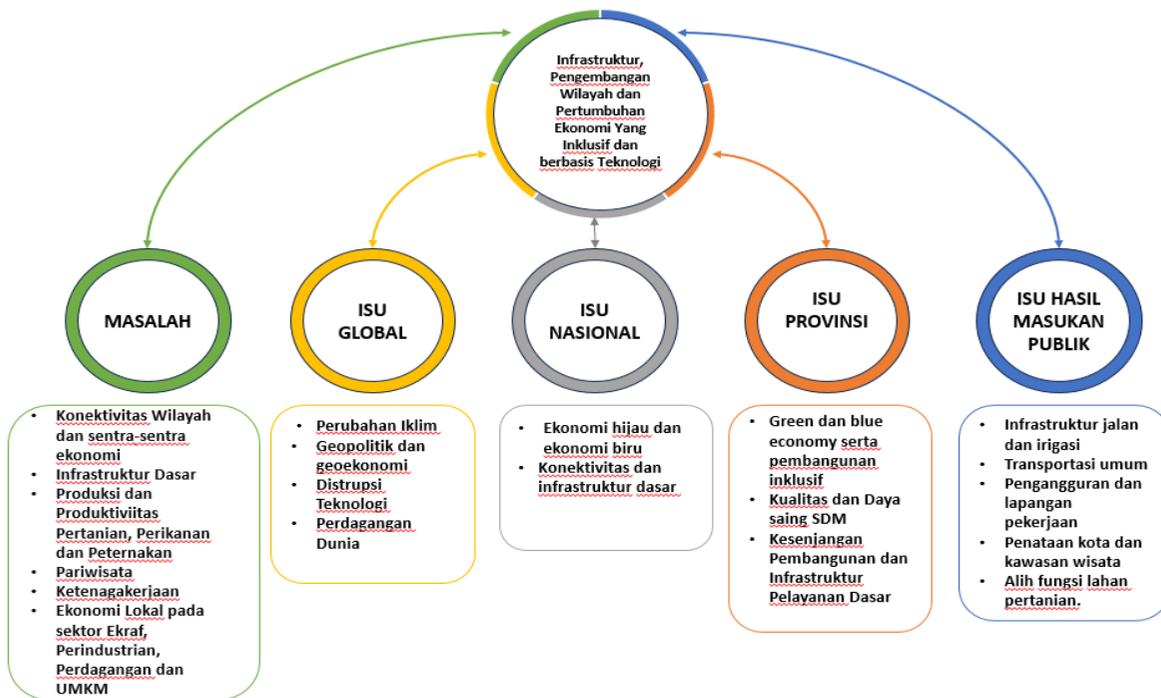
Infrastruktur yang memadai adalah pondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kabupaten Sumedang perlu memprioritaskan peningkatan jaringan transportasi, termasuk perbaikan jalan, pengembangan transportasi publik, dan penyediaan akses listrik yang stabil. Dalam era digital, investasi pada konektivitas internet dan telekomunikasi juga menjadi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur yang dikembangkan harus mendukung pengembangan wilayah dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Penting untuk memahami potensi lahan untuk pengembangan ekonomi dan infrastruktur serta merancang kebijakan tata ruang yang mendukung pertumbuhan yang terkoordinasi. Upaya pengembangan wilayah juga dapat mencakup pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan kualitas hidup.

Aspek keberlanjutan juga ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Semua lapisan masyarakat harus dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Inisiatif harus diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi lokal, memberdayakan usaha mikro dan kecil, serta memastikan bahwa pendapatan dan peluang ekonomi tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang. Program pelatihan dan pendidikan juga dapat meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat.

Pengintegrasian teknologi dalam pembangunan dapat memacu inovasi dan efisiensi. Kabupaten Sumedang perlu mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti akses internet yang luas dan program pelatihan untuk meningkatkan literasi digital. Penerapan teknologi dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, manufaktur, dan layanan publik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Pengintegrasian teknologi tidak hanya dilakukan untuk mendukung semua program pembangunan, tata kelola pemerintahan yang baik juga mendukung sumedang menuju *smart city*.

**Gambar 3.13 Isu Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang Berbasis Teknologi**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

#### 4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Transparansi dan akuntabilitas masih menjadi isu penting dalam peningkatan tata kelola pemerintahan. Transparansi dalam kebijakan dan proses pengambilan keputusan pemerintah adalah kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat. Diperlukan langkah-langkah untuk memastikan informasi publik mudah diakses dan dimengerti oleh masyarakat. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas juga harus diperkuat, melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan lembaga keuangan independen.

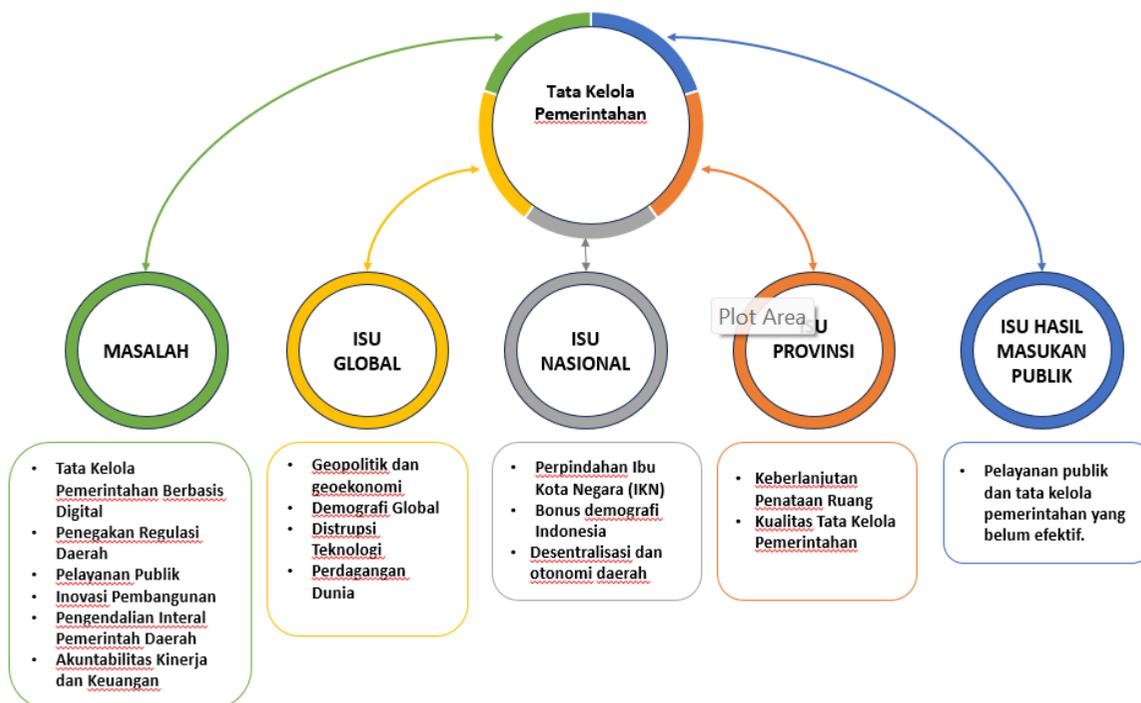
Tata kelola pemerintahan dalam pembangunan juga perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Pemerintah perlu menciptakan ruang untuk dialog dan konsultasi publik, memastikan bahwa suara semua lapisan masyarakat didengar. Mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa, pertemuan publik, dan forum partisipatif harus didorong dan didukung.

Tata kelola pemerintahan yang efektif perlu ditopang oleh birokrasi yang efisien dan responsif. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur birokrasi, memastikan bahwa proses pengambilan keputusan tidak lambat dan kompleks. Peningkatan kapasitas pegawai pemerintah juga dapat mendukung peningkatan efisiensi. Peningkatan kapasitas pegawai pemerintah juga dapat

mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang optimal.

Kabupaten Sumedang sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mampu merespons sepuluh tren mega-global yang ada dengan memanfaatkan peluang yang muncul dalam pengembangan aspek sosial dan ekonomi di wilayahnya. Kabupaten Sumedang juga perlu mempertimbangkan dengan cermat keterbatasan-keterbatasan yang timbul dari kondisi fisik dan sosial dasarnya. Keberadaan Kabupaten Sumedang dalam konteks geo-spasial yang rentan akan bencana banjir, Longsor, kebakaran, gempa bumi, serta cuaca ekstrem. Hal ini mengharuskan kita untuk mendalami faktor-faktor lingkungan geo-fisik dan ekosistem ketika mengelola sumber daya yang tersedia di wilayah ini. Dengan demikian, kita dapat meminimalisir risiko-risiko yang melekat dalam kehidupan di Kabupaten Sumedang. Hal ini mencerminkan pentingnya penanganan berbasis risiko yang holistik dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan dan pengelolaan sumber daya, dengan mempertimbangkan konteks geografis dan lingkungan yang unik, serta memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi, sejalan dengan pencapaian agenda nasional menuju **“Indonesia Emas”** Tahun 2045.

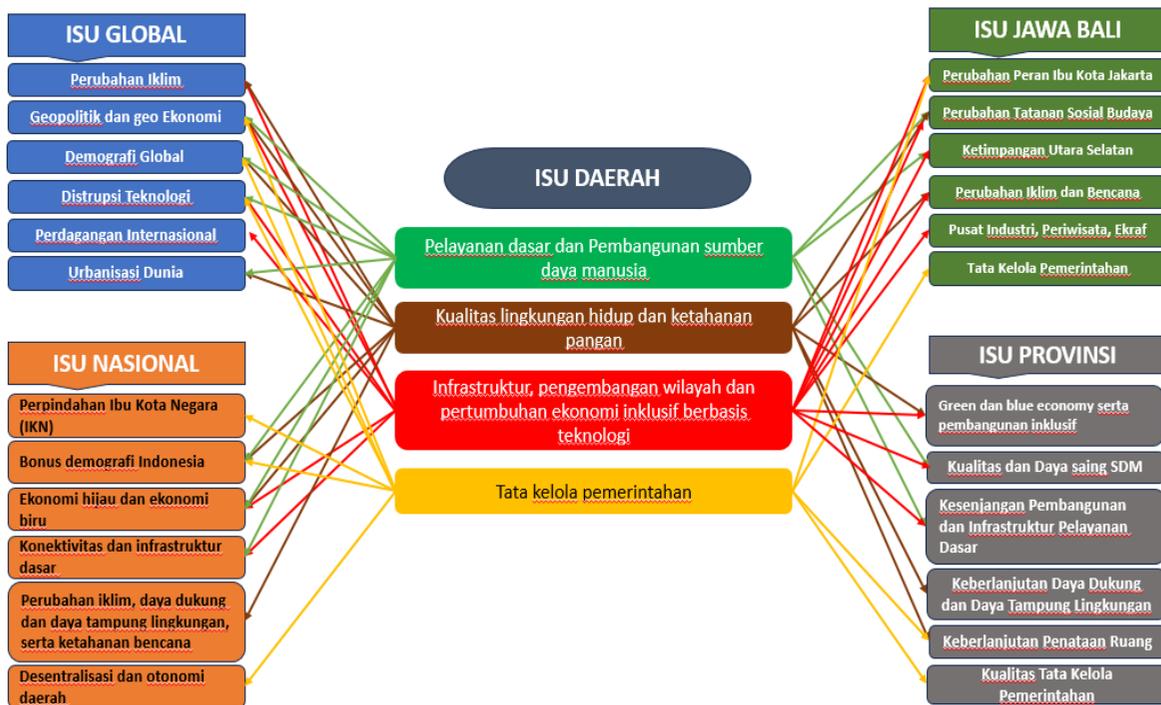
**Gambar 3.14 Isu Kualitas Tata Kelola Pemerintahan**



Sumber: Hasil analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

Dari Isu strategis di atas, Isu daerah harus selaras dengan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional (Jawa-Bali) dan Isu Provinsi Jawa Barat. Keselarasan tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 3.15 Keselarasan Isu Daerah dengan Isu Global, Isu Nasional, Isu Regional (Jawa-Bali) dan Isu Provinsi**



Sumber: Hasil analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### 3.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

*Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan kelanjutan dari *MDGs (Millenium Development Goals)*, yang telah berakhir pada Tahun 2015 yang lalu. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup. *Sustainable Development Goals* dimulai dari kesepakatan dari pertemuan dunia pada saat September 2015 melalui agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) yang merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/SDGs dilakukan dengan prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "No-one Left Behind".

SDGs terdiri dari 169 target dan 17 Tujuan antara lain : Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*); Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*); Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*); Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*); Kesetaraan Gender (*Gender Equality*); Air Bersih dan Sanitasi Layak (*Clean Water and Sanitation*); Energi Bersih dan Terjangkau (*Affordable and Clean Energy*); Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*); Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*Industry, Innovation and Infrastructure*); Berkurangnya Kesenjangan (*Reduce Inequalities*); Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*); Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*); Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*); Ekosistem Lautan (*Life Below Water*); Ekosistem Daratan (*Life on Land*); Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (*Peace Justice and Strong Institution*); Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (*Partnerships for the Goals*).

Implementasi dan capaian SDGs tentunya sangat diharapkan dan dapat diwujudkan melalui pengembangan kemitraan yang baik antara para pemangku kebijakan baik pusat maupun daerah, juga diperlukan pengembangan sumberdaya dan kapasitas dalam pengintegrasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam perencanaan yang ada, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek, disamping alokasi anggaran dari pemerintah maupun swasta untuk mendukung setiap tujuan pembangunan yang akan dicapai. Untuk mewujudkan pencapaian SDGs dan tujuan Pembangunan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang menjadi sumber daya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Hasil dari Rumusan Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 bahwa dari 17 TPB di tetapkan 5 (lima) Aspek Pembangunan Berkelanjutan (PB) dengan rumusan sebagai berikut:

1. Cakupan akses Kesehatan universal yang belum optimal, akses sanitasi dan kebersihan, mitigasi, penyebaran penyakit menular, termasuk Kesehatan

seksual dan reproduksi, serta pencegahan kematian bayi dan balita (TPB 3, TPB 6);

2. Hak terhadap sumber daya ekonomi, akses pelayanan dasar, dan perlindungan sosial yang belum merata (TPB 1);
3. Kebijakan pembangunan yang kurang mendukung penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, promosi pariwisata berkelanjutan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai upaya pengentasan kemiskinan (TPB 1, TPB 8);
4. Proses pembangunan yang belum terintegrasi dengan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati (TPB 15);
5. Ketahanan masyarakat terhadap bencana alam dan guncangan ekonomi masih rendah (TPB 1, TPB 11).

## **BAB IV**

### **VISI DAN MISI**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam menentukan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang selama 20 (dua puluh) tahun ke depan harus selaras dengan Visi dan Misi Nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Pembangunan merupakan transformasi secara menyeluruh menuju arah yang lebih baik, disengaja, dan menyentuh segala aspek. Melalui transformasi, daerah dalam melaksanakan pembangunan diharapkan untuk dapat meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing.

#### **4.1. Visi**

##### **4.1.1. Visi Indonesia Emas 2045**

Cita-cita besar bangsa Indonesia adalah membangun Indonesia Emas 2045 sebagaimana tercermin dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), 17 (tujuh belas) arah (Tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan, secara utuh mencerminkan semangat Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Melalui kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur mewujudkan Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada peringatan 100 (seratus) Tahun sebagai bangsa yang merdeka di Tahun 2045.

Penyusunan RPJPN Tahun 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah acuan utama dalam setiap pembangunan yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung, serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan (gambar

4.1). Penentuan visi ini berlandaskan pada kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; perkembangan megatrend global; dan pencapaian Pembangunan periode sebelumnya.

**Gambar 4.1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045**



Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara 2 (dua) samudera besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nusantara akan menjadi Negara tangguh pada Tahun 2045 yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. Kekuatan geopolitik Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritimnya secara efektif serta menjalin hubungan kerjasama dengan negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) juga memiliki kekuatan di bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Nusantara dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besar. Selain itu, Indonesia perlu mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestik dan posisinya dalam perdagangan internasional yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritim,

meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam serta memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan regional dan dunia internasional.

Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan aset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan regional dan dunia internasional.

Pada Tahun 2045, Indonesia yang **bersatu** adalah negara memiliki kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika, **berdaulat** adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya. Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara **maju**, perekonomiannya mencapai posisi nomor 5 (lima) terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan **berkelanjutan**, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

#### **4.1.2. Visi Provinsi Jawa Barat 2025-2045**

Rumusan mengenai keadaan atau kondisi Provinsi Jawa Barat yang diinginkan pada Tahun 2045 sebagai hasil Pembangunan selama 20 (dua puluh) Tahun ke depan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan dan Isu strategis Kualitas dan Daya Saing SDM, *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, Kesenjangan Pembangunan dan

Infrastruktur Pelayanan Dasar, serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan menjadi dasar perumusan visi Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan. Isu strategis *Green* dan *Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, Keberlanjutan penataan ruang, Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan dalam Pembangunan, serta Kualitas Tata Kelola Pemerintahan menjadi dasar perumusan visi Berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 adalah **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**. Rumusan visi tersebut diharapkan dapat menjadi komitmen, kesepakatan, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

**Gambar 4.2 Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045**

**PROVINSI JAWA BARAT  
TERMAJU, BERDAYA SAING DUNIA, DAN BERKELANJUTAN**



Sumber: RPJPD Provinsi Jawa Barat 2025-2045

Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 yaitu **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**, secara khusus dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Termaju** merupakan kondisi Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 berada pada tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya. Peran sebagai pusat *cutting-edge industry*, Jawa Barat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah lainnya, yang didukung dengan infrastruktur berkualitas dan modern serta kawasan sains dan teknologi, memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal untuk menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar, serta mengurangi

ketergantungan impor dan energi fosil. Peran sebagai penunpu pangan nasional, mampu mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian, ketahanan air, ketahanan pangan, dan adaptasi perubahan iklim, didukung dengan teknologi yang modern. Kemajuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2045 termanifestasi pada pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi, tingkat kemiskinan rendah, ketimpangan pendapatan masyarakat rendah, serta infrastruktur yang berkualitas dan modern.

**Berdaya Saing Dunia** merupakan kondisi Jawa Barat pada Tahun 2045 yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi, teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta infrastruktur dalam jangka panjang. Keunggulan kompetitif dalam bidang ekonomi ditunjukkan dengan transaksi perdagangan luar negeri yang tinggi, kualitas dan harga produk bersaing, kerjasama luar negeri yang semakin meningkat. Keunggulan kompetitif bidang teknologi dan inovasi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menciptakan, mengadopsi dan mengelola teknologi lebih efisien, efektif, dan inovatif, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi yang tinggi.

Keunggulan kompetitif bidang sumber daya manusia ditunjukkan dengan kualitas SDM yang unggul, kritis, kreatif, inovatif, percaya diri, kolaboratif, berbudaya, dan mampu bersaing di tingkat dunia, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Modal Manusia yang tinggi. Keunggulan kompetitif bidang infrastruktur ditunjukkan dengan prasarana transportasi, energi dan ketenagalistrikan, sumber daya air, telekomunikasi yang modern dan terintegrasi, hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Kualitas Infrastruktur yang tinggi.

Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2045 telah mewujudkan pembangunan **berkelanjutan**, yang dicirikan dengan adanya kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, untuk keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik, termanifestasi dengan penerapan perilaku ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan

lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara, dan sampah), menerapkan praktik pertanian organik, dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya. Keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang dimanifestasikan dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Peningkatan produktivitas dan transformasi ekonomi hijau dan biru dilaksanakan dengan tetap menjaga kelenturan ekosistem (menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup), dan mewujudkan ekonomi yang inklusif secara produktif, ditunjukkan dengan Indeks Ekonomi Hijau dan Biru yang tinggi, serta menurunnya emisi gas rumah kaca. Keberlanjutan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dengan kondisi masyarakat yang memiliki akses terhadap seluruh aspek layanan sosial ekonomi yang sangat baik serta memiliki tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kualitas kehidupan yang tinggi.

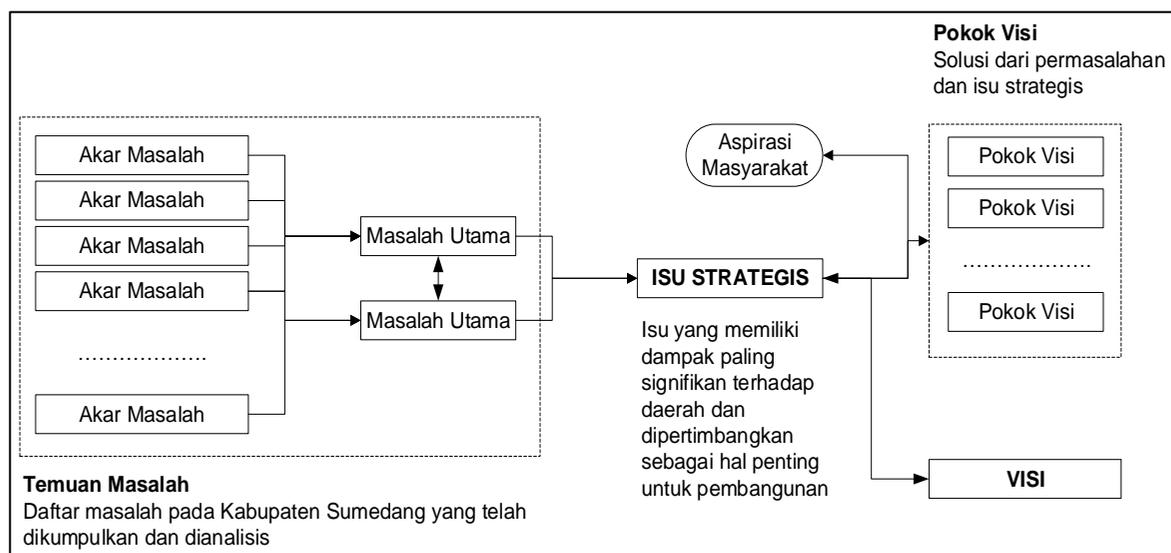
#### **4.1.3. Visi Daerah Kabupaten Sumedang 2025-2045**

Visi pembangunan adalah suatu gambaran jangka panjang yang menjadi panduan untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan, serta menciptakan motivasi dan inspirasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam pembangunan daerah, visi merupakan pokok penting dalam memberikan landasan filosofis dan esensial terhadap proses perencanaan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan. Visi pembangunan memegang peran krusial dalam membentuk identitas daerah dan menetapkan nilai-nilai inti yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan merinci cita-cita dan harapan jangka panjang, visi memandu proses pembangunan untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Visi pembangunan harus mampu menggambarkan dengan jelas gambaran masa depan yang diinginkan daerah berdasarkan kondisi dan situasi yang saat ini dihadapi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pelestarian lingkungan alam. Dengan adanya visi yang kokoh, pembangunan dapat diarahkan secara terukur oleh setiap pemangku kepentingan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh

lapisan masyarakat. Visi yang komprehensif dan inspiratif akan meraih tujuan bersama dalam proses pembangunan.

Visi merupakan cita-cita daerah yang dirumuskan dengan proses yang panjang. Perumusan visi diperoleh dengan perhatian yang dalam terhadap permasalahan pembangunan yang ditemukan serta temuan isu strategis yang didapatkan. Visi Kabupaten Sumedang juga memperhatikan faktor internal seperti potensi daerah dan permasalahan yang membentuk kelemahan dan perlu diselesaikan. Faktor internal mencerminkan karakteristik, sumber daya, dan kemampuan intrinsik suatu daerah yang menerjemahkan kemampuan daerah secara tepat. Selain hal tersebut, faktor eksternal dipertimbangkan karena memegang peran penting dalam pembangunan daerah karena lingkungan luar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan dan keberlanjutan suatu wilayah melalui peluang dan tantangan yang berpengaruh. Visi pembangunan daerah ini juga diperoleh berdasarkan pertimbangan isu strategis yang telah memunculkan pokok-pokok visi sebagai solusi permasalahan daerah yang mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Kabupaten Sumedang. Perumusan visi ini digambarkan sebagai berikut.

**Gambar 4.3 Bagan Konsep Perumusan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

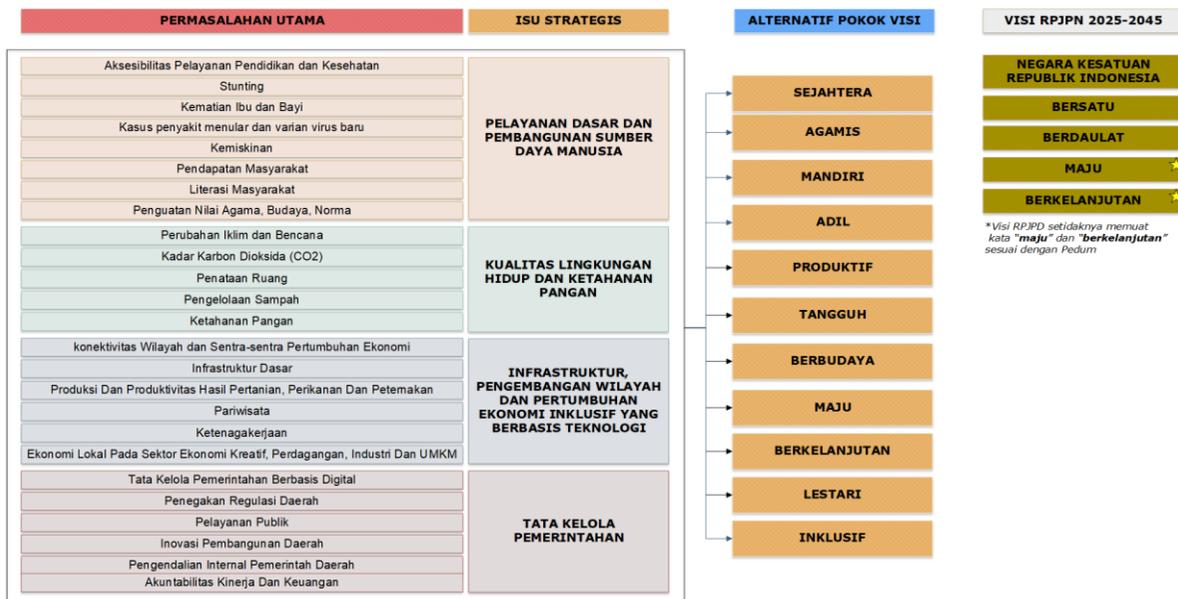


Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

Dengan proses perumusan visi tersebut, ditemukan dua puluh lima (25) masalah utama dan empat (4) isu strategis. Isu strategis yang telah diidentifikasi adalah 1) Pelayanan Dasar dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, 2) Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan, 3) Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif yang

Berbasis Teknologi, 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan. Pada perumusan visi daerah perlu untuk memperhatikan muatan visi yang tercantum sebagai visi pembangunan jangka panjang Indonesia. Temuan konsep visi pembangunan daerah yang dimaksud dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.4 Keselarasan Rumusan Visi berdasarkan Isu Strategis dan Permasalahan Utama RPJPD Tahun 2025-2045**



Sumber: Hasil analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Alternatif pokok visi yang menjadi landasan dalam perumusan visi Kabupaten Tahun 2025-2045. Sementara itu, alternatif pokok visi yang ditemukan sebagai solusi permasalahan dan potensi daerah adalah tangguh, Produktif, berbudaya, cemerlang, maju dan berkelanjutan. Pokok visi ini juga mempertimbangkan visi dalam RPJPN 2025-2045, yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** dan Visi Provinsi Jawa Barat yaitu **Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan**, Pokok visi yang terpilih sebagai pokok yang menjabarkan cita-cita Kabupaten Sumedang secara komprehensif adalah **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan** yang selanjutnya disingkat **SUMEDANG MANDALA**.

*Mandala* adalah kata dalam bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Sansakerta yang memiliki arti Pusat/Tempat Pendidikan. Jadi ketika kami jadikan Visi, kata Mandala selain merupakan akronim dari Maju, Mandiri, maju dan berkelanjutan. Kata Mandala juga menggambarkan Kabupaten Sumedang sebagai pusat pendidikan dimana jatinangor sumedang merupakan pusat pendidikan terkemuka di Indonesia.

Salah satu definisi Mandala adalah puseur/pusat dan juga nama lembaga formal pendidikan di wilayah Sunda pada masa sistem Kerajaan, sehingga akan menjadi sejalan dengan *City Branding* Sumedang yaitu *City of Knowledge* atau Kota Pengetahuan. Kata Mandala juga kuat karakternya, sehingga akan menambah semangat aparaturnya dan warganya.

Pada Tahun 2045 Kabupaten Sumedang diharapkan mampu berdaya saing dan lebih maju dari Kabupaten/Kota di Indonesia. Standar kualitas tinggi tersebut dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang modern, terintegrasi dan handal, memiliki sistem pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, perekonomian yang maju, dan didukung dengan pemerintahan yang kredibel, adaptif dan inovatif. Dalam Keberhasilan mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan bergantung pada partisipasi aktif, pemahaman, dan komitmen masyarakat Kabupaten Sumedang terhadap pembangunan dari berbagai bidang, namun tidak melupakan nilai-nilai budaya, agama dan norma serta kearifan lokal dalam upaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, diupayakan agar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan mengintegrasikan manusia, alam, dan pembangunan secara seimbang, Kabupaten Sumedang berkomitmen untuk menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi tetapi juga menjaga kearifan lokal dan kelestarian alam, mencapai kesejahteraan holistik bagi penduduknya secara berkelanjutan. Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2045 yaitu **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan** memiliki makna sebagai berikut:

### MAJU

**Maju** bermakna Tahun 2045 memiliki sumber daya manusia yang berdaya, tangguh, inovatif, memiliki kompetensi dan daya saing pada skala regional, nasional dan global, didukung kapasitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sisi pelayanan diharapkan akan terwujud kemudahan, kecepatan, keterjangkauan dan transparansi pelayanan publik. Keberhasilan Pembangunan kedepan harus semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

## AGAMIS

**Agamis** mempunyai makna bahwa Kabupaten Sumedang pada Tahun 2045 mempunyai kondisi lingkungan kehidupan sosial yang makin dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masyarakat yang diakui dalam sistem keagamaan nasional. Kondisi ideal kehidupan agamis ditunjukkan oleh meningkatnya jati diri dan karakter masyarakat yang makin beriman dan bertaqwa dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah; menguatnya kemitraan dan tanggung jawab dalam pembangunan Pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan di daerah; serta menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar dan inter umat beragama untuk menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

## MANDIRI

**Mandiri** merupakan wujud Kabupaten Sumedang pada Tahun 2045 yang mampu memanfaatkan potensi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Lainnya secara optimal. Pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut ditujukan untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dengan memenuhi kebutuhan sendiri maupun wilayah lain secara produktif serta menerapkan ekonomi hijau. Kemandirian Kabupaten Sumedang Tahun 2045 termanifestasi pada ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, meningkatkan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan keterkaitan UMKM dan industri besar dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, serta mengurangi ketergantungan produk luar/impor yang akan mengalami fluktuasi apabila adanya resesi ekonomi global.

## ADIL

**Adil** bermakna memastikan bahwa Pembangunan harus merata, seimbang dan berkeadilan antara penguatan dan pembanguan sumber daya manusia dengan pembangunan ekonomi dan pemerataan infrastruktur dan fasilitas layanan publik disetiap wilayah. Setiap kebijakan harus mengacu keadilan, kesetaraan

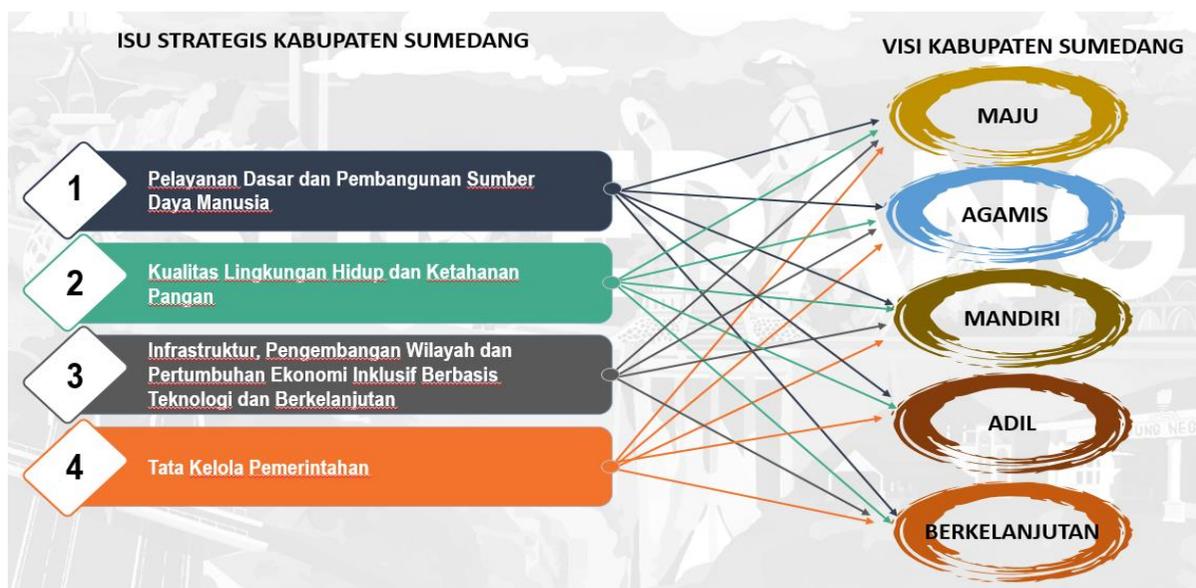
dan kesempatan yang sama bagi semua individu dan kelompok dalam masyarakat sehingga dapat mengakses sumber daya dan manfaat Pembangunan. Selain itu memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memperbaiki kualitas hidupnya agar terjamin semua kebutuhan dan hak setiap individu dan kelompok Masyarakat. Hal tersebut mencakup aspek-aspek seperti distribusi kesempatan (bekerja dan berusaha), akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, kenyamanan dalam melakukan aktivitasnya, pelayanan publik yang efisien serta partisipasi yang merata dalam proses pembangunan dan pengambilan Keputusan.

### BERKELANJUTAN

**Berkelanjutan** memiliki arti menjamin kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dengan tata kelola yang baik dalam jangka panjang. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan ekosistem dalam konteks lokal dan global serta kesejahteraan makhluk hidup yang ada di dalamnya.

Untuk menjaga dan kelestarian lingkungan dimulai dari gaya hidup ramah lingkungan seluruh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, pembangunan dan pengembangan infrastruktur hijau, pengelolaan limbah dan daur ulang sebagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas polusi (udara, air, suara, dan sampah), menerapkan praktik pertanian organik, mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan, serta menjaga keberlangsungan fungsi hutan, sungai dan waduk beserta isinya. Perkembangan teknologi dan perubahan *mindset* masyarakat tetap harus mempertahankan akar budaya, tumbuh sebagai individu yang maju, dan hidup dalam harmoni dengan alam.

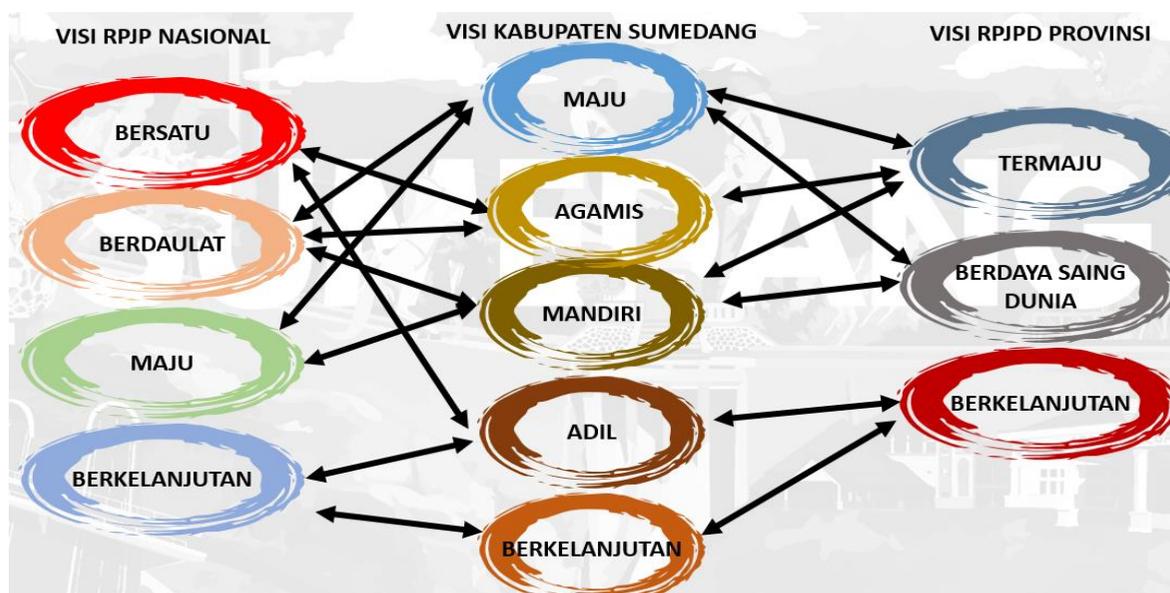
**Gambar 4.5 Keselarasan Isu Strategis dan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

Visi **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan (Sumedang Mandala)**, telah selaras dengan Visi Indonesia Emas 2025-2045 **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan** serta Visi Jawa Barat **Termaju, Berdaya Saing Dunia dan Berkelanjutan**. Dapat terlihat pada gambar dibawah ini.

**Gambar 4.6 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

#### 4.1.4. Sasaran Visi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2045, dirumuskan 5 (lima) sasaran visi, yaitu:

1. Peningkatan Pendapatan per kapita;
2. Penanggulangan kemiskinan dan Penurunan ketimpangan;
3. Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan Berdaya Saing;
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Keselarasan Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat dapat tersaji pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Keselarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045 dengan RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Barat**

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	a. GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300	Pendapatan per kapita meningkat	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	57,14 - 57,42	273,17 - 325,25	Peningkatan Pendapatan per kapita	a. PDRB Perkapita (ADHB) (Rp.Juta)	39,55 - 39,91*	68,93 - 121,01*
		b. Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEL)	54,65	495,56		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19,62*	21,5*
		c. Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0		c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	41,15 - 41,38	46,43 - 47,60				
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	a. Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	a. Tingkat Kemiskinan (%)	5,35 - 5,85	0,09 - 0,34	Penanggulangan kemiskinan dan Penurunan ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	9,09 - 8,23*	0,83 - 0,13*
		b. Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		b. Rasio gini (Indeks)	0,383 - 0,390	0,357 - 0,380		b. Rasio Gini (Indeks)	0,352 - 0,359*	0,328 - 0,351*
		c. Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	12,54	10,77		c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1,64*	1,68*
									d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,79 - 5,20*	4,82 - 6,02*	
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan daerah di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah (%)	3,87	5,00	Kepemimpinan Daerah yang Inovatif dan berdaya saing	Indeks Inovasi Daerah	60 - 65	80 - 85
										Indeks Daya Saing Daerah	3,593	4,943



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045



No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045				RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,69	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	74,48*	80,09*
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,61	75,84	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (Ton CO2eq/2010 IDR Milyar)	6,05*	11,69*
		Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12		Indeks kualitas lingkungan hidup	56,27	57,68		b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,25*	71,29*

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

## 4.2. Misi

### 4.2.1. Misi (Agenda) Pembangunan Nasional 2045

Berdasarkan dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: transformasi sosial; transformasi ekonomi; dan transformasi tata kelola yang ditopang oleh 2 (dua) agenda landasan transformasi, yaitu: supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia; dan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) agenda kerangka implementasi transformasi, yaitu: pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan serta kesinambungan pembangunan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.7 berikut.

**Gambar 4.7 Misi (Agenda) Pembangunan Tahun 2045**



Sumber: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk pembangunan manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi IPTEK, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau,

- transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif;
  4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan;
  5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam;
  6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;
  7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
  8. Kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Indonesia telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional. Oleh sebab itu, berkaitan dengan misi yang mewujudkan Indonesia Emas

2045 terdapat satu nilai penting yang harus selalu dijunjung tinggi yaitu Kedaulatan Rakyat.

#### **4.2.2. Misi Pembangunan Provinsi Jawa Barat 2025-2045**

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan diatas, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan visi Tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan **“Provinsi Jawa Barat Termaju, Berdaya Saing Dunia, dan Berkelanjutan”** adalah sebagai berikut:

##### **1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing**

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing sangat penting bagi Provinsi Jawa Barat. Hal ini didukung dengan fakta bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pengembangan ini untuk membentuk masyarakat Provinsi Jawa Barat yang memiliki karakter, moralitas, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, menghormati perbedaan, dan mampu berinteraksi secara efektif dalam konteks budaya, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan serta mutakhir. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perbaikan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan pelatihan tenaga kerja. Diharapkan, masyarakat Provinsi Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif.

##### **2. Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif.**

Transformasi ekonomi yang kokoh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga memperhatikan dan mendukung kepentingan seluruh masyarakat, termasuk yang kurang beruntung. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang



dengan hukum dan norma-norma yang berlaku untuk terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, kemampuan untuk merespon tantangan dan memanfaatkan peluang baru, serta menerapkan kebijakan dan praktik yang dilakukannya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern, pemerintahan harus dapat dipercaya, dinamis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat, tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat dan investor, tetapi juga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka Panjang.

#### **5. Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan**

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat Jawa Barat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang efisien; pelestarian hutan, laut, pesisir, dan lahan basah; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

## **6. Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif**

Meningkatkan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif adalah suatu upaya untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, tetapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang, mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur. Infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif menjadi salah satu kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur wilayah yang berkualitas juga menjadi investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, transportasi.

## **7. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi masa depan yang penting bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu. Pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

## 8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta tata ruang yang efisien. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, yang berarti bahwa perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur dilakukan dengan cermat. Perencanaan pembangunan yang terarah dapat mengurangi kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan Kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien, dengan fokus pada penciptaan *Transit Oriented Development* (TOD) berbasis transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi karbon.

### 4.2.3. Misi Pembangunan Kabupaten Sumedang 2025 – 2045

Berdasarkan visi yang telah dijelaskan diatas, diperlukan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan visi Tahun 2045. Rumusan umum dalam bentuk pernyataan misi tersebut untuk memastikan aktivitas yang ditentukan mengarah pada terwujudnya kondisi-kondisi yang ingin dicapai. Karena itu, misi Kabupaten Sumedang 2025-2045 untuk mewujudkan **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan (SUMEDANG MANDALA)** adalah sebagai berikut:

#### 1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing

Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang produktif dan Berdaya Saing sangat penting bagi Kabupaten Sumedang. Hal ini didukung dengan bonus demografi Kabupaten Sumedang pada Tahun 2045 yang di dominasi usia produktif. Potensi tersebut harus dimanfaatkan untuk

membentuk masyarakat yang memiliki karakter, moralitas, etika yang baik, pemahaman yang luas terhadap nilai-nilai budaya, memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang relevan sesuai dengan perkembangan global. Upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia tersebut diantaranya melalui perbaikan kualitas kesehatan, penyediaan pendidikan yang berkualitas, dan pelatihan tenaga kerja.

## **2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif**

Transformasi ekonomi yang tangguh dan inklusif dilakukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, tetapi juga harus berdampak pada seluruh lapisan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi juga harus kuat dan bertahan serta cepat bangkit dalam menghadapi tantangan bencana dan distrupsi ekonomi secara global. Transformasi ini dilakukan melalui perubahan struktur ekonomi yang semula berbasis hilirisasi, komoditas, menjadi ekonomi berbasis investasi, produksi, dan pelayanan yang memiliki nilai tambah tinggi serta menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dapat dilakukan dengan penguatan produktivitas daerah seringkali dimulai dengan investasi dalam infrastruktur dasar, mengadopsi teknologi baru dan mendorong inovasi. Hal ini melibatkan dukungan bagi penelitian dan pengembangan serta integrasi teknologi dalam proses produksi. Penguatan produktivitas daerah dapat pula mencakup diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi, peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan sektor swasta, dan mendorong kewirausahaan lokal.

## **3. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel**

Tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan Akuntabel serta unggul dalam *e-governement* (SPBE) mengandung arti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus melakukan reorientasi identitas pemerintah dengan mengubah kebiasaan lama yaitu mengubah *mindset* dilayani menjadi pelayan masyarakat. Lembaga/organisasi pemerintah dan Aparatur juga harus responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang harus dapat meyakinkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya bahwa dalam menjalankan roda Pemerintahan berbasis Transparan, akuntabel, jujur dan berintegritas, serta mematuhi standar etika tinggi dan bertindak sesuai dengan hukum dan norma-norma yang berlaku untuk terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi dalam menghadapi dinamika yang kompleks dalam masyarakat modern, pemerintahan harus dapat dipercaya, dinamis, responsif, dan mampu beradaptasi dengan cepat, sehingga terbangun kepercayaan masyarakat dan selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang cerdas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan jangka Panjang.

#### **4. Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan**

Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang aman dan berkeadilan bermakna bahwa Pemerintah harus dapat menjaga kondusifitas, menjamin rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakatnya sehingga dapat mendorong stabilitas sosial maupun ekonomi, dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, menjaga stabilitas ekonomi makro, serta meningkatkan kerja sama dengan dunia internasional. Dari hal tersebut akan mendorong iklim investasi yang baik sehingga dapat meningkatnya daya saing daerah. Terjaminnya keamanan, ketertiban dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan keamanan yang berkeadilan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur beserta lembaga terkait dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

#### **5. Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya serta Berwawasan Lingkungan**

Mewujudkan masyarakat madani, berbudaya, maju, dan peduli lingkungan merupakan suatu upaya untuk membentuk masyarakat

yang tidak hanya memiliki kesejahteraan material, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, keberagaman budaya, kemajuan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pendidikan yang berkualitas, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia agar masyarakat tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai-nilai etika dan moral yang positif. Selain itu, kepedulian lingkungan ditunjukkan dengan menjaga keseimbangan ekosistem alam; memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam; mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta dampak perubahan iklim; pengelolaan air yang efisien; pelestarian hutan, dan lahan basah; serta penggunaan energi baru terbarukan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan limbah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak sampah terhadap lingkungan. Penanaman pohon, restorasi habitat, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi fokus untuk memperkuat ekosistem alam dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

#### **6. Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata**

Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata harus dilakukan untuk menjamin bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di beberapa wilayah saja, tetapi juga merata di seluruh wilayah dengan memperhatikan keberagaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pemerataan infrastruktur wilayah yang mencakup jalan, sumber daya air dan irigasi, transportasi.

## **7. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**

Mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas merupakan investasi penting bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Pengembangan ini juga diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Upaya untuk membangun infrastruktur pelayanan dasar mencakup perumahan, air minum, sanitasi, persampahan, energi, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi secara terpadu. Pemerataan pelayanan dasar yang berkualitas bertujuan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan manfaat dari seluruh pembangunan secara adil tidak terkecuali masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau penduduk miskin. Karena itu, pengembangan ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang memadai dan berkualitas terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

## **8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan**

Mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen untuk menciptakan suatu sistem yang menggabungkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pelestarian lingkungan alam, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta tata ruang yang efisien. Hal ini melibatkan serangkaian langkah dan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan juga memperhatikan tata ruang yang efisien, yang berarti bahwa perencanaan penggunaan lahan dan infrastruktur dilakukan dengan cermat. Perencanaan pembangunan yang terarah dapat mengurai kepadatan populasi dan meminimalkan konversi lahan produktif menjadi lahan non-pertanian. Ini melibatkan identifikasi zona-zona yang sesuai untuk pertanian, pemukiman, dan Kawasan industri. Pengembangan perkotaan yang terencana dengan baik juga menjadi bagian dari tata ruang efisien, dengan fokus pada penciptaan *Transit Oriented Development* (TOD) berbasis transportasi massal, sehingga mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi dan mengurangi kemacetan serta emisi karbon.

**Tabel 4.2 Keterkaitan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 dengan Visi dan Misi Nasional dan Provinsi Jawa Barat**

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045	RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Agenda/Misi	Agenda/Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Berdaya Saing	Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing
2		Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Perekonomian yang Kokoh dan Inklusif	Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif
3		Transformasi Tata Kelola	Menguatkan Tata Kelola yang Dinamis, Berkualitas, Akuntabel dan Inovatif	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel
4	Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan Provinsi yang Aman dan Tertib serta Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah	Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan
5		Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan Masyarakat Madani, Berbudaya, Maju, dan Peduli Lingkungan	Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045



No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2045	RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2045
	Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Agenda/Misi	Agenda/Misi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Inklusif	Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata
7		Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas
8		Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024 (diolah)

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

#### 5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan kerangka kerja strategis yang melandasi perencanaan pembangunan dalam periode dua puluh Tahun atau jangka panjang. Sebagai penjabaran konkret dari misi yang telah disusun sebelumnya, arah kebijakan ini memberikan landasan bagi penyusunan kebijakan yang mendalam dan terperinci. Dengan mempertimbangkan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJPN Tahun 2025-2045, arah kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045 mencakup perlima Tahunan langkah-langkah kritis yang akan diambil untuk mencapai target sasaran pokok. Arah kebijakan ini mencerminkan komitmen jangka panjang pemerintah dalam mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045, yang, pada intinya berfokus pada pembangunan yang berbudaya, sejahtera, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini memainkan peran sentral dalam memberikan pedoman strategis bagi seluruh aspek pembangunan. Dengan merinci arahan kebijakan pada setiap periode pembangunan, arah kebijakan menjadi rambu-rambu untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut serta menentukan pendekatan implementasi yang optimal. Melalui langkah-langkah dan fokus pada pembagian perlima Tahunan, arah kebijakan ini menjadi instrumen kunci dalam menavigasi tantangan dan memastikan keselarasan antara rencana pembangunan jangka panjang dan misi yang telah digariskan sebelumnya. Dengan demikian, arah kebijakan bukan hanya sebagai panduan operasional, melainkan juga sebagai penjabaran nyata dari misi, menciptakan kesinambungan antara visi, misi, dan langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkan perkembangan yang berkelanjutan Kabupaten Sumedang hingga Tahun 2045. Arah kebijakan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 yang dimaksud terbagi menjadi empat tahapan utama yang dijelaskan sebagai berikut.

**Gambar 5.1 Tahapan Pembangunan Kabupaten Tahun 2025-2045**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

## **TAHAP PERTAMA FONDASI**

Tahap ini merupakan penguatan modalitas/sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pembangunan ke depan. Penguatan ini dilakukan dengan menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dihasilkan dan meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya penguatan fondasi ini meliputi:

1. Pemenuhan Pelayanan dasar pendidikan dan Kesehatan dalam menunjang Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif;
2. Penguatan Produksi dan Produktivitas sektor Ekonomi Primer;
3. Penataan kelembagaan, regulasi, digitalisasi, dan pemberdayaan masyarakat sipil yang Berintegritas, Kolaboratif dan Inovatif;
4. Penyelenggaraan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Peningkatan akses terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan;
6. Peningkatan Infrastruktur Dasar yang berkualitas;
7. Rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8. Penataan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

## TAHAP KEDUA AKSELERASI

Tahap ini merupakan akselerasi pembangunan yang difokuskan pada aspek/sektor yang telah berhasil dan aspek/sektor yang berpotensi pada pencapaian keberhasilan pembangunan sehingga dapat menggerakkan aspek/sektor lainnya. Upaya akselerasi pembangunan ini, meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia Berakhlak, Berkarakter, Berkualitas, dan Inklusif;
2. Keterpaduan nilai tambah sektor-sektor ekonomi primer melalui hilirisasi;
3. Penguatan fungsi kelembagaan kolaboratif dan regulasi berbasis teknologi informasi;
4. Penguatan Transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah;
5. Penerapan nilai agama dan budaya dalam kehidupan sosial yang berwawasan lingkungan;
6. Akselerasi pemerataan pembangunan wilayah;
7. Pemanfaatan fungsi sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8. Penguatan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

## TAHAP KETIGA OPTIMALISASI

Tahap ini merupakan optimalisasi pembangunan merupakan percepatan pembangunan pada semua aspek/sektor sehingga semakin mendekatkan pada perwujudan Visi **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan**. Upaya yang dilakukan dalam pemantapan pembangunan ini, antara lain:

1. Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Keberlanjutan Kesejahteraan;
2. Peningkatan sektor pariwisata, industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa;
3. Pengembangan kelembagaan adaptif, ASN kompetitif dan masyarakat sipil mandiri;
4. Peningkatan Fungsi Kelembagaan dan Pranata Sosial untuk mewujudkan daerah yang kondusif;
5. Pengembangan sumber daya manusia yang beradab dan berbudaya;
6. Pendayagunaan Infrastruktur Wilayah secara Inklusif;

7. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan dasar;
8. Pengembangan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan.

#### **TAHAP KEEMPAT PERWUJUDAN**

Tahap ini merupakan perwujudan Visi **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan** dengan tetap melakukan percepatan dan pencapaian pembangunan pembangunan daerah. Upaya perwujudan pembangunan ini, meliputi:

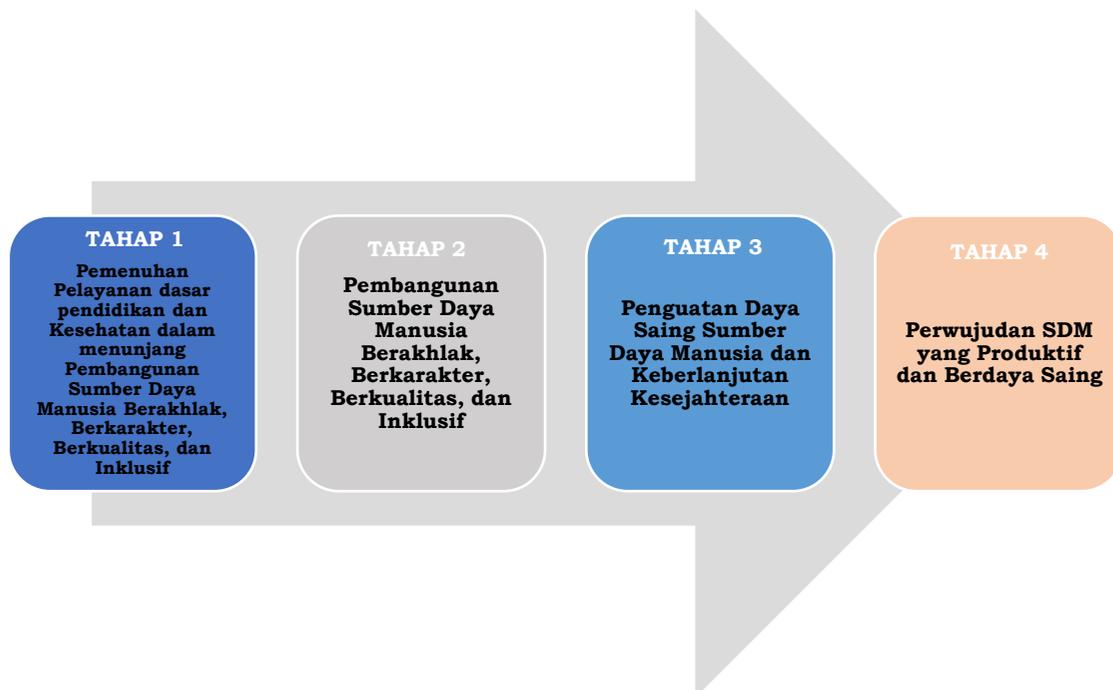
1. Perwujudan SDM yang Produktif dan Berdaya Saing;
2. Pengembangan hulu-hilir sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan, tangguh dan Inklusif;
3. Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel;
4. Perwujudan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan;
5. Perwujudan masyarakat madani;
6. Pemantapan konektivitas ekonomi antar wilayah;
7. Pemeliharaan kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar;
8. Pemantapan Kebijakan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

Mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Sumedang 20 (dua puluh) Tahun ke depan, serta prioritas pembangunan pada setiap tahap, maka arahan umum kebijakan pembangunan Sumedang untuk setiap misi adalah sebagai berikut:

#### **MISI 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing**

Untuk mengembangkan sumber daya manusia produktif dan berdaya saing Kabupaten Sumedang diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.2 Tahapan Misi Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing**

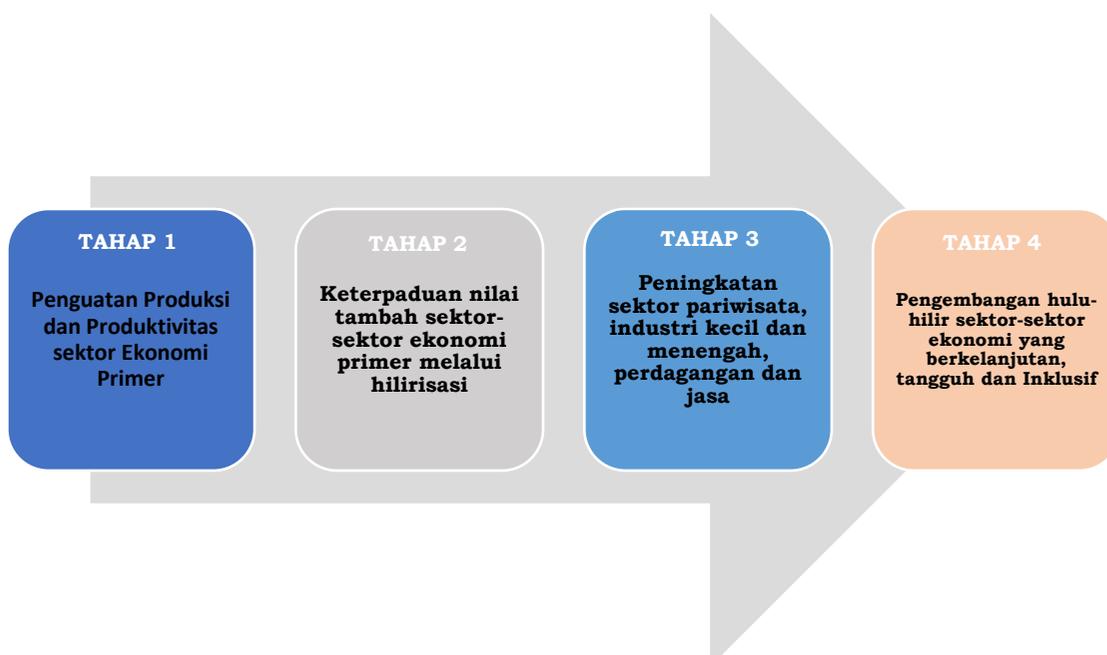


Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

## **MISI 2: Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif**

Untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan inklusif Kabupaten Sumedang diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.3 Tahapan Misi Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif**

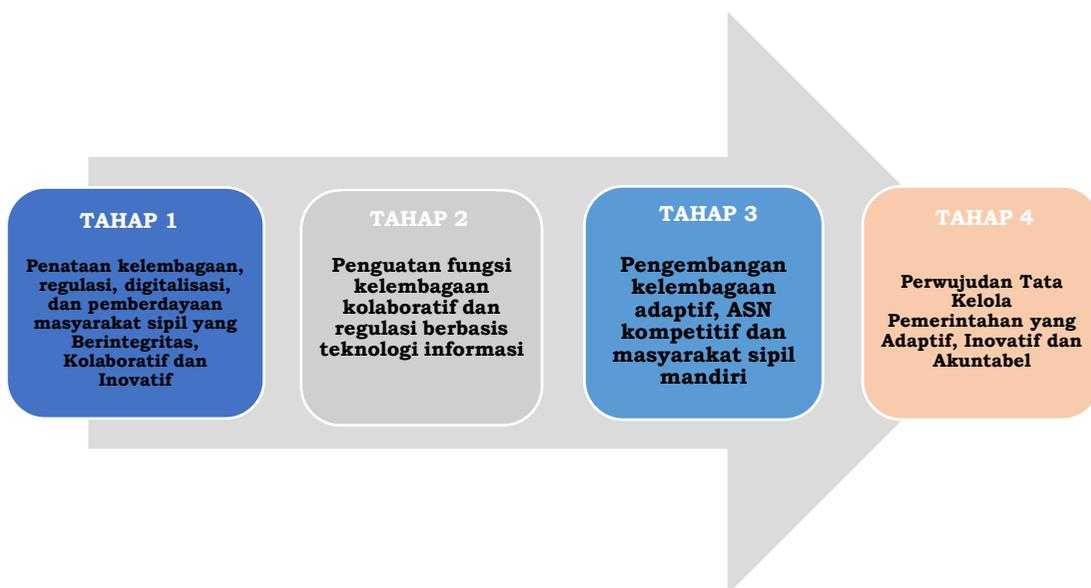


Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### **MISI 3: Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel**

Untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif dan akuntabel Kabupaten Sumedang diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.4 Tahapan Misi Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel**

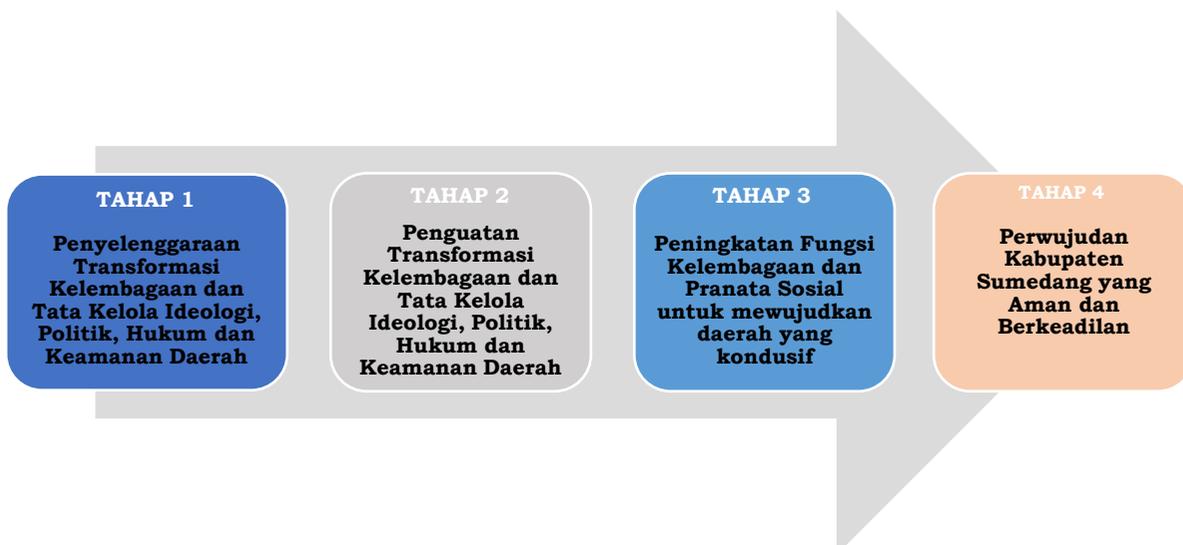


Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### **MISI 4: Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan**

Untuk Mewujudkan Kabupaten Sumedang Yang Aman dan Berkeadilan diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.5 Tahapan Misi Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Inovatif Dan Akuntabel**

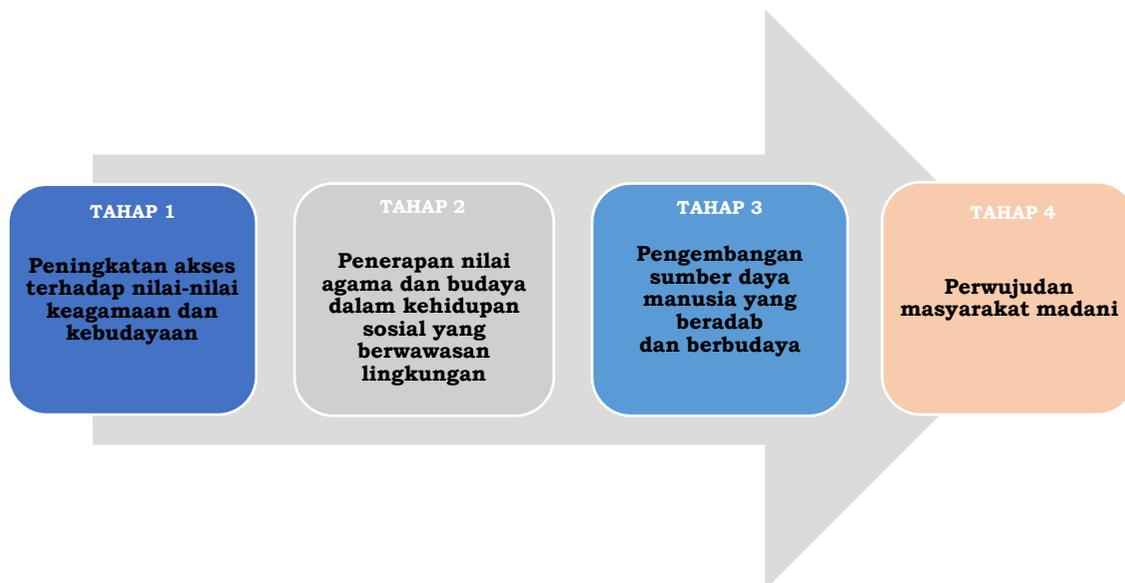


Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### **MISI 5: Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya serta Berwawasan Lingkungan**

Untuk mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya serta berwawasan lingkungan diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.6 Tahapan Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama dan Budaya serta Berwawasan Lingkungan**

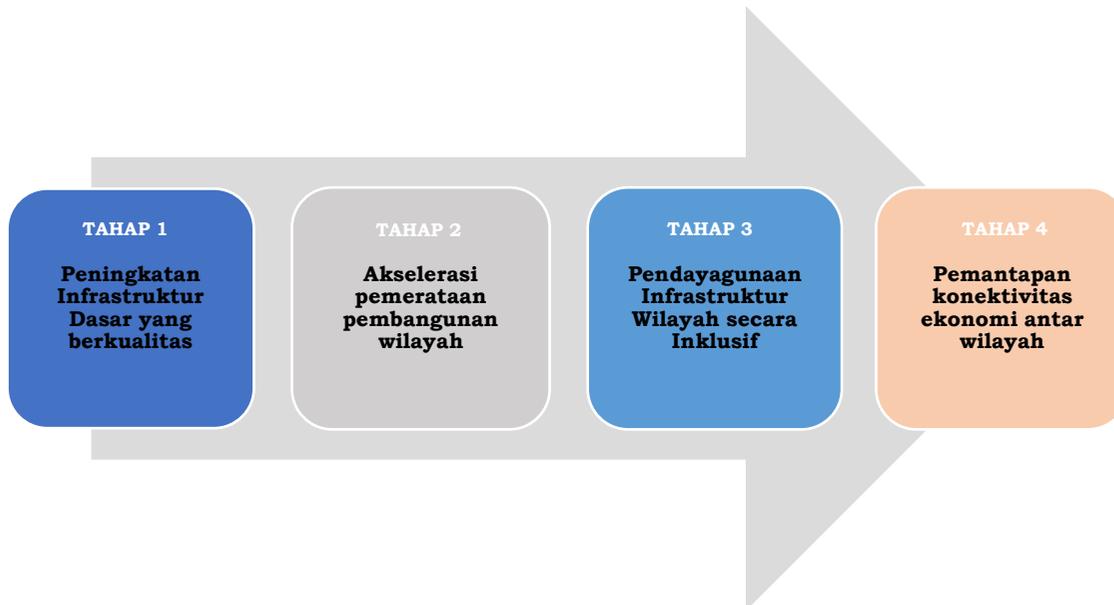


*Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024*

### **MISI 6: Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata**

Untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangan wilayah yang merata di Kabupaten Sumedang diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.7 Tahapan Misi Meningkatkan Pembangunan Dan Pengembangan Wilayah Yang Merata**

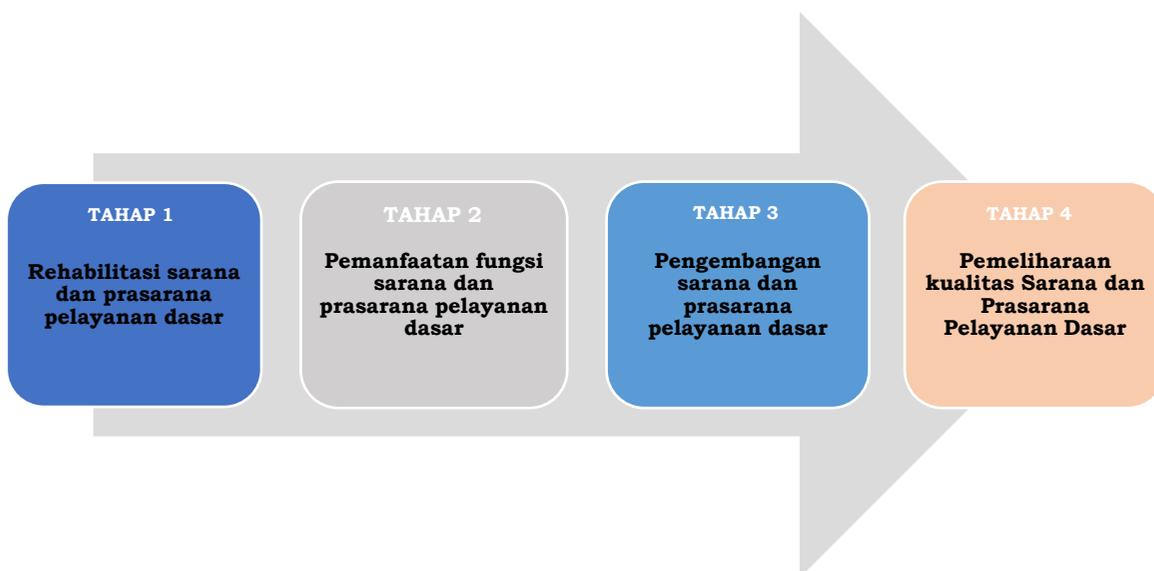


*Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024*

**MISI 7: Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas**

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas Kabupaten Sumedang diperlukan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.8 Tahapan Misi Menguatkan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah**

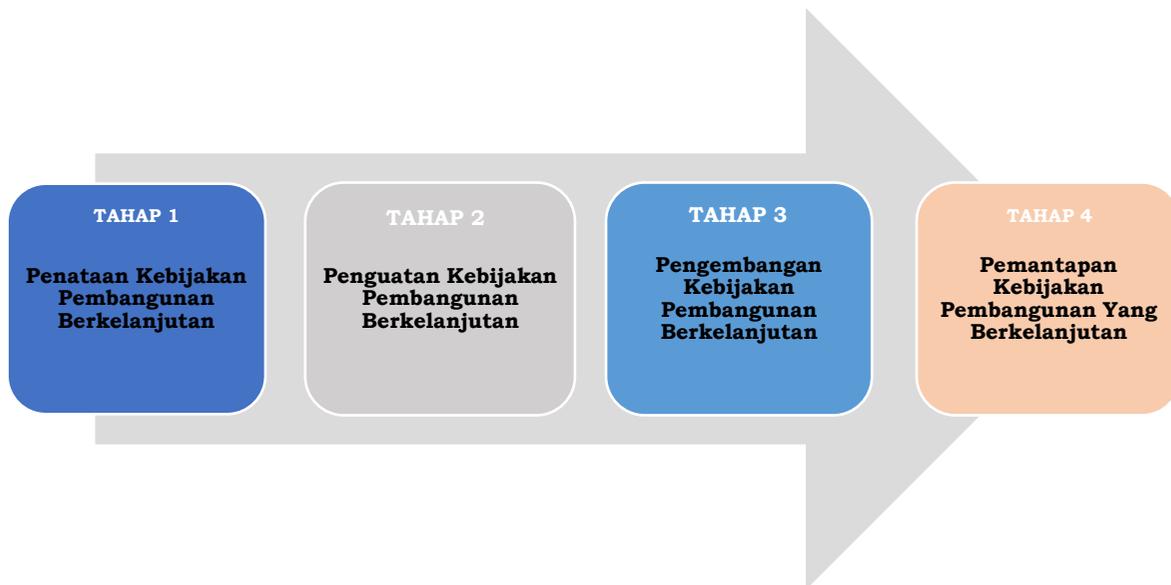


*Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024*

### **MISI 8: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan**

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan Kabupaten Sumedang diperlukan tahapan arah kebijakan sebagai berikut:

**Gambar 5.9 Tahapan Misi Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan**



*Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024*

Secara rinci Tahapan Arah Kebijakan Kabupaten Sumedang Untuk 20 (dua puluh) Tahun kedepan dapat tergambar pada tabel di bawah ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Rumusan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>KABUPATEN SUMEDANG YANG MAJU, AGAMIS, MANDIRI, ADIL DAN BERKELANJUTAN (MANDALA)</b>	<b>Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing</b>	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	<b>Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</b>	Peningkatan pola hidup sehat, gizi tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Perwujudan Lingkungan yang Sehat dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat
		<b>Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal</b>	Perluasan akses layanan Kesehatan universal	Penguatan akses layanan Kesehatan universal	Meningkatnya akses layanan Kesehatan universal yang merata
		<b>Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan</b>	Perluasan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Penguatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Perwujudan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang berkualitas dan berkelanjutan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya</b>	Perluasan Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Penguatan Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Optimalisasi pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
		<b>Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan</b>	Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	Perwujudan pelayanan kesehatan yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan
		<b>Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan</b>	Penguatan kesejahteraan tenaga kesehatan yang berkeadilan	Optimalisasi kesejahteraan tenaga kesehatan yang berkeadilan	Terwujudnya Tenaga kesehatan yang sejahtera dan optimal dalam pelayanan
		<b>Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.</b>	Perluasan Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Optimalisasi Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Perwujudan tenaga kesehatan yang profesional
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan air Bersih dan sanitasi	<b>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi</b>	<b>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga</b>	Perwujudan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas dan merata



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan regulasi dalam upaya pengadaan tenaga kesehatan di setiap wilayah	<b>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas</b>	Pemenuhan Penyediaan Tenaga kesehatan di setiap wilayah	Perwujudan pelayanan kesehatan masyarakat yang cepat dan optimal
		<b>Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.</b>	Penguatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Optimalisasi penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Perwujudan menuju zero new stunting
		<b>Peningkatan status Pustu Menjadi Puskesmas dan pemerataan Tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap Desa</b>	Pembangunan Pustu menjadi Puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap wilayah	Optimalisasi pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan di setiap wilayah	Perwujudan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang merata
		Pengendalian dan pencegahan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis yang terabaikan melalui upaya preventif dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat bidang kesehatan	Perluasan Pengendalian dan pencegahan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis yang terabaikan melalui upaya preventif dan meningkatkan tingkat literasi masyarakat bidang kesehatan	<b>Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.</b>	Perwujudan masyarakat yang sehat dan tangguh terhadap penyakit



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)</b>	Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) dan penguatan karakter dan budaya	Percepatan partisipasi pendidikan wajib belajar (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) yang berkarakter	Perwujudan partisipasi wajib pendidikan belajar 13 tahun
		<b>Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar</b>	Perluasan aksesibilitas pendidikan anak usia dini dan dasar	Penguatan pelayanan dan aksesibilitas pendidikan anak usia dini dan dasar	Perwujudan pendidikan anak usia dini dan dasar yang berkualitas
		Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	<b>Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</b>	Akselerasi bantuan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik berprestasi	Perwujudan siswa didik yang berprestasi mendapat akses pendidikan lebih tinggi
		Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi	<b>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi</b>	Perluasan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus	Perwujudan sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar aman bencana dan aksesibilitas yang terjangkau



VISI (1)	MISI (2)	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I (3)	TAHAP II (4)	TAHAP III (5)	TAHAP IV (6)
		khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	<b>khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</b>	peserta didik sesuai kondisi daerah.	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan merata	Perluasan pemerataan kualitas pendidikan	Akselerasi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas	<b>Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</b>
		<b>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)</b>	Akselerasi pendidikan vokasi bersertifikasi dan terintegrasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal dalam percepatan peningkatan kualifikasi angkatan kerja	Perwujudan pendidikan vokasi berkelas dunia, berbasis TIK dengan tingkat kebermanfaatan tinggi
		Pemenuhan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	<b>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kebencanaan daerah)</b>	Akselerasi pemerataan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Perwujudan kurikulum pendidikan yang merata di semua wilayah



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan manajemen Talenta dan prestasi peserta didik	Perluasan program manajemen talenta dan prestasi peserta didik	<b>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</b>	Perwujudan peserta didik yang berprestasi dan tersalurkan minat bakatnya
		<b>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</b>	Penguatan Kesejahteraan Guru dan tenaga kependidikan yang berkeadilan	Optimalisasi Kesejahteraan Guru dan tenaga kependidikan yang berkeadilan	Perwujudan kesejahteraan guru yang tenaga kependidikan yang berkeadilan
		<b>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan</b>	Pemerataan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	Akselerasi Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	Perwujudan Guru dan tenaga kependidikan yg berkualitas
		Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga pendidik	<b>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</b>	Akselerasi Pemerataan dan Peningkatan Kompetensi guru dan	Perwujudan guru dan tenaga kependidikan yang berkompetensi
		Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan.	<b>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan</b>	Akselerasi Pemerataan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan.	Perwujudan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penguatan dan penataan regulasi dalam upaya pengadaan guru dan tenaga kependidikan di setiap wilayah	<b>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah perbatasan</b>	Pemenuhan Penyediaan guru dan Tenaga Kependidikan di setiap wilayah	Perwujudan pelayanan pendidikan yang optimal
		Penguatan regulasi dan kerjasama dengan Lembaga pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)	<b>Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global bagi masyarakat</b>	Akselerasi aksesibilitas pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global bagi masyarakat	Perwujudan SDM yang memiliki kompetensi dan berkualitas sesuai kebutuhan pasar kerja
		Pembangunan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK serta beasiswa bagi warga belajar kesetaraan usia 21 tahun ke atas	<b>Pengembangan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK serta beasiswa bagi warga belajar kesetaraan usia 21 tahun ke atas</b>	Penguatan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK serta beasiswa bagi warga belajar kesetaraan usia 21 tahun ke atas	Peningkatan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK serta beasiswa bagi warga belajar kesetaraan usia 21 tahun ke atas yang berkelanjutan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pembangunan Sekolah terbuka dan Pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama	Pemerataan Pembangunan Sekolah terbuka dan Pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	<b>Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama</b>	Perwujudan sekolah terbuka dan pesantren yang berbasis asrama
		<b>Percepatan Penanggulangan dan penuntasan kemiskinan</b>	Penguatan Percepatan pengurangan Kemiskinan	Optimalisasi pengurangan Kemiskinan menuju nol angka kemiskinan	Perwujudan nol angka kemiskinan
		<b>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling</b>	Penguatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling dan reskilling	Optimalisasi penguatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif melalui upskilling dan reskilling	Perwujudan kompensasi SDM Usia produktif secara berkelanjutan dan selaras dengan perkembangan global
		<b>Peningkatan distribusi kebutuhan barang pokok penting dan produk komoditas unggulan serta peningkatan akses mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi</b>	Penguatan distribusi kebutuhan barang pokok penting dan produk komoditas unggulan serta peningkatan akses mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.	Optimalisasi distribusi kebutuhan barang pokok penting dan produk komoditas unggulan serta peningkatan akses mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.	Perwujudan yang berkelanjutan dalam distribusi kebutuhan barang pokok penting dan produk komoditas unggulan serta peningkatan akses mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya</b>	<b>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</b>	<b>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</b>	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.
	<b>Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif</b>	<b>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</b>	<b>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi</b>	<b>Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan</b>	Perwujudan Produktivitas Pertanian dan nilai tambah sektor Pertanian yang meningkat



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis</b></p> <p><b>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian</b></p> <p>Penyediaan Akses Pembiayaan Kredit Usaha Pertanian</p> <p><b>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan</b></p>	<p>pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p> <p><b>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian</b></p> <p><b>Peningkatan kapasitas dan akses informasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap</b></p>	<p>market, bank, dan asuransi pertanian</p> <p><b>Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap</b></p>	<p>Perwujudan Produktivitas Perikanan dan nilai tambah sektor</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>dan daya saing produk perikanan</b></p> <p><b>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring</b></p> <p><b>Modernisasi sarana dan prasarana perikanan</b></p> <p><b>Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya</b></p>	<p><b>melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh peternak ikan termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform</b></p>	<p><b>Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan &amp; petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan</b></p>	<p>perikanan yang meningkat</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis</b>	<b>Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</b>	Pemerataan pembangunan infrastruktur yang mendukung produktivitas industri pengolahan dan manufaktur yang berkelanjutan	Perwujudan industri pengolahan dan manufaktur kabupaten sumedang yang berdaya saing secara global
		<b>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional</b>	Penguatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Pertanian dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional
		<b>Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &amp; kemandirian pangan dan water prosperity</b>	<b>Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)</b>		



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p>Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</p>	<p><b>Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</b></p>	<p><b>Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja</b></p>	<p>Perwujudan Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.</p>
		<p><b>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</b></p>	<p><b>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</b></p>	<p><b>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</b></p>	<p><b>Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan</b></p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan</b></p>	<p><b>Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan yang terkoneksi antar wilayah di metropolitan Bandung</b></p>	<p><b>Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan</b></p>	<p>Perwujudan Infrastruktur konektivitas antar wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan</p>
		<p><b>Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb)</b></p>	<p>Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Bandung.</p>	<p><b>Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Bandung</b></p>	<p>Perwujudan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan yang inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Peningkatan produktivitas potensi ekonomi lokal didukung Teknologi dan digital	<b>Penguatan produktivitas potensi ekonomi lokal didukung Teknologi dan digital</b>	Optimalisasi produktivitas potensi ekonomi lokal didukung Teknologi dan digital	Perwujudan Potensi ekonomi lokal yang berkualitas dan berstandar pasar global
		Penyediaan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	<b>Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan</b>	Optimalisasi infrastruktur mobile connection pada area-area ruang publik dikawasan perkotaan	Perwujudan Infrastruktur konektivitas antar wilayah yang terintegrasi dan berkelanjutan
		<b>Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif</b>	<b>Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada</b>	<b>City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan\</b>	Perwujudan Kabupaten Sumedang menjadi Kabupaten Pariwisata berbasis budaya
		<b>Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif</b>			



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha</b></p>	<p><b>kawasan metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata</b></p>		
		<p><b>Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon</b></p>	<p><b>Pengembangan multi-infrastructure backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa</b></p>	<p>Akselerasi pengembangan pembangunan Infrastruktur konektivitas wilayah yang terintegrasi antar kawasan strategis regional atau nasional</p>	<p>Perwujudan Konektivitas antar kawasan strategis yang berdampak terhadap pemerataan pembangunan yang berkelanjutan</p>
		<p><b>Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon</b></p>			
		<p><b>Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA</b></p>			



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>komuter di kawasan metropolitan Bandung</b></p> <p><b>Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung</b></p>			
		Peningkatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	<b>Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global</b>	Optimalisasi ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Perwujudan hasil riset dan inovasi yang terimplementasikan dalam mendukung DUDI nasional yang berdaya saing global
		Penyiapan regulasi dan pengelola pengembangan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau yang berkelanjutan	<b>Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau</b>	Pengembangan Ekosistem dan Ekonomi hijau	Perwujudan Ekosistem dan Ekonomi hijau



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyiapan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Pengembangan Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	<b>Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi</b>	Perwujudan koperasi sebagai motor penggerak pemasaran komoditas dan produk unggulan yang didukung teknologi digital
		<b>Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha</b>	<b>Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis</b>		
		Penataan dan restrukturisasi BUMD.	<b>Peningkatan produktivitas BUMD</b>	Pengembangan Bisnis BUMD.	Perluasan Bisnis BUMD
		<b>Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui</b>	Penguatan dukungan dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan	Optimalisasi dukungan dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat melalui energi baru terbarukan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil</b></p>	<p>industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan system</p>	<p>pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil</p>	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>(isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</b></p>	<p>ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>	<p>(isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.</p>	



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif dan Akuntabel</b>	<b>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. ; serta (ii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital</b>	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	Perwujudan transformasi tata kelola dan layanan pemerintahan berbasis digital



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</b>	Penguatan Digitalisasi pelayanan publik dan respon terhadap laporan masyarakat	Akselerasi pelayanan publik yang efektif, efisien dan terjangkau masyarakat	Akselerasi pelayanan publik yang efektif, efisien dan terjangkau masyarakat
		Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN dan pendidikan anti korupsi	Penguatan sistem kelembagaan yang berintegritas sebagai upaya pencegahan korupsi	Penguatan sistem pemberantasan korupsi menuju zero corruption	Perwujudan meritokrasi dan integritas
		<b>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</b>	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang profesional dan bebas korupsi.	Perwujudan ASN berkelas Dunia yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif &amp; kreatif daerah (KPBUD dan CSR), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional</b></p>	<p>Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif &amp; kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional</p>	<p>Optimalisasi kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif &amp; kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional</p>	<p>Peningkatan pengelolaan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif &amp; kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb.), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan</b>	Peningkatan kualitas regulasi	<b>Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah</b>	Pemantapan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi	Perwujudan regulasi yang adaptif dan taat azas
		Peningkatan pengendalian inflasi daerah	<b>Penguatan pengendalian inflasi daerah</b>	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah	Perwujudan pengendalian inflasi daerah
		Peningkatan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.	<b>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance</b>	<b>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance</b>	<b>Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance</b>
		<b>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko</b>	Penerapan Manajemen Resiko yang berkesinambungan dalam pengendalian pembangunan	Akselerasi penerepan manajemen resiko agar pembangunan dapat terkendali sesuai peraturan perundang-undangan	Perwujudan pengendalian pembangunan berbasis manajemen resiko
		<b>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi</b>	Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi	akselerasi peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi	Perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas pembangunan berjenjang baik nasional maupun provinsi



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</b>	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		<b>Peningkatan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah</b>	Penguatan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah	Pemantapan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah	Perwujudan kestabilan keamanan, masyarakat yang taat hukum, berideologi, dan terjaminnya HAK politik warga negara
		<b>Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.</b>	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat
		Peningkatan kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	<b>Penguatan integritas partai politik</b>	Penguatan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa	Penguatan budaya politik yang kondusif untuk menciptakan kesatuan bangsa
	<b>Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai</b>	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila	<b>Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila</b>	Optimalisasi upaya menjaga nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat yang berasaskan Pancasila	Perwujudan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi pondasi dan berkesinambungan dalam pembangunan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan</b>	Peningkatan kerukunan antar etnis, umat beragama dan golongan	<b>Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan</b>	Optimalisasi tingkat kerukunan antar etnis, umat beragama dan golongan	Perwujudan toleransi dan kerukunan antar etnis, agama dan golongan
		<b>Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami</b>	Penguatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Akselerasi pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	Perwujudan Hutan lindung yang lestari dan terjaganya ekosistem alami
		<b>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi</b>	Penguatan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Optimalisasi Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Perwujudan Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					di daerah rawan bencana tinggi.
		<b>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</b>	<b>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</b>	<b>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</b>	<b>Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal</b>
		<b>Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat</b>	Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Optimalisasi pemenuhan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Perwujudan masyarakat Ketahanan pangan daerah
		<b>Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah</b>			
		<b>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</b>	<b>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</b>	<b>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</b>	<b>Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</b>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</b>	<b>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</b>	<b>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</b>	<b>Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan</b>
		<b>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan</b>	<b>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan</b>	<b>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan</b>	<b>Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan</b>
		<b>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</b>	<b>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</b>	<b>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</b>	<b>Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy</b>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.	<b>Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan</b>	<b>Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green &amp; grey infrastructure) pada kawasan perkotaan</b>	Perwujudan zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan.
	<b>Meningkatkan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah yang Merata</b>	<b>Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah</b>	<b>Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya</b>	Penguatan kerjasama Regional dan global dalam upara pemerataan pembangunan	Perwujudan keselarasan dan pemerataan pembangunan antar wilayah
		<b>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)</b>	Implementasi Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar Pelayanan)	Implementasi Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar Pelayanan)	Implementasi Rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar Pelayanan)
		Peningkatan Pengelolaan Jalan daerah dan jalan Desa	<b>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa</b>	Optimalisasi Pengelolaan Jalan daerah dan jalan Desa	Perwujudan jalan daerah dan jalan desa yang merata dan berkeadilan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</b></p>	<p>Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p>	<p>Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p>	<p>Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p>
		<p><b>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</b></p>	<p><b>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</b></p>	<p><b>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</b></p>	<p><b>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</b></p>
		<p><b>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau</b></p>	<p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan</p>	<p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian</p>	<p>Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya</b>	perkotaan dan kawasan strategis lainnya	layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan	perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan
	<b>Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Dasar yang Berkualitas</b>	<b>Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas daerah</b>	Pemerataan Pembangunan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas daerah	Akselerasi pemeratan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas daerah	Perwujudan Akses infrastruktur Pelayanan Dasar dan infrastruktur konektivitas daerah yang berkualitas dan merata
		Penyediaan Infrastruktur Air Baku dan air minum dikawasan Perkotaan	<b>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan</b>	Optimalisasi penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan	Perwujudan penyediaan layanan air baku dan air minum di kawasan perkotaan yang berkualitas dan berkelanjutan



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan air Bersih dan sanitasi	<b>Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi</b>	<b>Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga</b>	Perwujudan infrastruktur layanan dasar yang berkualitas dan merata
	<b>Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan</b>	<b>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan</b>	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan.
		Penyiapan regulisasi dan penguatan kelembagaan serta SDM dalam penilaian standarirasi bangunan yang bertahanan bencana dan iklim	Optimalisasi regulisasi dan penguatan kelembagaan serta SDM dalam penilaian standarirasi bangunan yang bertahanan bencana dan iklim	<b>Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim</b>	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan</b></p>	<p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p>	<p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p>	<p>Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional &amp; ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan.</p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<p><b>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri</b></p>	<p><b>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri</b></p>	<p><b>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri</b></p>	<p><b>Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri</b></p>
		<p><b>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</b></p>	<p><b>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</b></p>	<p><b>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</b></p>	<p><b>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</b></p>



VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<b>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi</b>	<b>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi</b>	<b>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi</b>	<b>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi</b>
		<b>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</b>	<b>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</b>	<b>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</b>	<b>Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan &amp; rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.</b>
		<b>Sinkronisasi dan koordinasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah</b>	<b>Sinkronisasi dan koordinasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah</b>	<b>Sinkronisasi dan koordinasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah</b>	<b>Sinkronisasi dan koordinasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah</b>

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

\*Keterangan:

- Cetak tebal arah Kebijakan Transformasi;
- I = Tahap Pertama (2025-2029); II = Tahap Kedua (2030 – 2034); III = Tahap Ketiga (2035 – 2039); IV = Tahap keempat (2040 – 2045).

## 5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi Kabupaten Sumedang Tahun 2045 yaitu **Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan “SUMEDANG MANDALA”**. Sasaran Pokok Kabupaten Sumedang dirumuskan dari Arah Pembangunan hasil penyelarasan RPJPD dengan RPJPD Provinsi Jawa Barat dan RPJPN Tahun 2025-2045, Arah Kebijakan Transformasi serta Indikator Utama Pembangunan berupa indikator hasil penyelarasan.

### 5.2.1. Arah Pembangunan

Mengacu pada Arah Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, maka Arah Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 adalah Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan, Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan, Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan, Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi, Penerapan ekonomi hijau, Pembangunan dan penguatan SDM berdaya saing, Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan, Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif, Penguatan regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas, Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah, Peningkatan kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah, Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender, Peningkatan kualitas lingkungan hidup, Peningkatan ketahanan pangan dan air, Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim.

Arah Pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan harus memperhatikan arah Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.2 di bawah ini.

**Tabel 5.2 Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2045		RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 - 2045		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Sosial	IE1. Kesehatan untuk Semua	Sosial	Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua	Sosial	1	Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan
2		IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Pendidikan berkualitas yang merata		2	Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan
3		IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Ketahanan sosial masyarakat yang berbudaya maju		3	Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan
4	Transformasi Ekonomi	IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas ekonomi daerah.	Transformasi Ekonomi	4	Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi
5		IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau		Penerapan ekonomi hijau		5	Penerapan ekonomi hijau
6		IE 6. Transformasi Digital		Transformasi Digital		6	Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital
7		IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Integrasi rantai pasok produksi dan perdagangan domestik dan global		7	Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045



No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045		RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8		IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		Pembentukan pusat kegiatan wilayah yang mendukung kluster perekonomian di setiap wilayah pengembangan		8 Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru
9	Transformasi Tata Kelola	IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif	Transformasi Tata Kelola	9 Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif
10	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Peningkatan Keadilan Hukum dan Demokrasi yang Berkualitas	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	10 Penguatan regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas
11		IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro		Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah		11 Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah
12		IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan		Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah		12 Peningkatan kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah
13	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Peningkatan kerukunan umat beragama	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13 Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama
14		IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender		14 Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender



# Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045



No	RPJP Nasional Tahun 2025-2045		RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 – 2045		RPJP Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2045	
	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan	Transformasi	Arah Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15		IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas		Peningkatan kualitas lingkungan hidup		15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup
16		IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi		16 Peningkatan ketahanan pangan dan air
17		IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim		17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

### 5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penjabaran dari arah kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan karakteristik Kabupaten Sumedang dan mendukung tercapainya Visi Kabupaten Sumedang. Secara rinci tercantum pada Tabel 5.3 dibawah ini.

**Tabel 5.3 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
1	<b>Transformasi Sosial</b>	<b>Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan</b>	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
			Peningkatan status Pustu Menjadi Puskesmas dan pemerataan Tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap Desa
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
	<b>Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan</b>		Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar			

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p>Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <p>Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.</p> <p>Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)</p> <p>Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)</p> <p>Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik</p> <p>Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan</p> <p>Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan</p> <p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah perbatasan</p> <p>Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global bagi masyarakat</p> <p>Pengembangan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK serta beasiswa bagi warga belajar kesetaraan usia 21 tahun ke atas</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
		<b>Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan</b>	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
			Percepatan Penanggulangan dan penuntasan kemiskinan
			Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya
			Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
			Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
2	<b>Transformasi Ekonomi</b>	<b>Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi</b>	Penguatan produktivitas potensi ekonomi lokal didukung Teknologi dan digital
			Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling
			Peningkatan distribusi kebutuhan barang pokok penting dan produk komoditas unggulan serta peningkatan akses mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
			Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global
			Peningkatan produktivitas BUMD
		<b>Penerapan ekonomi hijau</b>	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya
			Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau
			Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p>cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</p>
		<p><b>Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital</b></p>	<p>Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan</p>
			<p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. ; serta (ii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital</p>
			<p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai &amp; musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama &amp; pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh peternak ikan termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform</p>
			<p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring</p>
		<p><b>Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan</b></p>	<p>Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global</p>
			<p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian</p>
			<p>Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian</p>
			<p>Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan</p>
			<p>Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)</p>
			<p>Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Bandung</p>
			<p>Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i>; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p>Pengembangan <i>closed loop</i> model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan &amp; petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan</p> <p>Modernisasi sarana dan prasarana perikanan</p>
		<b>Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru</b>	<p>Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya</p> <p>Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan</p> <p>Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis</p> <p>Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan</p> <p>Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja</p> <p>Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon</p> <p>Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone</i> yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p><i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa</p> <p>Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan yang terkoneksi antar wilayah di metropolitan Bandung</p> <p><i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan \</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api cepat (HST/<i>High Speed Train</i>) Jakarta-Bandung-Cirebon</p> <p>Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa</p>
3	<b>Transformasi Tata Kelola</b>	<b>Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif</b>	<p>Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan</p> <p>Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat</p> <p>Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah</p> <p>Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Sumedang menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang profesional dan bebas korupsi</p> <p>Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital</p> <p>Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i>, dan <i>punishment</i>, termasuk melalui</p>

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			<p>peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja</p> <p>Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)</p> <p>Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah</p> <p>Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi</p> <p>Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi</p> <p>Sinkronisasi dan koordinasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko</p>
4	<b>Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia</b>	<b>Penguatan regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas</b>	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah
			Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
			Penguatan integritas partai politik
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i>
			Peningkatan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah
		<b>Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah</b>	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap
			Penguatan pengendalian inflasi daerah
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (KPBUD dan CSR), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
		<b>Peningkatan kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah</b>	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya
			Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb)
<b>5</b>	<b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>	<b>Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama</b>	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
		<b>Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender</b>	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami		

No	Arah Kebijakan Transformasi Daerah (dalam RPJP Daerah Kabupaten)		
	Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas daerah
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
		<b>Peningkatan ketahanan pangan dan air</b>	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
		<b>Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim</b>	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan
			Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
			Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan
			Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim

Sumber: Hasil Analisis Bapppeda, 2024 (diolah)

### **5.2.3. Indikator Utama Pembangunan**

Indikator Utama Pembangunan (IUP) kabupaten Sumedang sebanyak 39 indikator, mengacu kepada Indikator Utama Pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045. IUP dan target Tahun 2045 ditetapkan untuk mengukur keberhasilan arah pembangunan dan sasaran pokok yang akan dicapai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Sumedang. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.4 dibawah ini.

**Tabel 5.4 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Sumedang dengan RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045**

No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>				<b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>					
<b>IE1</b>	<b>Kesehatan untuk Semua</b>			<b>Pelayanan Kesehatan Prima untuk Semua</b>			<b>Peningkatan Pemerataan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan</b>		
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,4	80	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,29	80,78	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,42*	79,38*
2	Kesehatan Ibu dan Anak			Kesehatan Ibu dan Anak:			2. Kesehatan Ibu dan Anak:		
a.	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	115	16	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	114	15	a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	26*	4*
b.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,58*	3,31*
3	Insidensi Tuberkolisis (per 100.000 penduduk)	274	76	Penanganan Tuberkulosis:	91	100	3. Penanganan Tuberkulosis:		
				a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)*			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)*	91*	98*



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)*	91	100	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)*	91*	98*
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	99,5	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89,31	99,5	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,43* -96	99*
<b>IE2</b>	<b>Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>			<b>Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>			<b>Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan</b>		
5	Hasil pembelajaran			Hasil pembelajaran			5. Hasil pembelajaran		
a.	Rata-rata nilai PISA			a. Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:					
	- Membaca	396	485	i. Literasi Membaca	22,25 - 24,25	71,81 - 73,81			
	- Matematika	404	490	ii. Numerasi	1,70 - 3,70	65,20 - 67,20			
	- Sains	416	487						



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:		
				i. Literasi Membaca	35,55 - 37,55	71,42 - 73,42	i. Literasi Membaca	63,83	72,468
				ii. Numerasi	19,34 - 21,34	63,01 - 65,01	ii. Numerasi	61,46	67,07
							iii. Karakter	55,64	56,174
b.	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,46	12	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,52 - 9,53	12,05 - 12,09	c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,75 - 8,92	9,16 - 10,79
c.	Harapan lama sekolah	13,37	14,81	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,87 - 12,88	14,24 - 14,29	d. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09*	13,91*
6	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)	33,94	60	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	9,64	9,64 - 14,50	6. Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)*		
							a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91,42	92,82
							b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	97,33	98,73



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	91,57	92,97
							d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	59,63	61,03
7	Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%)	61,87	75	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	63,3	75			
<b>IE3</b>	<b>Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>			<b>Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya Maju</b>			<b>Ketahanan Sosial Masyarakat yang Berbudaya dan Berkelanjutan</b>		
8	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-7,0	0,5-0,8	Tingkat Kemiskinan (%)	5,85 - 6,46	0,09 - 0,34	7. Tingkat Kemiskinan (%)	9,09 - 8,23*	0,83 - 0,13*
9	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	44,1	99,5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	39,77	80,04	8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	50,02	100
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	20	60	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	24	70	9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD	1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>				<b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>					
<b>IE4</b>	<b>Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>			<b>Peningkatan Produktivitas Ekonomi Daerah</b>			<b>Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi</b>		
11	Rasio PDB industri pengolahan (%)	20,8	28	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	41,87 - 42,00	46,43 - 47,60	10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	19,62*	21,5*
12	Pengembangan Pariwisata			Pengembangan Pariwisata			11. Pengembangan Pariwisata		
a.	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,5	8	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,15	4,89	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,24*	6,6*
b.	Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)	18	100				b. Jumlah Pengunjung pada Objek Pariwisata (Orang)*	2.150.000	3.150.000
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,9	110	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	1,84	2,06	12. Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)	15,16 - 15,21	15,50 - 16,25
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN			Produktivitas UMKM, Koperasi			13. Produktivitas UMKM dan Koperasi		
a.	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,3 (2019)	5	a. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	6,3	14	a. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (%)	5,92	9,92



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
b.	Rasio kewirausahaan (%)	2,9 (Aug 2022)	8	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,5	9,86	b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,74*	10,2*
c.	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,1 (2021)	10						
d.	Return of Asset (ROA) BUMN (%)	3,4	5,6						
15	Tingkat pengangguran terbuka (%)	5	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,42 - 6,99	6,1 – 7,1	14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,68 - 6,13*	4,9 - 3,95*
16	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)	55,4	70	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,88	62,3	15. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan (%)	48-52	53-55
17	Tingkat penguasaan IPTEK						16. Tingkat penguasaan IPTEK:		
a.	Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)	0,28 (2020)	2,2-2,3	Indeks Inovasi Daerah*	71,76	81,76	a. Indeks Inovasi Daerah*	60 - 65	80 - 85
b.	Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)	75 (2022)	30 besar						
<b>IE5</b>	<b>Penerapan Ekonomi Hijau</b>			<b>Penerapan Ekonomi Hijau</b>			<b>Penerapan Ekonomi Hijau</b>		



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	Tingkat penerapan ekonomi hijau			Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
a.	Indeks ekonomi hijau (%)	70,8	90,65	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	61,3	85,05	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (%)	49,6*	69,38*
b.	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	20	70	b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	23,4	67,91			
<b>IE6</b>	<b>Transformasi Digital</b>			<b>Transformasi Digital</b>			<b>Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital</b>		
19	Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat)	51	20 besar	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi*	6,4	8	18. Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)*	90	100
<b>IE7</b>	<b>Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>			<b>Integrasi Rantai Pasok Produksi dan Perdagangan Domestik dan Global</b>			<b>Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan dan Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengembangan Sektor Perdagangan</b>		
20	Biaya logistic (% PDB)	16,9 (2019)	9	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*	7,88	5			



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)	29,8	27,2	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,7	23,8	19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,51*	25,2*
22	Ekspor barang dan jasa (% PDB)	26	40	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	24,42	44,8	20. Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)*	-1,5 sd -0,5	-0,5 sd 1
<b>IES</b>	<b>Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>			<b>Pembentukan Pusat Kegiatan yang Mendukung Klaster Perekonomian di Setiap Wilayah Pengembangan</b>			<b>Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru</b>		
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			21. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan		
a.	Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)	44,58	48,92						
b.	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64	100	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	56,95	100	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	63,22*	100*
							b. Pengentasan luasan kawasan kumuh (Ha)	141,03	0,00
c.	Persentase Desa Mandiri (%)			Persentase Desa Mandiri (%)	12,26	35,51	c. Persentase Desa Mandiri (%)	68,52	100



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>				<b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>					
<b>IE9</b>	<b>Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif</b>			<b>Peningkatan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan inovatif</b>			<b>Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif</b>		
24	Indeks materi hukum	0,25	0,49	Indeks Reformasi Hukum*	90,7	100	22. Indeks Reformasi Hukum*	80	90
25	Indeks system pemerintahan berbasis elektronik	2,34	5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,3	5,0	23. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,6	5,0
26	Indeks pelayanan publik	3,87	5	Indeks Pelayanan Publik	4,6	5	24. Indeks Pelayanan Publik	4,71	4,91
27	Anti Korupsi			Indeks Integritas Nasional	72,96	87,89	25. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %	80,0	90,0
a.	Indeks integritas nasional	71,94 (2022)	96,98						
b.	Indeks persepsi korupsi	34	60						
<b>SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA</b>				<b>KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH</b>					
<b>IE10</b>	<b>Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial</b>			<b>Peningkatan Keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas</b>			<b>Penguatan Regulasi dan Kepastian Hukum Serta Budaya Demokrasi Yang Berkualitas</b>		



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28	Indeks pembangunan hukum	0,6 (2021)	0,84	Indeks Kepatuhan Daerah	84,08	94,08	26. a. Indeks Kepatuhan Daerah	65	85
							b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	82
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	62,8 (2020)	80	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,78	69,16	27. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif	100	100
30	Indeks demokrasi Indonesia	Sedang (60-80)	Tinggi (>80)	Indeks Demokrasi Indonesia	84,12 - 87,37 (Tinggi)	Tinggi	28. Tingkat Bina Demokratisasi	100	100
<b>IE11</b>	<b>Stabilitas Ekonomi Makro</b>			<b>Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah</b>			<b>Terkendalinya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>		
31	Rasio pajak terhadap PDB (%)	10,0-12,0	18,0-20,0	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	2,2	4,6	29. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,709	0,965
32	Tingkat inflasi (%)	2,5 + 1	2,0 + 1	Tingkat Inflasi (%)	3,3 - 3,9	1,1 - 3,2			
33	Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan			Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			30. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan:		
a.	Aset perbankan/PDB (%)	66,9	200						
b.	Aset dana pensiun/PDB (%)	7,6	60						
c.	Aset asuransi/PDB (%)	9,1	20						



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
d.	Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)	57,8	120						
e.	Total kredit/PDB (%)	37,8	80-90	Total Kredit/PDRB (%)	23,7	73,8	e. Total kredit/PDRB (%)	19,13	67,19
34	Inklusi keuangan (%)	91	98	Inklusi Keuangan (%)	94,22	99,03			
<b>IE12</b>	<b>Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gantar Kawasan</b>			<b>Peningkatan Kerjasama Internasional dan Ketahanan Daerah</b>			<b>Peningkatan Kerjasama Regional Maupun Internasional dan Ketahanan Daerah</b>		
35	Asia Power Index (Diplomatic Influencer)	60,4 (2023)	75,0-80,0	Efektivitas Kerjasama Internasional	90,91	100	31. a. Jumlah Kerja Sama Luar Negeri	1	5
							b. Jumlah Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	25	525
36	Asia Power Index (Military Capability)	14,16 (2023)	45	Indeks ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	3,022	4,5	32. Indeks Ketahanan Daerah	0,54	0,81
<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>				<b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>					
<b>IE13</b>	<b>Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>			<b>Peningkatan Kerukunan Umat Beragama</b>			<b>Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama</b>		
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,57*	68,15	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,09 - 54,1	66,08 - 66,41			
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	75,19*	84,2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,79 - 74,85	81,68 - 82,32	33. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,7-78,5	87,2 - 87,7



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>IE14</b>	<b>Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b>			<b>Peningkatan Berkualitas Keluarga, Pemuda dan Kesetaraan Gender</b>			<b>Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Kesetaraan Gender</b>		
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,49 (2022)	80	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,92 - 70,95	75,81 - 76,05	34. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,4 - 61,6	65,4 - 65,6
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,459 (2025)	0,15	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,46 - 0,45	0,23 - 0,21	35. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,45 - 0,44	0,24 - 0,23
<b>IE15</b>	<b>Lingkungan Hidup Berkualitas</b>			<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>			<b>Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup</b>		
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,35 (2020)	0,7	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,741			
42	Kualitas Lingkungan Hidup			Kualitas Lingkungan Hidup			36. Kualitas Lingkungan Hidup:		
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	72,42 (2022)	76,12	Indeks kualitas lingkungan hidup	56,27	57,68	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	66,25*	71,29*
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	12,5	70	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	13,5	85	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,02*	78,52*
c.	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)	15 (13% terdaur ulang)	90 (35% terdaur ulang)	Pengelolaan Sampah			c. Pengelolaan Sampah:		



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	11,54 (2022)	90	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,63*	83,2*
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	47,77 (2022)	100	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,77*	100*
<b>IE16</b>	<b>Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>			<b>Peningkatan Ketahanan Pangan, Air dan Energi</b>			<b>Peningkatan Ketahanan Pangan dan Air</b>		
43	Ketahanan energi, air, dan pangan			Ketahanan energi, air, dan pangan			37. Ketahanan air dan pangan:		
a.	Ketahanan Energi			Ketahanan Energi					
	- Indeks ketahanan energi	6,61	8,24	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1400	2670			
				- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	191	165			
b.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%)	6,2	2,1	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,75	1,39	b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi	5,01*	0,35*



No	Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPN 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045		Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan	RPJPD 2025-2045	
		Target RPJPN			Target RPJPD PROVINSI			Target RPJPD KAB/KOTA	
		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045		Baseline 2025	Target 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				(Prevalence of Undernourishment) (%)			Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		
c.	Ketahanan air			Ketahanan Air			c. Ketahanan Air:		
	- Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)	63,45	200	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	4,93	63,12	- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,26*	6,03*
	- Akses rumah tangga perkotaan terhadap asir siap minum perpipaan (%)	39	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	34,74	100	- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,55*	100*
<b>IE17</b>	<b>Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>			<b>Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</b>			<b>Peningkatan Ketahanan Bencana Daerah dan Perubahan Iklim</b>		
44	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%)	0,14	0,11	Indeks Risiko Bencana (IRB)*	131,62	107,27 - 86,47	38. Indeks Risiko Bencana (IRB)*	137,5	120,55
45	Presentasi penurunan emisi GRK (%)			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			39. Penurunan Emisi GRK		
a.	Kumulatif	28,12	51,51	d. Kumulatif	2,66	31,65	a. Kumulatif (Ton Co2eq)	456.726,86*	2.488.488,60*
b.	Tahunan	32,65	80,89	b. Tahunan	9,27	70,08			

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024



#### **5.2.4. Sasaran Pokok**

Dalam rangka mencapai Visi, Sasaran Visi, Misi dan Selaras dengan arah pembangunan, maka dalam RPJPD Kabupaten Sumedang di rumuskan sasaran pokok Tahun 2025-2045. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.5 di bawah ini.

**Tabel 5.5 Perumusan Sasaran Pokok Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
1	<b>Mengembangkan Sumber Daya Manusia Produktif dan Berdaya Saing</b>	<b>Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan</b>	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan	<b>1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)</b>	75,42*	79,38*	Mewujudkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang merata	
			Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal	<b>2. Kesehatan Ibu dan Anak:</b>				
			Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	26*	4*		
			Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya	b. Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,58*	3,31*		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan	<b>3. Penanganan Tuberkulosis:</b>				
			Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)*	91*	98*		
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)*	91*	98*		
			Peningkatan status Pustu Menjadi Puskesmas dan pemerataan Tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan di setiap Desa	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	90,43* -96	99*		
			Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas					
			Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.					
		<b>Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan</b>	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)	<b>5. Hasil pembelajaran:</b>			Mewujudkan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan yang merata	
			Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar	a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:				
			Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	i) Literasi Membaca	63,83	72,47		
			Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang	ii) Numerasi	61,46	67,07		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.					
			Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	iii) Karakter	55,64	56,174		
			Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)	b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,75 - 8,92	9,16 - 10,79		
			Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan	c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09*	13,91*		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			dunia usaha dan dunia industri (DUDI)					
			Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik	<b>6. Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)</b> :				
			Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91,42	92,82		
			Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan	b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	97,33	98,73		
			Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	91,57	92,97		
			Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan terutama di daerah perbatasan	d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	59,63	61,03		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di daerah perbatasan</p> <p>Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global bagi masyarakat</p> <p>Pengembangan layanan pendidikan kesetaraan jarak jauh berbasis digital dan TIK serta beasiswa bagi warga belajar kesetaraan usia 21 tahun ke atas</p>					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama					
		<b>Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan</b>	Percepatan Penanggulangan dan penuntasan kemiskinan	<b>7. Tingkat Kemiskinan (%)</b>	<b>9,09 - 8,23*</b>	<b>0,83 - 0,13*</b>	Terwujudnya Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan	
			Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya	<b>8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)</b>	50,02	<b>100</b>		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</p> <p>Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat</p>	<b>9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)</b>	<b>1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD</b>	<b>1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD</b>		
<b>2</b>	<b>Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh dan Inklusif</b>	<b>Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi</b>	<p>Penguatan produktivitas potensi ekonomi lokal didukung Teknologi dan digital</p> <p>Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling</p>	<b>10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)</b>	<b>19,62*</b>	<b>21,5*</b>	Mewujudkan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi	
				<b>11. Pengembangan Pariwisata:</b>				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Peningkatan distribusi kebutuhan barang pokok penting dan produk komoditas unggulan serta peningkatan akses mobilitas masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi	a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,24*	6,6*		
			Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan	b. Jumlah Pengunjung pada Objek Pariwisata (Orang)	2.150.000	3.150.000		
			Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan metropolitan (urban tourism) dan kawasan strategis pariwisata	<b>12. Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)</b>	15,16 - 15,21	15,50 - 16,25		
			Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata	<b>13. Produktivitas UMKM dan Koperasi:</b>				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif					
			Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha	a. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (%)	5,92	9,92		
			Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif	c. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,74*	10,2*		
			Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi	<b>14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>6,13 - 6,68*</b>	<b>3,95 - 4,9*</b>		
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran),	<b>15. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan (%)</b>	<b>48-52</b>	<b>53-55</b>		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			penerapan teknologi dan kemitraan usaha					
			Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	<b>16. Tingkat penguasaan IPTEK:</b>				
			Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri	a. Indeks Inovasi Daerah	60 - 65	80 - 85		
			Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			nasional yang berdaya saing di tataran global					
			Peningkatan produktivitas BUMD					
		<b>Penerapan ekonomi hijau</b>	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)	<b>17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau</b>			Terwujudnya Penerapan ekonomi hijau	
			Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	49,6*	69,38*		
			Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya					
			Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			(smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		<b>Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital</b>	<p>Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada <i>area-area weak coverage</i> di kawasan perkotaan</p> <p>Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. ; serta (ii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital</p>	<b>18. Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)*</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital					
			Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>Peningkatan kapasitas dan akses informasi perikanan budidaya dan perikanan tangkap melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh peternak ikan termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform</p>					
			<p>Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring</p>					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		<b>Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan</b>	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	<b>19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)</b>	<b>23,51*</b>	<b>25,2*</b>	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	
	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian		<b>20. Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)*</b>	<b>-1,5 sd -0,5</b>	<b>-0,5 sd 1</b>			
	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian							
			Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)					
			Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (global city), dan berketahanan, terutama pada metropolitan Bandung					
			Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja</p> <p>Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan &amp; petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan</p> <p>Modernisasi sarana dan prasarana perikanan</p>					
		<b>Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru</b>	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	<b>21. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan</b>			Terwujudnya Pusat pertumbuhan ekonomi baru	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya	a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	63,22*	100*		
			Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan	b. Pengentasan luasan kawasan kumuh (Ha)	141,03	0,00		
			Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis	c. Persentase Desa Mandiri (%)	100	100		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan					
			Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan					
			Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja					
			Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkar kawasan perkotaan, terutama pada jalan tol intraregional metropolitan Bandung					
			Fasilitasi dan koordinasi dalam dukungan Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kereta api logistik dry port KA terintegrasi kawasan strategis industri Kertajati-Cirebon					
			Pengembangan multi-infrastructure backbone yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem expressway dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan yang terkoneksi antar wilayah di metropolitan Bandung					
			City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan\					
			Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka Elektrifikasi jalur KA dan peningkatan sarana/prasarana perkeretaapian, terutama untuk layanan perkeretaapian KA komuter di kawasan metropolitan Bandung					
			Fasilitasi dan koordinasi Pengadaan lahan dalam Pengembangan kereta api					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>cepat (HST/High Speed Train) Jakarta-Bandung-Cirebon</p> <p>Percepatan pengadaan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif &amp; partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas</p> <p>Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa</p>					
<b>3</b>	<b>Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan yang</b>	<b>Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas,</b>	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan,	<b>22. Indeks Reformasi Hukum*</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
	<b>Adaptif, Inovatif dan Akuntabel</b>	<b>adaptif, dan inovatif</b>	dan pengawasan pembangunan				berintegritas, adaptif, dan inovatif	
			Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat	<b>23. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	<b>4,6</b>	<b>5</b>		
			Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah	<b>24. Indeks Pelayanan Publik</b>	<b>4,71</b>	<b>4,6-5</b>		
			Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menuju penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang profesional dan bebas korupsi	<b>25. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %</b>	<b>80,0</b>	<b>5,0</b>		
			Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja					
			Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)					
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah					
			Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi					
			Peningkatan akuntabilitas kinerja					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi</p> <p>Sinkronisasi dan koordinasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan daerah</p> <p>Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko</p>					
4	<b>Mewujudkan Kabupaten Sumedang yang Aman dan Berkeadilan</b>	<b>Penguatan regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas</b>	Penguatan kualitas kebijakan dan penegakan regulasi daerah	<b>26. a. Indeks Kepatuhan Daerah</b>	<b>65</b>	<b>85</b>	Terwujudnya regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas	
			Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	82		
			Penguatan integritas partai politik	<b>27. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
			Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan &	<b>28. Tingkat Bina Demokratisasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			kemandirian pangan dan water prosperity					
			Peningkatan transformasi Kelembagaan dan Tata Kelola Ideologi, Politik, Hukum dan Keamanan Daerah					
		<b>Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah</b>	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian	<b>29. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)</b>	N/A	N/A	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi markro daerah	
			Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap	<b>30. Pendalaman /Intermediasi sektor keuangan</b>				
			Penguatan pengendalian inflasi daerah	e. Total kredit/PDRB (%)	19,13	67,19		
			Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (KPBUD dan CSR), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			(TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional					
			Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi hijau, dan energi baru dan terbarukan					
			Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		<b>Peningkatan kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah</b>	Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	<b>31. a. Jumlah Kerja Sama Luar Negeri</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah	
			Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya	<b>b. Jumlah Naskah Kerja Sama Dalam Negeri</b>	<b>25</b>	<b>525</b>		
			Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb)	<b>32. Indeks Ketahanan Daerah</b>	<b>0,54</b>	<b>0,81</b>		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
5	Mewujudkan Masyarakat yang Menjunjung Tinggi Nilai Agama, Budaya dan Berwawasan Lingkungan	Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila	33. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,7-78,5	87,2 - 87,7	Meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama	
			Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan					
		Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	34. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	61,4 - 61,6	65,4 - 65,6		
Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	35. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,45 - 0,44	0,24 - 0,23				



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan					
			Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal					
		<b>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami	<b>36. Kualitas Lingkungan Hidup:</b>			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	
			Pengimplementasian pengembangan tata ruang wilayah	a. Indeks kualitas lingkungan hidup	66,25*	71,29*		
			Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung circular	b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,02*	78,52*		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			economy pada kawasan perkotaan					
			Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>	c. Pengelolaan Sampah:				
			Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas daerah	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,63*	83,2*		
			Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,77*	100*		
			Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga					



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
		<b>Peningkatan ketahanan pangan dan air</b>	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional	<b>37. Ketahanan air dan pangan:</b>			Meningkatnya ketahanan pangan dan air	
			Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	a. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5,01*	0,35*		
			Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat	b. Ketahanan Air				
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,26*	6,03*		
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,55*	100*		
		<b>Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim</b>	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green &amp; grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan	<b>38. Indeks Risiko Bencana (IRB)*</b>	<b>137,5</b>	<b>120,55</b>	Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			<p>Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi</p> <p>Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan</p> <p>Penegakan standar keandalan bangunan</p>	<b>39. Penurunan Emisi GRK/Kumulatif (Ton Co2eq)</b>	<b>456.726,86*</b>	<b>2.488.488,60*</b>		



No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah	Indikator Utama Pembangunan	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
					Baseline 2025	Target 2045		
			yang berketahanan bencana dan iklim					

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

\*Keterangan: N/A masih dalam perumusan

**Tabel 5.6 Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
1	Mewujudkan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan yang merata	Peningkatan Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan kesehatan	<b>1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)</b>	75,42*	79,38*	
			<b>2. Kesehatan Ibu dan Anak:</b>			
			a. Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun (jumlah)	26*	4*	
			b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	12,58*	3,31*	
			<b>3. Penanganan Tuberkulosis:</b>			
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)*	91*	98*	
			b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)*	91*	98*	
<b>4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)</b>	<b>90,43* -96</b>	<b>99*</b>				



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
2	Mewujudkan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan yang merata	Pemerataan aksesibilitas dan pelayanan Pendidikan	<b>5. Hasil pembelajaran:</b>			
			a. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:			
			i. Literasi Membaca	63,83	72,47	
			ii. Numerasi	61,46	67,07	
			iii. Karakter	55,64	56,174	
			b. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,75 - 8,92	9,16 - 10,79	
			c. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09*	13,91*	
			<b>6. Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)</b>			
			a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	91,42	92,82	
			b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	97,33	98,73	
			c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	91,57	92,97	
			d. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kesetaraan	59,63	61,03	
3	Terwujudnya Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan	Ketahanan Sosial masyarakat yang berbudaya dan berkelanjutan	<b>7. Tingkat Kemiskinan (%)</b>	<b>9,09 - 8,23*</b>	<b>0,83 - 0,13*</b>	
			<b>8. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)</b>	50,02	<b>100</b>	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			<b>9. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)</b>	<b>1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD</b>	<b>1% Perusahaan Swasta, 2% BUMN/BUMD</b>	
4	Mewujudkan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi	Peningkatan pertumbuhan produktivitas perekonomian daerah berbasis inovasi dan teknologi	<b>10. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)</b>	19,62*	21,5*	
			<b>11. Pengembangan Pariwisata :</b>			
			a. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	5,24*	6,6*	
			b. Jumlah Pengunjung pada Objek Pariwisata (Orang)	2.150.000	3.150.000	
			<b>12. Rasio PDRB Sektor Perdagangan (%)</b>	<b>15,16 - 15,21</b>	<b>15,50 - 16,25</b>	
			<b>13. Produktivitas UMKM dan Koperasi:</b>			
			a. Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru yang Berskala Mikro (%)	5,92	9,92	
			b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,74*	10,2*	
			<b>14. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</b>	<b>6,13 - 6,68*</b>	<b>3,95 - 4,9*</b>	
			<b>15. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan (%)</b>	<b>48-52</b>	<b>53-55</b>	
5	Terwujudnya Penerapan ekonomi hijau	Penerapan ekonomi hijau	<b>16. Tingkat penguasaan IPTEK:</b>			
			a. Indeks Inovasi Daerah	60 - 65	80 - 85	
			<b>17. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau</b>			



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	49,6*	69,38*	
6	Meningkatnya pemanfaatan transformasi digital	Pembangunan dan penguatan Transformasi Digital	18. Persentase Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD)	90	100	
7	Meningkatnya nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	Peningkatan nilai tambah komoditas unggulan dan Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam Pengembangan sektor perdagangan	19. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,51*	25,2*	
			20. Net Ekspor Impor Antar Daerah (% PDRB)	-1,5 sd -0,5	-0,5 sd 1	
8	Terwujudnya Pusat pertumbuhan ekonomi baru	Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru	21. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:			
			a. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	63,22*	100*	
			b. Pengentasan luasan kawasan kumuh (Ha)	141,03	0,00	
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	100	100	
9	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Penguatan Tata kelola Pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	22. Indeks Reformasi Hukum*	80	90	
			23. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,6	5	
			24. Indeks Pelayanan Publik	4,71	4,6-5	
			25. Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) %	80	5	
10	Terwujudnya regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas	Penguatan regulasi dan kepastian hukum serta budaya demokrasi yang berkualitas	26. a. Indeks Kepatuhan Daerah	65	85	
			b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	70	82	



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			<b>27. Tingkat Cipta Kondisi Kondusif</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
			<b>28. Tingkat Bina Demokratisasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
11	Terwujudnya Stabilitas Ekonomi markro daerah	Terkendalinya stabilitas ekonomi makro daerah	<b>29. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	
			<b>30. Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan</b>			
			e. Total kredit/PDRB (%)	19,13	67,19	
12	Meningkatnya kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah	Peningkatan kerjasama regional maupun internasional dan Ketahanan Daerah	<b>31. a. Jumlah Kerja Sama Luar Negeri</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	
			b. Jumlah Naskah Kerja Sama Dalam Negeri	<b>25</b>	<b>525</b>	
			<b>32. Indeks Ketahanan Daerah</b>	<b>0,54</b>	<b>0,81</b>	
13	Meningkatnya toleransi dan kerukunan umat beragama	Peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama	<b>33. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)</b>	<b>77,7-78,5</b>	<b>87,2 - 87,7</b>	
14	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesetaraan gender	Peningkatan ketahanan keluarga dan kesetaraan gender	<b>34. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga</b>	<b>61,4 - 61,6</b>	<b>65,4 - 65,6</b>	
			<b>35. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)</b>	<b>0,45 - 0,44</b>	<b>0,24 - 0,23</b>	
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	<b>36. Kualitas Lingkungan Hidup:</b>			
			a. Indeks kualitas lingkungan hidup	66,25*	71,29*	
			b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	7,02*	78,52*	
			c. Pengelolaan Sampah:			



No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	2,63*	83,2*	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	76,77*	100*	
16	Meningkatnya ketahanan pangan dan air	Peningkatan ketahanan pangan dan air	<b>37. Ketahanan air dan pangan:</b>			
			a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	5,01*	0,35*	
			b. Ketahanan Air	0	0	
			- Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2,26*	6,03*	
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	32,55*	100*	
17	Meningkatnya ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim	<b>38. Indeks Risiko Bencana (IRB)*</b>	<b>137,5</b>	<b>120,55</b>	
			<b>39. Penurunan Emisi GRK/Kumulatif (Ton Co2eq)</b>	<b>456.726,86*</b>	<b>2.488.488,60*</b>	

Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

\*Keterangan: N/A masih dalam perumusan

## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Pelaksanaan

Dengan disusunnya RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 diharapkan agar arah kebijakan, sasaran pokok, dan target pembangunan jangka panjang dapat diturunkan ke dalam RPJMD serta dioperasionalkan dalam RKPD. Untuk merealisasikan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 yang penuh tantangan dan dinamika pembangunan, maka digunakan 5 (lima) prinsip utama yaitu:

- a. Prinsip perencanaan kegiatan mengacu kepada prinsip perencanaan yang cerdas (*SMART Planning*), yaitu program terpilih harus diyakini argumentatif dan memiliki kekhususan (*Specific*), terukur (*Measurable*), Ketercapaian (*Achievable*), ketersediaan sumber daya (*Resources Availability*), dan waktu (*Time*).
- b. Prinsip administrasi perencanaan, yaitu menggunakan *Shewhart Cycle* yang dikenal dengan Siklus PDCA dengan tahapan: Rencanakan (*Plan*), Kerjakan apa yang telah direncanakan (*Do*), periksa atau monitor pelaksanaan (*Check*), dan aksi tindak lanjut (*Action*). Untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan pada level perangkat daerah Kabupaten Sumedang serta dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah, maka digunakan pembagian peran perangkat daerah untuk melaksanakan RPJPD berdasarkan misi pembangunan, dengan membagi peran perangkat daerah setiap bidang pada setiap misi pembangunan Kabupaten Sumedang.
- c. Prinsip pelaksanaan program menggunakan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang memiliki 3 (tiga) aspek, yaitu:
  - 1) Taat dan sesuai aturan (*Compliance with Regulation*);
  - 2) Sesuai dengan norma profesionalisme (*Adherence with Norm Professionalism*); dan
  - 3) Berorientasi pada hasil yang berkualitas (*Quality Result Driven*).
- d. Prinsip dukungan kebijakan keuangan mengikuti kebutuhan program prioritas (*Money Follow Program*).
- e. Prinsip pengendalian untuk sukses pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan memerankan:

- 1) *Desk monitoring dan evaluasi implementasi program untuk pengendalian kualitas implementasi kegiatan dan ketaatan waktu serta output; dan*
- 2) *Desk akuntabilitas untuk kepentingan pendampingan (counseling partner) dan pengendalian ketaatan terhadap aturan dan disiplin anggaran atau prinsip 3E dan 1K (efesien, ekonomis, efektif dan ketaatan terhadap ketentuan).*

Setiap perangkat daerah dapat merumuskan berbagai dokumen perencanaan sektoral yang dapat mengacu pada RPJPD ini. Dokumen RPJPD ini juga dapat menjadi acuan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan pembangunan spasial yang termuat dalam dokumen RTRW beserta turunannya. Hal ini dimaksudkan untuk keselarasan perwujudan ruang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJPD.

Pada pelaksanaannya juga diperlukan monitoring yang harus dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu, evaluasi dan perubahan dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam dalam 5 (lima) Tahun untuk mengetahui pencapaian target pembangunan dan melakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Pelaksanaan semua kebijakan dalam RPJPD ini harus melibatkan multi-pihak baik pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sumedang.

## **6.2. Pembiayaan**

RPJPD Kabupaten Sumedang ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sumber pembiayaan pembangunan yang dapat digunakan, antara lain bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten Sumedang. Selain itu, dimungkinkan untuk pembiayaan pembangunan dilakukan dengan menggunakan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Guna mengoptimalkan pemanfaatan barang produksi dalam negeri maka menjadi penting dalam pelaksanaan pembangunan agar memanfaatkan produk lokal. Hal ini untuk mewujudkan peningkatan dampak berganda dan nilai tambah dari hasil produk ekonomi Kabupaten Sumedang.

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan seluruh masyarakat. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2045: **“Kabupaten Sumedang yang Maju, Agamis, Mandiri, Adil dan Berkelanjutan”** yang disingkat **“SUMEDANG MANDALA”**.

### **6.3. Proses Pelaksanaan Manajemen Resiko**

Dalam implementasi setiap visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pada RPJPD Kabupaten Sumedang ada beberapa hal yang dapat menghambat atau mencegah ketercapaian keberhasilan RPJPD. Keberlangsungan dan keberhasilan rencana pembangunan dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah setiap elemen dapat membangun framework manajemen risiko, mengidentifikasi, mengantisipasi dan mengelola ketidakpastian yang akan terjadi dimasa depan.

Manajemen risiko merupakan proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko Organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaiantujuan pemerintah daerah dan mengidentifikasi, menganalisa dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko dilingkungan pemerintah daerah. Dalam melakukan manajemen Risiko, bukan hanya identifikasi risiko dan penilaian risiko. Namun setekah dilakukan identifikasi dan penilaian risiko dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi, hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi Impact atau probability atau mungkin juga untuk mencegah agar risiko tidak terjadi. Dalam melakukan mitigasi risikoterdapat beberapa cara salah satunya adalah penentuan strategi penanganan yang terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilaksanakan sebelum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, yang penyusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko,

kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern.

Dalam upaya menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah serta dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi Jawa Barat dan Nasional diperlukan pengendalian kontinu dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata Kelola data Pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan penerapan manajemen risiko yang dilakukan mulai tahapan perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan.

**Gambar 6.1 Kerangka Pengendalian RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2045**



Sumber: Hasil Analisis BAPPPEDA Kabupaten Sumedang, 2024

#### a. Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahapan perencanaan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi perencanaan Pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari APBD, APBD Provinsi, APBN maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah (lima Tahunan) dan jangka pendek (Tahunan).

Pengendalian jangka menengah meliputi penjabaran RPJPD ke RPJMD dan RPJPD ke Rencana Jangka Menengah Perangkat Daerah (Renstra Perangkat daerah).

Pengendalian jangka pendek meliputi: (i) penjabaran RPJMD ke dokumen RKPD dan dokumen RKPD ke rencana jangka pendek Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah); (ii) kesiapan desain proyek prioritas beserta ukuran keberhasilan pembangunan daerah; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan Pembangunan dan mitigasinya.

#### **b. Pengendalian Pelaksanaan**

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi Pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian pada tahapan ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas Pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko Pembangunan daerah; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas Pembangunan daerah; (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program perangkat daerah yang mendukung sasaran Pembangunan daerah.

Agar pengendalian bisa berjalan optimal maka perlu didukung tatanan regulasi yang bisa menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja serta penguatan kelembagaan pengendalian yang mampu mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal perangkat daerah.



P. BUPATI SUMEDANG,

JUDIA RAMLI